Adnan Buyung Nasution:

"Enak Saja Dibilang Subversif!"

- Peran Politik LSM
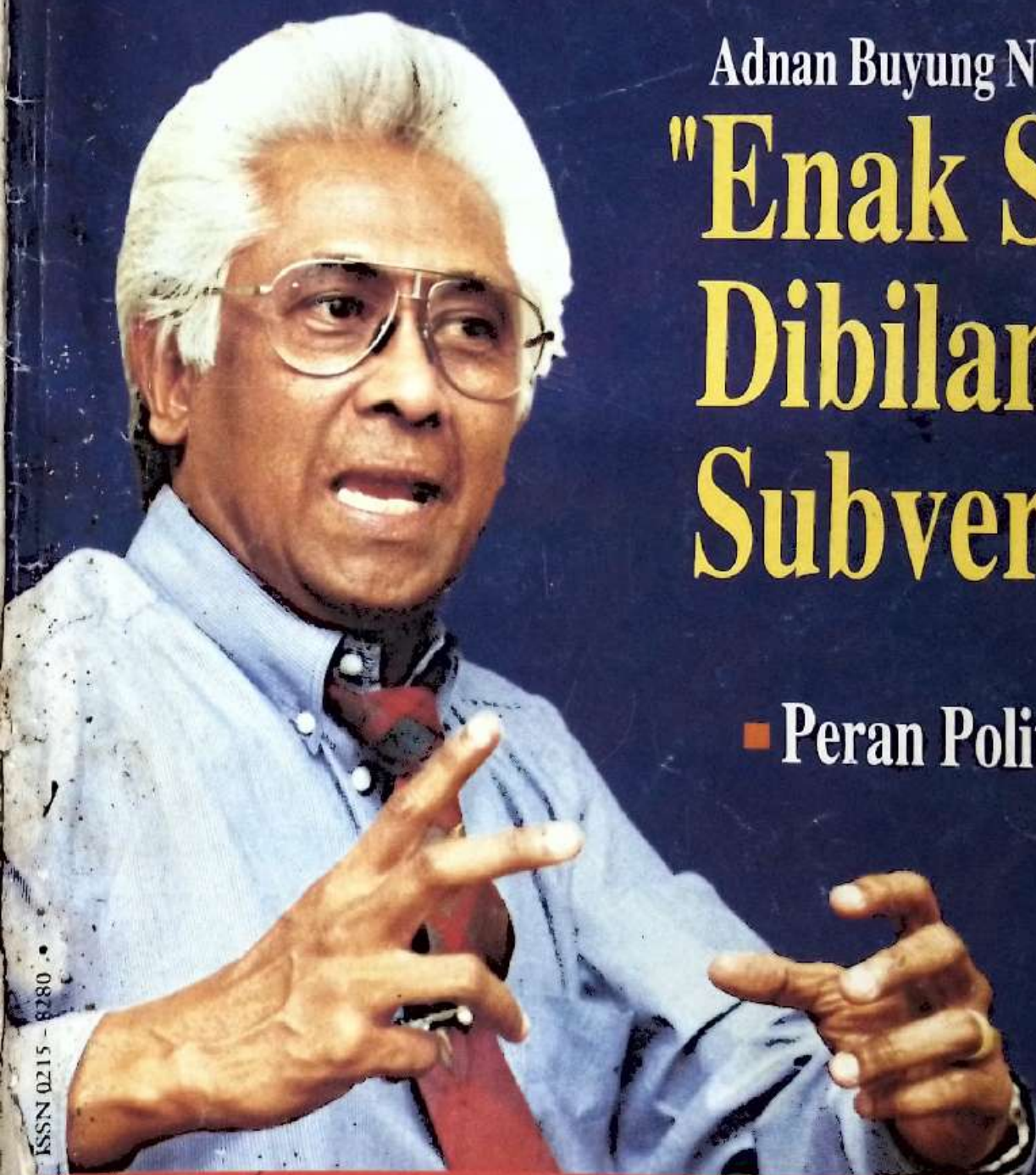
Adnan Buyung Nasution

ISSN 0215 - 8280

...omor 11, Tahun II, 16 September 1993

Rp 3000,00

FORUM

Pj. Pemimpin Umum:
Eric Samola

Wkl. Pemimpin Umum:
Yusril Djalinus

Pemimpin Redaksi:
Karni Ilyas

Wkl Pemimpin Redaksi:
Wina Armada S.A.

Redaktur Pelaksana:
Sori Siregar
Noorca M. Massardi

Staf Redaksi:
Riza Sofyat
Zainal Abdi
Adyan Soeseno
Tony Hasyim
Agung Marrauch
Imran Hasibuan
Iskandar Siregar
L.R. Baskoro
M. Isa Idris
Pracoyo
Retno Kustiati
Sri Raharti H.
Wahid Rahmanto

Redaktur Bahasa:
Erwin Yushar Salim

Juru Foto:
Agus Butar Butar
Fauzan H.

Artistik:
Y. Joko Suhroyo (Koordinator)
Habel JuZa
Selo Sumarsono

Sekretariat Redaksi:
Erien S.L.
Anik Armadani

Penerbit:
Yayasan Keadilan

Pemimpin Umum:
Suhadibroto (non aktif)

Pemimpin Perusahaan:
Sokardi Dharmawan

Pemasaran:
Hendrix K. Hidayat

Bank:
Bank Dharmala
Cab. Kebayoran Center Jakarta Selatan
A/C No 0210004777
Bank Internasional Indonesia (BII)
Kebayoran Mall Jakarta Selatan
No. Rek. 2-020-90317-4
Tamara Bank
Cab. Kebayoran Baru
A/C. No. 1510445

Alamat Redaksi:
Kebayoran Center No. 12a-14
Kebayoran Baru - Velbak Jakarta 12120
P.O.BOX 4279/KBY Jakarta 12042
Telp. (021) 7310734 - 7310736
Fax 7206620

Pencetak:
PT. Temprint

SIUPP No 265/SK/MENPEN/D2/1990
Tanggal: 25 APRIL 1990

Terbit Dua Minggu Sekali

Bacaan Wajib di Lembaga Pemasyarakatan

Banyak jalan menuju Roma. Banyak pula jalan menembus narasumber. Ketika jauh hari mendengar selentingan kabar bahwa narapidana politik peristiwa Tanjungpriok dan BCA akan mendapat pembebasan bersyarat, kami mewajibkan wartawan FORUM masuk ke lembaga pemasyarakatan sebelum wartawan lain. Caranya? Itulah yang harus dipecahkan sendiri oleh si wartawan. Lewat bertanya, kiat, dan lobi, akhirnya, wartawan kami dapat melakukan tugas itu.

Dua wartawan FORUM, Santoso dan Riza Sofyat, diizinkan menjenguk narapidana politik ketika jam menjenguk, Minggu 15 Agustus lalu. Dengan bebas, kami boleh mengunjungi narasumber. Sekali gebrak, ketika itu, kami mewawancarai H.M. Sanusi, Tashrif Tuasikal, Abdul Qadir Djaelani, dan Rachmat Basuki.

Selanjutnya, kesempatan sudah terbuka luas. Ketika kepala kantor wilayah menyerahkan daftar remisi pada 16 Agustus untuk narapidana di Cipinang, FORUM sempat mengikuti upacara itu.

Kemudian, setelah acara pembebasan bersyarat A.M. Fatwa, 23 Agustus, kami memperoleh kesempatan lagi untuk mewawancarai bekas sekretaris Petisi 50 itu, yang divonis 18 tahun karena tuduhan membuat lembaran putih peristiwa Tanjungpriok. Fatwa adalah narapidana politik pertama yang memanfaatkan fasilitas Peraturan Menteri Kehakiman tahun 1993 tentang pembebasan bersyarat.

Melihat banyak hal yang dapat digali dari situ, FORUM memilih Fatwa menjadi narasumber dalam rubrik wawancara edisi ini. Wawancara dilakukan dalam berbagai kesempatan untuk menggali lebih dalam, apa saja kesan Fatwa dalam penjara dan pendapatnya tentang masa lalu, serta responnya mengenai perubahan yang terjadi akhir-akhir ini di panggung politik nasional.

Pembebasan bersyarat, kemudian, juga diterima Abdul Qadir Djaelani, Tashrif Tuasikal, dan Rachmat Basuki pada 24 Agustus, tanpa diharuskan membuat *paper* seperti Fatwa — yang sempat menjadi perdebatan di beberapa media massa. Mereka hanya menyampaikan pendapatnya secara lisan.

Kelonggaran-kelonggaran itu, seperti juga kelonggaran bagi dunia pers sendiri, tampaknya membuktikan bahwa angin perubahan memang sedang berembus di tanah air kita, bahkan menembus dinding-dinding penjara.

PEWAWANCARA NAPOL: *Dua wartawan FORUM, Riza Sofyat dan Santoso yang banyak berkutat untuk urusan wawancara napol-napol bebas bersyarat.*

Dalam meliput detik-detik terakhir narapidana politik berada di selnya itu, kami mendapat pengalaman lain yang sangat menarik. Ketika narapidana yang lain tahu bahwa kami dari FORUM, mereka secepatnya menyambut baik kedatangan kami. Bahkan, mereka menolong menunjukkan di mana narasumber yang sedang kami cari. "FORUM jadi bacaan wajib di sini," kata salah seorang narapidana. ❑

Rudini Tentang Soerjadi

SAYA terkejut ketika membaca FORUM No.9 tahun II, yang memuat wawancara dengan bekas Menteri Dalam Negeri Rudini. Komentar Rudini tentang Ketua PDI, Soerjadi, sangat keras. Bahkan, terkesan diucapkan dalam situasi emosional sehingga tidak terkontrol.

Rudini, antara lain, menyatakan tentang kesalahan yang pernah dibuat Soerjadi. Misalnya, tentang pembatasan masa jabatan presiden, yang pernah diintrodusir Soerjadi ketika kampanye PDI tahun lalu. Menurut Rudini, karena ucapan itu, Soerjadi bertujuan membendung Pak Harto menjadi presiden lagi.

Menurut saya, hal itu tidak beralasan, karena:

1. Tekad Soerjadi untuk menjalankan demokrasi Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen disertai komitmen bangsa yang tertuang dalam salah satu ketetapan MPR untuk tidak mengubah UUD 1945. Toh, walaupun ada niat, menurut saya, tidak salah dan bukan merupakan dosa. Hal tersebut dimungkinkan oleh UUD 1945 bab XVI pasal 37 dengan syarat tertentu. Bukankah dalam urutan perundang-undangan Indonesia kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari ketetapan MPR?

2. Tidak ada bukti Soerjadi mempunyai niat membedung Pak Harto menjadi presiden. Buktinya, PDI tetap mencalonkan Pak Harto pada sidang umum MPR, Maret lalu.

Saya sangat sayangkan, Rudini sampai berkomentar seperti itu. Termasuk, tega sekali mengindentikkan Soerjadi dengan Saddam Hussein, yang jelas hidup dalam suasana dan budaya yang berbeda. Lagi pula, Soerjadi dan kita punya Pancasila, sedangkan Saddam Hussein tidak.

S. Nasar Usman
Jalan Tanimbar 15 - Denpasar 80114

Grasi Xanana

SELAKU kader bangsa, patut mempertanyakan faktor "X" yang melandasi kebijakan Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman dalam memberi pertimbangan untuk meringankan hukuman terhadap gembong pengacau keamanan asal Fretilin, Xanana, sehingga presiden mengabulkan permohonan grasi yang bersangkutan lewat Keputusan Presiden No. 62/G/1993, 10 Agustus 1993.

Dengan menjunjung tinggi hak prerogatif presiden, yaitu pengurangan hukuman Xanana dari seumur hidup menjadi *hanya* 20 tahun, patutlah menjadikan kita merenung sesaat:

1. Tidakkah disadari bahwa tindakan Xanana selama ini merugikan laju pertumbuhan masyarakat pedalaman Timor Timur, khususnya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

2. Tertutupkah mata hati kita atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, termasuk membakar hidup-hidup seorang pelajar sekolah, merampok, bahkan membakar rumah rakyat kecil.

3. Butakah kita bahwa cita-citanya selama ini hanya ingin memisahkan diri dari negara kesatuan yang berdaulat, Indonesia, bukan masalah kebutuhan perut semata.

4. Tulikah kita bahwa akibat perbuatan makarnya, sangat merugikan Indonesia di peta politik dunia. Apalagi, sekarang, pemerintah sedang giat melakukan *go international*, khususnya di dunia usaha.

5. Sudahkah direnungi secara mendalam dan memikirkan kata hati para pejuang Timor Timur dahulu, yang dengan segala risiko terpikul, berjuang tanpa pamrih untuk bergabung dengan Indonesia. Pengorbanan besar yang terkadang harus kehilangan sanak keluarga, harta benda, gelar dan kepangkatan sebagai layaknya kebanggaan duniawi sekarang.

Keputusan grasi sudah turun dan disebarluaskan. Itu akan menjadi salah satu lembaran sejarah perjalanan bangsa kita. Suka atau tidaknya menerima keputusan grasi terhadap gembong Fretilin itu, juga menjadi penambah keyakinan kita bahwa politik itu selain mahal harganya, terkadang sulit dimengerti.

Als Anantama Said
Kader Golkar
Jakarta

Koreksi dari Kejaksaan Agung

FORUM No. 9, 19 Agustus 1993, judul "Pajak Fiktif Rp 2,4 miliar" tertulis, "Dalam pemeriksaan Kejaksaan Agung, Zulfikar mengaku memperoleh imbalan sebesar Rp 280 juta...." Kalimat tersebut bersumber dari Kepala Humas Kejaksaan Agung, Soeparman.

Atas keberatan penasehat hukum tersangka, Asfifuddin, SH dan setelah diadakan penelitian kembali, yang dimaksud oleh kalimat tersebut adalah pengakuan Prianto. Bukan pengakuan tersangka Drs. Zulfikar.

Soeparman, SH, MH
Kejaksaan Agung RI
Jakarta

Forum dan Pendidikan Hukum

DIDUDUKKAN hukum menjadi bidang tersendiri dalam GBHN, kemudian diikuti Surat Keputusan Menteri P dan K No. 17/D/O/1993 yang menggantikan kurikulum lama, tentunya diharapkan mampu memberi angin segar bagi pendidikan fakultas hukum.

Menurut Hartono Soerjopraknjo, yang pernah dilontarkannya dalam kuliah pendidikan notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas sarjana hukum adalah karena mahasiswa tidak pernah diajarkan/dilatih untuk menemukan hukum yang hidup. Cara untuk menemukan hukum yang hidup itu, menurut beliau, adalah dengan jalan membaca keputusan-keputusan hakim dalam berbagai kasus yang beraneka ragam variasinya. Dengam mendalami keputusan yang bersangkutan, mahasiswa dapat mengetahui logika dan pemikiran yang yuridis dari hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Merujuk pendapat beliau itu, di sinilah eksistensi FORUM sebagai majalah hukum, dituntut bermain *all out* dalam menyajikan informasi hukum untuk mengembangkan pendidikan hukum, tidak hanya menyajikan kasus-kasus yang sepotong-sepotong seperti rubrik pidana/perdata selama ini, tetapi menampilkan kembali rubrik meja hijau seperti versi FORUM dulu, dengan mengangkat kasus-kasus pidana/perdata secara lengkap.

Sebagai konsekuensi penambahan rubrik tersebut, menambah harga sebesar Rp 500 pereksemplar saya kira akan lebih efektif dan efisien dibanding cara mahasiswa secara beramai-ramai pergi ke pengadilan negeri untuk membaca dan mempelajari keputusan-keputusan hakim.

Raga Purba
Jalan Bausasran 15 - Yogyakarta

Tragedi di Sebuah Kolam

MEMBACA FORUM No. 9, 19 Agustus 1993, tentang "Tragedi di Sebuah Kolam", saya ikut terharu dan merasa salut atas ketabahan serta kesabaran keluarga para korban, khususnya keluarga Adi Sucipto dalam menghadapi kematian tragis putra mereka, Eddy Suprianto.

Keluarga Adi, tampaknya, benar-benar ikhlas menerima tragedi tersebut. Tapi, walaupun demikian, saya prihatin bukan kepada keluarga korban, melainkan kepada PT Patra Jasa, yang telah membiarkan terbengkalainya sebuah lahan tanpa diusaha-

kan pembangunan sehingga menelan korban jiwa. Terlebih terhadap tindakan para aparat pemerintah yang berhubungan dengan masalah itu. Mereka seolah-olah tidak tahu-menahu dan bersikap *cuek*, bahkan tuduh-menuduh, saling lempar tanggung jawab, dan saling melepaskan diri dari tanggung jawab atas tragedi tersebut.

Saya berharap, permintaan keluarga Adi kepada pihak Patra Jasa untuk segera mendirikan bangunan di atas kolam tersebut supaya ditanggapi, sebab bukan tak mungkin tragedi tersebut dapat berulang kembali. Juga, selama pembangunannya, keamanan lokasi harus betul-betul dijaga agar tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Natalyn Ronauly Siagian
Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Jalan Cihampelas 8 – Bandung 40116

Muslim Maluku di Negeri Keju

SAYA mendapat informasi dari seorang kenalan saya di Belanda, bahwa FORUM pernah menurunkan artikel tentang bangunan mesjid di Belanda. Dalam artikel tersebut, konon, disebut-sebut nama Achmad Tan (almarhum) di kamp Wyldemerck-Balk Pov. Friesland di awal 1950-an. Achmad Tan adalah ayah saya.

Saya telah berkeliling kota Malang mencari FORUM edisi tersebut (kata teman saya, *cover*-nya adalah Ali Sadikin), tetapi nihil. Saya dan ibu saya sangat mengharapkan dapat membaca artikel tersebut. Apabila tidak keberatan, mohon redaksi dapat mengirim copy artikel tersebut ke alamat saya.

Oemar Machmud
Jalan Hamid Rusdi Timur V/413 – Malang 65123

Artikel tersebut berjudul "Muslim Maluku di Negeri Keju", dimuat dalam FORUM No. 5, 24 Juni 1993. Copy-nya telah kami kirimkan ke alamat Anda.

Gus Dur, Pak Nas, dan Bang Ali (I)

SAYA cukup gusar mendengar komentar Gus Dur atas tangis Ali Sadikin terhadap nasib Pak Nasution. "Saya menolak kalau kita bercengeng-cengeng menangisi nasib Pak Nas. Saya lebih menangisi nasib rakyat, yang sampai hari ini tanahnya masih digusur..." kata Gus Dur. (FORUM No. 8, 5 Agustus 1993, halaman 33).

Ucapan Gus Dur itu, menurut saya, seperti merendahkan Bang Ali dan Pak Nas. Padahal, wajar jika Bang Ali menangisi nasib Pak Nas. Pak Nas kan dijuluki Bapak Angkatan Darat, dan banyak berjasa kepada negeri ini, tiba-tiba dikucilkan, hidup, dan ruang geraknya dibatasi.

Apa Gus Dur pernah merasakan sakitnya dicekal? Gus Dur belum pernah dicekal kan? Bagaimana bisa merasakannya?

Kalau memang Gus Dur "lebih menangisi nasib rakyat", apa ada, dan apa pernah beliau secara terang-terangan memikirkan nasib mereka? Buktikan!

A. SIREGAR
Jalan Indramayu Raya 5 – Bandung 40291

Gus Dur, Pak Nas, dan Bang Ali (II)

DALAM FORUM No. 8, 5 Agustus 1993, halaman 33, Gus Dur (K.H. Abdurrahman Wahid) mengatakan, "Saya menolak menangisi Pak Nas, saya lebih menangisi nasib rakyat."

Menurut saya, ungkapan beliau itu kurang tepat, karena:

1. Pak Nas adalah Bapak ABRI, sedang ABRI berasal dari rakyat, dan mengabdi untuk rakyat.

2. Pak Nas adalah bekas ketua MPRS yang merupakan lembaga tertinggi di republik ini. Pak Nas terpilih secara aklamasi, dan bukan seperti penunjukan Dr. Chaerul Saleh sebagai wakil perdana menteri III/ketua MPRS. Walaupun tidak seluruh anggota MPRS hasil pilihan rakyat, tapi sebagian besar adalah hasil pilihan rakyat pada pemilihan umum 1956, ditambah anggota-anggota yang ditunjuk.

Saya mengharapkan keikhlasan hati Bapak K.H. Abdurrahman Wahid kiranya berkenan mendoakan agar Pak Nas senantiasa dianugerahi kesehatan oleh Allah SWT.

H. Muh. Hasan H. Muhammad
Jalan Landak Baru III/20 – Ujungpandang 97222

Ralat Mengenai PT Semen Cibinong

DALAM ceramah saya di *Jakarta Lawyers Club* pada 29 Juli 1993, antara lain, saya mengambil kasus *go public*-nya PT Semen Cibinong sebagai contoh. Dalam ceramah tersebut, saya katakan bahwa dengan persetujuan pemerintah, Semen Cibinong telah melakukan revaluasi aktiva tetapnya dari Rp 5 miliar menjadi Rp 45 miliar.

Itu adalah kesalahan. Yang ingin saya katakan, sebenarnya, bahwa saham-saham baru bisa diperoleh tanpa penyetoran modal, melainkan dengan cara melakukan revaluasi aktiva tetap. Dalam hal Semen Cibinong, revaluasi aktiva tetapnya (hanya
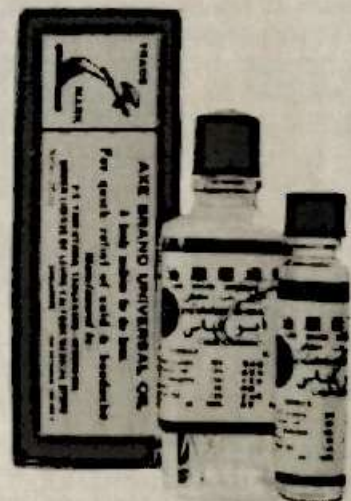
revaluasinya saja tanpa menyinggung besarnya aktiva tetap) adalah sebagai berikut:

Per 1/1-1979 Rp 7.524.836.219

Per 1/1-1987 menjadi Rp 29.109.488

Per 1/1-1987 menjadi Rp 43.603.129.795. Dari jumlah itu yang dikapitalisasi menjadi modal disetor adalah Rp 40.111.500.000, yang diwakili oleh saham-saham baru sebanyak 40.111.500 lembar a Rp 1.000 nominal.

Maksud saya tidak mendiskreditkan Semen Cibinong, melainkan mengemukakan kenyataan kepada para pakar hukum, bahwa di dalam hukum yang berlaku absah di Indonesia, modal setor bisa diperoleh tanpa penyetoran modal. Caranya banyak, tetapi, antara lain, melalui revaluasi aktiva tetap.

Saya ingin menegaskan bahwa yang dilakukan oleh Semen Cibinong adalah sah, karena disetujui oleh pemerintah. Yang itu, dengan jelas, saya katakan dalam ceramah tersebut.

Jelas bahwa saya telah melakukan *slip of the tongue* dalam ceramah tersebut. Maka, dengan ini saya meralatnya. Dan kalau kesalahan itu telah menimbulkan salah paham yang merepotkan, saya mohon maaf.

Kwik Kian Gie

Jakarta

Gugatan PT Bayu Mas Agung Terhadap BUPLN

BERKENAAN dengan dimuatnya kasus gugatan saudara Soeprindiyo (PT Bayu Mas Agung) terhadap kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dalam FORUM No.7, 22 Juli 1993, dengan ini disampaikan penjelasan untuk meluruskan berita tersebut.

Pertama-tama selaku salah seorang kuasa hukum tergugat, saya, Hartono, bukan kepala Biro Hukum Departemen Keuangan, melainkan salah seorang staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Humas. Di samping itu, saya juga tidak pernah memberikan keterangan bahwa dalam penanganan pengurusan kredit macet atas nama penggugat (Soeprindiyo/Bayu Mas Agung) telah melakukan proses pelelangan sesuai dengan prosedur. Yang benar adalah pengurusan kredit macet atas nama penggugat, yang dilimpahkan Bank Bumi Daya cabang Kebayoran kepada BUPLN, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu UU No. 49 Prp. tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya, terakhir sebagaimana yang diatur dalam Kepmenkeu No.293/KMK 09/1993.

Gugatan tersebut, saat ini, sedang diperiksa di PTUN Jakarta dan telah memasuki tahap pembuktian (pemeriksaan saksi), di mana saya selaku kuasa hukum tergugat, akan mengajukan bukti-bukti antara lain bukti pengakuan penggugat tentang adanya Bank Garansi yang menurut dalil penggugat, keberadaan Bank Garansi tersebut tidak pernah diakui. Dengan demikian, kalimat yang menyatakan bahwa "sebenarnya, saudara Soeprindiyo sudah membuat surat pengakuan hutang serta bersedia melunasi", merupakan kekeliruan wartawan FORUM dalam menangkap penjelasan saya.

Selain itu, saya tidak pernah mengatakan bahwa pelelangan akan terus dijalankan. Yang benar adalah proses pengurusan/penagihan kredit macet atas nama penggugat akan terus dilaksanakan.

Hartono

Departemen Keuangan Republik Indonesia

Jakarta

KARIKATUR

Wajah Buruh yang Terpuruk

Kehidupan buruh Indonesia masih di bawah tingkat kelayakan. Pemerintah bertekad memperbaikinya, tapi banyak pihak yang meragukan janji itu.

Dengung sirene memecah suasana pagi di kawasan industri Tangerang, Jawa Barat. Itulah pertanda jam kerja dimulai. Buruh-buruh pun bermunculan dari ujung lorong dan gang rumah-rumah kontrakan mereka. Bak semut-semut hitam yang keluar dari sarangnya, para buruh beriringan menuju pabrik-pabrik tempat mereka bekerja. Panorama itulah yang lazim terlihat di kawasan industri sejak dulu hingga kini.

Di antara para buruh, terlihat Narsih, 18 tahun, yang sudah bekerja tiga tahun di pabrik karung goni di Tangerang. Gadis asal Cepu, kota kecil di Jawa Tengah, itu digaji Rp 2.500 per hari. "Sangat minim buat hidup sehari-hari," kata Narsih.

Untuk menghemat, seperti buruh lainnya, Narsih menyewa sepetak bilik bersama empat rekannya. "Bayar kontraknya patungan. Jadi, bisa hemat," katanya.

Kendati demikian, sebagai buruh, keadaan Narsih masih lumayan. Menurut Yati, 20 tahun, rekan sepondokan Narsih, ada buruh pabrik tekstil di Tangerang yang tinggal di asrama. "Satu rumah BTN, diisi 19 orang," kata Yati. Gadis yang sudah empat tahun bekerja di perusahaan pakaian jadi itu mengaku, ia digaji Rp 2.100 per hari. Kalau ada musibah, misalnya sakit, sudah pasti ia harus berutang.

Toh, katanya, buruh di Jabotabek masih lebih baik daripada di daerah lain. Contohnya, Misnarni, 13 tahun, harus bekerja di pabrik Korek Api Deli, Medan, Sumatra Utara, dari pukul 06.00 sampai 18.00. Upahnya sekitar Rp 700 per hari. Padahal, ketentuan upah minimum di Sumatra Utara ditetapkan Rp 3.100 per hari untuk bekerja tujuh jam sehari.

Akhir Juli 1993 lalu, Misnarni terkena musibah. Ketika ia memasukan batang korek api ke dalam kotak, batang-batang itu saling bergesek, sehingga menimbulkan kebakaran di meja Misnarni. Tangan dan kaki anak petani miskin itu turut terbakar. Perusahaan tempatnya bekerja memang kurang memperhatikan keselamatan kerja. Misalnya, tidak menyediakan sarung tangan, masker, pelindung, serta pengaman kebakaran.

FAUZAN

DIABAIKAN: *Buruh wanita yang bekerja di industri pakaian jadi. Seringkali hak-hak mereka diabaikan.*

Kasus serupa menimpa pula Rosmawati Gultom dan Monika Tamba, pada 5-6 Agustus 1993. Kedua tubuh buruh itu terbakar hingga dirawat di klinik. Selama tidak bekerja, mereka tidak digaji. "Jangan berharap ada santunan cacat, atau tewas karena kecelakaan kerja," kata Ilfah, teman Misnarni. Karyawan Korek Api Deli lainnya, Irwan Lubis, bahkan tewas karena terpotong mesin bubut. Perusahaan hanya memberi uang duka sebanyak Rp 700 ribu.

Karena itu, 200 karyawati Korek Api Deli pernah menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut kepada perusahaan agar memperhatikan keselamatan kerja serta kesejahteraan buruh. Namun, Ilfah, yang hanya lulusan SMA, dituduh memimpin rapat gelap serta mendalangi aksi unjuk rasa itu.

Lantas, buruh bagian masak itu, pada 19 Agustus 1993, diinterogasi Direktur Korek Api Deli, Ayen, dan stafnya, mulai pukul 08.00 sampai 16.00 WIB. "Saya dibilang Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia, organisasi wanita di bawah PKI, red.) dan orangtua saya dikatakan PKI," kata Ilfah. Selama pemeriksaan, Ilfah disuruh berdiri sampai jatuh pingsan. Setelah sadar, "Saya dipaksa menandatangani surat pengunduran diri," kata Ilfah. Namun, para pejabat Kanwil Departemen Tenaga Kerja Sumatra Utara tidak bertindak apa pun terhadap perusahaan.

Tampaknya, keadaan buruh seperti itu tidak terlepas dari peraturan perburuhan yang dinilai merugikan buruh. Contohnya, Surat Keputusan (SK) Menteri Tenaga Kerja No. 342 tahun 1986 tentang pedoman umum perantaraan perselisihan hubungan

industrial. Isinya, antara lain, menyatakan pemogokan itu liar. Padahal, UU No. 22 tahun 1957 membolehkan pemogokan.

Berbagai organisasi buruh sudah menyampaikan protes. Forum Solidaritas Buruh Sumatra Utara dan LBH Medan, 24 Agustus lalu, umpamanya, telah menyampaikan surat protes ke Departemen Tenaga Kerja. Bahkan, Forum Solidaritas Buruh, yang dipimpin Abdul Hakim Garuda Nusantara, menggugat ke Mahkamah Agung agar SK Menteri Tenaga Kerja No. 342 tahun 1986 itu dicabut.

Abdul Latief

Menteri Tenaga Kerja, Abdul Latief, menyerahkan persoalan itu kepada Mahkamah Agung. "Anggapan bertentangan itu kan versi lembaga swadaya masyarakat (LSM)," kata Latief. SK itu lahir semasa Sudomo menjabat menteri tenaga kerja. Sudomo, kini ketua DPA, tak keberatan jika SK itu ditinjau kembali. Namun, ia cenderung berpendapat bahwa SK itu tidak perlu dicabut. Sebab, ketentuan itu, katanya, harus diartikan di mana saja, kalau ada pemogokan harus dijaga polisi. Kalau tidak mampu, minta bantuan militer. "Maksudnya, menjaga ketertiban dan jangan sampai terjadi perusakan," katanya. Ia mempertanyakan, siapa yang dapat menjamin kalau pabriknya dirusak atau dibakar. "Pendekatan itu kan tindakan preventif," kata Sudomo.

Menurut bekas panglima Kopkamtib itu, semua keputusan menteri tenaga kerja dikeluarkan setelah mendengar pertimbangan Tripartit: pemerintah, pengusaha, dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Bahkan, bentuk mekanisme seperti itulah yang dijelaskan kepada organisasi internasional. "Indonesia pernah dibebaskan dari ancaman pencabutan GSP (sistem preferensi umum, red.)," ujar Laksamana (Pur.) Sudomo.

Bag Arief Budiman, gejolak yang diperlihatkan para buruh sekarang justru masih sangat minim. "Mestinya, gejolak buruh harus lebih besar," kata pakar sosiologi itu. Namun, menurut Arief lagi, para buruh tak berdaya meskipun sudah dibantu oleh LSM. Toh, ia memandang gerakan buruh tidak efektif.

Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Departemen Tenaga Kerja, Payaman Simanjuntak, tidak sependapat dengan Arief. Ia beranggapan, ada atau tidaknya ancaman itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki nasib buruh. Contohnya, perbaikan ketentuan upah minimum (KUM). Lima tahun lalu, KUM rata-rata 60 persen dari kebutuhan fisik minimum (KFM). Sekarang, KUM sudah mencapai 80 persen dari KFM. Sedangkan pada 1994, diupayakan KUM mencapai 95 persen dari KFM.

Begitu pula, katanya, serikat pekerja yang lima tahun lalu hanya 6.000, sekarang telah dibentuk 11.000 serikat pekerja dari 37.000 perusahaan yang terdaftar.

Soal buruh anak, ia mengingatkan, sudah sesuai UU No. 3 tahun 1951 tentang pengawasan perburuhan dan UU No. 14 tahun 1969 mengenai ketentuan pokok ketenagakerjaan. Payaman pun menjelaskan, pendekatan militer dalam penyelesaian perselisihan perburuhan sudah ada aturan mainnya. "Itu yang harus kita jelaskan kepada masyarakat internasional menurut kacamata kita," ujar Payaman, yang pernah menjadi ketua tim delegasi penjelasan GSP ke Amerika Serikat.

MELIBATKAN APARAT:
Pemogokan buruh di salah satu industri pakaian jadi. Peraturan perburuhan memang menuntut aparat militer terlibat dalam penyelesaiannya.

Sekjen SPSI, Bomer Pasaribu, menilai bahwa pemerintah juga serius memperbaiki kesejahteraan buruh. "Sebagaimana dimasukannya upaya meningkatkan kesejahteraan buruh dalam GBHN 1993," kata anggota DPR Komisi V itu. "Ada atau tidak ancaman pencabutan GSP, SPSI akan berjuang habis-habisan memperbaiki nasib buruh," kata Bomer.

Namun, di mata anggota DPR Komisi V, Tajuddin Noer Said, pemerintah terkesan lebih berpihak kepada pengusaha. Contohnya, dalam mengatur upah buruh tidak tampak kepedulian pemerintah kepada buruh. Pemerintah memakai patokan KFM, standar 1960, sehingga tak sesuai dengan kebutuhan sekarang, meskipun ditetapkan 100 persen KFM. "Saya rasa masih belum pantas. Buruh kita lebih sering menjadi tumbal atas keberhasilan para pengusaha," kata Tajuddin.

Menurut Tajuddin, sebetulnya, buruh menginginkan adanya wadah yang dapat mengartikulasikan kepentingan mereka dengan penguasa dan pengusaha. SPSI dipandang belum sepenuhnya menjadi wadah para buruh dan memperjuangkan nasib buruh dengan memanfaatkan senjata satu-satunya yang dimiliki buruh, yaitu pemogokan. "Lihat saja, buruh yang mogok lebih banyak datang ke DPR, LSM, atau LBH, daripada ke SPSI," kata Tajuddin.

Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan, Saut Aritonang, lebih jauh lagi menilai, pemerintah hanya gembar-gembor akan memperbaiki nasib buruh agar tidak ditekan oleh masyarakat internasional. Kenyataannya, pemerintah berkolusi dengan pengusaha. Gambaran senada diutarakan oleh ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Mochtar Pakpahan. Ia menilai, Departemen Tenaga Kerja tidak sungguh-sungguh meningkatkan kesejahteraan buruh. "Masa, patokan upah berdasarkan KFM. SBSI akan memperjuangkan upah buruh yang layak," kata Mochtar.

Komisaris PT Mayatex, Chamroel Djafri, sebagai pengusaha, menghendaki agar jangan hanya pengusaha yang disorot. Ia mengingatkan, upah minimum buruh yang hanya lulusan SMA sudah lebih baik dari pegawai negeri yang lulusan perguruan tinggi. "Perbaiki gaji pegawai negeri, sehingga tidah memerah pengusaha, yang membuat biaya ekonomi tinggi," katanya. Chamroel berteori, kalau biaya tinggi bisa dipangkas, pengusaha dapat memberi tambahan jaminan kepada buruh dengan lebih baik. Apa benar?

ADYAN DAN HARYANTO

Gelombang Gerakan Buruh di Indonesia

Indonesia disorot lagi karena melanggar peraturan internasional tentang perburuhan. Bagaimana masa depan gerakan buruh?

Sejak awal, agaknya, masalah perburuhan tidak dapat dilepaskan dari iklim politik. Terakhir, gejolak dan keresahan dunia perburuhan kembali mewarnai hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Awal Juli lalu, pemerintah Amerika Serikat kembali "mengancam" Indonesia. Bila kesejahteraan dan hak asasi buruh tidak mendapat perhatian semestinya, Amerika Serikat akan mencabut fasilitas sistem preferensi umum (GSP) yang diberikan kepada Indonesia.

Ancaman seperti itu, sebenarnya, sudah pernah disuarakan pemerintah Amerika Serikat pada tiga tahun lalu. Ketidakbebasan buruh untuk menentukan keinginan berkumpul dan berserikat, rendahnya kesejahteraan pekerja Indonesia, serta ketidakpatuhan pengusaha terhadap hukum juga syarat-syarat dan norma-norma perburuhan internasional, merupakan alasan utama bagi Amerika Serikat mencoba membatasi ekspor tekstil dan pakaian jadi Indonesia ke pasar mereka pada waktu itu.

Dari catatan sejarah Indonesia, perjuangan buruh untuk memperoleh hak-hak asasinya seperti tak kunjung selesai. Dan, itu tak lepas dari pasang-surut gerakan serikat buruh serta situasi politik masa itu.

Serikat buruh yang pertama berdiri adalah Serikat Buruh Perusahaan Kereta Api Negara (Staatsspoor) pada 1905. Tapi, tidak lama kemudian, serikat itu dibubarkan dan anggotanya masuk ke dalam Vereeniging van Spoor-en Tramweg Personeel (VSTP), di bawah pimpinan Sneevliet dan Semaoen, yang berdiri pada 1908 di Semarang.

BURUH DI ZAMAN BELANDA: *Salah satu sisi kehidupan buruh perkebunan di Sumatra di zaman penjajahan Belanda.*

Setelah VSTP berdiri, kesadaran berorganisasi di antara kaum buruh makin meluas. Maka, muncullah serikat-serikat buruh lainnya. Pada 1911, berdiri Perhimpunan Bumiputera Pabean (PBP). Lalu pada 1912, lahir Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Seterusnya, pada 1916 hadir Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB). Tujuan pendirian serikat buruh ketika itu lebih bersifat sosial ekonomis, yakni untuk peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Tapi, serikat-serikat buruh yang terpisah-pisah itu dinilai tak efektif untuk lebih meningkatkan nasib buruh. Untuk itu, pada 1919, PPPB mengadakan kongres di Bandung. Dalam kongres tersebut, dicetuskan gagasan agar semua serikat buruh pribumi bergabung dalam satu wadah. Ternyata, gagasan itu mendapat sambutan hangat dari peserta kongres. Sehingga, terbentuklah Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) yang diketuai Semaoen dan Soerjopranoto.

Program perjuangan PPKB dirumuskan antara lain, upah minimum, jam kerja — delapan jam sehari waktu siang dan enam jam sehari waktu malam — hak libur tahunan 14 hari, pengakuan terhadap organisasi buruh sebagai wakil buruh di tempat pekerjaan, dan menuntut supaya ada majelis urusan perselisihan perburuhan.

Namun, organisasi pertama buruh di Indonesia itu tak bisa bertahan lama. Pengaruh dari luar negeri dan kemelut politik dalam negeri, yang melahirkan aliran kiri dan kanan, bermuara juga ke tubuh PPKB. Buntutnya, pada 1921, PPKB pecah. Semaoen dkk. yang beraliran kiri ke luar dari PPKB dan mendirikan organisasi sendiri bernama Revolutionaire Vakcentrale.

Selain itu, pada 1922, terbentuk pula wadah baru dengan nama Persatuan Vakbond Hindia (PVH). Tapi, organisasi itu juga tak berumur panjang. Soalnya, sebagian pengurus PVH itu berkeinginan mempertahankan tujuan yang bersifat sosial ekonomi, sedangkan lainnya, menginginkan agar PVH mengambil bagian dalam pergerakan politik dan membentuk partai buruh sendiri.

Menurut para pengamat perburuhan, itulah awal gerakan buruh yang dualistis. Artinya, di satu sisi, organisasi itu memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh, tapi di segi lain, organisasi itu ikut terjun dalam revolusi politik.

Pada masa pendudukan tentara Jepang, semua kegiatan organisasi, baik politik maupun ekonomi, dilarang. Serikat buruh praktis tidak lagi berfungsi.

Setelah proklamasi kemerdekaan, kembali ada upaya membentuk wadah pergerakan buruh, yang ikut aktif memperta-

hankan kemerdekaan. Pada 19 September 1945, terbentuklah Barisan Buruh Indonesia (BBI). Jadi, sesudah proklamasi, perjuangan buruh tidak untuk kepentingan buruh sendiri, tapi untuk mempertahankan kemerdekaan dan merebut kekuasaan perusahaan-perusahaan dari tangan musuh lalu menyerahkannya ke pemerintah RI.

Belakangan BBI retak. Ada kelompok dalam BBI yang menginginkan agar organisasi itu terjun ke kancah politik. Sebaliknya, kelompok lain dalam BBI ingin tetap mempertahankan organisasi itu semata-mata bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Pada Mei 1946, BBI mengadakan kongres di Madiun. Di situlah BBI dibubarkan dan diganti dengan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (Gasbi). Lalu, 29 November 1946, Gasbi bergabung dengan Serikat Buruh Vertikal, yang berhaluan kiri, dan

DOK. FORUM

DEMONSTRASI:
Sebagian upaya buruh untuk memperbaiki nasib mereka adalah melalui aksi demonstrasi.

membentuk Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Kemudian Mei 1947, SOBSI menyatakan sikap mendukung gerakan kaum kiri (komunis). Tak hanya itu. SOBSI juga terlibat dalam pemberontakan PKI yang dipimpin Muso pada September 1948.

Akibat keterlibatan SOBSI itu, terjadilah perpecahan lagi di kalangan kaum buruh. Mereka yang tidak setuju dengan SOBSI, keluar, di antaranya Serikat Buruh Gula (SBG). Atas prakarsa SBG didirikan gabungan baru yang bernama Gabungan Serikat Buruh Revolusioner Indonesia (Gasbri).

Keadaan antara 1950-1959, banyak gerakan buruh yang menjadi satelit partai politik tertentu. Hampir semua partai politik mendirikan serikat buruh dan menempatkannya sebagai *onderbouw* (di bawah naungan) partainya. Misalnya, Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (Sorbri) "bergandeng tangan" dengan Partai Murba. Tambahan lagi, pada 1955, keluar Peraturan Menteri Perburuhan No. 90, yang menetapkan syarat-syarat ringan untuk mendirikan serikat buruh.

Yang jelas, saat itu golongan prokomunis mendapat angin baik. Sedangkan golongan antikomunis makin memperkuat diri untuk bertahan. Majunya SOBSI, yang mendukung komunis, mencurigakan golongan yang menentangnya. Karena itu, bermunculanlah induk-induk organisasi buruh yang baru, antara lain, untuk menghambat lajunya SOBSI. Untuk itu, berdirilah SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) pada 31 Mei 1961.

Persaingan antara golongan pendukung dan penentang komunis mencapai puncaknya saat Gerakan 30 September (G-30-S/PKI) meletus. Dengan pecahnya G-30-S/PKI, keadaan perjuangan buruh maupun organisasi buruh berubah drastis. Organisasi-organisasi buruh yang nonkomunis tetap berdiri dan berkembang. Sedangkan, organisasi yang prokomunis semuanya dibubarkan.

Jelasnya, peristiwa G-30-S/PKI mempunyai pengaruh yang dalam bagi gerakan buruh yang bersifat dualistis. Keterlibatan gerakan buruh berhaluan kiri ke dalam jalur politik, yang bermuara pada kegagalan G-30-S/PKI, telah menghancurkan pendukungnya. Dalam masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, untuk sementara, gerakan buruh tergeser ke belakang.

Meskipun demikian, pemerintah RI sendiri berusaha mendorong agar segera ada satu induk organisasi buruh seluruh Indonesia. Sebagai langkah permulaan, pada 1969, pemerintah Indonesia mendirikan MPBI (Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia). Organisasi MPBI merupakan organisasi buruh pertama yang menyatakan Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas organisasinya. Organisasi itulah cikal bakal FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia).

Bagi para pengamat perburuhan, kelahiran FBSI pada 20 Februari 1973 tidak terlepas dari pola sistem politik dan ekonomi pemerintahan Orde Baru. Usaha pemerintah menciutkan jumlah partai politik (parpol), satu tahun sebelum FBSI terbentuk — dari sepuluh parpol menjadi dua parpol dan satu golongan karya — membawa pengaruh terhadap serikat buruh *onderbouw* partai-partai politik.

Akibatnya, banyak serikat buruh yang harus melepaskan "cantelannya" pada parpol. Sebab, ada "penggarisan" politik bahwa kegiatan serikat buruh harus lepas dari semua kekuatan politik. Tampaknya, ada semacam "trauma" akibat tragedi G-30-S/-PKI. Sehingga, gerakan buruh harus dijauhkan dari arena politik praktis.

Kemudian, pemerintah menyatakan FBSI sebagai satu-satunya organisasi buruh nasional, yang mewakili kaum buruh swasta Indonesia secara nasional dan internasional. Fungsi FBSI pun lebih ditekankan pada perserikatan ekonomis.

FBSI juga membawahi serikat buruh yang terkelompok menurut lapangan pekerjaan atau profesi dalam Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP) di seluruh Indonesia.

Namun, dalam Kongres II FBSI pada November 1985 di Jakarta, terjadi perubahan mendasar dalam organisasi buruh itu. Di dalam kongres itu, antara lain, diputuskan untuk mengganti istilah "buruh" dengan "pekerja" karena istilah buruh dinilai memiliki citra menentang kekuasaan. Selain itu, diputuskan pula untuk mengganti nama FBSI dengan SPSI, yang oleh pemerintah diakui sebagai satu-satunya organisasi pekerja swasta di Indonesia. Tambahan lagi, menghapus SBLP dan menggantinya dengan sistem departemen.

Ternyata, pelaksanaan keputusan kongres tersebut berjalan seret. Pasalnya, dari unsur SBLP banyak yang menolak dibubarkan. Organisasi buruh internasional, yang selama ini membina kerja sama dengan FBSI juga menolak pembubaran FBSI itu.

Organisasi buruh internasional seperti International Confederation of Free Trade

Union (ICFTU) yang berpusat di Brussels, Belgia, World Confederation of Labour (WCL), dan American Federation of Labour - Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) menuduh Indonesia telah melanggar standar perburuhan yang diakui di dunia. Soalnya, pemerintah Indonesia dituding campur tangan dalam kehidupan dan perkembangan organisasi serikat pekerja.

Dengan hanya mengakui SPSI sebagai satu-satunya organisasi pekerja, Indonesia dianggap melanggar Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No. 87, tentang kebebasan berserikat dan pelindungan atas hak berorganisasi, dan Konvensi ILO No. 98, tentang hak berorganisasi dan mengadakan perundingan bersama.

Tak hanya itu. Dalam Sidang ke-73 ILO pada 1987 di Swiss, ICFTU memberikan dukungan kepada wakil-wakil yang ditunjuk SBLP dan tidak mengakui kehadiran wakil-wakil resmi SPSI.

Soal hak-hak pekerja itu pula yang mendorong Federasi Buruh Amerika Serikat, pada 1988, mengajukan petisi kepada pemerintahnya agar mencabut Indonesia dari daftar negara yang memperoleh fasilitas GSP. Namun, upaya Federasi Buruh Amerika Serikat itu gagal.

Federasi Buruh Amerika Serikat tak berhenti mengecam Indonesia. Pada 1993, mereka kembali "menekan" Indonesia dengan "ancaman" pencabutan GSP lewat pemerintah Amerika Serikat. Bagi bekas Menteri Tenaga Kerja, Sudomo, ancaman itu merupakan indikasi sikap proteksi pemerintah Amerika Serikat. "Untuk melindungi ekonomi dalam negerinya dari ekspor negara yang mendapat fasilitas GSP," ujar Sudomo.

Bagi bekas Menteri Tenaga Kerja, Cosmas Batubara, ancaman itu bisa menjadi cermin buat SPSI. Cosmas mengakui, SPSI memang belum seratus persen berfungsi baik untuk melindungi kepentingan kaum buruh. Bagaimana kalau dibuat serikat baru lagi? Cosmas tidak setuju. "Kalau harus membikin lagi seperti SBSI, SBM, pengusaha jadi bingung dan malah takut dipolitisir. Sikap itu tidak menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya serikat pekerja yang kuat," kata Cosmas.

ISKANDAR, ZUHRI, DAN HARYANTO

Derita Pemicu Mogok

Dalam tiga tahun terakhir, banyak terjadi pemogokan buruh. Rupanya, mogok memang masih ampuh untuk melawan pengusaha.

Makam itu tampak sederhana. Nisannya terbuat dari kayu biasa, tanpa warna. Dalam makam itu terbujur jasad Marsinah, buruh pabrik PT Catur Putra Surya, Sidoarjo, yang tewas mengenaskan pada awal Mei lalu. Di leher korban ada bekas cekikan, di beberapa bagian tubuh tampak bekas luka pukul, dan alat kelaminnya berdarah seperti tanda bekas pemerkosaan.

Menjelang ajal menjemput, Marsinah sempat memimpin pemogokan sebagai protes terhadap pemimpin pabrik. Lalu, timbul opini di masyarakat bahwa kematian Marsinah tak wajar. Sekarang, nama Marsinah menjadi simbol perlawanan kaum buruh yang tertindas. Paling tidak, dari kasus Marsinah, orang lalu diingatkan kembali tentang wajah kaum buruh yang sebenarnya.

MOGOK: *Para buruh kini mulai berani melakukan aksi mogok. Ada yang menunggangi mereka?*

Dalam tiga tahun terakhir, aksi pemogokan buruh memang menonjol. Menurut Kanwil Departemen Tenaga Kerja Jawa Barat, dalam tahun 1991/1992 saja, misalnya, di Jawa Barat sedikitnya terjadi 132 kali pemogokan. Padahal, tahun sebelumnya hanya terjadi 61 kali pempgokan. Di Jawa Barat, yang sering dilanda aksi pemogokan adalah Tangerang.

Unjuk rasa terbesar, agaknya, terjadi di Grup Gajah Tunggal, Tangerang, pada Agustus 1991. Tidak kurang 14 ribu buruh mogok menuntut gaji yang sesuai standar upah minimum. Di samping itu, ada 22 tuntutan lainnya, seperti kesepakatan kerja bersama (KKB) dan perlindungan terhadap buruh wanita.

Jakarta juga dilanda pemogokan buruh. Unjuk rasa itu pula yang terjadi di perusahaan pakaian jadi milik Menteri Tenaga Kerja, Abdul Latief, PT Indonesian Product Centre Sarinah Jaya, beberapa waktu yang lalu. Hampir seribu lima ratus buruh mogok, menuntut agar perusahaan itu membayar gaji sesuai dengan standar upah minimum dan pelaksanaan hak cuti dan jaminan sosial tenaga kerja.

Pemogokan juga melanda perusahaan PMA. Ribuan buruh mogok kerja di PT Dong Joe, perusahaan sepatu Reebok dan Spotec, dan di PT Sung Hwa Dunia, produsen sepatu Nike. Kedua perusahaan itu berlokasi di Tangerang. Unjuk rasa yang terjadi di kedua perusahaan milik orang Korea Selatan itu, bahkan, menjalar menjadi aksi kekerasan.

Pencabutan larangan mogok, agaknya, memberi angin kepada para buruh untuk lebih berani bernegosiai dengan pihak perusahaan. Sekalipun wanita, Marsinah, misalnya, ia berani berhadapan dengan pihak perusahaan yang didukung petugas dari Kodim, Polri, dan sejumlah satpam.

Bagaimanapun, mogok akhirnya menjadi senjata efektif buruh untuk memaksa pihak perusahaan untuk duduk di meja perundingan. "Sebenarnya bukan mogok, tapi unjuk rasa biasa," kata Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan (SBM-SK), Saut Aritonang. Paling tidak, dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di Sarinah, perusahaan akhirnya memenuhi tuntutan para buruh tersebut.

AGUNG DAN AZHAN

Cosmas Batubara:

"Mogok Senjata Pamungkas"

Menghadapi gejolak soal buruh, bekas Menteri Tenaga Kerja, Cosmas Batubara, menyarankan agar serikat pekerja berbentuk federasi. Di samping itu, ia juga masih memandang masalah keamanan penting dalam bidang perburuhan. Berikut, petikan wawancara FORUM *dengan aktivis Angkatan 66 itu.*

Ada desakan untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Menteri Tenaga Kerja No. 342 tahun 1986. Setujukah Anda?

Sebenarnya, perundangan maupun peraturan itu sudah memberikan tempat bagi tegaknya keadilan. Kalau yang diatur itu dilaksanakan sesuai dengan isinya, tidak perlu menjadi permasalahan.

Dalam surat keputusan tersebut, orang selalu mempersoalkan kehadiran unsur keamanan di dalam berbagai perselisihan perburuhan. Unsur keamanan di Indonesia masih sangat penting. Kita tidak boleh bersikap *to take for granted*, seolah-olah semua itu sudah berjalan dengan sendirinya, atau sudah aman.

Karena itu, adanya unsur-unsur keamanan harus dilihat dalam satu kerangka untuk menjaga agar hak-hak para pekerja itu terjamin. Kedua, perusahaan itu bisa tetap memproduksi dan ketiga, kestabilan ekonomi dan politik bisa terjamin.

SK menteri tenaga kerja itu bisa menjadi senjata pengusaha untuk menyelesaikan masalah perburuhan sedini mungkin...

Tidak. Keamanan sendiri sudah tahu diri. Selama itu berada di dalam pabrik, itu merupakan urusan Departemen Tenaga Kerja. Kadang-kadang, mereka di situ bisa saja, tetapi yang mengadakan wawancara, mengecek masalah upah dan sebagainya dilakukan oleh unsur-unsur Departemen Tenaga Kerja. Kita juga harus tahu, di negeri ini, kadang-kadang sebagai pencegahan dini terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak, adanya unsur keamanan sangat membantu. Sehingga, orang tidak berani melakukan hal-hal yang merusak, karena hal itu tidak diinginkan oleh siapa pun.

Setujukah Anda dengan aksi mogok yang dilakukan para buruh dalam menuntut haknya?

Senjata mogok itu merupakan senjata pamungkas yang bernilai tinggi. Jangan belum apa-apa mogok. Padahal, ada syarat, mereka boleh mogok kalau mereka berunding dulu. Formulasikan dulu, apa masalahnya. Baru kemudian sesudah diajukan, tetapi tidak ditanggapi, menggunakan hak yang paling suci itu.

Di negara maju sekalipun, seperti di Amerika Serikat, kalau melakukan mogok harus tertib dan teratur sehingga tidak mengganggu orang lain. Jadi, kita menghormati hak itu. Tetapi, tolong ditempatkan pada proporsi yang betul dan benar untuk kepentingan kita bersama, supaya jangan terjadi, atas nama ketidakadilan, tapi malah melanggar hukum.

Apakah SPSI, yang selama ini terkesan sebagai wadah tunggal organisasi para pekerja, masih dibutuhkan dalam kondisi sekarang?

Kita jangan pernah menggunakan kata wadah tunggal. Karena, pola pikir seperti itu monolitik. Serikat pekerja di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Ia berawal dari gerakan sebelum kemerdekaan pada waktu 1945 sampai 1973. Serikat pekerja, waktu itu, disebut serikat buruh, boleh dikatakan masih banyak merupakan *onderbouw* dari partai politik, seperti SOBSI yang mendukung PKI. Bayangan kita lebih sebagai alat politik dari parpol.

Kemudian, pada 1973, ditinggalkan oleh para pemimpin serikat buruh Indonesia. Mereka mengadakan deklarasi untuk membentuk FBSI dari Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP), yang waktu itu ada sembilan SBLP. Istilah Inggrisnya adalah *trade union*. Sehingga, sebenarnya, pada 1973, Indonesia mempunyai satu federasi dengan lebih dari 9 *trade union*. Jadi tidak monolitik. Di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, organisasi buruh begitu.

Pada 1985 ada kongres FBSI yang kemudian mengganti nama menjadi SPSI, dan mengganti SBLP itu dengan departemen. Itu dianggap oleh beberapa kalangan menyempit lagi. Tapi, itu tidak bertahan lama. Sewaktu saya jadi Menteri Tenaga Kerja pada 1990, Musyawarah Nasional SPSI mengadakan *review* terhadap pengorganisasian itu, lalu mereka kembali membentuk, ada DPP SPSI dengan 13 sektor.

Bagaimana mengenai tuntutan Amerika Serikat terhadap perbaikan kondisi pekerja Indonesia dengan mengancam pencabutan sistem preferensi umum (GSP) Indonesia?

Sebenarnya, pada masa saya dulu itu kerangkanya sudah ditangani. Soal upah minimum, saya menindak majikan yang tidak membayar upah minimum. Kalau tindakan itu diteruskan oleh pemerintah, maka Amerika Serikat bisa melihat konsistensi kebijakan keberpihakan kita kepada pekerja. Jadi, perlu adanya suatu *enforcement* dari pemerintah. Tindaklah mereka yang memang tidak melakukan, dan berilah mereka yang melakukannya. Jangan sampai terjadi permainan angka-angka, sehingga seakan sudah menaati peraturan.

Kita juga sudah memiliki UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada akhir masa jabatan saya. Di mata pengamat perburuhan internasional merupakan suatu keputusan strategis yang baik sekali. Kalau itu diimplementasikan, tidak ada tempat bagi para pengkritik bahwa buruh Indonesia seolah-olah tidak dilindungi.

Menghadapi pengkritik luar negeri, kita tidak perlu panik atau seperti orang kebakaran jenggot, karena yang kita sudah lakukan selama lima tahun terakhir ini, secara strategis, sudah menjawab kritikan mereka. Masalahnya, bagaimana kita mengintensifkan. Karena itu, masalah perlindungan tenaga kerja perlu diberi porsi yang lebih besar di masa yang akan datang.

Hasil pembangunan 25 tahun terakhir telah memberikan kesadaran kepada masyarakat pada hak dan kewajiban. Juga berdampak besar sekali bagi para pekerja yang lebih baik, karena pembangunan menjanjikan perbaikan. □

Habibie, Merangkul Semua

Pak Harto dan Pak Try jadi pelindung dan pembina ICMI. Mabes ABRI pun menerima kedatangan Habibie. Gaya Habibie makin menarik.

Setelah berlibur selama sebulan di Jerman, Habibie mulai "bekerja" lagi. Selasa 24 Agustus lalu, sembilan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) diajak Habibie menghadap Pak Harto di Bina Graha. Keesokan harinya, bersama rombongan yang lebih besar, sebanyak enam puluh orang, Habibie menemui Pak Try di Istana Wakil Presiden. Dari situ, rombongan cendekiawan Islam itu berangkat lagi ke Cilangkap, untuk bersilaturahmi dengan pimpinan ABRI.

Pak Harto, ternyata, telah menyatakan kesediaannya menjadi pelindung ICMI. Selain itu, bersama dengan dua mantan wakil presiden Haji Umar Wirahadikusumah dan Haji Sudharmono, Wakil Presiden Try Sutrisno, telah bersedia diangkat sebagai anggota Dewan Pembina ICMI.

Kesediaan Pak Try menjadi anggota Dewan Pembina ICMI itu sangat istimewa. Sebab, selama ini, ada kabar burung hubungan kedua kader calon penerus kepemimpinan Pak Harto itu retak. Kabarnya, ada beberapa masalah yang sempat mengganggu hubungan ICMI dengan Try sejak ia masih menjabat Panglima ABRI.

Tapi menurut sebuah sumber FORUM, sebenarnya masalah antara Habibie dan ABRI sudah ada semasa Benny Moerdani menjadi Panglima ABRI. Umpamanya, kata

TRY DAN HABIBIE:
Habibie bersama ICMI sowan ke Try Sutrisno dan Try bersedia menjadi anggota Dewan Pembina ICMI.

sumber seorang mantan petinggi ABRI ini, ketika Habibie mengambil alih Pusat Industri Angkatan Darat (Pindad). Saat itu, Habibie menyarankan kepada Pak Harto agar ABRI memakai senjata jenis FN buatan Pindad, dan tidak perlu lagi membeli senjata dari luar negeri.

Itu menimbulkan masalah bagi kemampuan tempur ABRI. Sebab, Pindad tiap tahunnya hanya bisa memproduksi FN sebanyak 30-40 ribu pucuk, sedangkan jumlah anggota ABRI 450 ribu. Menurut perhitungan, setelah sepuluh tahun seluruh anggota ABRI bisa menggunakan senjata tersebut. Namun, pada saat itu, jenis senjata itu sudah ketinggalan zaman. "*Lah* ABRI-nya kan merasa dirugikan," katanya.

Juga, tutur sumber ini, mengenai masalah PT PAL (Perindustrian Angkatan Laut). Habibie, tanpa konsultasi dengan Benny, langsung mengatakan kepada Pak Harto bahwa seluruh kapal di Indonesia harus dirawat oleh PAL. Habibie, katanya, tidak tahu bahwa yang bisa dirawat di PAL hanya 30 persen dari seluruh kapal milik ALRI.

Itu menyebabkan ABRI merasa "tidak enak", katanya. Sebab, hal-hal semacam itu tidak perlu terjadi jika sebelum mengemukakannya kepada Pak Harto, Habibie membicarakannya lebih dahulu di tingkat menteri. "Kalau begitu, kan, Pak Harto bisa *misinformed*," kata sumber ini.

Konon, tindakan Habibie itu terus berlangsung semasa Try menjadi Panglima ABRI. Sebuah sumber lain mengatakan bahwa ketegangan antara Habibie dan ABRI, semasa Try menjadi Panglima ABRI semakin diperuncing dengan terbentuknya ICMI. "Habibie yang polos politik tiba-tiba disuruh membentuk ICMI, jadi ekslusif lagi!" kata sumber itu.

Namun, sumber itu bilang, ABRI juga polos memberi penilaian terhadap ICMI. "Ini zaman integrasi, kok, eksklusivisme diperbolehkan," katanya. Ada alasan ABRI untuk bilang begitu. Sebab, tuturnya, belum lama berselang baru saja kelompok ekstrimis Islam dihabisi, tapi sekarang dikumpulkan lagi. "Padahal, interes orang-orang itu kan enggak karu-karuan. Ismail Suny dan sebagainya itu kan pernah di-

tangkap," kata sumber itu. Padahal, lanjut sumber itu, ABRI yang selalu berpikir nasional, tidak senang dengan pengumpulan kelompok religius itu. "Karena dianggap sebagai unsur pemecah belah," katanya lagi.

Agaknya, ketegangan itulah yang ingin diselesaikan oleh Habibie. Kujungannya kepada Pak Try dan Panglima ABRI Feisal Tanjung, baru-baru ini, terbukti mengendurkan ketegangan antara dua kekuatan besar di pentas politik Indonesia saat ini. Dan konon, kunjungan ICMI ke Mabes ABRI ini merupakan pertama kalinya sejak ICMI berdiri. "Seingat saya, sewaktu saya jadi Kassospol, mereka enggak pernah datang," kata Letjen Harsudiono Hartas, mantan Kassospol ABRI.

AGUS BUTAR BUTAR

KUNJUNGAN PERTAMA:
ICMI sejak lahir 3 tahun lalu, secara resmi sowan yang pertama kali ke Panglima ABRI di Mabes ABRI.

Dawam Rahardjo, salah seorang wakil ketua Dewan Pakar ICMI mengatakan, pada dasarnya kunjungan ke Pak Try itu untuk melaporkan hasil-hasil rapat koordinasi nasional ICMI yang dilaksanakan Juli lalu. Namun, katanya, acara itu sekaligus untuk membina "saling pengertian" antara ICMI dan Pak Try. Dawam bilang, selama ini ada "kesalahfahaman" antara Pak Try dan ICMI, yakni sekitar isu sektarian. "Agaknya, Pak Try terpancing dengan isu sektarian yang diembuskan orang. Yang mulai menganggap ICMI sektarian, kan, Abdurrahman Wahid," katanya.

Memang, beberapa waktu lalu, ketika menerima pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Pak Try mengatakan, ada gejala Islam dimanfaatkan sebagai alat politik. "Saya sangat tidak setuju, Islam dijadikan alat legitimasi politik," kata Pak Try waktu itu tanpa menyebut "oknumnya".

Istilah "sektarian" itu pun dilansir lagi dalam pidatonya, ketika menerima kunjungan rombongan ICMI itu. Try mengingatkan, "Kesadaran kebangsaan, yang meliputi wawasan kebangsaan, paham kebangsaan, semangat kebangsaan, dan rasa kebangsaan juga perlu ditumbuh kembangkan di dada setiap anggota ICMI, agar tidak mudah terperangkap dalam kesempitan perilaku komunal-sektarian."

Namun, apa yang dimaksud "sektarian" oleh Pak Try sudah jelas bukanlah ICMI. Terbukti dengan kesediaannya diangkat sebagai anggota Dewan Pembina ICMI saat itu. Feisal Tanjung pun merasa ABRI tidak ada masalah dengan ICMI. "Kami telah menangkap penjelasan panjang lebar Pak Habibie. Semua itu senapas dengan ABRI," kata Feisal dalam pembukaan pidatonya, saat menyambut kunjungan pengurus ICMI.

Amien Rais, dosen Fisipol UGM, melihat kunjungan Habibie ke Pak Try dan pimpinan ABRI sebagai *reaching out strategy*. Menurut asisten ketua umum ICMI itu, dalam mewujudkan ICMI sebagai suatu wahana perjuangan nasional, Habibie merangkul semua pihak. "Habibie, telah merangkul ekonom vokal, seperti Kwik Kian Gie, Christianto Wibisono, dan Sjahrir. Bang Ali dan Pak Nas pun sudah dirangkul," kata Amien Rais.

Agaknya, dalam rangka merangkul semua pihak itu Habibie tidak mau tanggung-tanggung. Pak Harto pun, kini, sudah resmi menjadi pelindung ICMI. Hanya, perlu diingat, "Pak Harto jadi pelindung ICMI bukan selaku presiden, tetapi selaku Haji Muhammad Soeharto, seperti halnya K.H. Ali Yafie. Beliau menjadi anggota ICMI bukan sebagai orang NU, tetapi sebagai cendekiawan Islam," kata Habibie, yang ditemui FORUM sepulang dari Singapura, pekan lalu.

TONY DAN SUDARSONO

AGUS BUTAR BUTAR
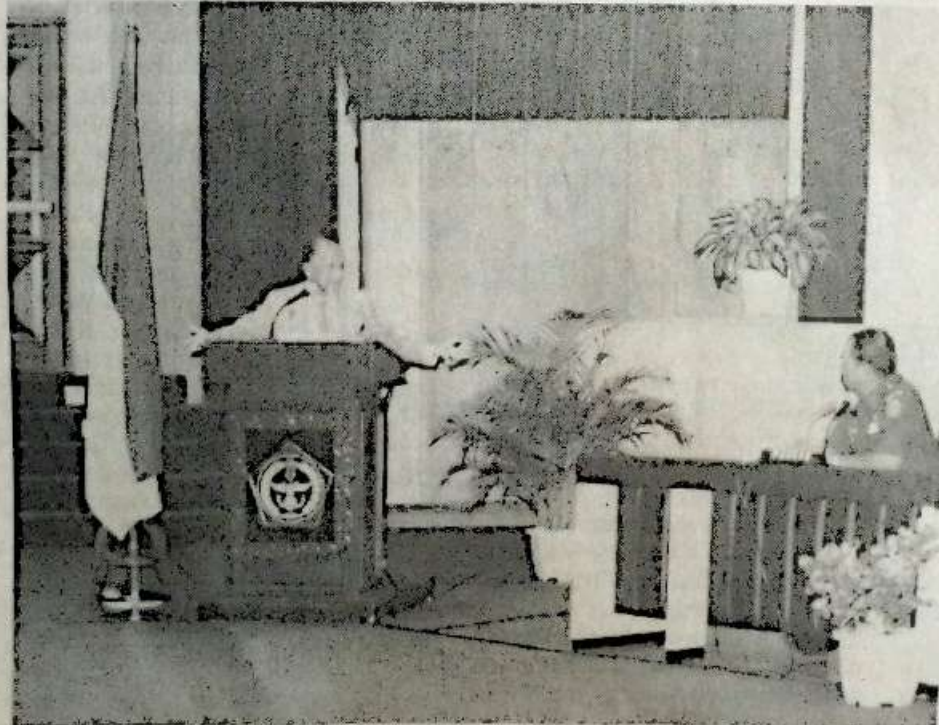
SERIUS:
Ketua ICMI, B.J. Habibie, di Mabes ABRI menjelaskan tentang ormas Islam yang didengarkan Panglima ABRI, Jenderal Feisal Tanjung, secara serius.

PDI

Caretaker Tidak Dikenal di PDI

Tahun ini juga, kongres luar biasa (KLB) PDI akan dilaksanakan. Soerjadi hampir pasti akan tersingkir.

Babak penyelesaian kemelut PDI mulai mendekati titik akhir. Minggu lalu, tanpa banyak perdebatan, 27 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), lewat tujuh formatur yang dianggap mewakili semua DPD berhasil membentuk 23 personil sebagai *caretaker* DPP PDI. "Kita harap, *caretaker* itu bisa menyelesaikan tugas penting seperti yang diminta seluruh DPD," kata Ketua PDI Jawa Timur, Latif Pudjosakti, tuan rumah rapat yang juga duduk dalam komposisi *caretaker*, dan terpilih sebagai ketua umum. Tugas penting *caretaker*, menurut ketua PDI Jawa Timur itu, adalah konsolidasi partai, melaksanakan KLB, dan mengamankan seluruh struktur partai yang ada.

Dalam komposisi *caretaker* itu, tercantum tiga nama tokoh PDI yang pernah mencalonkan diri sebagai ketua umum PDI waktu kongres PDI di Medan, yakni Budi Hardjono, Soetardjo Soerjogoeritno (ketua PDI DI Yogyakarta), dan Ismunandar yang semuanya duduk sebagai ketua. Yang menarik, tokoh "*old crack*," Isnaeni, ditunjuk sebagai penasihat *caretaker* begitu pula Ani Soenawar Soekowati yang dikenal sebagai pendukung kelompok 17. Selain itu, masuk pula nama Kwik Kian Gie, ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP PDI, dan Markus Wauran, yang sebelum kongres PDI di Medan dikenal gigih mendukung Soerjadi. "Komposisi demikian itu dibuat untuk mencerminkan perwakilan semua pihak," kata Latif kepada FORUM. Dan, tampaknya, memang mengenai sasaran. "Walau tidak masuk dalam *caretaker*, adanya Pak Isnaeni dan Bu Ani Soenawar, kita, ya, sudah enggak apa-apalah," kata tokoh kelompok 17, Marsoesi.

Pembentukan *caretaker* itu memang merupakan buntut dari kekisruhan antara kelompok asal tetap Soerjadi (ATS) dan asal bukan Soerjadi (ABS) pada kongres PDI IV di Medan, 21-25 Juli lalu. Kendati peserta kongres secara aklamasi memilih Soerjadi sebagai ketua umum PDI periode 1993-1998, dimata kelompok anggota PDI yang "berhaluan" ABS, itu dianggap tidak sah. "Soerjadi memang tidak layak lagi sebagai ketua PDI, masak kita memilih ketua yang dimata pemerintah sudah jelas cacat hukum," kata Ketua PDI DKI Jakarta, Alex Asmasoebrata.

Jauh sebelumnya, tanda-tanda bakal ributnya kongres itu sudah tercium. Kelompok yang menamakan dirinya kelompok 17 (Marsoesi dkk.), dan kelompok peralihan pimpinan Achmad Soebagyo, misalnya, jelas-jelas menyatakan berusaha semaksimal mungkin agar Soerjadi tak terpilih lagi. "Harusnya, waktu itu, DPP menyelesaikan dulu pertikaian dalam tubuh PDI sebelum kongres," kata bekas Sekjen PDI yang juga anggota DPR, Sabam Sirait, waktu itu.

RULLY KESUMA/TEMPO

TIDAK TERULANG:
Kongres luar biasa PDI memang diharapkan lancar dan tidak terulang peristiwa pendudukan kongres, seperti dilakukan DPP peralihan di Medan, Juli lalu.

Walau kemudian ketua panitia kongres, Nico Daryanto menyatakan DPP PDI 1993-1998 telah terbentuk, setelah melihat perkembangan pascakongres itu pemerintah menyatakannya tidak sah. "DPP PDI dinyatakan vakum," kata Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memet, yang juga pembina politik dalam negeri. Pernyataan Yogie itu pula yang kemudian berkembang menjadi suara-suara yang menginginkan diadakannya kongres luar biasa untuk menuntaskan kemelut dalam tubuh partai banteng itu.

Bahkan, Pak Harto mendukung perlunya kongres luar biasa itu. "Pemerintah akan memberikan bantuan berupa fasilitas dan lain-lain apabila diadakan kongres luar biasa," kata Pak Harto dalam pertemuan dengan pengurus Yayasan 17 Agustus 1945 di Bina Graha, 21 Agustus lalu. Tiga hari kemudian, 27 DPD pun mengadakan pertemuan, atas undangan Menteri Dalam Negeri, di Hotel Surabaya Airport, Surabaya.

Akan berlangsungnya kongres luar biasa sudah mengisyaratkan, betapa makin rapuh dan tak mandirinya PDI, sekaligus dicampakkannya AD/ART partai yang berangkat dari fusi lima partai politik pada 1973 tersebut. "Sebab, terselenggaranya kongres luar biasa harus diusulkan oleh minimal setengah jumlah cabang dan yang berangkat ke situ," kata Aberson Marle Sihaloho, anggota fraksi PDI di DPR. Dan menurut Jupri, rekan satu fraksi Aberson di DPR, "Dalam AD/ART PDI tak dikenal istilah *caretaker*." Karena pemerintah menganut asas legalitas, dimata Aberson semuanya akan sia-sia, jika jalan yang diinginkan anggota PDI pun tak diakui pemerintah.

Menurut sumber FORUM lainnya, DPP *caretaker* itu akan menimbulkan masalah lain jika pertikaian kelompok dalam tubuh PDI belum diselesaikan dulu. "Menurut saya harus diselesaikan semua pertikaian itu. Jika tidak, pertikaian terus saja ada," kata Kassospol ABRI, Letjen Hariyoto P.S. Yang dikhawatirkan, jika kelompok pendukung Soerjadi — yang menurut Ismunandar memang banyak — tak puas dengan hasil kerja *caretaker* itu dan menambah perpecahan baru dalam partai metal itu. Relakah Pak Soer mundur? "Bagi saya enggak masalah. Kalau PDI sudah tidak menghendaki saya sebagai pimpinan enggak apa-apa. Tapi, kalau yang minta mundur orang di luar PDI, ya, saya tidak rela," kata Soerjadi.

BASUKI

PEMBEBASAN BERSYARAT

Kontroversi Makalah Narapidana Politik

Ketentuan wajib makalah yang diberlakukan bagi narapidana politik mendapat reaksi pro-kontra. "Itu dapat menghambat kemerdekaan berpikir," kata Adnan Buyung Nasution.

Ini tradisi baru di lembaga pemasyarakatan, pembacaan makalah mengenai keyakinan terhadap Pancasila dan UUD 1945 oleh narapidana politik, yang mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat. Pionirnya adalah Andi Mappetahang Fatwa, yang dihukum 18 tahun penjara, salah seorang konseptor Lembaran Putih Peristiwa Tanjungpriok, yaitu sebuah buku berisi tuntutan agar pemerintah membentuk komite pencari fakta dalam peristiwa itu. Dalam acara pembebasan, Senin pekan lalu, Fatwa membacakan makalah berjudul "Pemahaman dan Penghayatan Saya Sebagai Muslim Indonesia Terhadap Pancasila" dengan gaya orator yang memikat.

Selesai membacakan makalah setebal 7 halaman itu, ia pun mendapat tepukan gemuruh dari sekitar 50 orang yang hadir. Sesaat kemudian, giliran Panglima Kodam Jaya, Mayjen A.M. Hendropriyono memberikan sambutan. "Makalahnya bagus sekali. Kalau saya boleh menilai, akan saya beri nilai *cum laude*," ujar Hendro, yang disambut tepukan tangan dari hadirin.

Gagasan wajib makalah bagi narapidana politik memang muncul dari Hendro, selaku ketua Bakorstanasda Jaya. Bermula dari kunjungan Hendro ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, akhir Juli lalu. Saat bertemu Fatwa di dalam selnya, ia melihat makalah yang dibuat Fatwa dua tahun lalu, ketika mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Pledang, Bogor. Ternyata, Hendro tertarik. Tak lama kemudian, ia menawarkan kepada Fatwa membacakan makalahnya dalam acara pelepasan.

Ide itu disampaikan pula kepada Menteri Kehakiman Oetojo Oesman, Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Baharuddin Lopa, serta unsur-unsur Bakorstanasda lainnya. Ternyata, semuanya menyambut hangat. "Itu ide yang baik," kata Oetojo. Hanya, katanya, gagasan itu masih perlu dikaji lagi dan dicari "cantelan"-nya dalam peraturan yang berlaku.

Selama ini, dasar hukum yang dirujuk Hendro adalah Peraturan Menteri Kehakiman No. M. 01-PK. 04.10 tahun 1991. Dalam pasal 3 peraturan Menteri Kehakiman itu, memang disebutkan bahwa narapidana subversif, atau yang terlibat perkara yang meresahkan masyarakat, baru dapat memperoleh asimilasi atau pembebasan bersyarat setelah kesadaran dan perilakunya dinilai oleh tim pengamat pemasyarakatan bersama Bakorstanasda. Nah, untuk mengetahui kesadaran itulah diperlukan penyampaian makalah yang dibuat narapidana politik. "Jadi, itu hanya teknik untuk mengetahui kesadaran narapidana politik. Kita kan nggak bisa membedah kepa-

WAJIB MAKALAH: *Para narapidana politik yang akan diwajibkan membuat makalah*

Bebas tapi Berpantangan

Apa yang disebut pembebasan bersyarat? Pembebasan bersyarat merupakan pembebasan narapidana oleh pemerintah, karena narapidana bersangkutan dinilai memenuhi persyaratan yang diminta. Dengan demikian, sang narapidana tidak lagi menjalani sisa hukuman yang ada.

Peraturan Menteri Kehakiman tahun 1993 menyebutkan, untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, narapidana harus telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak tanggal penahanan.

Di samping narapidana wajib menjalani minimum hukuman, ia juga harus lulus dari berbagai persyaratan lain. Dalam setahun terakhir, misalnya, narapidana bersangkutan tidak boleh terkena hukuman disiplin. Narapidana juga memperlihatkan sikap menyesal atas kesalahannya. Secara administrasi, narapidana, antara lain, juga harus melampirkan surat keterangan dari kejaksaan bahwa ia tidak tersangkut perkara lain. Selain itu, harus pula ada kesediaan dari seseorang, badan, atau lembaga yang menjamin secara tertulis di atas meterai bahwa narapidana tidak akan melarikan diri.

Beberapa ketentuan juga tidak boleh dilanggar oleh narapidana setelah ia dibebaskan. Misalnya, mengulangi perbuatan tindak pidana, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dan bergaul dengan residivis. Pelanggaran terhadap "pantangan" tadi akan menyebabkan izin pembebasan bersyarat dicabut. Artinya, narapidana tadi harus kembali ke penjara untuk menjalani sisa hukumannya. Bahkan, kalau ia kembali ke penjara, ia tidak akan lagi memperoleh hak pembebasan bersyarat. Sedangkan masa sewaktu di luar penjara tidak dihitung sebagai masa menjalankan hukuman.

Menurut Direktur Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Sanusi Has, kembalinya narapidana ke penjara karena melanggar ketentuan pembebasan bersyarat tidak bersifat otomatis. "Akan ditangani lebih dulu oleh petugas Balai Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak," kata Sanusi. Petugas Balai Bimbingan lalu melaporkan narapidana tadi kepada kepala Kanwil Departemen Kehakiman. Selanjutnya, Dirjen Pemasyarakatanlah yang kemudian menentukan, apakah narapidana tadi harus masuk lagi ke penjara atau tidak.

AGUNG MATTAUCH

la mereka," kata Hendro.

Toh, kewajiban membuat makalah bukanlah harga mati. Buktinya, tiga narapidana politik lainnya — Abdul Qadir Djaelani, Tashrif Tuasikal, dan Eddy Ramli — yang dibebaskan sehari kemudian, hanya mengemukakan isi hati dan pikiran mereka secara lisan. "Kami bukannya tak mau, tapi enggak punya waktu untuk menulisnya. Acara itu kan mendadak pemberitahuannya," ujar Tashrif.

Fleksibilitas itu diakui pula oleh Bakorstanasda, "Kalau memang enggak bisa menulis, ya, silakan pidato saja. Kalau enggak bisa pidato, metodenya tanya-jawab saja," kata Kepala Staf Kodam Jaya, Brigjen Wiranto. Selain itu, menurut Wiranto, di masa mendatang pelaksanaan pembacaan makalah atau pidato lisan akan dilakukan jauh hari sebelum keluarnya surat keputusan pembebasan bersyarat bagi narapidana politik.

Kalangan narapidana politik sendiri, umumnya, tak menyetujui kebijakan baru itu. "Saya akan menolak kalau disuruh membuat makalah," kata H.M. Sanusi, tokoh yang dihukum 19 tahun karena kasus peledakan BCA. Ia hanya bersedia menyampaikan pikirannya secara lisan. Nada yang sama datang dari narapidana yang terlibat Peristiwa Lampung. "Di sini kan bukan sekolahan. Kalau kami disuruh buat makalah, mestinya juga diperlakukan seperti mahasiswa," kata Fauzi bin Isnan, yang dihukum 20 tahun. Mereka khawatir, kebijakan baru itu malah menambah birokrasi yang menghambat proses asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Kekhawatiran itu merebak pula ke luar penjara. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), misalnya, telah mengeluarkan nota kritik kepada Bakorstanasda Jaya. Isinya mempertanyakan kepastian hukum kebijakan wajib makalah itu. Selain itu, nota yang diteken Ketua Dewan Pengurus YLBHI, Adnan Buyung Nasution, juga menyatakan kebijakan itu sebagai upaya mengadili pikiran seseorang. "Itu bisa menghambat kebebasan berpikir," kata Buyung.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Muladi, justru mempertanyakan kewenangan Bakorstanasda. Menurutnya, KUHP pasal 15a ayat 2 memang membuka peluang untuk syarat tambahan bagi narapidana yang akan mendapat pembebasan bersyarat. Namun, kata Muladi, "Yang berhak memutuskan syarat tambahan adalah Menteri Kehakiman, bukan pejabat lain."

IMRAN DAN RIZA

LEMHANAS

Lemhanas Ganti Atap

Berbeda pendapat dicekal, itu mempengaruhi mutu Lemhanas. Sekarang ada penurunan mutu.

Serah terima jabatan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), dari Letjen Soekarto kepada Mayjen R. Hartono, kali ini, mempunyai arti yang cukup penting. Sebabnya, Lemhanas dikembalikan ke Departemen Pertahanan dan Keamanan. Tentu saja, hal itu menimbulkan pertanyaan, adakah yang salah selama ini sehingga perlu diralat?

"Itu bukan ralat, tapi evaluasi," ujar Panglima ABRI, Jenderal Feisal Tanjung. Evaluasi itu diperlukan, menurut Feisal, agar pengkajian-pengkajian yang dilakukan Lemhanas lebih efektif dan berdaya guna.

AGUS BUTAR-BUTAR

DILANTIK:
Mayjen R. Hartono saat dilantik sebagai Gubernur Lemhanas.

Pendapat senada juga dilontarkan Gubernur Lemhanas yang baru, Mayjen R. Hartono. Menurutnya, Mabes ABRI adalah instansi pengguna kekuatan, sedangkan Departemen Hankam sebagai pembina kekuatan. lebih berkaitan dengan kebijakan politik nasional. "Jadi, rasanya kurang pas kalau Lemhanas berada di bawah Mabes ABRI," kata Hartono.

Perubahan itu diperlukan karena tugas Lemhanas sekarang lebih luas dan kompleks, mencakup masalah ekonomi atau demokrasi. "Kan, lucu kalau masalah-masalah seperti itu hanya dirumuskan oleh ABRI," kata Letjen (Pur.) Soebijakto, yang menjabat Gubernur Lemhanas selama dua periode, 1983 sampai 1989.

Lemhanas sendiri terbentuk dengan Surat Keputusan Presiden Soekarno pada Desember 1962, dan berfungsi untuk mengkaji masalah-masalah strategis. Ketika itu, pimpinan Lemhanas langsung bertanggungjawab kepada Presiden Soekarno.

Di awal Orde Baru, Lemhanas mengalami perubahan struktur organisasi. Pengawasan tidak lagi langsung oleh presiden, tetapi dialihkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI. Tetapi, ketika jabatan Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan dipisah pada 1983, lembaga itu dititipkan kepada Mabes ABRI.

Menurut Soekarto, sebenarnya ketika lembaga itu di bawah Mabes ABRI, tidak ada masalah. Cuma, orang sering bertanya, yang ditangani masalah nasional, kok, ditempatkan di bawah ABRI. "Jadi, sebenarnya masalah psikologis saja," ujar Soekarto. Usulan perubahan struktur organisasi itu pun, tidak semata-mata datang dari dalam lembaga itu sendiri.

Perubahan struktur organisasi Lemhanas dinilai pakar hukum tata negara, Prof. Sri Sumantri, merupakan langkah yang tepat. "Lemhanas itu merupakan lembaga pendidikan bagi para calon pejabat tinggi, yang bukan saja terbatas dari kalangan militer," kata Sri. Sehingga, menurut dia, rasanya kurang tepat kalau lembaga itu tetap berada di bawah Mabes ABRI. Pada masa Panglima ABRI-nya Jenderal Benny Moerdani (1983-1988) dan Jenderal Try Sutrisno (1988-1992).

Selain itu, Soebijakto mengungkapkan, sekarang ini terjadi penurunan mutu di Lemhanas. Itu akibat kurangnya pengetahuan politik orang-orang di lembaga itu sendiri. Kondisi seperti itu merupakan akibat sistem politik yang mengetat. "Akhir-akhir ini, kalau berbeda pendapat, lantas dicekal. Itu berpengaruh terhadap mutu Lemhanas sendiri," kata Soebijakto.

WAHYO DAN SUDARSONO

LEGISLATIF NASIONAL

Menata Mata Rantai UU

Selama ini, banyak RUU yang tidak dimulai dari naskah akademis, di antaranya UU Lalu Lintas. Benarkah naskah akademis itu harus dari BPHN?

Sejak Pelita II, banyak departemen yang tidak mengindahkan tata cara penyusunan rancangan undang-undang (RUU), dan program legislasi nasional. Akibatnya, berbagai produk hukum berupa perundang-undangan terlepas dari mata rantai di atasnya, yaitu UUD 1945. "Terjadi kesenjangan antara perundang-undangan dan UUD 1945," kata bekas Wakil Sekretaris Kabinet, Prof. Dr. Hamid S. Attamimi.

Pembangunan sistem hukum berupa peraturan atau perundang-undangan itu, menurut Hamid, mestinya mengacu kepada cita-cita hukum Pancasila, lalu UUD 1945, kemudian dijabarkan dalam GBHN, baru dirinci dalam bentuk UU atau peraturan-peraturan. Tapi, "Sekarang, arahnya tak jelas.

Kendati sudah ada program legislasi nasional, tambah Hamid, pelaksanaannya belum baik. "BPHN hanya menjadi wadah karena skala prioritasnya ditentukan oleh masing-masing departemen," tutur Hamid.

Karena itu, dia memandang wajar pada Pelita VI, pembangunan bidang hukum menjadi salah satu prioritas dalam GBHN tahun 1993, dan salah satunya dicanangkan dalam bentuk program legislasi nasional.

Menurut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Prof. Dr. Sunaryati Hartono, pembangunan hukum akan berhasil jika departemen-departemen teknis yang menyusun RUU memperhatikan tata cara dan mekanisme penyusunan RUU, seperti yang diatur Instruksi Presiden (Inpres) No. 15 tahun 1970.

Berdasarkan inpres itu, kata Sunaryati, semua pembuatan RUU harus didahului oleh pembuatan naskah akademis. Naskah akademis itu merupakan rancangan yang dibuat berdasarkan hasil pengkajian dari departemen bersangkutan. "Yang terjadi, selama ini, mereka sering mengabaikan naskah akademis dari BPHN," kata Sunaryati.

Contoh RUU yang tak memakai naskah akademis dari BPHN, menurut Sunaryati, adalah UU Lalu Lintas (UU No. 14 tahun 1992). "Mungkin, Departemen Perhubungan membuatnya juga. Tapi, yang pasti, bukan dari BPHN," kata Sunaryati.

Dulu, BPHN pernah menyampaikan naskah akademis untuk UU Lalu Lintas, tapi tak dipakai. "Enggak tahu, ke mana rimbanya," kata Sunaryati.

Naskah akademis itu mengandung pasal-pasal, yang didahului penjelasan dan uraian mengenai latar belakang, maksud, dan tujuan RUU yang hendak disusun. "Dalam bentuk RUU, penjelasan itu ditempatkan setelah pasal-pasal," katanya.

Mochtar Kusumaatmadja

Disebut naskah akademis, menurut Sunaryati, karena naskah itu dibuat berdasarkan teori hukum yang berkaitan dengan bidang RUU yang akan disusun. "Jadi, yang layak menyusunnya adalah para akademisi, biro hukum yang terkait, konsultan hukum, atau praktisi, dan LSM-LSM," katanya.

Dalam Pelita VI ini, BPHN telah membuat program untuk mengevaluasi 400 peraturan dan perundang-undangan peninggalan kolonial, yang harus diganti menjadi hukum nasional. Per tahun akan diselesaikan 70 peraturan dan UU. Yang diprioritaskan adalah UU pokok, seperti yang menyangkut hukum perdata, hukum dagang, hukum kontrak, dan hukum perburuhan. Hasil evaluasi itu, nantinya, akan merekomendasikan mana yang perlu dicabut, diganti, atau cukup diterjemahkan saja. "Bila UU atau peraturan itu diganti atau dicabut,

Sunaryati Hartono

maka naskah akademisnya akan dibuat oleh BPHN," kata Sunaryati.

Mengenai fungsi BPHN sendiri, dalam kaitannya dengan pembuatan RUU, bekas Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, mengatakan bahwa BPHN hanya membuat naskah akademis untuk Departemen Kehakiman dan departemen-departemen lain sebatas yang diminta. Program legislasi nasional itu tugas pemerintah melalui rapat koordinasi antardepartemen. BPHN hanya menjadi mitra jika memang diminta masukan. "Sebab, ada bidang-bidang hukum yang teknis dan rutin, yang tak memerlukan masukan dari BPHN," kata Mochtar.

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Dr. Satjipto Rahardjo, memang benar bahwa penyusunan naskah akademis itu seharusnya dilakukan oleh pakar hukum dari kampus, disertai konsultan hukum atau praktisi hukum, di samping aparat penegak hukum serta aparat dari instansi yang bersangkutan. "Siapa pun yang menyusunnya, apakah itu BPHN atau departemen teknis, asal ada koordinasi, rasanya, tak ada soal. Baiknya, sih, BPHN sebagai koordinatornya," kata Satjipto.

RIA SOFYAT

Menguji Sebuah Harapan

Setelah 13 tahun tidak boleh beredar, film *Yang Muda Yang bercinta* karya Sjumandjaja yang sarat kritik sosial-politik, diloloskan Badan Sensor Film. Betulkah koridor demokrasi di film Indonesia juga sudah dibuka?

Di tengah kegelapan pasaran film nasional dewasa ini, masih ada sedikit angin segar. Film *Yang Muda Yang Bercinta*, karya almarhum Sjumandjaja, tiba-tiba diloloskan Badan Sensor Film (BSF). Padahal, film itu sarat dengan kritik sosial-politik. "Ini menunjukkan BSF sudah mulai dewasa," kata Manu Sukmadja, produsernya.

Sejak awal, film itu sudah menyuguhkan kritik tajam. Film langsung dibuka dengan pembacaan *Sajak Sebatang Lisong* karya W.S. Rendra oleh penyairnya sendiri di sebuah kampus. Dengan gayanya yang impresif, Rendra, antara lain berujar, *Aku bertanya/tetapi pertanyaan-pertanyaanku/membentur meja kekuasaan yang macet/dan papan-papan tulis para pendidik/yang lepas dari persoalan kehidupan.*

Beberapa dialog dalam film itu juga jelas menyindir keadaan di masyarakat. Belum lagi, poster-poster yang bunyinya cukup keras. Misalnya, ada kalimat, "Kembalikan ABRI kepada Rakyat." Tak heran bila waktu itu Kaskokamtib Sudomo melarang peredaran film ini. "Ya, saya yang melarang film itu. Keadaan waktu itu lain dengan sekarang," kata Sudomo. Selain itu, Manu diminta tidak keluar Indonesia selama sekitar tiga bulan.

Menurut Sudomo, kini ketua DPA, keadaan sekarang sudah jauh berbeda. Selama masih berpegang pada Pancasila dan UUD 1945, sekarang perbedaan pendapat bukan masalah. Situasi dan kondisi masyarakat sekarang, kata Sudomo, sudah memungkinkan demokrasi ditingkatkan secara kualitatif. Sehingga, Sudomo melihat peredaran *Yang Muda Yang Bercinta* tidak akan membahayakan kehidupan demokrasi.

"Tidak masalah", katanya. Ia mengingatkan, sekarang sudah banyak film yang menunjukkan adanya korupsi dan yang sejenis itu. Namun, semuanya tidak menimbulkan masalah lagi.

Film yang selesai diproduksi pada 1988 itu ditaburi bintang-bintang masa itu. Misalnya, Yaty Octavia, Poppy Dharsono, Nani Widjaya, almarhum Soekarno M. Noer, dan Maruli Sitompul. Biaya pembuatannya pun sekitar lima kali lebih besar dari film-film Indonesia umumnya. Jika waktu itu sebuah film nasional standar hanya memerlukan biaya Rp 70 juta, film itu menelan ongkos hampir Rp 500 juta.

Film yang bakal beredar pertengah bulan ini, lolos hampir tanpa sensor. Yang kena gunting cuma adegan yang berbau porno, khususnya penampilan Poppy Dharsono. Memang, dalam film itu, Poppy sempat tampil *topless* alias bugil. Tanpa busana, ia disorot ketika lari ke pantai dan waktu berenang berdua dengan Rudy Salam. Adegan itulah yang dikurangi BSF. Sebaliknya, adegan yang mengandung kritik sosial-politik tak banyak diotak-atik.

Menurut pemain dan sutradara film yang kini menjadi anggota DPR, Sophan Sophiaan, meskipun film itu dibuat akhir 1970-an, isi kritiknya masih relevan dengan keadaan saat ini. "Film itu masih sangat kontekstual," katanya. Ia melihat, film itu dilepas karena pemerintah juga ingin menerapkan keterbukaan di bidang perfilman.

Namun, Sophan juga melihat, ada maksud lain dari pemerintah meloloskan *Yang Muda Yang Bercinta*. "Dalam anggapan pemerintah, film ini diharapkan dapat menerobos kelesuan film nasional," katanya.

Sutradara Chaerul Umam juga menghubungkan dibolehkannya *Yang Muda Yang Bercinta* dengan iklim keterbukan sekarang. Hanya, di sini lain, ia juga melihat kritik yang dilontarkan terhadap film itu, jika diukur dengan keadaan kini, sudah tidak terlalu keras lagi. "Maka, boleh beredar untuk umum," katanya.

Film itu bercerita mengenai pencarian jati diri seorang mahasiswa yang menjadi penyair. Ia melihat berbagai kemunafikan dalam kehidupan dan penghidupan. Namun, rupanya ia sendiri menghadapi persoalan sebagai seorang anak di tengah keluarganya. Apalagi, setelah ia menghamili kekasihnya.

Pada 1978, film itu meraih delapan nominasi Piala Citra. Menurut kabar, sebenarnya, tujuh dari delapan nominasi berhasil direbut film itu. Namun, lantaran sebelum diumumkan film ini kenal cekal, akhirnya cuma satu Piala Citra yang diperoleh untuk peran pembantu wanita atas nama Nani Widjaya.

Kalau saja terhadap film nasional lainnya, sikap BSF sama dengan menghadapi *Yang Muda Yang Bercinta*, setidaknya, pasar film Indonesia memang masih punya harapan. Sebab, seperti kata Sophan, selama ini, salah satu hambatan film Indonesia adalah "terlalu banyak pembatasan".

Ami, Harianto, dan Zum

PENUH KRITIK:
Film ini selain banyak menampilkan adegan "panas", juga menyuguhkan banyak kritik sosial-politik.

Mochtar Lubis:

Jangan Salah Baca Zaman

Ini bisa disebut pertemuan langka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wardiman Djojonegoro, didampingi Dirjen Kebudayaan, Edi Sedyawati, mengadakan dialog dengan sekitar 70 seniman di Departemen P dan K, Jakarta. Salah satu yang mencuat dalam dialog itu, para seniman meminta pemerintah mencabut larangan peredaran buku-buku karya Pramoedya Ananta Toer, sastrawan yang pernah ditahan di Pulau Buru (1965-1977) karena kegiatannya di Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), organisasi di bawah naungan PKI. Apa pendapat Mochtar Lubis *tentang itu? Berikut, wawancara* Baskoro *dari* FORUM *dengan pemimpin umum majalah sastra* Horison *itu.*

Apakah Anda setuju buku Pramoedya diedarkan lagi?

Saya tidak keberatan sama sekali. Dengan hancurnya komunisme di dunia, sebenarnya tak ada lagi yang perlu ditakuti. Selain itu, kalau dalam buku-buku Pramoedya terdapat sesuatu yang bisa merugikan masyarakat kita, bawa Pramoedya ke pengadilan. Biar hakim yang memutuskan. Jadi, jangan pemerintah sendiri yang memutuskan. Selama ini kan belum pernah.

Sebenarnya, yang jadi masalah bukan Pramoedyanya, karena dia kan sudah dibebaskan. Masalahnya, apa benar buku-buku Pramoedya itu mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan kekacauan? Itu harus dibuktikan di pengadilan.

Anda pernah melihat tendensi komunisme dalam karyanya...

Saya tidak pernah baca habis, *ngantuk*...

Ataukah dia korban politik masa lalu?

Bagi saya, dia korban politik dirinya sendiri. Kenapa dia pilih Lekra? Artinya, dia salah baca zaman. Itu risiko dia.

Dalam dialog dengan Menteri P dan K, justru seniman yang dulu dimusuhi Pramoedya yang meminta bukunya boleh beredar lagi...

Itu yang harus kita hargai. Orang yang dulu disikat Pramoedya dengan Lekranya, kini justru berjuang agar bukunya tidak dilarang. Itu bisa jadi pelajaran, supaya jangan suka-suka melarang ciptaan. Saya tidak keberatan ada buku yang dilarang, asal bisa dibuktikan di pengadilan, bahwa buku itu benar-benar dapat membahayakan masyarakat.

Ada kesan memaafkan Pramoedya...

Saya rasa, kita harus tegas. Dalam agama, juga diajar saling maaf-memaafkan. Dendam itu tidak baik. Saya pernah jadi korban dia, waktu dia berjaya dengan Lekra. Waktu itu mereka menekan supaya pemerintah Sukarno melarang buku-buku saya. Tapi, saya tidak sakit hati. Apa boleh buat, politik memang begitu.

AGUS BUTAR BUTAR

Mochtar Lubis

Kapan terakhir bertemu Pramoedya?

Waktu dia bebas dari Pulau Buru, dia datang ke rumah saya. Kalau saya, sudah saya anggap berlalu. Enggak ada dendam.

Bagaimana dengan ideologinya?

Tidak bisa. Seorang sastrawan yang jujur hanya menulis dengan keyakinan. Seorang sastrawan yang berideologi komunis, pasti mengembangkan ideologi yang ia yakini. Cara-cara ia mengkritik masyarakat akan berdasarkan ideologi komunis. Kalau ia menulis lepas dari ideologi yang ia yakini, itu tidak benar. Ia membohongi diri sendiri, juga masyarakat.

Apa sebenarnya persoalan mendasar seniman kita?

Masalah besar seniman Indonesia sekarang adalah kesempitan iklim kemerdekaan kreatif di negeri kita. Terlalu banyak larangan, seperti pameran seni rupa Marsinah di Surabaya, diskusi buku di Yogyakarta. Itu iklim agak pengap. Padahal, kreativitas suatu bangsa tergantung sikap kritis. Kalau manusia tidak bisa kritis menghadapi macam-macam kendala, ia tidak bisa mengembangkan diri sebagai manusia yang kreatif. Padahal, bangsa kita memerlukan manusia yang kritis, yang tidak saja di bidang seni.

Apakah diperlukan lembaga tertentu atau mekanisme yang jelas dalam soal pelarangan?

Siapa pun yang melarang, kita tidak suka. Pokoknya, yang membuat penyempitan iklim kebebasan kreativitas kita tolak. Tentu, kita juga tidak mengartikan kebebasan demikian tanpa batas. Bagi saya, batasnya adalah kepentingan umum. Seperti juga kebebasan pers. Kalau kebebasan pers sudah melanggar kepentingan umum, harus dihentikan. Tapi, di dalam melakukan penghentian kebebasan kreativitas, itu harus lewat pengadilan.

Jadi, nanti dia bisa mempertanggungjawabkan karyanya itu di pengadilan. Jangan seperti sekarang, penguasa-penguasa ini yang memutuskan. "Ini melanggar ketertiban umum." Biasanya, alasannya kan demikian. Jangan penguasa kita jadi polisi sendiri, jadi jaksa sendiri, jadi hakim sendiri.

Apakah dialog yang diadakan Menteri P dan K menjurus ke arah itu?

Ada pepatah Belanda yang menyatakan, burung layang-layang bisa menunjukkan datangnya musim panas, tapi kalau hanya seekor burung layang-layang belum berarti musim panas telah sampai. Jadi, jangan cepat-cepat membesarkan hati dan berkesimpulan, semua akan beres. Tapi, saya hargai inisiatif Menteri P dan K untuk pertemuan ini.

Anda merasa seniman itu dilindungi dan dibantu oleh pemerintah?

Enggak. Cuma, satu-satunya yang membantu seniman adalah Ali Sadikin waktu jadi gubernur. Gubernur lain, mana ada? ❑

Menyentil Konsultan Hukum Melayu

Hashim S. Djojohadikusumo menilai konsultan hukum Indonesia kurang mampu melakukan perjanjian bisnis internasional. Benarkah anggapan tersebut?

Para konsultan hukum Indonesia kena sentil. Presiden Direktur PT Semen Cibinong, Hashim S. Djojohadikusumo, dalam pertemuan Jakarta Lawyers Club, 18 Agustus lalu, menilai bahwa konsultan hukum Indonesia masih lemah dalam membuat kontrak-kontrak dagang internasional. "Jarang sekali konsultan hukum kita bisa menangani *business deal*," kata Hashim. Akibatnya, menurut Hashim, terpaksa para pengusaha menggunakan jasa konsultan hukum dari luar negeri.

Hashim mengharapkan agar para konsultan hukum Indonesia mulai tertarik dan mengembangkan ilmunya di bidang *trade financing, trade law and regulations*. Dengan demikian, Hashim berharap, para konsultan hukum Indonesia kelak mampu menyusun perjanjian-perjanjian dagang dengan pengusaha asing.

Benarkah kenyataannya demikian? Konsultan hukum Gani Djemat tak menampik penilaian Hashim itu. Menurut Gani, konsultan hukum Indonesia rata-rata masih kurang mampu menangani kontrak-kontrak internasional. Hal itu, kata Gani, karena mereka kurang mampu menguasai bahasa asing, khususnya Inggris, serta kurang menguasai hukum *international banking/finance/trade*, dan kurang menguasai strategi dan teknik negosiasi.

Namun, kata Gani lagi, sebenarnya beberapa konsultan hukum, khususnya di Jakarta, sudah berhasil menyelesaikan kontrak-kontrak internasional yang terbilang rumit. Misalnya, kontrak yang menggunakan konstruksi *build operate and transfer* (BOT), *turnkey, international borrowings*, kredit sindikasi, *notes issuance facility* (NIF), R.U.F. *revolving underwriting facility* (RVF), dan *commercial paper* (CP) *notes*.

Konsultan hukum Prof. Dr. Komar Kantaatmadja dari Kantor Konsultan Hukum MKK, juga mengakui bahwa dari segi kuantitas, memang baru sedikit yang mampu menangani kontrak berskala internasional. "Yang sedikit ini bisa dikatakan pintar-pintar membuat kontrak internasional. Malah, kita mengajari konsultan hukum asing untuk hal tersebut," kata Komar.

Gani Djemat

Komar Kantaatmadja

Menurut Komar, minimnya jumlah konsultan hukum yang mampu itu karena sistem hukum di Indonesia yang berkiblat ke sistem hukum kontinental peninggalan zaman Belanda. Padahal, Belanda yang tadinya menggunakan sistem hukum tersebut, belakangan telah mengubah sistem kontrak yang ada di Burgerlijk Wetboek (BW) mengarah ke sistem kontrak yang ada dalam sistem hukum Anglo-Saxon dan Anglo-Amerika. Sebab, Belanda merasakan bahwa sistem kontrak yang ada dalam BW lama sudah tidak cocok untuk pembuatan kontrak internasional. "Jadi, mahasiswa fakultas hukum di sini jangan dijejali terus dengan sistem hukum kontrak di BW," kata Komar.

Namun, konsultan hukum dari Kantor Konsultan Hukum Tumbuan Pane, Fred B.G. Tumbuan, menolak anggapan tersebut. Menurut Fred, hal itu bukan karena ketidakmampuan konsultan hukum Indonesia, tapi karena memang bukan bidang hukum yang dipelajarinya. "Coba, kalau kita panggil ahli hukum Inggris, tentu dia tidak mengerti soal hukum Indonesia. Kalau dia mengatakan mampu, malah dia menunjukkan kekonyolan dan kekerdilannya," ujar Fred.

Fred memang mengakui, konsultan hukum kita punya kekurangan dari segi pengalaman. Hal itu, misalnya, bisa dilihat dari kontrak-kontrak migas di masa lalu. "Namun, semuanya, toh, tak lepas dari *bergaining position*, bukan karena ketidakmampuan konsultan hukumnya," kata Fred.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa kantor konsultan hukum yang terbilang besar menggunakan tenaga konsultan hukum asing. Di Jakarta, menurut Komar, sekitar sepuluh kantor melakukan hal tersebut, termasuk MKK yang memakai tiga konsultan hukum dari Amerika Serikat.

Menurut Felix O. Soebagyo, konsultan hukum dari Lawfirm Soebagyo Roesdiono Jatim Djarot, pemakaian tenaga konsultan hukum asing untuk menangani kontrak-kontrak internasional di beberapa kantor konsultan hukum, selain untuk fungsi *marketing* — karena klien biasanya lebih merasa aman bila ditangani konsultan hukum asing — juga untuk fungsi *training*.

Gani memandang, dengan adanya konsultan hukum asing di beberapa kantor itu, diharapkan terjadi alih-pengetahuan kepada konsultan hukum kita ketika berpraktek bersama.

PELUMAS

Mencari Rezeki di Oli Bekas

Para pemegang izin mengolah pelumas atau oli bekas yang legal mulai mendirikan pabrik. Bagaimana dampak teknologinya bagi lingkungan?

Di tengah kenaikan harga oli, lahir pabrik resmi pengolahan oli bekas. Sebuah pabrik pemurnian oli bekas mulai dibangun bulan ini di desa Gandamekar, Kecamatan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Rencananya, pabrik milik PT Wiraswasta Gemilang Indonesia itu, yang merupakan anak perusahaan Grup Napan, akan mendaur ulang oli bekas. "Ini usaha pengolahan oli bekas yang legal," kata Wakil Presiden Direktur Wiraswasta Gemilang, A.P. Batubara.

Batubara perlu menegaskan kata "legal" karena, selama ini, masyarakat hanya mengetahui oli palsu yang diproduksi pengolah liar oli bekas. Oli palsu yang selama ini beredar merusak mesin-mesin. Sebab, bahan-bahan pencemar dan perusak dalam oli bekas itu masih menetap. Masalah yang terakhir itulah, menurut Batubara, yang jadi pertimbangaan mengapa pabrik itu didirikan, selain tentunya soal bisnis yang menguntungkan.

Dalam lima tahun terakhir ini, memang banyak kasus pemalsuan oli yang terbongkar. Para pemalsu itu, umumnya, membeli oli bekas dari bengkel-bengkel dengan harga kurang dari Rp 200 per liter. Kemudian, oli bekas tersebut mereka olah secara sederhana.

Caranya, oli bekas yang telah mereka endapkan diberi bahan-bahan kimia murahan untuk menghilangkan bau dan mengubah warna. Per liternya, mereka hanya membutuhkan biaya sekitar Rp 100 untuk membeli bahan kimia. Ditambah ongkos kirim dan lain-lain, seluruhnya menghabiskan biaya sekitar Rp 500 per liter. Lalu, oli palsu itu dijual ke distributor dengan keuntungan 200-300 persen per liter. Itu sebabnya, bisnis oli bekas liar merajalela lima tahun terakhir.

Apa sebab? Semula, melalui Keppres No. 66 tahun 1983, pemerintah menegaskan bahwa daur ulang oli bekas hanya boleh dilakukan oleh Pertamina. Dalam hal ini, Pertamina menunjuk salah satu anak perusahaanya, PT Elnusa, untuk mengolah pelumas bekas. Pada 1988, keppres tersebut diubah oleh Keppres No. 18 tahun 1988 yang membolehkan swasta mengolah kembali oli bekas, asalkan ada izin Departemen Pertambangan. Celah "swasta boleh mengolah oli bekas" itulah yang dimanfaatkan oleh para pemalsu oli.

MAKIN MANTAP:
PT Wiraswasta Gemilang Indonesia semakin mantap beroperasi setelah ADB memberi pinjaman pada Agustus lalu. Dari kiri: Sudwikatmono, A.P. Batubara, dan salah seorang pemegang saham minoritas, Wilson Pribadi

Departemen Pertambangan sendiri, menurut Direktur Pembinaaan dan Pengembangan Migas, Rivai Hamzah, hanya membatasi pemberian izin kepada lima pabrik. Alasannya, antara lain untuk memudahkan pengawasan terhadap dampak kegiatan industri itu terhadap lingkungan. Tiga dari lima pabrik — Wiraswasta Gemilang, PT Sinar Pejambon Indah, dan Elnusa anak perusahaan Pertamina — itu telah mendapat izin beroperasi di Bekasi, Surabaya, dan Medan.

Menurut Batubara, pabrik yang dibangun dengan investasi 59 juta dollar AS — sekitar 24 juta dollar AS merupakan bantuan ADB itu menggunakan teknologi pemurnian oli bekas yang terbaru, yaitu dengan proses *mohawk*, tepatnya proses *hydrotreating* atau *vacuum distillation-hydrofinishing*. Wiraswasta Gemilang membeli lisensi teknologi *mohawk* dari Chemical Engineering Partners di Amerika Serikat. "Imbalan lisensinya 1,5 juta dollar AS, dengan uang muka sebesar 350 ribu dollar AS," kata Batubara.

Prosesnya dimulai dari dehidrasi, yang diikuti dengan penyulingan vakum. Kemudian, terjadi proses hidrogen dari minyak pada tekanan tinggi dan terakhir dilakukan fraksionisasi. Hasil proses berupa *base oil*, yang merupakan bahan baku pelumas itu kualitasnya sama dengan, bahkan lebih, dari kualitas pelumas semula. Menurut Batubara, sampel *base oil*-nya telah dinyatakan memenuhi kualitas standar *American Petroleum Institute* (API). Ditjen Migas melalui Surat Keputusan No. 42 tahun 1988 memang menentukan API sebagai standar bagi proses pengolahan oli.

Limbah yang dihasilkan dari teknologi itu, menurut Batubara, berupa limbah padat yang justru bisa menjadi bahan baku aspal — dalam proses tersebut, hasil sampingannya adalah aspal dan bahan bakar. Sedangkan limbah cairnya, berupa air yang akan digunakan lagi oleh pabrik untuk mendinginkan mesin. "Kami juga membangun *water treatment* yang menelan biaya sampai 3,6 juta dollar AS," ujar Batubara seraya menambahkan bahwa amdal Wiraswasta Gemilang telah disetujui.

Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan, Universitas Indonesia, Prof.Dr. Mohammad Soerjani, belum bisa memastikan aman atau tidaknya limbah pabrik oli bekas itu. "Saya tidak berkompeten dan menguasai masalah itu. Perlu analisa ahli kimia dulu," kata Soerjani.

Secara umum, menurut Soerjani, setiap industri pasti ada limbah yang kadar bahan pencemarnya tentu saja bervariasi. Namun, kalau melihat gambaran kasar teknologi canggih semacam *mohawk* itu, kata Soerjani, jelas lebih menguntungkan daripada oli bekas dibuang ke sungai dan tanah atau dipalsu.

RETNO KUSTIATI

Kredit Dulu, Ribut Kemudian

Karena mengaku dibujuk untuk membuat kredit palsu oleh Bank Surya Nusantara, lelang yang semula sudah siap pun dibatalkan. Nasabah atau Bank yang berpura-pura?

Hati-hati memberi jaminan ke bank. Bisa jadi, barang yang semula tak dijaminkan pun ikut melayang. Itulah yang dirasakan seorang penduduk Pematangsiantar, Eddy Syahbana. Kini, ia tengah menghadapi gugatan Bank Surya Nusantara cabang Pematangsiantar, lantaran urusan pinjaman uang.

Pada 1989, pengusaha leveransir yang dulunya pedagang kelontong tersebut butuh modal besar. Eddy menoleh ke Surya Nusantara. Eddy meminjam uang Rp 150 juta untuk membiayai proyeknya di PTP VII, dan Surya Nusantara tak keberatan.

Persetujuan pun diteken, 18 Agustus 1989, dengan bunga 3 persen per bulan. Jangka waktu pengembalian pinjamannya dua tahun. Sedangkan jaminannya berupa rumah dan tanah bersertifikat hak guna bangunan milik Eddy di Pematangsiantar.

Namun, proyek yang dikerjakannya rugi. Ayah empat anak itu hanya mampu mengangsur beberapa bulan saja. Eddy pun sempat mendapat peringatan dari Surya Nusantara.

Ketika kreditnya jatuh tempo pada 1991, pemberitahuan dari Surya Nusantara sempat membuat Eddy terhenyak. Utangnya yang semula Rp 150 juta pada 1989—karena bunga-berbunga—membengkak menjadi Rp 611 juta. "Saya heran, waktu meminjam uang, pihak bank bilang, bunga kreditnya hanya 36 persen pertahun," kata Eddy. Toh, ia tetap minta Surya Nusantara memberi tenggang waktu, sekaligus mencarikan jalan ke luar buat dirinya.

Surya Nusantara menganjurkan, karena nilai jaminan rumah Eddy di Pematangsiantar tak bakal bisa menutupi semua utangnya, ia lebih baik menutupi dengan memberi jaminan lain. Caranya?

Surya Nusantara membawa Eddy ke Notaris Soeparno di Medan, November 1991, untuk meneken surat perjanjian seolah-olah berhutang ke Surya Nusantara Rp 350 juta. Jaminannya, tanah seluas 4 hektare di Kecamatan Medan Johor, Medan, senilai Rp 350 juta. "Waktu itu, saya tak bisa apa-apa. Jadi, ketika pihak Surya Nusantara menyuruh teken, ya, saya teken saja," kata Eddy.

Di Pematangsiantar, dia masih harus meneken surat perjanjian membuka kredit (PMK) sebesar Rp 350 juta. Padahal, ia sama sekali tidak menerima uang itu. "Jadi, PMK itu "topengan" saja," kata pengacara Eddy, Aldian Pinem.

HARIS

MENGGUGAT: *Bank Surya Nusantara cabang Pematangsiantar melakukan lelang eksekusi, tapi dilumpuhkan oleh pengadilan negeri.*

Namun, setelah penekenan PMK, 7 November 1992, Surya Nusantara mengajukan permohonan eksekusi grosse akta hipotik senilai Rp 611 juta ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Tidak itu saja, dengan alasan yang sama, dua hari kemudian, Surya Nusantara pun menggugat Eddy ke Pengadilan Negeri Medan. "Itu kan aneh," kata Aldian.

Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kemudian memang mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Namun, 7 Januari 1992, sebelum eksekusi dilaksanakan, Aldian melayangkan surat bantahan. Alasan Aldian, selain jumlah utang Eddy tak jelas, Surya Nusantara tidak memberikan informasi lalu lintas uang yang masuk dan ke luar dari rekening koran Eddy.

Upaya Aldian membuktikan PMK Rp 350 juta sekadar "topengan" berhasil. Pada 22 Juli lalu, Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Andar Purba, memutuskan "melumpuhkan" kekuatan hukum pengumuman lelang dan pelaksanaan eksekusi yang sudah ditetapkan pengadilan. "Surya Nusantara tidak dapat membuktikan cek dan giro yang ditarik Eddy sebesar Rp 611 juta, seperti yang disebutkan Surya Nusantara," kata Purba.

Surya Nusantara mengajukan banding. Apalagi, Surya Nusantara juga merasa punya bukti yang kuat. *Pertama*, pengakuan utang sebesar Rp 150 juta serta penyerahan jaminan rumah dan tanah di Pematangsiantar. *Kedua*, perjanjian kredit sebesar Rp 350 juta, berikut jaminan tanah 4 hektare di Medan.

Pemimpin Bank Surya Nusantara cabang Pematangsiantar, A. Sudianto, tak mau berkomentar mengenai kasus itu. "Tanya saja kepada direksi Bank Surya Nusantara di Medan," kata Sudianto. Namun, direksi Surya Nusantara Medan mengelak pula menerangkan masalahnya.

BASKORO DAN HARIS (MEDAN)

LIMBAH

Badai di Hotel Sinabung

Penampungan limbah milik Hotel Sinabung Resort, Brastagi, ambrol diterjang hujan badai. Enam warga setempat tewas dan puluhan rumah hancur. Akibatnya, pemilik hotel digugat Rp 90 juta.

"Pimpinan Hotel Sinabung Resort benar-benar melecehkan kami," kata Husni, penduduk Kampung Listri Atas, Brastagi, Sumatra Utara. Anaknya, Mei lalu, tewas dalam peristiwa ambrolnya tempat pembuangan limbah milik Sinabung Resort. Husni marah lantaran, setelah kejadian itu, pimpinan hotel tidak pernah menghubunginya.

Selain anak Husni, ada lima orang lainnya yang tewas secara mengenaskan. Itu belum termasuk yang luka-luka dan puluhan rumah yang rusak. Peristiwa ambrolnya tempat pembuangan limbah Sinabung Resort itu, sebenarnya, sudah dua kali terjadi. Pertama, akhir 1992, terjadi menjelang tengah malam.

Saat itu, terjadi hujan lebat. Dalam keadaan hujan badai tersebut, tiba-tiba tempat pembuangan limbah hotel, berukuran 20 x 20 meter persegi di atas bukit, malahan ambrol dan menerjang perumahan penduduk yang terletak tepat di bawah bukit itu. "Anak saya, Eka, saya temukan sudah meninggal dunia di balik lemari," kata Husni.

Pemerintah daerah setempat segera datang memberi bantuan Rp 600 ribu kepada penduduk yang tertimpa musibah. Bantuan juga datang dari Yayasan Gotong Royong dan Departemen Sosial. Namun, pihak hotel tidak pernah melayat, apalagi memberikan uang duka kepada keluarga korban.

Penduduk sempat mendatangi tempat pimpinan hotel untuk membicarakan pertanggungjawaban pihak hotel. Namun, penduduk malahan dihadang oleh anggota Polsek Brastagi. "Hampir sebulan, daerah itu dijaga ketat oleh polisi," kata Husni.

Belakangan, pihak hotel membangun kembali tempat penampungan limbah itu. Belum lama dibangun, tragedi serupa pun terulang. Tempat penampungan limbah kembali ambrol dihajar hujan badai, 14 Mei. Kali ini tanpa korban tewas.

Penduduk kembali mendatangi tempat pimpinan hotel. Namun, lagi-lagi tidak ada tanggapan dari pihak hotel. Sebelumnya, muncul rombongan dari kelurahan Gundaling I yang dipimpin Kasir Ginting. Kasir memberi ganti rugi Rp 20 ribu kepada para korban. Tapi, penduduk yang telah menerima ganti rugi disuruh meneken surat pernyataan tidak akan menuntut pihak hotel.

LIMBAH:
Hotel Sinabung Resort Brastagi rapuh dari luar. Kini, pemiliknya digugat Rp 90 juta dalam peristiwa bobolnya penampung limbah hotel.

Namun, sebagian penduduk menolak tawaran tersebut. "Saya tak mau meneken surat pernyataan itu karena isinya merugikan penduduk," kata Husni. Lalu, dalam pernyataan memang disebutkan, Sinabung Resort sudah memberikan bantuan kepada penduduk. Tak jelas apa hubungan antara rombongan itu dan pemilik hotel. Itulah sebabnya, Husni dan kawan-kawan tetap ingin bertemu dengan pimpinan hotel. "Tapi, sampai sekarang pimpinan hotel tak mau berjumpa dengan kami," kata Husni. Aparat keamanan pun kembali turun tangan.

Akhirnya, penduduk menggugat Rp 90 juta kepada pimpinan hotel di Pengadilan Negeri Kabanjahe, awal Agustus lalu. Menurut pengacara pihak penduduk, Pakayun Nawi, jumlah ganti rugi yang diminta adalah dua kali bencana, rinciannya Rp 60 juta sebagai ganti rugi bagi enam warga yang tewas, sisanya ganti rugi untuk kerusakan rumah dan korban yang luka-luka.

Pihak hotel, tentu saja bertahan tak mau membayar gugatan penduduk. Mereka menganggap peristiwa itu bukan kesalahan pihak hotel. Menurut pengacara Sinabung Resort, Ayub, musibah itu adalah akibat bencana alam (*force majeur*). "Jadi, bukan kemau- an pihak hotel," kata Ayub.

Sejak lama, kata manajer Sinabung Resort, Syahriadi, lokasi rumah penduduk termasuk daerah rawan longsor karena berada pada tingkat kemiringan 80 derajat. Selain itu, perumahan penduduk tadi memang sering dilanda banjir. Dengan demikian, katanya, banjir yang menghanyutkan para korban bukan karena ambrolnya tempat penampungan limbah. "Jadi, tak benar kami yang salah," kata Syahriadi. Soal itulah yang bakal diputuskan pengadilan.

AGUNG DAN HARIS (MEDAN)

Dua Sertifikat Satu Alamat

Ada dua sertifikat Hak Guna Bangunan dengan alamat yang sama tapi beda pemilik. Hal itu baru diketahui saat tanah dan bangunan di alamat itu akan disita karena kredit macet.

Siapa makan nangka, dan siapa kena getahnya. Itulah yang diinginkan Guek Beng, 51 tahun, seorang penduduk Binjei, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. Tanah dan rumahnya, di Jalan Sudirman No. 156, sudah disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Binjei berdasarkan permohonan Lippobank setempat. Padahal, Guek Beng sama sekali tak pernah berurusan dengan bank itu.

Usut punya usut, ternyata yang berurusan dengan Lippobank adalah Eng Deix, penduduk Jalan Sudirman No. 5-B. Kredit Eng Deix sebesar Rp 100 juta di Lippobank macet, sehingga jaminannya akan dieksekusi. Tapi, kenapa rumah Guek Beng yang dieksekusi? Rupanya, yang digunakan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 447 atas nama Eng Deix. Tapi di sertifikat itu justru tertulis — dengan tulisan tangan — lokasi persil yang terletak di Jalan Sudirman No. 156. Alamat itu sama dengan yang tertulis dalam sertifikat HGB No. 538 atas nama Guek Beng.

Pengacara Guek Beng, Akim Edwarta Butar Butar menilai, ini kecerobohan Lippobank, kredit langsung diberikan tanpa mengecek lokasi tanah yang diagunkan lebih dulu. "Akibatnya, orang lain yang menjadi korban," katanya.

Menurut Guek Beng, tanah dan rumah miliknya berasal dari akta hibah No. 74 pada 23 November 1962 di hadapan notaris Marah Sutan Nasution. Ny. Tjeng Sioe Ang menghibahkan sebuah rumah toko kepada anak kandungnya, yang tak lain ayah Guek Beng, Kho Bok Sing alias Aliantono. Tanah itu sendiri merupakan tanah negara yang berasal dari hak-hak Barat.

Sepeninggal Aliantono, Oktober 1991, Guek Beng mengajukan permohonan HGB atas tanah itu. Dua bulan kemudian, dengan persetujuan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatra Utara, Guek Beng mendapat sertifikat HGB No. 538. Alamat yang tertera dalam sertifikat itu.

Betapa kagetnya Guek Beng, ketika pada 21 dan 23 September 1992, muncul surat penetapan ketua Pengadilan Binjei tentang sita eksekusi dan berita acaranya. Surat itu terbit berdasarkan permohonan Lippobank.

Ternyata, surat itu buntut dari kredit macet Eng Deix yang diberikan pada 1989. Karuan saja, Guek Beng mengajukan *verzet* pada 28 September 1992. Selain karena tak pernah berhubungan dengan Lippobank, sertifikat milik Guek Beng tak ada cap stempel dibebani hipotik.

DUA SERTIFIKAT:
Rumah toko berikut tanah milik Guek Beng itu terancam dieksekusi, karena dua sertifikat beralamat sama.

Di persidangan, pengacara Lippobank, Irwansyah, berpendapat bahwa sertifikat HGB Eng Deix yang terbit 6 Juli 1989 itu sah. Sebab, sertifikat itu dikeluarkan lebih dulu daripada HGB Guek Beng. Tapi, anehnya, kata Irwansyah, walaupun telah tahu dan tercatat dalam buku tanah adanya beban hipotik atas tanah terperkara pada 22 Mei 1991, BPN Binjei tetap menerbitkan sertifikat untuk Guek Beng.

Irwansyah menduga adanya "permainan" antara Guek Beng dan BPN. Selain itu, Irwansyah juga membantah pernyataan Akim soal tak ada pengecekan lapangan terlebih dulu ketika memberi kredit.

Eng Deix juga membantah *verzet* Guek Beng. Menurut Eng Deix, sertifikat HGB No. 447 atas namanya terletak di Jalan Sudirman No. 156. Lokasi bekas tanah *Grant C* itu dibeli orangtuanya, Kho Lian Gim, dari Tengku Mochtar Aziz pada 25 Februari 1961 di hadapan notaris Oesman Aldjoeffry.

Pengadilan sendiri telah menolak *verzet* Guek Beng, Maret lalu. Hakim, Ny. Taruli Butar Butar, mengungkapkan bahwa akta hibah No. 74 yang dijadikan landasan Guek Beng, bila diteliti lagi, ternyata Tjeng Sioe Ang hanya menghibahkan perusahaan kilang kopi dengan merek "Tek Kie" kepada Aliantono dengan disaksikan Kho Lian Gim. Menurut Taruli, tanah dan bangunan perusahaan itu tak disebut-sebut.

Akibat keputusan itu, Guek Beng pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Kini, perkaranya masih diproses. Selain itu, Guek Beng mengadukan perkaranya kepada Kapolda Sumut. Bulan lalu Kapolda melayangkan surat kepada ketua Pengadilan Binjei.

BPN Kodya Binjei pun tak tinggal diam. Pihaknya tengah berupaya mengungkap tabir kedua sertifikat itu. Menurut kepala kantor BPN Kodya Binjei, Laden Damanik, berdasarkan data yang ada di kantornya, sertifikat HGB No. 538 jelas terletak di Jalan Sudirman No. 156. Sedangkan HGB No. 447 terletak di Jalan Sudirman No. 5-B.

"Jadi tidak benar, ada dua sertifikat dengan alamat yang sama. Kalau tidak percaya, lihat saja data permohonan mereka dan sertifikat yang diterbitkan kantor kami," kata Laden. Untuk menjaga nama baik BPN, Laden telah melayangkan surat kepada kantor lelang untuk menjelaskan persoalan tersebut.

RETNO DAN HARIS (MEDAN)

Gubernur Digugat Karena Rambutan

Sudah setahun terminal di Kampung Rambutan beroperasi. Ternyata masih terus berbuntut masalah.

Rambutan yang satu ini rasanya masam bagi para pejabat Pemda DKI Jakarta. Rambutan yang dimaksud adalah terminal angkutan umum yang diresmikan gubernur DKI Jakarta, awal Oktober 1992, di akhir jabatan Gubernur Wiyogo Atmodarminto. Kini, rambutan yang rasanya masam itu masih berbuntut masalah.

Bekas Kepala Biro Pengembangan Daerah DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, menggugat atasannya, Gubernur Surjadi Sudirdja, yang sidang terakhirnya digelar pada 31 Agustus 1993 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. "Saya keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan gubernur," ujar Sinaga mengenai sanksi yang dikaitkan dengan kasus pembangunan terminal di salah satu tepi jalan lingkar Jakarta Timur itu.

Skandal itu mulai tersingkap ketika gubernur yang menggantikan Wiyogo, Bang Sur (panggilan akrab Surjadi), meninjau ke terminal seharga Rp 8,6 miliar tersebut. Ia menemukan, ada sekitar 80 titik di bangunan terminal yang tidak sesuai dengan bestek.

MASIH DIPERBAIKI:
Banyak titik di terminal Kampung Rambutan yang menyalahi bestek, sehingga beberapa pejabat terkena sanksi disiplin.

Wajah terminal Kampung Rambutan, yang rusak berat jauh sebelum waktunya, membuat Surjadi berang. Kontan, bekas Panglima Kodam Jaya itu memerintahkan Inspektorat Wilayah Provinsi memeriksa sampai tuntas para pejabat Pemda DKI Jakarta yang menangani pembangunan terminal itu.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan, Surjadi menjatuhkan sanksi disiplin terhadap 20 pejabat yang dianggap bertanggung jawab. Seorang di antaranya Pandapotan Sinaga, selaku Ketua Tim Asistensi Teknis proyek tersebut, yang dibebaskan dari jabatan Kepala Biro Pembangunan Daerah DKI Jakarta, kemudian dimutasikan ke staf wakil gubernur bidang ekonomi dan pengembangan.

Karena merasa keberatan atas tindakan tersebut, Sinaga, lulusan Fakultas Teknik UGM pada 1967, menggugat Gubernur DKI Jakarta, Surjadi Sudirdja, ke PTUN. Melalui pengacaranya, I Wayan Sudirta, ia menuntut agar PTUN membatalkan surat keputusan gubernur itu dan menghukum tergugat untuk merehabilitasi nama baiknya.

Sebelum menggugat ke PTUN, sebenarnya Sinaga pernah menghadap gubernur untuk menyelesaikan masalah itu secara musyawarah. Tapi, menurut Sinaga, Surjadi menegaskan, "Sanksi disiplin itu tetap berlaku. Sebenarnya, saya hanya melihat secara makro."

Awal Maret 1993, Sinaga kembali mengajukan keberatan. Kali ini, kepada menteri dalam negeri. "Namun, tidak ada jawaban," kata Sinaga. Akhirnya, Sinaga mengajukan gugatan ke PTUN, akhir Mei 1993.

Sinaga bersikeras tidak menerima hukuman disiplin tersebut. Menurut I Wayan Sudirta, dasar keputusan gubernur DKI Jakarta, yakni berita acara pemeriksaan dan pemeriksaan, sangat sumir karena sama sekali tidak tercermin kesalahan Sinaga.

Begitupun, tudingan tidak melaksanakan tugas bimbingan serta pengawasan proyek, menurut Sinaga, tidak benar. "Kalaupun hasilnya kurang memuaskan, itu wajar saja," ujarnya. Karena, dalihnya, ada sekitar 3.000 proyek dalam setahun di DKI Jakarta.

Lantas, mengapa Sinaga yang kena hukuman terberat? Menurut Sinaga, ia hanya korban. Karena penyelesaiannya ditargetkan dan harus ada yang dihukum. Padahal, ada banyak pejabat lain yang seharusnya bertanggung jawab. Tapi, ternyata mereka bebas, malah dipromosikan ke jabatan yang lebih baik. Contohnya, Wali Kota Jakarta Timur yang menyatakan pembangunan telah selesai dengan baik. Juga, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang mendesak agar terminal segera diresmikan, meskipun bangunan belum sempurna. "Seharusnya, merekalah yang bertanggung jawab," kata Sinaga.

Namun, tuntutan Sinaga itu ditampik oleh pengacara gubernur dengan surat jawaban melalui Majelis Hakim PTUN. Dalih yang dipakai Sinaga tidak layak diterima, karena Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta mengenai sanksi disiplin kepada Sinaga adalah wewenangnya, dan berdasarkan pertimbangan yang benar. "Kita lihat saja nanti hasilnya di pengadilan," kata pengacara gubernur, Hendroningsih.

Aryan Soeseno

Carlsberg
Carlsberg
Beer
Probably the best beer in the world.

A.M. Fatwa:

"Pemerintah Berubah, Saya Pun Ikut Berubah"

FAIZAL

Azan magrib menggema di kediaman Haji Andi Mappetahang Fatwa, Jalan Kramat Pulo Gundul, Jakarta. Tuan rumah bergegas berangkat salat di musala "Saiful Ulum-Ayah Ton", yang terletak di lantai atas bagian belakang kediamannya. Sore itu, warga di sekitarnya kembali mendengar suara Fatwa melantunkan ayat-ayat suci Alquran. Kini, setelah sembilan tahun mendekam di penjara, ia kembali menjadi iman di situ.

Musala itu, yang sekaligus sebagai ruang perpustakaannya, meninggalkan kenangan khusus baginya. Di situ, sembilan tahun lalu, bersama dengan beberapa mahasiswa anggota HMI, Fatwa pernah mengadakan pertemuan dengan Letjen (Purn.) H.R. Dharsono. Belakangan, pertemuan itulah yang menyebabkan Fatwa dan H.R. Dharsono menjadi terdakwa dalam kasus "Peledakan BCA".

Untuk mengenang peristiwa tersebut, di belakang nama musala seluas 5 x 7 meter itu — semula hanya "Saiful Ulum" — ditambahkan dengan "Ayah Ton", sebuah panggilan keluarga untuk H.R. Dharsono. Ia merasa kasihan kepada H.R. Dharsono yang dituduh terlibat dalam kasus pengeboman tiga bank milik Liem Sioe Liong itu. "Padahal, Pak Ton sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa itu. Tapi, ia diadili dengan tuduhan itu," kata Fatwa.

H.R. Dharsono sudah keluar dari penjara pada 1991. Dan, kini, Fatwa, 54 tahun, menyusul. Senin, 23 Agustus lalu, Fatwa mulai menjalani masa bebas bersyarat. Berarti, ia dibolehkan tinggal di luar penjara sambil menunggu masa "bebas murni" pada 16 Oktober 1999.

Fatwa, kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1939 itu, telah tiga kali masuk penjara sebagai "terpidana politik", yaitu pada 1963, 1978, dan 1984. Aktivis Pemuda Islam Indonesia (PII) itu pernah menjadi kepala Dinas Pembinaan Rohani Islam Ksatrian KKO Surabaya (1967-1969), sekretaris Korps Dakwah Islam DKI Jakarta, dan sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta.

Banyak kalangan bersuka cita menyambut kebebasannya itu. Sejak hari pertama, kediamannya terus-menerus dikunjungi para kerabat dan teman-temannya. Ruang tamunya dipenuhi dengan karangan bunga. Tiga di antaranya dari Adnan Buyung Nasution, Mulyana W. Kusumah, dan Luhut M.P. Pangaribuan, yang menjadi pembelanya. Di sudut lain, tampak kiriman dari Haji Probosutedjo. "Dari saudaranya Pak Harto," kata Fatwa sambil menunjuk karangan bunga itu.

Fatwa belum punya rencana ihwal kegiatannya dalam waktu dekat ini. Namun, kata Fatwa, ia akan mengutamakan urusan keluarganya lebih dahulu. "Sudah sembilan tahun saya tidak mengurus mereka," kata Fatwa kepada Tony Hasyim dan Santoso dari FORUM, dua hari setelah ia menghirup udara bebas.

UCAPAN SELAMAT:
Panglima Kodam Jaya, Mayjen A.M. Hendropriyono, mengucapkan selamat kepada Fatwa setelah membacakan paper-nya di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang

Sejak bebas sudah bertemu dengan siapa saja?

Ya, kemarin malam saya baru ke tempat Bang Ali. Saya diundang ke rumahnya di Pejaten untuk makan malam.

Tahun 1990 Anda membuat paper Pancasila di penjara Pledang. Dalam rangka apa?

Sebenarnya, tahun 1990 saya dikirimi buku oleh Pak Munawir (Menteri Agama waktu itu, Munawir Sjadzali). Buku itu judulnya *Ketatanegaraan dalam Islam*. Saya disuruh baca dan diminta untuk komentar. Dan, komentar saya bentuknya seperti paper ini.

> Dulu, saya lancarkan kritik-kritik sosial itu atas hal-hal yang memang dianggap berat bagi masyarakat

Saya juga dikirimi pidato menteri agama di Yogya, yang dimuat koran. Melalui istri saya, Pak Munawir mengirimkan guntingan koran itu dan meminta tanggapan saya. Saya sudah lupa judul pidatonya itu. Tapi isi pidatonya itu terkait dengan wawasan dia dalam bukunya. Lalu saya menanggapi, bagaimana sebagai muslim Indonesia memahami Pancasila. Tapi, sesungguhnya, ini sudah merupakan sikap politik saya sejak dulu. Pokoknya, dari dulu, saya punya kesadaran politik berorganisasi, ya, begitu.

Soal asas tunggal juga?

Asas tunggal itu bukan soal orang anti-Pancasila.

Peristiwa Tanjung Priok, 12 September 1984, kan dituduh sebagai gerakan anti-Pancasila?

Peristiwa Tanjung Priok kan tidak ada hubungannya.

Anda sejak dulu menerima Pancasila?

Saya berorganisasi di PII, HMI, Muhammadiyah, itu memang sudah pendirian saya. Itu sebenarnya kan suatu isu saja, menolak Pancasila. Rancangan UU yang kita tolak. Kemudian, kan ada beberapa perbaikan. Presiden mengatakan Pancasila sebagai ideologi terbuka, kita kan *surprised*. Bukan masalah materi Pancasilanya sendiri. Tetapi, kita mengkhawatirkan sistem politik, pembinaan masyarakat bangsa ini yang serba monolitik. Bukan soal Pancasilanya.

Anda tampaknya mendapat perhatian khusus dari Munawir?

Pak Munawir itu pernah mengambil inisiatif pribadi untuk mengupayakan bagaimana agar hukuman saya dapat diringankan. Itu dibicarakan dengan Moerdiono (Menteri Negara Sekretaris Negara) tahun 1990. Pak Moerdino lalu mengatakan, bagaimana kalau soal Fatwa ini kita bicarakan dengan Pak Presiden. Lantas Pak Munawir mengundang istri saya. Dia bilang, "Tidak bisa menjanjikan apa-apa." Tapi, tampaknya, upaya itu terhambat oleh kesulitan prosedur hukum dan suasana politik yang ketika itu belum seperti sekarang.

Pak Munawir sebetulnya tidak saya kenal secara pribadi. Pernah ketemu langsung dan bicara sebentar pada waktu meninggalnya Mr. Roem. Pak Munawir dengan Pak Hasan Basri dan Anwar Harjono kan kawan lama, sedangkan Pak Hasan Basri dan Anwar Haryono senior saya.

Bagaimana pendapat Anda tentang H.R. Dharsono?

Pak Ton (panggilan akrab H.R. Dharsono) pernah mendapat musibah. Kebetulan, di rumah ini ada pertemuan yang kemudian menimbulkan salah paham. Padahal, Pak Ton sama sekali tidak terlibat dalam kejadian BCA, tapi beliau diadili dengan tuduhan itu.

Maksud Anda dengan salah paham?

Ya. Pertemuan itu dianggap rapat gelap. Ini dinilai ada hubung-

TERDUDUK LEMAS:
Fatwa, ditemani Aziz Saleh, terduduk lemas setelah mengikuti sidang maraton di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 1985

DIJENGUK REKAN-REKAN:
Kunjungan rekan-rekan adalah saat yang paling membahagiakan. Sabam (paling kiri) dan Mulya Lubis (kedua dari kiri) menjenguk Fatwa dan H.R. Dharsono pada 1987.

annya dengan kejadian BCA. Padahal, sama sekali tidak ada kaitannya. Kebetulan, ada seorang yang hadir dalam pertemuan itu, yang terlibat dalam kejadian BCA. Lalu dikait-kaitkan.

Sejak Pak Try Panglima ABRI tahun 1991, timbul pemikiran bahwa keadaan sudah aman. Barangkali, itu sebabnya macam-macam narapidana politik enggak jadi masalah...

Apakah pola berpikir Anda berubah setelah sembilan tahun dalam penjara?

Saya kira tidak. Hanya, saya pikir masalah kematangan pribadi yang saya rasakan ada dan kearifan ini kan soal usia. Tentu, dalam penjara namanya orang tahanan, pasti merenung. Tapi, dalam soal pola berpikir dan sikap politik, saya kira tetap saja. Pandangan politik saya terhadap Pancasila sejak dulu begitu.

Pandangan Anda terhadap pemerintah juga tetap?

Pemerintah sendiri sudah berubah, ha...ha.... Kenapa kita tidak berubah. Dulu, saya lancarkan kritik-kritik sosial itu atas hal-hal yang memang dianggap berat bagi masyarakat. Sekarang ini, pendekatan pemerintah terhadap masyarakat atau umat Islam karena saya *mubaligh* kan sudah berubah.

Apakah Anda merasa perubahan ini bukan kamuflase?

Enggak. Saya kira pemerintah sendiri juga belajar dari pengalaman masa lalu. Pendekatan keamanan (*security approach*) tidak lagi menjadi titik berat. Sekarang, dalam rangka keterbukaan, lalu menjadi *prosperity approach*.

Ada kesan, kekuatan Islam sangat ditakuti, tapi tiba-tiba berubah setelah Pak Harto naik haji?

Itulah. Suatu kebijakan pendekatan yang simpatik dari Pak Harto terhadap umat Islam. Bahwa masih banyak hal-hal lain, dalam perwujudan demokrasi, sistem politik yang kita ingin sempurnakan, ya, itu proses kan. Perlu waktu. Dan, saya kira, perputaran waktu itu yang akan membantu.

Dulu, tahun 1963 Anda masuk penjara juga, waktu PII...

Tahun 1963 itu kan masalah intern di departemen agama, lalu diperluas. Seolah-olah, karena mengoreksi kebijakan menteri, lalu dianggap mengoreksi pemimpin besar revolusi. Waktu itu, ada penyelenggaraan Ganefo lalu dianggap seperti mengganggu Ganefo. Dan, bukan hanya saya, banyak tokoh juga kena.

Tahun 1978 Anda ditahan lagi, mengapa?

Tahun 1978, saya menjadi Ketua Panitia Peringatan hari 1 Muharam, di Senayan. Jatuhnya Desember 1978 dan itu menjelang sidang umum MPR. Di situ, berpidato Jenderal Nasution, ketua Majelis Ulama. Alamsjah (saat itu wakil ketua DPA) juga hadir. Tema peringatan itu adalah mengimbau supaya aliran kepercayaan tidak dimasukkan dalam GBHN. Kebetulan, pada waktu itu, dewan-dewan mahasiswa juga bergerak kan, menentang NKK/BKK. Karena itu, saya diminta ke Kampus Kuning oleh mahasiswa. Kalau mahasiswa diadili. Saya tidak diadili karena ketika menyelenggarakannya itu saya sekretaris Majelis Ulama, dan saya ditugaskan untuk menjadi *project officer* penyelenggaraan peringatan itu.

Siapa lagi yang ditahan tahun 1978 itu?

Banyak tokoh lain yang ditahan kan? Ismail Sunny, Mahbub Djunaidi, Adnan Buyung Nasution, dan Imaduddin kan pada masuk juga.

Siapa yang menangkap Anda tahun 1984?

Waktu saya ditangkap, asintelnya Sampurna (Kolonel Sampurna). Sekarang dia wagub kan?

Anda pernah mengatakan Pak Ton enggak bersalah dalam kasus peledakan BCA, 4 Oktober 1984...

> Jadi garis politik saya sebenarnya dari dulu moderat. Saya tidak pernah anti-Pancasila.

Ya. Sebenarnya itu sekadar *trigger*, pemicu saja atau alasan untuk memegang. Sebenarnya, sudah ada situasi sebelumnya. Buat saya, sebenarnya, ada beban moril terhadap Pak Ton dan keluarganya, kok, kebetulan di rumah saya ada pertemuan. Oleh sebab itulah dia ditangkap. Menimbulkan beban moril buat saya, sebagai tuan rumah.

GAYA NARAPIDANA:
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Cipinang memiliki pakaian khas berwarna biru. Fatwa (kiri) dan Basuki Rachmat (berkacamata) mengenakan pakaian khas itu.

Sebelumnya, Anda sudah ada hubungan dengan Pak Ton?

Ya, terang saja dong. Petisi 50 itu kan yang merintis, yang mengundang kan Fosko Angkatan Darat. Dia aktif di Fosko Angkatan Darat tahun 1980.

Bagaimana hubungan Anda dengan "Lembaran Putih"

Peristiwa Tanjungpriok?

"Lembaran Putih" itu kan dijadikan konsiderans dalam keputusan hakim tentang vonis saya. Salah satu yang memberatkan saya kan disebutkan bahwa saya konseptor "Lembaran Putih". "Lembaran Putih" produk Petisi 50, ya, tentunya saya ikut rapat. Pertemuannya di rumah Pak Ali. Formil itu pertemuannya Petisi 50. Kok, saya yang ditahan. Jadi, saya kira, ada pertimbangan lain. Dari sudut itu, menurut saya, yang bertanggung jawab atas "Lembaran Putih" kan Petisi 50 ("Lembaran Putih" adalah semacam laporan tentang Peristiwa Tanjungpriok yang berbeda dengan penjelasan pemerintah).

Sebagai karyawan DKI, sejak kapan Anda tertarik soal-soal politik?

Saya kan ikut organisasi sejak SMP, jadi ketua cabang PII. Saya pernah menjadi pengurus pusat PII. PII kan pernah pecah dulu, katakanlah antara yang moderat dan garis keras. Saya garis moderat, saya ketua umum itu. Dan itu, ketua yang memisahkan diri, yang garis moderat.

Jadi garis politik saya sebenarnya dari dulu moderat. Persoalan saya ditangkap itu kan persoalan temporer saja, tetapi tidak mengubah pola berpikir saya tentang Pancasila. Saya tidak pernah anti-Pancasila.

Kalau begitu Anda dikorbankan dengan cap anti-Pancasila?

Ya.

KELUAR DARI CIPINANG::
Setelah mendekam selama 9 tahun, Fatwa keluar dari Penjara Cipinang.

> Saya menuntut perdata karena saya menderita waktu ditahan. Saya pernah gegar otak karena disiksa di tahanan

Apa saja tugas Anda di DKI semasa Gubernur Ali Sadikin?

Tugas saya, antara lain, menyangkut masalah-masalah agama dan politik yang ada hubungannya dengan agama, karena saya memang kepala subdirektorat di direktorat politik. Kepala Direktorat Politiknya Kolonel Wiryadi.

Sebelumnya, Anda sudah kenal Bang Ali di KKO?

Ya, memang saya imam KKO di Surabaya. Kemudian, dikirim kepada Pak Ali untuk membantu. Tidak kenal lama secara pribadi. Akhirnya, kan jadi pegawai DKI. Kan banyak yang begitu.

Sikap Bang Ali mempengaruhi Anda?

Saya kira, karena dia seorang pemimpin dan itu bos saya, pasti saya banyak terpengaruh. Tapi, masing-masing orang kan punya pribadi. Tentu, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya dibentuk oleh Bang Ali. Kalau interaksi dengan semua orang ada, kan?

Insinyur Wardiman dulu pembantu Ali Sadikin di DKI, tapi tidak jadi oposan. Mengapa Anda jadi oposan?

Itu perjalanan hidup seseorang. Saya menganggap Wardiman birokrat tulen, bukan politisi. Sekarang jadi menteri itu kan jabatan politis. Sebenarnya, saya juga agak heran itu. Tapi, sekarang memang begitu, ya, ha...ha.... Banyak pegawai jadi menteri.

Anda berhenti dari DKI setelah Bang Ali turun?

Zaman Amirmachmud (saat itu menteri dalam negeri). Setelah Bang Ali keluar dari DKI. Itu saya kira kejadian formal saja. Kalau sekadar formalitas kerja, saya belum pernah dapat peringatan, langsung saja diberhentikan. Itu tahun 1979. Jadi, saya masih sempat di bawah Pak Tjokro (bekas Gubernur DKI Jakarta, Tjokropranolo). Waktu di bawah Pak Tjokro saya ditahan. Yang menahan Pak Eddie Nalapraya (saat itu Asisten Intel Kodam Jaya, Kolonel Eddie Marzuki Nalapraya). Tapi, hubungan pribadi saya dengan dia baik. Waktu di penjara, sering dia *nengok*. Malah, waktu dia wakil gubernur, dia pernah menengok. Padahal, dia yang menangkap saya itu.

DI MUSALA BERSAMA PARA KERABAT:
Kepada para kerabatnya, Fatwa menceritakan pengalamannya selama mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

Waktu itu, Panglima Kodamnya siapa?

Norman Sasono. Sesudah itu kan saya sering 'menginap', ditahan beberapa hari. Sehingga, ada istilah Sudomo itu, Fatwa tidak ditahan tapi menginap saja. Dulu yang diejek di berbagai surat kabar kan begitu, Fatwa tidak ditahan cuma menginap saja.

Sama Pak Domo baik?

Ya, baik. Saya kan pernah jadi warga Angkatan Laut, sebagai imam, tentu kenal sama dia. Bunga itu (Fatwa menunjuk karangan

bunga di atas bufetnya) kiriman dari Pak Domo waktu lebaran yang lalu.

Banyak yang berpendapat, Anda yang memberi kontribusi sehingga Bang Ali menjadi politisi...

Ah, itu kan pendapat orang. Saya membantah itu. Sebagai pembantu beliau, tentu kewajiban saya memberikan input. Dipakai atau tidak, terserah dia. Jadi, tidak benar kalau saya membentuk pola pikir Pak Ali. Beliau orang besar, kok. Pak Ali kan kuat membaca.

Apakah karena dakwah Anda dianggap keras yang membuat Anda dipecat dari DKI?

Ndak. Sejak saya masih pegawai kan. Waktu saya khotbah di Pulomas, yang akhirnya diinterogasi itu, saya masih pegawai. Berikutnya di lapangan UI, saya masih pegawai.

Apakah Anda merasa ada tindakan petugas yang salah terhadap Anda?

Ya, pokoknya banyaklah itu tindakan oknum yang salah. Saya maafkan sajalah. Karena itu dulu, saya pernah menuntut Menhankam, Panglima ABRI tahun 1982 atas perkara perdata. Panglimas Kopkamtib saya tuntut. Apa *ndak* pernah dengar itu?

Apa yang Anda alami akibat melakukan tuntutan itu? Dulu Anda sempat diclurit segala...

Saya disuruh mencabut tuntutan. Saya enggak mau, lantas saya diclurit. Saya menuntut perdata karena saya menderita waktu ditahan. Saya pernah gegar otak karena disiksa di tahanan. Saya dilarang khotbah. Tapi, sudahlah, *ndak* usah diungkit. Sudah lewat itu. Yang lalu, ya,sudah.

Prinsipnya, tidak ada kesepakatan dilarang bicara...

Tidak ada larangan, tapi kalau orang lain jadi tersinggung kan bisa dipersoalkan. Persoalannya begitu.

Bang Ali saja sudah bisa bicara...

Ya, Bang Ali lain, dong, ukurannya. Kalau saya ini kan gampang digini... (Fatwa menjewer sendiri telinganya). Kalau dibandingkan sama Pak Ali enggak bisa, dong. Harus lihat masing-masing posisi. Orang itu kan beda-beda.

Apakah Anda merasa jadi korban politik?

Sama dengan Pak Hoegeng itu. Sebenarnya, saya anggap sebagai suatu amal saja. Kalau Pak Hoegeng bilang dia merasa terhormat, saya istilahkan saja itu sebagai amal. Mudah-mudahan Tuhan meridai.

Selama di penjara Cipinang, Anda pernah bertemu dengan Subandrio (bekas menteri luar negeri, wakil perdana menteri, kepala Badan Pusat Intelijen, yang sekarang menjadi terpidana seumur hidup)?

BERKUMPUL KEMBALI:
Terali besi ditinggalkannya. Fatwa kini berkumpul kembali bersama istri dan anak-anaknya.

Dengan Subandrio saya sering jalan-jalan. Tapi, kadang-kadang, sudah datang pikunnya dia. Kalau yang lebih sering bicara Omar Dhani (bekas kepala staf AURI, terpidana seumur hidup).

Bagaimana dengan narapidana politik lainnya?

Mereka itu sebenarnya sangat mendambakan kebebasan, sudah 27 tahun. Ya, sebenarnya, tahanan politik dari kalangan Islam juga, dulu, melalui seorang pengacara, kan pernah *appeal* kepada presiden untuk memberikan amnesti. Sampai sekarang *ndak* ada.

Itulah tadi, saya singgung, tentang Pak Munawir. Katanya, sudah bicarakan dengan Pak Harto. Demikian *appeal*-nya pada waktu itu. Dan lagi, kalau saya dibebaskan sendiri, itu apa namanya, dong. Kalau saya sendiri diberikan keringanan kan kurang baik. Buat diri saya sendiri tidak baik.

Waktu itu, Pak Munawir mau menolong Anda sendiri?

Enggak. Masalahnya, dari teman-teman saya banyak memberikan, seperti Nurcholish dkk., pernah Pak Munawir mengecek kepada dia, Fatwa ini bagaimana. Nurcholish bilang, Fatwa itu sangat Pancasilais dan moderat. Jadi, kesaksian teman-teman saya yang banyak tukar pikiran dengan Pak Munawir. Pak Munawir punya niat baik, yang kemudian berupaya mencari jalan supaya hukuman saya diringankan. Istri saya diundang ke rumahnya pada tahun 1990. Kemudian, saya dikirimi buku-buku.

Bagaimana dengan H.M. Sanusi?

Sanusi sebenarnya bukan garis keras. Saya kira, dia Pancasilais.

Anda akan menjadi anggota ICMI?

Ya, saya beli saham Republika. Dalam formulir itu membeli saham kan otomatis jadi anggota.

Saya memang berpendapat, ICMI tidak usah mengumpulkan anggota secara massal. Ya, orang-orang berpendidikan yang pantas sajalah. Intelektual sajalah. Tapi, Pak Habibie maunya asal tidak buta huruf sajalah. Buat apa?

Itu salah satu kritik saya kepada ICMI. Buat apa? Bagi-bagi, dong, kepada yang lain. Masa, asal tidak buta huruf bisa menjadi anggota ICMI. Merekrut secara massal itu, jadinya seperti politik. Katanya bukan organisasi politik, tapi itu nyatanya apa bukan politik.

Bagaimana dengan Habibie dan ICMI?

Saya enggak kenal secara pribadi, tapi saya pernah kirim surat, saya mendukung pembentukan ICMI.

ICMI sekarang pelindungnya Pak Harto...

Ya, bagus itu. ❑

Saya memang berpendapat, ICMI tidak usah mengumpulkan anggota secara massal. Ya, orang-orang berpendidikan yang pantas sajalah. Intelektual sajalah

Krisis dan Keuangan Menjerat Arafat

Pemimpin PLO, Yasser Arafat, didesak mundur karena krisis politik dan salah urus keuangan organisasi gerakan kemerdekaan Palestina itu. Bagaimana PLO menggali dan mengelola modalnya?

Yasser Arafat, pemimpin karismatis Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), tampaknya, mendekati masa-masa akhirnya. Sidang darurat Komite Eksekutif PLO di Tunis, Tunisia, 26 Agustus lalu, diwarnai desakan kuat agar Yasser Arafat mengundurkan diri.

Tuntutan itu, diduga, merupakan buntut krisis politik dan keuangan yang melilit organisasi gerakan kemerdekaan Palestina yang didirikan pada 1964 itu. Paling tidak, 7 dari 18 anggota komite eksekutif itu, sebelum sidang dimulai, mengancam akan *walk out* bila Arafat berusaha meredam pembicaraan tentang krisis itu.

Krisis yang kini menjerat tubuh PLO itu, oleh para pengamat, dinilai sangat serius dan akan menghancurkan PLO. Mereka, yang mengecam Arafat, memang tidak senang atas kebijakan Arafat selama ini. Terutama, menyangkut salah urus keuangan PLO.

Sebenarnya, menurut para analis, bisnis PLO termasuk kelompok usaha paling sehat di kalangan internasional. Sejumlah sumber tak resmi memperkirakan, PLO memiliki kekayaan melebihi 15 miliar dollar AS. Namun, umumnya diakui, melalui dana nasional Palestina (PNF), PLO menguasai kekayaan sekitar 2 miliar dollar AS.

Bersama berbagai kelompok usaha lainnya, PLO telah menghimpun kekayaan sampai 5 miliar dollar AS. Pada 1983, dana sekitar 600 juta dollar AS, dalam bentuk rekening giro, telah ditarik untuk PNF. Dari jumlah itu, sekitar 100 juta dollar AS berasal dari sumbangan orang-orang kaya Palestina, atau dari negara-negara Arab.

Ketika secara resmi didirikan, PLO memiliki tiga lembaga utama, yaitu Dewan Nasional Palestina, Komite Eksekutif, dan PNF. Untuk menyederhanakan organisasi dan memisahkan pengelolaan bisnis dari politik, agar tidak mengganggu setiap rusuk aktivitas PLO, kemudian PNF mendapat kekuasaan tertinggi.

Dan untuk mencegah PNF terlibat dalam persaingan antarfaksi, PLO pun menjadikan PNF seindependen mungkin. Sehingga, PNF menyerupai departemen keuangan dari sebuah pemerintahan yang sebenarnya. Lembaga itu, secara tetap, mengamati investasi yang mungkin memberikan keuntungan maksimal. Pada saat yang sama, PNF juga menyampaikan laporan yang meyakinkan bahwa setiap sen yang ditanam akan menyejahterahkan rakyat.

Yasser Arafat

Sumber utama pendapatan PNF adalah pajak, sumbangan, investasi, dan *sponsorship* dari negara yang bersimpati. Setiap orang Palestina diwajibkan menyumbangkan lima persen pendapatannya sebagai pajak kepada PLO. Di Libya dan Aljazair, jumlah itu dipotong sebelum para karyawan menerima gajinya.

PNF, seperti halnya setiap faksi di dalam tubuh PLO, memiliki daftar penyumbang tersendiri, yang sewaktu-waktu dapat diminta dana, di atas 100 ribu dollar AS. Bukan rahasia lagi, bahwa sejumlah hartawan Palestina dan para simpatisan Arab, di kawasan Teluk, secara tetap mengirimkan sumbangan kepada berbagai kelompok perlawanan Palestina.

Beberapa pengamat di Barat percaya, PNF ikut menanamkan modal di Wall Street, pasar saham London, dalam bidang usaha teknologi tinggi di Jerman Barat, Perancis, Jepang, dan Belgia, di samping masuk ke dalam bisnis *real estate* di Paris dan London. Menurut beberapa sumber, organisasi itu mempunyai beberapa anak perusahaan di Luksemburg dan Liechtenstein.

Dari segi lain, PLO lebih beruntung dari perusahaan-perusahaan resmi. Mereka tidak perlu membayar pajak, dan bisa masuk ke dalam industri mana saja dengan tetap terselubung.

Namun, seperti halnya hampir semua lembaga duniawi, PLO dan PNF juga mengenal korupsi di dalam tubuhnya. Itulah yang kini ditudingkan ke arah Arafat. Salah urus dalam pengelolaan keuangan itu mengakibatkan jutaan dollar, yang dikumpulkan dari orang Palestina maupun negara-negara pendukung, tak jelas pemakaiannya.

Dana untuk ribuan pengungsi Palestina, sekolah, rumah sakit, dan organisasi sosial banyak yang bocor. Selain itu, gaji ribuan pegawai PLO juga belum dibayar selama beberapa bulan. Tak heran, bila ribuan keluarga pegawai tersebut unjuk rasa terhadap Arafat. Buntutnya, Arafat pun didesak mundur.

Lalu, bagaimana tanggapan Arafat? "Ia mengatakan, gunung, angin, tak akan mengalahkanmu. Seperti itulah ia kini," kata pembantu dekat Arafat.

MALAYSIA

Berebut Kursi Timbalan UMNO

Menteri Keuangan Malaysia, Anwar Ibrahim, menantang Wakil Perdana Menteri, Ghafar Baba, dalam perebutan kursi wakil ketua UMNO. Diduga, Ghafar Baba terpaksa menyingkir dalam persaingan itu.

Inilah pertama kalinya, sejak 1987, kursi "timbalan presiden" alias wakil ketua United Malaysia National Organization (UMNO) akan diperebutkan kembali pada 4 sampai 7 November nanti.

Menteri Keuangan Malaysia, Anwar Ibrahim, yang juga salah satu dari tiga deputi ketua UMNO, 23 Agustus lalu, menyatakan akan merebut kursi yang diduduki Ghafar Baba, kini wakil ketua UMNO. "Demi kesinambungan perjuangan untuk mengangkat martabat umat Melayu dan bangsa Melayu," ujarnya.

Pencalonan itu dilakukannya, kata Anwar, karena UMNO adalah partai yang menggabungkan kekuatan dan pengalaman silam, dengan keberanian dan kebijakan baru. "Tegasnya, memadukan segenap lapisan rakyat, tua dan muda, kota dan desa, petani dan nelayan, pendidik dan pekerja, usahawan dan budayawan, cendekiawan dan teknokrat, untuk bergerak sebagai sebuah tim," kata Anwar.

Sedangkan Ghafar, yang menyatakan tetap berjuang mempertahankan kursinya, mengatakan akan mempertahankan UMNO sebagai sebuah "partai kampung". Memang, ketika didirikan 47 tahun lalu, anggota UMNO terdiri dari orang desa, khususnya petani, nelayan, dan guru.

Menurut Ghafar, bekas guru SD di negara bagian Malaka yang aktif di UMNO pada awal 1960-an itu, kini ada usaha dari golongan bisnis Melayu untuk mengubah haluan partai itu. Dan, UMNO akan dijadikan alat kepentingan mereka, tidak lagi memperjuangkan kepentingan orang desa.

Menurut Ruhanie Haji Ahmad, 44 tahun, politisi muda UMNO, pendukung Anwar yang juga anggota parlemen dari negara bagian Johor, Malaysia telah bangkit dari masyarakat yang agraris ke masa industrialisasi. Karena itu, kata Ruhanie, harus ada kesempatan bagi yang muda untuk memahami gerak langkah Mahathir, agar visi masa depan Malaysia tetap terjaga, bila suatu saat Mahathir turun dari kekuasaan.

Bagi pendukung Ghafar, Bahador Shah, 53 tahun, yang juga sekretaris deputi ketua UMNO, Sanusi Junid, jika Anwar mau menunggu, toh, ia akan mendapat kesempatan menggantikan Ghafar. "Sebab, Ghafar tak akan aktif lebih dari lima tahun lagi," kata Bahador.

Ghafar Baba

Anwar Ibrahim

Melihat kemungkinan perpecahan itu, Ketua UMNO, Mahathir Mohammad, yang juga Perdana Menteri Malaysia, mengingatkan tentang akibat perebutan pos dan secara tradisional membawa pemegangnya menjadi wakil perdana menteri Malaysia itu. "Saya tidak akan memihak kepada siapa pun. Tugas saya adalah menyatupadukan dan mengukuhkan kembali barisan UMNO, termasuk yang kalah dan yang menang," kata Mahathir.

Tampaknya, Mahathir ingin menghindari peristiwa pada enam tahun lalu terulang. Ketika itu, 1987, Ghafar berhasil merebut kursi "timbalan presiden" dari Musa Hitam sebelum Musa mengundurkan diri dari kabinet, dengan alasan tidak bisa bekerja sama lagi dengan Mahathir.

Akibat pertarungan sengit antara tim A, yang dipimpin Mahathir dan Ghafar, dan tim B, yang menggabungkan bendahara UMNO, Tengku Razaleigh Hamzah dan Musa, UMNO dihukum. Namun, Mahathir berhasil mempertahankan kedudukannya dan Ghafar bisa merebut kursi wakil ketua dari Musa. Dan, Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur lalu memutuskan, partai terkuat di Malaysia itu sebagai partai "haram" karena menyimpan anggota "siluman". Partai itu pun otomatis bubar dan anggotanya pecah menjadi dua.

Kemudian muncullah UMNO baru, yang sekarang disebut UMNO, dipimpin Mahathir. Sedangkan UMNO lama, sekarang dinamakan Semangat 46, dipimpin Razaleigh.

Sejak itu, tak ada lagi perebutan kursi ketua dan wakil ketua UMNO. Yang terbuka untuk diperebutkan hanyalah tiga kursi deputi ketua UMNO, yang sekarang diduduki Anwar, Menteri Luar Negeri Abdullah Badawi, dan Menteri Pertanian Sanusi Junid. Selain itu, juga 20 kursi anggota di Majelis Tertinggi.

Di atas kertas, kini, semua pimpinan cabang UMNO dan anggota Majelis Tertinggi sudah memihak Anwar. Ghafar hanya didukung dua cabang UMNO ditambah sokongan dari Abdullah Badawi dan Sanusi Junid. Soalnya, hubungan antara Anwar, Abdullah, dan Sanusi memang "dingin". Meskipun, mereka sama-sama "orang utara", panggilan bagi mereka yang berasal dari sebelah utara Semenanjung Malaysia, tapi mereka bersaingan untuk menduduki kursi wakil ketua UMNO itu.

Jika Mahathir mengundurkan diri dari partai, secara tradisional, pos tertinggi itu jatuh ke tangan wakilnya, Ghafar. Proses estafet kepemimpinan itu, sepanjang sejarah UMNO, berjalan mulus. Sebab, sudah ada kesepakatan bahwa pos ketua tidak akan diperebutkan.

Menurut para pengamat, Anwar harus memanfaatkan peluang merebut kursi itu. Sebab, ia akan sulit menduduki pos yang lebih tinggi kalau membiarkan proses pergantian pimpinan UMNO berjalan secara alamiah.

Meskipun demikian, keputusan akhir berada dalam Majelis Tertinggi atau Dewan Pimpinan Pusat, yang akan menentukan pilihan, melalui sistem pemungutan suara oleh sekitar 1.600 peserta kongres UMNO, 4 November nanti.

EKRAM (KUALA LUMPUR) DAN ISKANDAR

Memprotes Presiden di Dalam Rumah

Penduduk Lagos, ibu kota Nigeria, mogok massal dengan mengunci diri dalam rumah selama tiga hari. Mereka memprotes dan menuntut pengunduran diri penguasa Nigeria.

Tampaknya, belum pernah ada unjuk rasa seperti yang dijalankan rakyat Nigeria. Pertengahan Agustus lalu, ketika malam tiba, suasana malam di Lagos sunyi-senyap bak kota mati. Itu gara-gara penduduk ibu kota yang berjumlah sekitar enam juta orang mogok massal, dengan mengunci diri di dalam rumah. Toko-toko pun tutup dan kegiatan bisnis lumpuh.

Akibatnya, kereta api dan bus-bus umum pun mendekam di stasiun. Di jalan-jalan Lagos yang lengang, hanya ada ribuan anggota polisi dan tentara yang berpatroli.

Aksi mengurung diri penduduk Lagos itu berlangsung selama tiga hari. Mereka memprotes kebijakan pemerintah Nigeria, yang dipimpin Mayor Jenderal Ibrahim Badamasi Babangida. Menurut majalah *Time*, penduduk Lagos dan rakyat Nigeria menolak kehadiran rezim militer Babangida, yang membatalkan pemilihan presiden pada 12 Juni lalu.

Aksi unjuk rasa itu, tampaknya, merupakan buntut dari janji Babangida di masa silam. Ketika mengambil alih kekuasaan delapan tahun lalu, Babangida berjanji akan menyerahkan tongkat kekuasaannya lewat pemilu yang demokratis. Untuk itu, ia membentuk dua partai politik, yakni Partai Demokratik Sosial (SDP), yang condong beraliran kiri, dan Konvensi Republik Nasional (NPC), yang beraliran kanan. Babangidalah yang memilih ketua partai-partai itu.

Namun, ketika seorang miliarder industrialis kandidat dari SDP, Moshood Abiola, memenangkan pemilu, Babangida ingkar janji. Ia menolak hasil pemilu itu. Bahkan, ia menuding ada kecurangan dan penyuapan dalam pemilu tersebut.

Sebelumnya, sejak pemilu Juni lalu, rakyat Nigeria sudah menunjukkan ketidakpuasannya terhadap pemerintahan Babangida, dengan berdemonstrasi di jalan-jalan. Hasilnya, 100 orang demonstran tewas diberondong peluru petugas keamanan.

Meskipun begitu, para tokoh antipemerintah Babangida, yang menggerakkan demonstrasi itu, tak kapok. Mereka, yang mengaku sebagai pejuang demokrasi, menuntut pemerintahan Babangida turun karena ia telah begitu lama membelenggu demokrasi negeri itu.

THE ECONOMIST

UNJUK RASA:
Penduduk Lagos melakukan unjuk rasa menentang pemerintahan Babangida

Situasi di Nigeria, ketika itu, mirip saat bangkitnya ***people's power*** yang menggulingkan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos. Akibatnya, pemerintah Nigeria menumpas kelompok-kelompok dan kaum demonstran antipemerintah itu dengan kekerasan senjata.

Sebenarnya, aksi unjuk rasa antipemerintah itu bukanlah yang pertama. Sejak Nigeria bebas dari pendudukan Inggris, 33 tahun lalu, tercatat ada lima kali kudeta dan enam kali pemimpin militer menjadi penguasa. Hanya sembilan tahun militer Nigeria absen dari kekuasaan.

Menurut para pengamat, di bawah rezim militer yang silih berganti, Nigeria, yang terletak di sebelah selatan Gurun Sahara di Benua Afrika itu, sulit berkembang maju. Terbukti, pendapatan per kapita penduduk dari sekitar 1.200 dollar AS pada 1980, menjadi kurang dari 400 dollar AS pada 1991.

Padahal, negara yang berpenduduk kesepuluh terbanyak di dunia tersebut, merupakan negara produsen minyak keempat terbesar di organisasi negara pengekspor minyak (OPEC). Sumur-sumur minyak Nigeria menghasilkan 2 juta barrel minyak sehari. Menilik potensi itu, kata para pengamat, niscaya Nigeria bisa menjadi "Korea Selatan"-nya Afrika.

Di mata rakyat Nigeria, pemerintah militerlah biang keladi kemandekan ekonomi dan kemerosotan demokrasi di negeri itu. Karena itu, kemenangan Abiola dalam pemilihan presiden 12 Juni lalu itu, disambut hangat seluruh rakyat. "Abiola harus memimpin Nigeria. Sebab, begitulah keinginan rakyat Nigeria," ujar novelis Nigeria, Chinua-Achebe, menanggapi kemenangan Abiola itu.

Pemimpin buruh, Didi Adodo, berpendapat senada dengan Achebe. "Melalui pemilu itu, rakyat telah memutuskan, militer harus angkat kaki dari pemerintahan. Mereka mencari orang yang dapat memimpin Nigeria ke masa depan yang lebih baik. Dan, mereka melihat Abiola bisa melakukan itu," ujar Adodo.

Yang jelas, ketika Babangida membatalkan hasil pemilu itu, Amerika Serikat segera menunda bantuan ekonominya dan membatasi kerja sama militernya. Menurut pejabat Amerika Serikat, bantuan itu akan dipulihkan kembali jika pembatalan terhadap kemenangan Abiola digugurkan.

Tampaknya, tekanan Amerika Serikat dan unjuk rasa itu tak sia-sia. Akhirnya, Babangida, 26 Agustus, mengundurkan diri. Ia meletakkan jabatan sebelum menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sementara bukan hasil pemilu. Namun, menurut Abiola, yang sedang berada di London, "Para pengikut saya tidak percaya Babangida mundur. Ia hanya digantikan oleh orang yang dapat dikendalikannya".

ISKANDAR SAE'JAH

Berebut Iklan dan Pemirsa Nasional

Perebutan penonton antarstasiun televisi swasta tidak terhindarkan. Namun, TVRI tidak merasa tersaingi. Sampai kapan?

Sejak 24 Agustus lalu, aksi Juminten, tukang jamu dalam komedi *Lika-liku Laki-laki*, sudah hadir di 10 kota di Nusantara. Jika sebelumnya tukang jamu cantik dalam sinetron RCTI itu hanya bisa dilihat warga Jabotabek (Jakarta-Bogor-Bekasi), Bandung, dan mereka yang punya parabola, kini masyarakat Ambon pun bisa melihat ulah centil artis Ria Irawan itu.

Berkat SK Menteri Penerangan No. 111 tahun 1990, stasiun televisi swasta boleh menyiarkan acaranya secara nasional. Dan, RCTI-SCTV sendiri menghabiskan Rp 50 miliar untuk membangun secara bertahap 24 stasiun sampai akhir tahun ini. "Ini berarti, pemirsa dengan segmen yang beraneka ragam pun otomatis akan kita jaring," kata Komisaris RCTI, Peter F. Gontha.

Ada lima pemancar televisi yang beroleh izin siaran secara nasional, yakni RCTI, SCTV, TPI, AN teve, dan Indosiar Visual Mandiri. Dari yang lima, RCTI, SCTV, dan TPI mengambil kesempatan pertama. RCTI dan SCTV, yang selama ini menampilkan program yang sama, sejak 24 Agustus lalu tampil beda, kecuali untuk acara-acara tertentu seperti *Nuansa Pagi*, *Seputar Indonesia*, dan *Buletin Malam*.

Sedangkan AN teve, yang semula berpangkalan di Lampung dan mengadakan siaran percobaan pada Januari lalu, kini telah mengambil ancang-ancang. September ini, pemirsa di kawasan Jabotabek, Bandung, dan Surabaya akan melihat AN teve dalam gambar yang bersih. "Asal pemirsa mengarahkan antene televisinya ke Kebonjeruk, lokasi stasiun kami," ujar Widyantoro, manajer pemasaran AN teve. Sedangkan Indosiar baru "melayar kaca" pada awal 1994.

Dengan demikian, persaingan bakal seru. Mulai dari pukul 06.00 sampai dini hari, pemirsa tinggal pencet tombol untuk memilih siaran yang disukai.

Terancamkah TVRI? Kepala Seksi Monitoring TVRI, J.B. Wahyudi tidak melihat ancaman dari siaran nasional pemancar televisi swasta itu. "Cakupan siarannya masih jauh dibanding TVRI," katanya. Sebagai perbandingan, dengan 13 stasiun penyiarannya, sampai kini, TVRI menjangkau 40 persen wilayah Indonesia atau 85 persen dari sekitar 185 juta penduduk Indonesia. RCTI, kendati sudah melebar di sepuluh kota dan sampai akhir tahun menjadi 20 kota, masih belum bisa merangkul pemirsa TVRI. "Karena yang bisa menerima siaran itu paling jauh dalam radius 40 km dari kota-kota yang ada stasiun *relay*-nya itu," kata Wahyudi.

HADIR DI SEPULUH KOTA:
Ulah centil penjual jamu, Juminten, dalam sinetron Lika-liku Laki-laki sudah hadir di sepuluh kota di Indonesia.

Jika TVRI — kendati lebih 20 pegawainya telah hijrah ke pemancar televisi swasta — menganggap pemancar swasta bukan saingannya, demikian pula bagi TPI. "Kami tidak takut bersaing dengan televisi swasta yang mulai siaran nasional. Soalnya, segmen TPI sudah jelas," kata juru bicara TPI, Iwan Gardiwan. Segmen itu, antara lain, kaum wanita yang menurut Iwan selama ini menjadi pemirsa utama TPI.

Namun, itu bukan berarti TPI tidak berjaga-jaga "menyambut" kehadiran siaran pemancar swasta lainnya. "Serial *Mahabharata*, *Mahkota Mayangkara*, dan *Kedasih* tetap menjadi andalan kami," kata Iwan.

Dan, karena pemancar swasta hidup dari iklan, otomatis perang tarif iklan pun terjadi. Baik RCTI (yang sekaligus SCTV) maupun TPI kini menahan diri untuk menaikkan tarif iklannya, dengan harapan, agar pemasang iklan akan banyak masuk. TPI malah menurunkan tarif iklannya, yang dulunya Rp 18 juta menjadi Rp 14 juta per spot (30 detik).

RCTI dan SCTV hanya menaikkan sekitar 10-15 persen tarif iklan setelah siaran nasional ini. "Itu pun hanya untuk tarif pada *prime time* dan *gold time* (antara pukul 19.30 sampai 21.00). Sedangkan tarif siaran pagi dan larut malam malah turun," ungkap Kordinator Humas RCTI, Bobby Sael. Sedangkan AN teve memasang tarif terendah, Rp 1.5 juta sampai Rp 6,5 juta per spot, dan pemancar itu belum merencanakan kenaikan tarif.

Di pihak lain, penyewaan film nasional (lama) semakin kompetitif. Sebab, pemancar swasta kini pun sudah memutar film-film itu. "Film yang dulu sewanya tertinggi Rp 10 juta, sekarang menjadi dua kali lipat," kata Wahyudi. Dan, TVRI, yang dananya *cupet*, tentu saja kini makin "ngos-ngosan". Karena itu, pemirsa tak perlu protes jika tiba-tiba ada iklan terselubung di TVRI.

[illegible]

Greenpeace dan Skandal *Rainbow Warrior*

Gerakan Greenpeace sudah bersifat internasional. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sangat militan itu tak jera bahkan oleh sabotase pemerintah Perancis. Padahal, mereka hanya hidup dari iuran dan sumbangan.
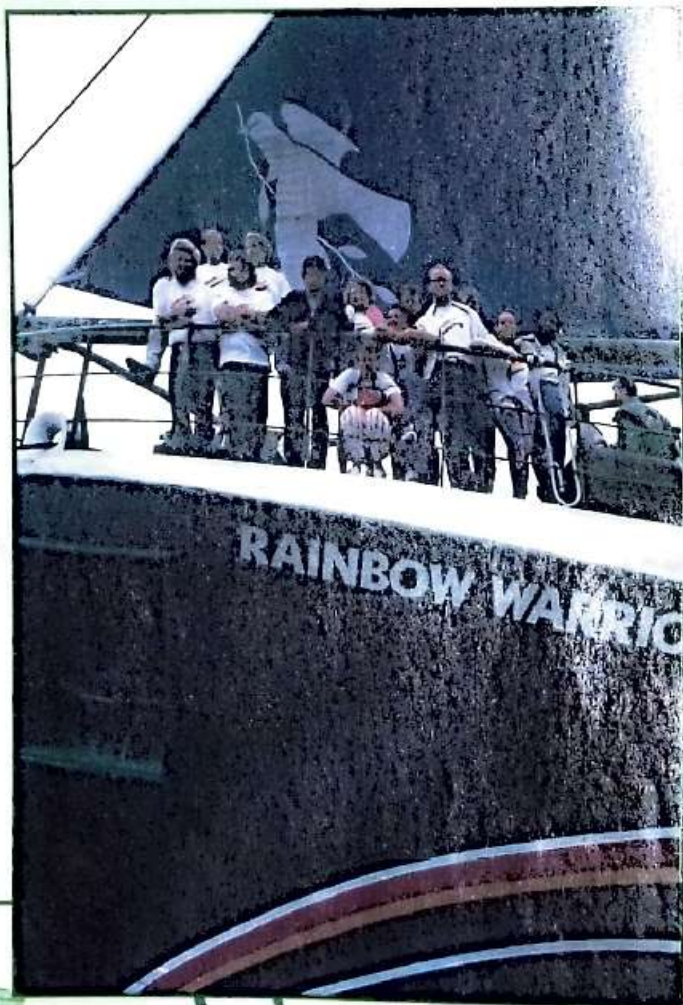
Kampanye lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional menentang rencana pengembangan usaha yang akan dilakukan PT Barito Pacific Timber, milik konglomerat Prajogo Pangestu, muncul di London, akhir Agustus lalu. Kampanye itu dilakukan LSM Greenpeace International dan Friends of the Earth, bersama 11 LSM lainnya. Mereka membujuk agar 275 pengelola dana yang bermarkas di pusat bursa City of London tidak memberikan dukungan keuangan bagi Barito, yang membutuhkan suntikan 250 juta dollar AS (sekitar Rp 500 miliar). Menurut mereka, pengembangan bisnis Barito dalam kayu lapis, pulp, dan kertas, sudah berlebihan sehingga mengganggu lingkungan.

Apa yang dilakukan Greenpeace, khususnya dalam perjuangan membersihkan dunia dari pencemaran, bukan barang baru. Greenpeace yang didirikan David McTaggart asal Kanada itu, kini sudah mencatat anggota lebih dari satu juta orang di belasan negara. Organisasi yang menggantungkan hidupnya dari iuran anggota, sumbangan, dan penjualan produk kampanye lingkungan hidup itu, memang merupakan salah satu LSM internasional yang sangat gigih, terlatih, dan militan.

Gerakan-gerakan mereka, yang antilimbah beracun dan antipercobaan senjata nuklir, menyebabkan mereka ahli di lautan. Kapal-kapal kecil mereka, tak segan-segan menempuh badai dan ancaman maut di tengah laut, menghadapi kapal-kapal besar milik swasta dan pemerintah asing. Yang paling menarik dan bersejarah, tentu saja apa yang menimpa kapal sewaan mereka, *Rainbow Warrior*, yang Kamis, 10 Juli 1985, dibom oleh pasukan komando marinir Perancis, di pantai Pelabuhan Auckland, Selandia Baru.

Tragedi yang menggemparkan dunia karena menewaskan seorang fotografer Portugal, Fernando Pereira, itu telah mencoreng nama Perancis, dan mengakibatkan mundurnya Menteri Pertahanan Perancis Charles Hernu, serta meruntuhkan kredibilitas Perdana Menteri Laurent Fabius ketika itu.

Bahkan, hubungan diplomatik Perancis-Selandia Baru ikut memburuk, karena Perdana Menteri Selandia Baru, David Lange, menolak penyelesaian diam-diam secara diplomatis. Ia tetap menuntut dijatuhkannya sanksi kepada mereka yang terlibat dalam sabotase terhadap *Rainbow Warrior*. Akhirnya, sebulan setelah kejadian, Perancis membentuk komite penyelidik yang dipimpin Bernard Tricot, bekas Sekjen Istana Elysee di bawah Presiden Charles de Gaulle.

Namun, laporan Tricot yang diumumkan pada 25 Agustus 1985, itu, oleh banyak pihak, dianggap sangat tidak kredibel.

Berikut adalah kilas balik skandal *Rainbow Warrior* itu, sebagaimana disiarkan pers Perancis waktu itu, termasuk *Le Monde*, dan berdasarkan buku *l'Affaire Greenpeace* karya Xavier Luccioni.

11 Juli 1985
Attn/Greenpeace Seluruh Cabang
Dari Greenpeace International
Urgent Urgent Urgent Urgent Urgent

Rainbow Warrior Ditenggelamkan dengan Dua Ledakan di Pelabuhan Auckland, Selandia Baru, Sekitar Dua Jam yang Lalu. Diduga Sabotase. Informasi Masih Belum Lengkap. Seorang Kru Hilang.

SVP : Jangan Kirim Teleks atau Menelefon ke Cabang Auckland. Sirkuit Penuh. Berita Selengkapnya Akan Segera Dikirim.

Itulah kawat pertama yang dikirim cabang Greenpeace di Auckland, begitu kapal Greenpeace *Rainbow Warrior* dibom dengan 20 kilogram bahan peledak, yang mengakibatkan jebolnya lambung kapal dalam ukuran 2,5 meter X 2 meter.

Sabotase yang dilakukan pemerintah Perancis terhadap kelompok Greenpeace itu, agaknya, merupakan puncak dari keberangan mereka terhadap aksi-aksi Greenpeace sejak 1970-an. Kelompok itu melakukan aksi-aksinya secara berani dalam menentang percobaan nuklir bawah laut Perancis di pulau atol Mururoa. Pada 1985 itu, dengan kapal *Rainbow Warrior*-nya, mereka akan melakukan pendaratan di pulau karang itu. Upaya yang didukung media massa, termasuk jaringan televisi itu, tentu saja akan menghasilkan publikasi buruk bagi Perancis. Oleh sebab itu, aksi pendaratan tersebut harus dicegah dengan pelbagai cara.

Untuk mengantisipasi tindakan itu, pihak Perancis telah memutuskan untuk mengusut secara tuntas tujuan Greenpeace, serta jumlah dan identitas kapal-kapal yang terlibat dalam ekspedisi, mencegah pendaratan ke Mururoa sambil menghindarkan insiden, meningkatkan kewaspadaan untuk menghindarkan orang-orang di sekitar tempat itu dari bencana langsung maupun tidak langsung, untuk jangka waktu sekarang maupun di masa datang.

FOTO-FOTO: DOK. TEMPO

CHARLES HERNU:
Menteri Pertahanan Perancis

FERNANDO PEREIRA:
Fotografer Greenpeace yang tewas bersama meledaknya kapal Rainbow Warrior.

Awal Maret 1985, Direktur Pusat Percobaan Nuklir Perancis (DIRCEN), Laksamana Henry Fages, menyerahkan sejumlah dokumen tentang Greenpeace kepada Menteri Pertahanan Perancis Charles Hernu. Fages memperkirakan, aksi pendaratan Greenpeace akan dilakukan pada Senin 24 Juni, bersamaan festival kesenian pasifik di Tahiti. Dibahas juga, kemungkinan Greenpeace mengerahkan empat kapalnya ke Mururoa dan Fangatofa. Di antaranya, kapal *Rainbow Warrior* dan *Vega*. Kapal-kapal itu akan merapat di tepi perairan Perancis, dan mereka akan menurunkan para penumpangnya, termasuk tokoh-tokoh kemerdekaan Polynesia. Sebelumnya, Fages sudah mengirimkan laporan itu kepada Kepala Direktorat Jenderal Keamanan Luar Negeri alias dinas rahasia Perancis (DGSE), Laksamana Pierre Lacoste. Tapi, DGSE belum memberikan tanggapan.

Pada pertengahan Maret itu, kapal *Rainbow Warrior* bertolak dari Pelabuhan Jacksonville, Florida, Amerika Serikat, menuju Honolulu,

Hawaii, dan sampai di sana pada Kamis 18 April. Sepuluh hari kemudian, *Rainbow Warrior* bertolak ke Kepulauan Marshall, untuk mengungsikan sekitar 300 warga sebuah pulau kecil yang terkena radiasi percobaan atom Amerika Serikat dulu. Para korban kemudian didaratkan di atol besar Kuenyeen. Dari situ, kapal sewaan Greenpeace itu berangkat lagi ke pulau lain, sebelum akhirnya bertolak ke Pelabuhan Auckland, Selandia Baru, yang dijadwalkan tiba di sana pada Minggu 7 Juli 1985.

Rencana-rencana Greenpeace untuk menghalang-halangi percobaan nuklir bawah laut Perancis selama itu, memang selalu terhambat karena pelbagai alasan teknis. Sejumlah kapal kecil yang rencananya akan mereka pakai, karena kesulitan mencari awak, terpaksa dibatalkan. Sementara, rencana percobaan nuklir Perancis akhirnya berlangsung tanpa aral.

JALAN KAKI:
Anggota Greenpeace di padang pasir Nevada menuju tempat percobaan bom atom

Meskipun demikian, pihak pemerintah Perancis tetap tidak menginginkan aksi pendaratan Greenpeace di atol Mururoa. Menteri Pertahanan, Charles Hernu, sudah mempelajari pelbagai usulan yang disodorkan Laksamana Fages untuk mencegah aksi Greenpeace, terutama secara legal. Antara lain ditetapkan, mempersiapkan segala peraturan yang mungkin, dan bagaimana melacak jaringan komunikasi UHF dan VHF yang akan dipakai armada Greenpeace menuju Mururoa, DIRCEN diperintahkan menangkap siapa saja yang mendarat di sana dan menyita seluruh perlengkapan foto serta videonya. Diputuskan pula, segala hak bagi lalu-lintas sipil di wilayah atol Mururoa dan Fangatofa dicabut, berdasarkan Dekrit 6 Februari 1985 dan Konvensi Hukum Laut PBB 10 Desember 1983, pasal 25 ayat 3.

Sementara itu, sesuai rencana, pada Minggu 7 Juli 1985, bekas kapal penangkap ikan sepanjang 40 meter dengan bobot 418 ton, mendarat di Pelabuhan Auckland. Kapal *Rainbow Warrior* yang dibikin pada 1955 di Amsterdam, dan dibeli Kementerian Pertanian Inggris sebelum dijual kepada Greenpeace dengan harga 85.000 dollar AS itu, baru datang dari Vanuatu, Hibrida Baru.

Di pihak lain, diam-diam, anggota dinas rahasia Perancis dari satuan pasukan katak tempur, sudah bergerak ke Auckland melalui pelbagai cara. Ada yang lewat laut, dengan kapal bernama *Ouvea*, dari Noumea, Kaledonia Baru (Raymond Velche, Eric Audrenc, Jean-Michel Berthelo, Philippe Dubast, Xavier Maniguet), ada yang lewat penerbangan komersial dengan melakukan penyamaran (Alan Mafart dan Dominique Prieur), dan ada yang sudah beberapa bulan ikut bergabung dengan tim Greenpeace di Auckland (Christine Cabon), untuk memperoleh peta Pelabuhan Auckland.

Maka ketika Rabu 10 Juli 1985 tengah malam, atau Kamis dinihari 11 Juli pukul 00.30, sebuah bom meledak di lambung kapal *Rainbow Warrior*. Pemerintah Perancis tidak merasa terkejut. Saat itu, ada 12 orang awak dan seorang fotografer Belanda asal Portugal, Fernando Pereira, 36 tahun, di kapal itu. Padahal, beberapa saat sebelumnya, ada 25 orang pengurus Greenpeace yang hendak rapat di kapal itu. Tapi, karena ada yang mengusulkan agar rapat dilakukan di tempat lain, maka mereka segera turun dari kapal.

Begitu ledakan pertama meletus, seluruh awak kapal berloncatan turun. Namun, karena Fernando harus kembali ke dalam untuk mengambil peralatan fotonya, fotografer yang bekerja untuk agen foto Belanda itu, kemudian menjadi korban dalam ledakan kedua. Kedua bom itu memang dikomando dari jarak jauh. Bila ledakan pertama dimaksud sebagai peringatan agar para penumpang keluar, maka ledakan yang kedua kekuatannya lebih besar dan memang bersifat menghancurkan.

Seorang juru mudi *Rainbow Warrior*, kemudian mengungkapkan, peralatan komunikasi mereka yang canggih dan baru saja dibeli, ikut hancur akibat bom. Padahal, harganya waktu itu sekitar 75.000 dollar AS. Sedang kapten kapal Peter Willcox, sebelum terjun menyelamatkan diri, masih sempat menyelamatkan sejumlah dokumen penting.

AKSI POSTER:
Protes di jalan yang menuju tempat percobaan nuklir.

Dan, hanya 48 jam setelah ledakan bom itu, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Selandia Baru, David Lange, mengecam keras peristiwa itu. Ia mengatakan, "Masyarakat kita sudah terkondisikan untuk berpikir bahwa Anda baru bisa dibilang jantan kalau Anda mampu mengancam orang dengan kepalan tangan," katanya.

Kapal *Rainbow Warrior*, sejak dibeli Greenpeace pada 1978, memang telah menjadi simbol kapal "pemberontak." Ia telah dipakai untuk aksi-aksi melawan kapal pemburu ikan paus dari Uni Soviet, Islandia atau Spanyol. Ia juga dikerahkan melawan para pemburu

anjing laut dari Kanada, penangkap ikan salmon dari Jepang, kapal pengangkut limbah nuklir dari Perancis atau Inggris. Pada September 1979, kapal itu pernah ditangkap Angkatan Laut Inggris karena menentang kebebasan menangkap ikan dan merusak perlengkapan mereka senilai 42.000 dollar AS. Dan beberapa bulan kemudian, nelayan Perancis bahkan sudah membakar kapal itu di lepas pantai Cherbourg, karena berusaha menghalangi kapal-kapal pembawa limbah atom.

Pada 1982, *Rainbow Warrior* berada di perairan Kanada dan bentrok dengan kapal penjaga pantai *Halifax*, ketika mereka menentang pembantaian anjing-anjing laut yang kulitnya dipakai untuk memproduksi mantel dingin. Lalu, kapal itu beroperasi lagi ke Inggris menentang pemuatan limbah nuklir. Di Jepang, pada 1983, kapal itu beraksi menuntut hak-hak hidup bagi ikan salmon. Di Selat Bering, kapal itu menghadapi para pemburu ikan paus. Reputasi *Rainbow Warrior* mulai melejit ketika selama lima bulan ditahan di Pelabuhan Ferreol, Spanyol, karena menentang perburuan ikan paus, dengan denda 130.820 dollar AS. Selama masa penahanan itu, para awak kapal berhasil berbaik-baik dengan para penjaganya, sehingga mereka kehilangan kewaspadaan. Dan suatu malam, kapal *Rainbow Warrior* berhasil melarikan diri. Akibatnya, seorang laksamana Spanyol yang bertugas menjaga kapal itu, diberhentikan dari jabatannya.

Akibat peristiwa pelarian yang spektakuler itu, maka kemashuran Greenpeace pun menjalar ke seluruh dunia. Opini internasional pun sangat tersentuh karena keberanian anak-anak muda, yang bahkan ada yang menikah di lautan itu. Mereka berhasil melecehkan lembaga-lembaga resmi, mengecohkan angkatan laut, dan mengorbankan nyawa mereka untuk kehidupan satwa laut yang langka, dan membangkitkan kembali nostalgia bagi petualangan di lautan. Namun, tantangan mereka yang terbesar adalah menghadapi kekuasaan dunia modern yang semakin mencemari lingkungan hidup manusia dan alam sekitarnya.

BERITA:
Surat kabar Perancis yang memuat berita skandal keterlibatan DGSE atas peledakan Rainbow Warrior.

Sebelum terjadi pemboman, pada 10 Juli, semua *skipper* di kapal *Rainbow Warrior*, sebenarnya telah dipanggil ke kapal untuk rapat koordinasi dan merayakan pesta ulangtahun ke-29 Steve Sawyer, seorang pejabat Greenpeace International. Di situ sudah tersedia anggur, bir, teh, dan kue tar.

Menjelang pukul 20.00, seorang warga Perancis naik ke kapal. Ia mengaku sebagai teknisi dari sebuah perusahaan *off-shore* di Singapura, yang sedang dalam perjalanan liburan ke Tahiti. Ia juga mengaku sebagai simpatisan Greenpeace. Oleh karena itu, ia disambut hangat di kapal, dan ikut makan serta minum di situ. Ia kemudian menawarkan bantuan. Kawan-kawannya di Tahiti, katanya, bisa membantu gerakan antinuklir itu. Ia juga sempat berdiskusi dengan Rein Achterberg dan Chris Robinson, dua veteran kampanye ekologis di sekitar Mururoa. Lalu, orang itu pun pergi. Belakangan, setelah terjadinya pengeboman itu, kelompok Greenpeace di kapal itu mulai curiga, jangan-jangan orang Perancis itu memang bagian kelompok yang bertugas menghancurkan *Rainbow Warrior*.

MURORQA:
Pangkalan tempat penyelidikan nuklir Perancis di Pulau Atol Mururoa, Pasifik Selatan.

Pengeboman itu, mulai terjadi pada pukul 23.55. Sebuah ledakan keras terdengar di bagian lambung kapal. Kapal itu kemudian karam dalam kegelapan. Kepala bagian mesin, Davey Edward, segera menuju ruang mesin. Di situ, ternyata air laut sudah naik setinggi lutut. Tak ada harapan lagi, pikir Edward. Peter Willcox, *skipper* dari Amerika, kemudian memerintahkan semua penumpang ke luar dari kapal. Dalam kekalutan itu, seluruh kru berkumpul di dermaga. Mereka berjumlah sebelas orang. Seorang wanita, Hanna Sorenson, tidak nampak di dermaga itu. Sedang Fernando Pereira, fotografer, naik lagi ke atas untuk mengambil peralatan fotonya. Dan ketika itulah terdengar ledakan yang kedua.

Akibat ledakan keras itu, kapal *MV Explorer*, yang berlabuh di samping *Rainbow Warrior*, terhempas ke dermaga. Kaptennya segera terjaga dan merayap ke jembatan. Ketika dilihat kapal tetangganya itu tengah tenggelam, ia kemudian mengudarakan permintaan bantuan melalui radio. Beberapa saat kemudian, polisi pun berdatangan. "Saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Kami mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Lalu dalam empat menit, kapal tenggelam. Untunglah, kami masih sempat melompat ke dermaga," katanya.

Setelah seluruh kru dihitung, ada dua orang yang tidak muncul. Satu perempuan dan satu laki-laki. Ternyata, Hanna Sorenson sudah

tuan dari kapal satu jam sebelumnya. Dan baru pada pukul 02.00 dinihari diketahui, Fernando Pereira tewas tenggelam, karena terkurung di dalam kabinnya.

Bom peledak itu, yang menenggelamkan *Rainbow Warrior*, ternyata dipasang oleh anggota *Centre d'instruction des nageurs de combat* (CINC), pasukan katak tempur, dari dinas rahasia Perancis, yang berpangkalan di Aspretto, dekat Ajaccio, Korsika.

Pada 12 Juli 1985, dua puluh empat detektif Selandia Baru, dikerahkan untuk melacak pelaku pengeboman itu. Seluruh kesaksian
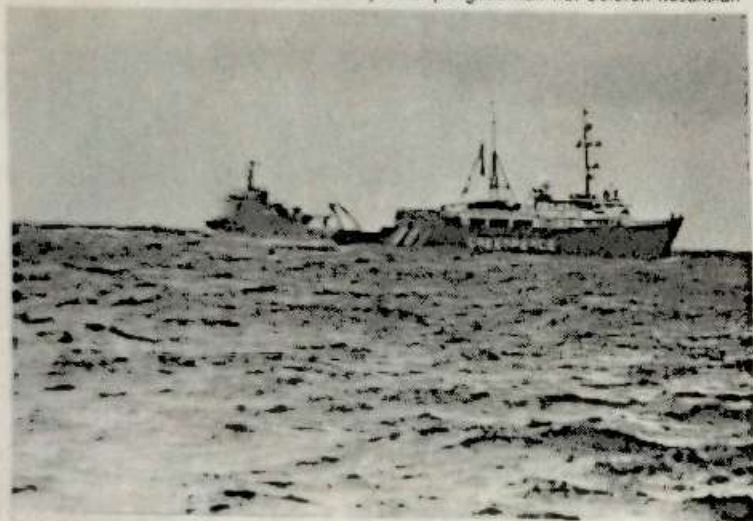
MENUJU LOKASI:
Kapal milik Greenpeace yang akan menuju Pulau Mururoa untuk melakukan protes terhadap percobaan nuklir Perancis.

dikumpulkan dan setiap unsur mencurigakan diselidiki. Kontak pun segera dilakukan dengan pihak keamanan di Tahiti, untuk menyelidiki orang Perancis yang naik ke kapal beberapa saat sebelum peledakan. Satuan polisi kemudian berjaga-jaga di dermaga, karena ada sebuah kapal peti kemas *Helene Delmas* berbendera Perancis, yang tiba di Auckland pada 10 Juli, dalam perjalanannya menuju Christchurch.

Sebuah perahu karet lalu ditemukan di sebuah lubang, tempat yang diduga merupakan tempat disembunyikannya bom. Tidak hanya itu. Para kru *Rainbow Warrior* pun ingat pernah melihat sebuah perahu layar yang melintas di dekat kapal mereka, beberapa jam sebelum ledakan. Dan sekitar 1.000 kilometer dari tempat itu, di Norfolk, pulau kecil di bawah kedaulatan Australia, sebuah *yacht* bernama *Ouvea* yang berbendera Perancis, baru saja merapat di situ dari Selandia Baru. Di perairan Hobson Bay pun, ditemukan tabung oksigen buatan Perancis, yang biasa digunakan pasukan katak tempur.

Namun, hasil yang paling penting adalah polisi berhasil menangkap pasangan "suami-istri" yang mengaku warga negara Swiss, saat mereka mengembalikan sebuah *camping-car* yang mereka sewa sebelumnya. Karyawan perusahaan mobil sewaan itu menyatakan : "Si suami menyatakan, senang sekali menghabiskan masa liburannya. Tapi, si istri kelihatan sangat gugup dan mengaku liburannya sangat tidak menyenangkan."

Para saksi mata menyatakan, pada malam menjelang pengeboman itu, sekitar pukul 21.30, mereka melihat *camping-car* itu berada tiga kilometer dari Marsden Wharf, tempat berlabuhnya *Rainbow Warrior*. Para penumpang mobil *camping* itu nampak berhubungan dengan sekelompok penumpang perahu karet misterius bertuliskan *Zodiac*. Petugas jaga di *Oustboard Boating Club* di Hobson Bay, yang melihat kegiatan di tengah malam itu, sempat mencatat nomer mobil pasangan itu dan segera melaporkan kepada polisi.

Ketika diusut, seluruh dokumen perjalanan pasangan "suami-istri" Alain dan Sophie-Claire Turenge itu, terbukti palsu. Ternyata, mereka adalah warga Perancis bernama Alain Mafart dan Dominique Prieur. Keduanya anggota pasukan katak tempur CINC, yang berada di bawah naungan dinas rahasia Perancis. Maka sahlah keterlibatan Perancis dalam aksi sabotase terhadap Greenpeace itu.

Dan pukul 10.00 pagi, 12 Juli 1985, di kantor pusat Greenpeace International di London, terlihat sebuah poster bertuliskan : *You Can't Sink a Rainbow.* Anda tak bisa tenggelamkan sebuah pelangi. Kantor yang sangat rapih itu, tak henti-hentinya diganggu bunyi dering telefon. Hampir semua penelefon menanyakan informasi yang persis soal peledakan itu. Termasuk permohonan untuk wawancara. Namun, pendiri Greenpeace asal Kanada, David McTaggart, yang mengawali aksi dan kampanye antipercobaan nuklir Perancis di Mururoa, menepiskan pelbagai kecurigaan dan kemungkinan. Perancis? Tunggu dan lihat dulu, jawabnya.

Namun, sebuah skandal telah meletus. Dan beberapa bulan kemudian, ketika bukti-bukti keterlibatan Perancis tak bisa diingkari lagi, Menteri Pertahanan Charles Hernu diminta mengundurkan diri oleh Perdana Menteri Laurent Fabius. Masa pemerintahan sosialis di
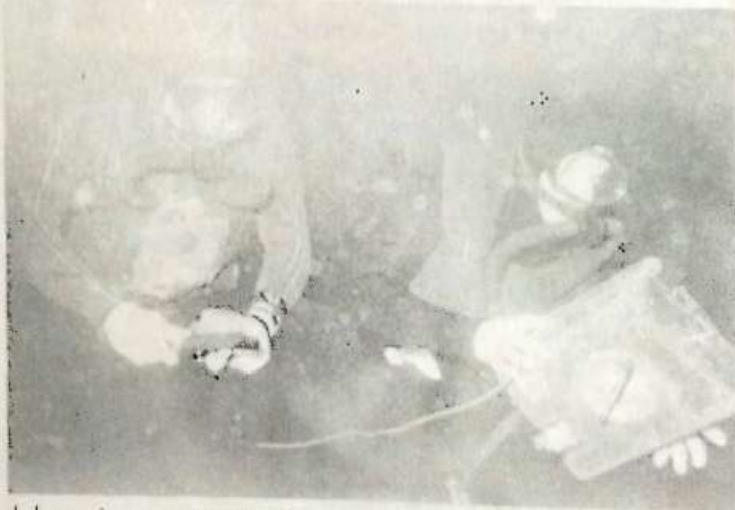
PASUKAN KOMANDO:
Dua orang anggota pasukan komando marinir Perancis ketika hendak meledakkan bom.

bawah Presiden Francois Mitterrand pun, cacat untuk selamalamanya. Sabotase pengecut melawan gerakan lembaga pelindung lingkungan itu, segera dicatat dalam sejarah Perancis modern, dengan tinta yang hitam. Dan karena frustrasi akibat pemecatan itu, bekas Menteri Pertahanan Charles Hernu, sahabat baik Mitterrand, beberapa tahun kemudian, tewas bunuh diri. Ia telah mengabadikan nama Greenpeace dan *Rainbow Warrior* sebagai pahlawan pecinta perdamaian. Dunia pun, kini, tak bisa sembarangan lagi memperlakukan dan meremehkan aksi-aksi yang dilakukan Greenpeace. Karena, tak seorang pun bisa menenggelamkan sebuah pelangi. Karena, *you can't sink a rainbow.*

NURCA M. MASSARDI

Andi Idrus Zainuddin:

Politisi yang Jadi Terdakwa

Andi Idrus Zainuddin, 54 tahun, bekas ketua Dewan Pimpinan Daerah Pergerakan Tarbiyah Islam (Perti) — telah melebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) — Sulawesi Tengah, yang juga direktur CV Central Sulawesi dan politisi PPP, kini mencari keadilan. Sejak 1983, ia berusaha mendapatkan kembali haknya atas kayu hitam (ebony) sebanyak 160 meter kubik yang dulu berharga lebih dari Rp 26 juta.

Ia tidak hanya ingin mendapatkan kembali hak tersebut, tetapi juga berupaya menghindar dari dakwaan terdakwa penadah kayu-kayu curian. Semua itu berawal dari adanya laporan sebuah perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan (HPH), PT Iradat Puri, yang mengaku kayunya hilang.

Zainuddin merasa ada kejanggalan dalam kasus itu. Sebab, laporan Iradat Puri baru disampaikan setelah polisi memanggil Zainuddin. Ketika itu, Zainuddin baru saja selesai mengapalkan kayu ebony sebanyak 160 meter kubik yang akan dikirim ke Semarang. Tetapi, tiba-tiba, muncul panggilan dari kepolisian karena ia disangka membeli dan menimbun kayu hitam tanpa izin, dan dianggap melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 1974 pasal 10 dan 11.

Padahal, menurut Zainuddin, kayu itu miliknya. Buktinya, surat-suratnya lengkap. "Karena surat-surat saya lengkap, sampai kapan pun saya tidak mau dihukum," katanya. Di Pengadilan Negeri Palu, Zainuddin dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. Ia naik banding, dan di Pengadilan Tinggi Palu hukumannya dikurangi menjadi 1 tahun. Kini, ia mengajukan kasasi. Semua itu ia lakukan sendiri. "Mungkin, kasus saya satu-satunya kasus pidana yang diurus terdakwa sendiri ke Mahkamah Agung, tanpa bantuan pengacara," katanya.

PADA 1983, saya merintis bisnis baru, yaitu mengirim kayu ke Semarang. Bertahun-tahun, sebelumnya, saya hanya mengirim kayu ke Bali. Tidak lama setelah usai pengapalan kayu sebanyak 160 meter kubik, saya dikagetkan oleh surat panggilan dari Komando Wilayah Kepolisian 151 Sulawesi Tengah.

Saya diminta datang untuk memberikan keterangan sebagai tersangka/saksi dalam perkara pembelian dan penimbunan kayu hitam tanpa izin. Saya dituduh melanggar Perda No. 5 tahun 1974 pasal 10 dan 11. Karena saya merasa tak ada masalah apa-apa, saya datang.

Ternyata, kasus saya tidak diproses seperti disebutkan dalam surat panggilan. Sebab, saya bisa menunjukkan semua dokumen kelengkapan pemuatan kayu. Tetapi, saya tidak bisa segera mengirim kayu tersebut karena sudah terlanjur dibongkar dari kapal.

Ketika saya sedang mengusahakan lagi pemuatan kayu ke kapal, tiba-tiba datang pengaduan dari Iradat Puri — sebuah perusahaan yang memegang hak pengelolaan hutan di Sulawesi Tengah — kepada pihak kepolisian. Pihak Iradat Puri menyatakan, kayu-kayunya hilang dan yang menjadi tersangka penadah barang curian tidak lain adalah saya sendiri. Maka, saya pun diinterogasi oleh polisi. Saya memberikan bukti-bukti yang saya miliki.

Namun, saya tetap tidak bisa mengirim kayu kepada pemesan di Semarang. Kayu itu lalu disita pihak kepolisian. Padahal, kayu-kayu itu sebagian besar milik saya sendiri yang mendapat izin dari Pemda Sulawesi Tengah untuk menebang pohon di hutan. Kayu-kayu yang akan saya kirim itu merupakan hasil penebangan sebelum izin HPH dikeluarkan. Memang, setelah Iradat Puri mempunyai HPH, kayu-kayu yang saya tebang itu berada dalam areal HPH yang dimilikinya. Apakah karena itu, bisa dikatakan bahwa kayu yang akan saya jual sebagai hasil curian?

BERSAMA ANAK: *Andi Idrus Zainuddin dengan seorang putrinya di Mess Pemda Sulawesi Tengah*

Selain itu, semua stok kayu hitam yang berasal dari atau berada di kawasan HPH itu merupakan bekas penebangan lama para pengusaha non-HPH, termasuk saya. Semua penebangan lama itu termasuk limbahnya (cabang, ranting) berada di kawasan milik Pemda Sulawesi Tengah. Tetapi, saya sudah membayar lunas uang jaminan ganti rugi sebagai syarat untuk menjualnya. Saya juga sudah melunasi pembayaran iuran hasil hutan sebesar Rp 15 juta le-

bih. Sehingga, legalitas kayu yang saya jual adalah sah. Bahkan, Iradat Puri, dulu bernama PT Sakura Abadi Timber, sampai 1983 belum mempunyai izin khusus untuk menebang kayu hitam.

Namun, saya tetap diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Palu. Di pengadilan itu, saya tidak bisa berbuat banyak. Saya ini buta hukum. Sehingga, bukti-bukti yang saya punya tidak sempat diajukan.

Yang lebih memberatkan lagi, beberapa penjual kayu yang kayunya saya beli sudah diadili sebelumnya. Dari tiga orang yang terbukti mencuri, diketahui bahwa yang mereka curi tidak lebih dari sepuluh meter kubik. Berdasarkan bukti-bukti itu, saya menjadi terjepit. Saya dituduh sebagai penadah kayu-kayu curian. Akhirnya, pada 1986 saya mendapat vonis 1,5 tahun penjara.

Karena merasa tidak bersalah, saya tidak menerima vonis itu. Jalan yang bisa saya tempuh adalah naik banding. Berkat bantuan anak dan saudara saya yang sarjana hukum, saya naik banding. Untunglah, dengan berbagai alasan, hukuman saya dikurangi menjadi satu tahun.

Namun, saya tidak puas. Saya tetap yakin tidak ada alasan untuk menghukum saya. Maka, saya pun mengajukan kasasi, dengan beberapa keberatan yang berkaitan dengan tuduhan jaksa. Pertama, saya merasa keberatan bahwa hakim keliru menafsir dan menunjuk KUHAP pasal 194 ayat 2 sebagai dasar hukum dalam penentuan penyerahan dan penerimaan kembali barang bukti kepada Iradat Puri.

Kedua, saya juga merasa tidak bebas memberikan keterangan pada saat pemeriksaan. Sebab, alat bukti berupa surat-surat pemilikan atau asal-usul kayu hitam tidak diikutsertakan dalam berkas perkara. Saya melihat itu sebagai ganjalan.

Sebagai terdakwa saya menyadari, walaupun pengadilan tingkat kasasi tidak untuk mengadili fakta, tidak diikutsertakannya surat bukti itu memang di luar batas kemampuan saya. Itu baru saya sadari saat membuat memori kasasi.

Di antaranya, bukti yang belum disampaikan Iradat Puri yang pernah mengambil kayu dari perusahaan saya dan belum dibayar. Tapi, bukti-bukti itu akan saya ajukan untuk peninjauan kembali, bila saya dikalahkan di Mahkamah Agung.

Keberatan lain, saya merasa barang bukti itu saya peroleh secara legal dan sah dari Pemda Sulawesi Tengah. Karena itu, saya baru dapat dituntut sebagai penadah menurut KUHAP pasal 480 ayat 1, apabila Pemda Sulawesi Tengah (penjual) sudah lebih dahulu dituntut dan dinyatakan bersalah.

Barang bukti dalam perkara itu memang tidak lagi berupa kayu, tapi dalam bentuk uang hasil lelang 160 meter kubik kayu. Kayu itu sudah dilelang dengan harga Rp 24 juta lebih. Saya kira, itu cukup untuk membiayai kuliah dan sekolah anak-anak saya. Sejak adanya kasus ini, perusahaan saya bangkrut. Akibatnya, penghasilan keluarga tidak ada, dan anak-anak sekolahnya terlantar. Bayangkan, anak saya sembilan orang dan cucu saya enam orang.

Saya juga keberatan karena barang bukti yang dipakai tidak akurat, sehingga keputusan yang dibuat pun melebihi fakta. Kayu yang berasal dari Iradat Puri yang dijual kepada saya oleh seorang saksi hanya 448 potong atau enam meter kubik. Tetapi, yang diperintahkan kepada saya untuk diserahkan kepada Iradat Puri berjumlah 160 meter kubik.

Saya yakin, majelis hakim di Mahkamah Agung yang menyidangkan kasus itu akan berbuat bijaksana dan adil dengan mempertimbangkan keberatan-keberatan saya.

Di samping itu, saya juga mempunyai keyakinan bisa dibebaskan. Sebab, Direktur PT Sulawesi Tengah, Abang Djunaedi, seorang kenalan saya, yang menjadi tertuduh dalam kasus yang sama dan divonis 2 tahun di Pengadilan Negeri Palu, diubah menjadi bebas murni oleh Mahkamah Agung. Sedangkan kayu hitam yang disengketakan dan sudah diserahkan kepada Iradat Puri, dikembalikan kepadanya.

Saya sangat berharap agar uang itu bisa kembali. Kalau saya merasa bersalah, untuk apa saya bersusah payah mengurus kasasi, karena sudah banyak uang yang saya keluarkan untuk mengurus kasasi itu. Sudah dua tahun saya berada di Jakarta. Karena uang saya tidak mencukupi, saya mendapat bantuan dari beberapa pejabat Sulawesi Tengah yang membantu saya secara pribadi. Saya mendapat bantuan, karena saya masih dianggap sebagai tokoh masyarakat. Tetapi, tentu saja, saya tidak bisa selamanya menggantungkan diri kepada bantuan mereka.

Pacuro

ANTARA

TIMBUL SENGKETA:
Pengusahaan kayu hutan di Sulawesi Tengah seperti itu, yang kemudian menjadikan Andi Idrus Zainuddin sebagai tersangka.

Joseph P. Salutondok:
"Itu Wewenang Hakim"

SAKSI pelapor, Direktur Iradat Puri, Riswong Hongdoyo, ketika dua kali dihubungi FORUM tidak berada di tempat. Karena itu, FORUM lalu menghubungi Jaksa Penuntut Umum, Joseph P. Salutondok.

Kini, Salutondok tidak lagi bertugas di Palu, tetapi di Kejaksaan Negeri Cianjur. Karena kasus itu sudah cukup lama, dan berkas-berkas perkara berada di Palu, Salutondok menyatakan tidak ingat persis apa yang telah dilakukannya. "Tetapi, bukti-bukti yang dia miliki tidak kuat," katanya. Setelah itu, ia meminta agar FORUM mengutip kontra kasasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Dalam kontra memori, Salutondok menyebut keberatan Zainuddin, yang menyatakan bahwa hakim salah tafsir terhadap KUHAP pasal 194 ayat 2 tidak bisa dilihat sebagai hal yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pertimbangan lain. Sedangkan keberatan lain harus ditolak, kata Salutondok, karena hanya bersifat penilaian yang menjadi wewenang hakim pengadilan tingkat pertama. ❑

Bung Karno, Pancasila, dan Sejarah

Abdurrachman Surjomihardjo
Pakar Sejarah

Jarak dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945, makin lama makin jauh. Dan, selama 48 tahun sampai sekarang, peristiwa itu telah mengalami proses pembentukan citra sejarah. Orang tidak mempertanyakan lagi latar belakang sejarah, arti penting, dan maknanya setiap tanggal 17 Agustus. Hari itu adalah hari nasional.

Namun, pembentukan citra sejarah yang begitu agung, kadang-kadang, terganggu manakala dalam rekonstruksi sejarah, ketepatan, kecermatan, dan ketekunan para sejarawan tak tampak dalam hasil akhir berupa karya tulis. Peminat yang serius terhadap proses terjadinya peristiwa sejarah itu, mempertanyakan kebenaran yang terkandung dalam rekonstruksi sejarah secara ilmiah. Ia terganggu terus pikirannya dan kata hatinya, manakala dalam berbagai buku "sekitar proklamasi" terdapat ketidakcocokan satu sama lain. Apalagi, bila terdapat tokoh yang dalam citra sejarahnya ternyata tidak disebut sama sekali, atau diturunkan derajatnya di bawah tokoh lain yang diragukan kesamaan kedudukannya dalam proses sejarah.

Sejak 1945, bangsa kita pastilah makin cerdas, punya kemampuan evaluasi dan analisis sehingga segera saja merasakan adanya sesuatu yang kurang beres dalam beberapa karya sejarah. Terutama, hal itu terjadi dalam penulisan sejarah kontemporer, sejarah masa kini, yang para pelaku dan saksi mata belum seluruhnya meninggal dunia.

Heboh terjadi ketika buku *Sejarah Nasional Indonesia*, yang enam jilid itu, terbit untuk pertama kali pada 1975. Dalam dua jilid terakhir, peranan tokoh-tokoh sentral dalam republik ini yang sengaja dihilangkan, atau menurut kecaman seorang sarjana asing "sejarawan Indonesia telah membunuh tokoh-tokoh sejarah".

Heboh yang lebih hebat terjadi ketika dalam sebuah karya sejarah disebutkan, bukan Bung Karno penggali Pancasila, tetapi Muhammad Yamin-lah yang lebih berjasa dalam hal itu. Karena, dalam buku Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Djilid I, Djakarta: Prapantja, 1959, pidato Yamin *ditafsir* oleh penulis sejarah sebagai pidato yang lebih sistematis, dan diucapkan sebelum pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, yang dikenal sebagai "hari lahirnya Pancasila". Penafsir itu alpa, pidato Yamin itu terlalu sempurna uraiannya dan sistematis, dan Yamin sendirilah, dalam bukunya yang lain dan dalam indeksnya, mencantumkan Bung Karno sebagai penggali Pancasila.

JOKO SULISTYO

Para pelaku sejarah dan saksi mata, dengan tokoh sentralnya Bung Hatta, menyatakan kesaksiannya, tidak diragukan lagi Bung Karno-lah yang mengucapkan pidato Pancasila, ketika itu diucapkan di luar kepala artinya tanpa teks, dan sampai kepada kita melalui transkripsi laporan stenografi dari Karundeng. Terbit pertama kali pada 1948 dengan kata pengantar Dr. Radjiman Wediodiningrat, cendekiawan yang dihormati kaum politisi dan budayawan.

Pandangan kritis dari para orang tua dan sejarawan, juga menjadi terbuka dalam media cetak mengenai buku-buku Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). PSPB, tampak sekali, ditulis tergesa-gesa. Antara 1983 dan 1993 tercatat, buku pelajaran sejarah untuk sekolah dasar berjumlah 363 judul, di antaranya 221 buku pelajaran PSPB. Untuk sekolah lanjutan tingkat pertama 308 judul, di antaranya 117 judul buku pelajaran PSPB. Untuk sekolah lanjutan tingkat atas berjumlah 190 judul, di antaranya 67 judul buku pelajaran PSPB.

Betapa cerobohnya penulisan PSPB, ternyata dari sebuah buku yang berjudul "2.000 Tanya Jawab PSPB" untuk sekolah dasar. Orang dewasa pun kalau diuji berdasarkan 2.000 tanya jawab itu sudah pasti *teler* duluan.

Mengapa dalam hal itu terjadi suatu pandangan kritis dan heboh di berbagai media massa? Karena, dalam banyak hal, para penulis sejarah tidak menggunakan sumber primer secara luas yang memang sulit dicapai. Sedang Arsip Nasional Republik Indonesia yang kita punyai, belum merupakan tempat koleksi yang lengkap mengenai arsip-arsip Republik Indonesia.

Dalam persoalan seperti itu, sungguh berat bagi penulis sejarah untuk dapat melakukan rekonstruksi sejarah ilmiah secara cermat dan tepat. Legenda, dan bukan sejarah yang tepat dan cermat tumbuh di kalangan masyarakat. Pembentukan citra sejarah lebih banyak terjadi daripada rekonstruksi sejarah.

Maka benarlah ucapan seorang arif, bahwa bangsa yang tidak mempunyai sejarah adalah bangsa yang bahagia, karena bangsa itu tidak akan dituntut untuk menulis sejarahnya secara benar, cermat, dan tepat. Tetapi, proses pembentukan bangsa Indonesia telah terjadi. Dua tahun lagi akan genaplah Republik Indonesia berusia 50 tahun, dan bangsa Indonesia, mudah-mudahan, tetap bangga sebagai bangsa yang mempunyai sejarah. ❑

Selamat

atas peresmian

YAYASAN GINJAL NASIONAL INDONESIA
(NATIONAL KIDNEY FOUNDATION OF INDONESIA)

Yagina
YAYASAN GINJAL NASIONAL INDONESIA
1993
NATIONAL KIDNEY FOUNDATION NKFI
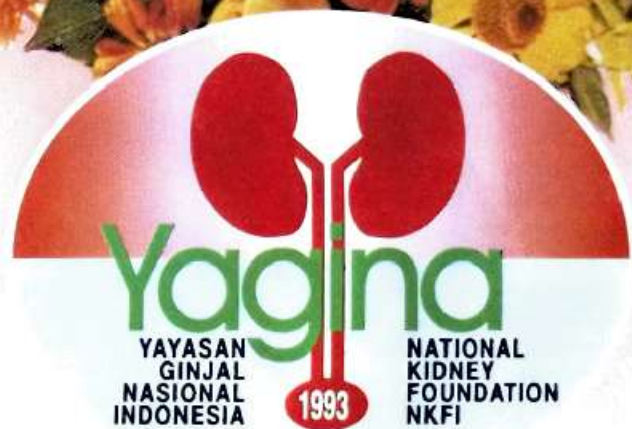
Oleh :
Bapak Jendral (Purn.) Soesilo Soedarman
Ketua Umum Yagina

SUARA PEMBARUAN

Jadi Pengacara

DICKY ISKANDAR DINATA

Dicky Iskandar Dinata menjadi pengacara? "Memang, ada yang menawari saya menjadi pengacara," kata bekas direktur Bank Duta yang kini masih meringkuk di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Menurut pengakuannya, September ini, ia sudah berhak memperoleh asimilasi. Artinya, terpidana kasus permainan valas itu bisa menghirup udara segar di luar tembok penjara. Siang hari, ia bisa bekerja di luar. Malam hari, ia masih pulang ke "rumahnya" di Cipinang.

Saat menunggu masa asimilasi itu, katanya, sebuah kantor pengacara yang cukup beken di Jakarta menawarinya bergabung sebagai *corporate lawyer*. Ia mengaku belum berani menerima tawaran itu. "Kita lihat saja. Yang jelas, saya tidak akan terjun ke dunia perbankan," ujar cucu pahlawan nasional Otto Iskandardinata itu. Trauma pada masa lalu? "Enggak mau saja," katanya.

Dicky, yang menerima remisi dua bulan 20 hari pada peringatan hari kemerdekaan Indonesia itu, di lembaga pemasyarakatan mendapat julukan "menteri perindustrian". Julukan itu, agaknya, berawal dari kepercayaan pihak lembaga pemasyarakatan kepada Dicky untuk mengoordinasi rekan-rekannya membuat kerajinan tangan. "Ya, seperti bikin sablon ini," kata Dicky, seraya menunjukkan hasil sablon di celana jinsnya.

Ia mengaku tidak sulit berhubungan dengan rekan-rekannya, termasuk dua rekan sekamarnya, terpidana pembunuhan. Namun, temannya yang paling akrab adalah Arswendo Atmowiloto, yang dijuluki "menteri penerangan" di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. "Tapi, IQ saya jongkok bergaul dengan Arswendo," kata Dicky bercanda. ☐

Menjual Karcis

NIA ZULKARNAEN

Sebelum konser Michael Jackson di Singapura, 29-30 Agustus lalu, Nia Zulkarnaen termasuk artis yang terlihat wara-wiri Jakarta-Singapura. "Saya kan harus mempersiapkan akomodasi di sana buat pembeli karcis saya," katanya. Bersama temannya, Taka Mantik, Nia memang menjual karcis pertunjukan Michael Jackson sebanyak 200 lembar.

Ide menjual karcis pertunjukan itu bermula ketika ada berita Michael tidak jadi manggung di Jakarta. "Waktu ditawari Taka buat jual karcis Michael saya langsung setuju. Apalagi, saya yakin penggemar Michael Jackson di Indonesia banyak," katanya.

Untuk memasarkan karcis itu, Nia mengaku tak memakai iklan di media massa. "Saya cuma pakai selebaran saja," katanya. Toh, itu pun cukup manjur. 150 lembar karcis perpaket yang disediakan sudah amblas. Kebanyakan memang dibeli rekan-rekan artisnya. "Denny Malik saja pesan 40 karcis," katanya. Agar pembeli karcisnya tidak kecewa. Nia memang sengaja pergi ke stadion yang akan dipakai konser. "Saya potret, di mana kami akan duduk nanti. Jadi, saya tahu banget kondisinya," katanya.

Karcis yang ditawarkan Nia dan Taka memang cukup murah dibandingkan agen perjalanan. "Perpaket kita jual 460 dollar AS. Itu sudah termasuk hotel, akomodasi di Singapura, tiket Garuda, dan tiket Michael. Pembeli kami jelaskan perincian biayanya. Soalnya, saya enggak mau main kotor sih," katanya. Harga itu bisa ditekan, kata Nia, karena ia bekerja sama dengan Hilton Hotel. "Kami memesan satu lantai hotel," kata artis yang kini tengah sibuk *shooting* sinetron RCTI, *Bunga-Bunga Kehidupan*.

Di tengah kesibukannya itu, Nia tak melupakan sengketanya dengan *Blue Pages*. "Masih jalan kok. Insya Allah, kalau saya sudah selesai *shooting* Bunga-Bunga Kehidupan, kasus itu akan dibawa ke meja hijau," kata Nia. ☐

Dua-duanya Enak

TIKA BISONO

Penyanyi Tika Bisono seakan beralih profesi jadi "tukang seminar". Penyanyi bersuara lembut dengan album *Pagi* dan *Ketika Senyummu Hadir* itu, belakangan ini sibuk menghadirkan senyum di berbagai arena seminar. Mulai sebagai pembawa acara, moderator, sampai menjadi pembicara. "Hampir tiap *weekend*, saya pasti seminar," katanya.

Jika diminta menjadi pembicara, pengagum Bung Karno ini mengaku menyiapkan diri secara matang. "Semua makalah, saya tulis sendiri," katanya. Tapi, kegiatan seminar tidak membuat Tika mengundurkan diri dari dunia tarik suara, kan? "Habis, dua-duanya enak," kata gadis

Rp.7 Miliar untuk Sentul

JENNY RACHMAN

Belakangan, artis peraih dua Citra, Jenny Rachman, sering terlihat mondar-mandir Jakarta-Sentul. Tapi, kehadirannya bukan untuk pengambilan gambar film atau sebagai model iklan sirkuit bertaraf internasional itu. Bukan pula lantaran ia ingin beralih profesi sebagai pembalap. "Saya lagi cari iklan untuk Sentul," katanya.

Keterlibatannya sebagai pencari iklan untuk Sirkuit Sentul bermula enam bulan lalu. Saat itu, dalam acara pencarian dana untuk korban bencana alam Flores, Jenny bertemu dengan Hutomo Mandala Putra. "Saya *ditawarin* Pak Tommy buat cari iklan. Ya, saya terima. Soalnya, saya memang suka dunia *advertising*," kata direktur utama Global Pratama, yang bergerak di bidang *broadcast advertising* itu.

Jenny, yang kini bergerak di bawah bendera Humpuss Madya Pratama, ternyata cukup lincah menjaring iklan. "Alhamdulillah, saya bisa dapat sekitar Rp 7 miliar buat sirkuit Sentul," katanya. Jumlah itu termasuk iklan pelumas Mesran dari Pertamina.

Ia mengaku tak punya kiat khusus dalam memasarkan Sentul. "Yang jelas, Sirkuit Sentul kan bertaraf internasional dan punya masa depan bagus. Jadi, Sentul adalah sarana yang tepat untuk promosi berbagai produk," kata ibu satu anak itu sedikit berpromosi.

Bergelut dalam bidang periklanan bukan berarti Jenny meninggalkan dunia seni. Tawaran untuk main film, katanya, selalu mengalir. "Tapi, sampai sekarang belum ada peran yang cocok," katanya.

Hajjah yang biasanya tampil berjilbab itu, di Sentul tampil dengan rambut tergerai. Kok, jilbabnya dilepas? "Memang, saya kadang-kadang tidak pakai jilbab, tergantung situasi dan kondisi di mana kita berada," kata Jenny. ❑

---

yang pernah terpilih sebagai Putri Remaja Indonesia 1978 itu.

Keterlibatannya dalam banyak seminar itu, bermula dari ajakan psikolog Sarlito Wirawan, dosen Tika, menjadi moderator seminar pada 1983. Saat itu, Tika masih kuliah di Fakultas Psikologi UI. Eh, dari moderator, terus meningkat menjadi pembawa makalah, menggantikan Sarlito Wirawan. "Lama-lama, saya berani sendiri," katanya.

Kini, anak pertama yang masih *sorangan* itu, sibuk menjadi panitia Konferensi Periklanan Asia. Dalam panitia itu, Tika, pengasuh rubrik konsultasi psikologi di beberapa media massa dan radio, menjadi Direktur Pelaksana Harian. "Meskipun kongres baru 1995, tapi persiapannya sudah mulai dari sekarang," katanya.

Untuk yang satu ini, ia pun tak mau setengah-setengah. Sampai, ia meninggalkan sebagian tugas di perusahaannya sendiri, SAJI Indonesia yang bergerak di bidang konsultasi pemasaran. "Sebagai *owner*, saya kan sedikit bebas," katanya. ❑

Diwawancarai Anak Sendiri

MOERDIONO

Kejadian itu, selama ini, agak tak lazim. Moerdiono dan anak sulungnya, Ninuk Mardiana, tampil di Istana Merdeka pada 17 Agustus lalu. Baru kali itulah, Moerdiono mengajak keluarganya menghadiri hari ulang tahun proklamasi Indonesia.

Seusai acara, Moerdiono sudah ditunggu wartawan. Kali ini, Moerdiono memberikan keterangan pers di teras samping Istana Merdeka. Ninuk, yang telah menjadi wartawan *Kompas* sejak sembilan tahun lalu, tak kalah gesit dengan wartawan lainnya. Dengan sigap, Ninuk, yang saat itu memakai kebaya merah muda, mengeluarkan buku kecil dari tasnya dan sibuk mencatat keterangan sang ayah tentang kehadiran Jenderal (Purn.) A.H. Nasution dalam acara itu.

Sambil tersenyum, Moerdiono melirik tingkah putri sulungnya itu. Wartawan lain yang menyaksikan adegan itu sempat tersenyum geli. Maklum, ayah dan anak itu serupa benar. Sementara itu, sang ibu dan ketiga adik lelakinya terus-menerus memandanginya. Barangkali, baru kali itu pula mereka melihat Ninuk mewawancarai ayahnya sendiri.

Sebelumnya, Ninuk memang tak pernah mau memburu berita di lingkungan Istana dan Sekretariat Negara. Ia juga jarang mewawancarai ayahnya. Jebolan IPB itu mengaku, mungkin tak mau sumber beritanya tahu bahwa ia anak Menteri Sekretaris Negara Moerdiono.

Menurut Moerdiono, Ninuk, yang telah memberinya tiga cucu, sejak dulu memang ingin menjadi wartawan. "Saya sering geleng-geleng kepala lihat ia *reporting* naik motor, boncengan sama temannya. Ya ampun, anak menteri, kok. Kasihan amat, ya, ha...ha...ha.... Tapi, ya, enggak apa-apa, kalau memang itu maunya dia. Bahkan, saya bangga, anak saya mau bekerja keras seperti itu," kata Moerdiono. ❑

Gitty Srinita

Tidak Memperlihatkan Pusar

ajahnya, sekilas mirip Lidya Kandou. Bahkan, ada yang sering menyangkanya sebagai adik peraih Piala Citra 1992 itu. Padahal, sama sekali tak ada kaitan darah antara Gitty Srinita, yang berdarah India, dan Lidya Kandou, yang asli Manado. Kalaupun ada persamaan di antara mereka, yaitu sama-sama bintang film.

Semula, gadis kelahiran Aceh, 27 Maret 1973, itu tak menyangka akan menjadi artis. "Dulu, cita-cita saya menjadi polisi wanita atau dokter," kata artis yang namanya, kini, mulai berkibar sebagai artis layar perak dan sinetron.

Kini, hari-hari mahasiswi tingkat II Akademi Bahasa Asing di daerah Cikini, Jakarta Pusat, tak beranjak dari *shooting* dan foto. Jadwal kegiatan gadis, tinggi 169 cm dan bobot 56 kilogram, itu terbilang super padat. Sejak pukul 5 pagi sampai menjelang tengah malam, ada saja pemotretan dan pengambilan gambar untuk film yang harus dilakoninya. "Untungnya, dosen-dosen saya mengerti kesibukan saya," ujar mahasiswi jurusan ba-

hasa Inggris tahun kedua itu.
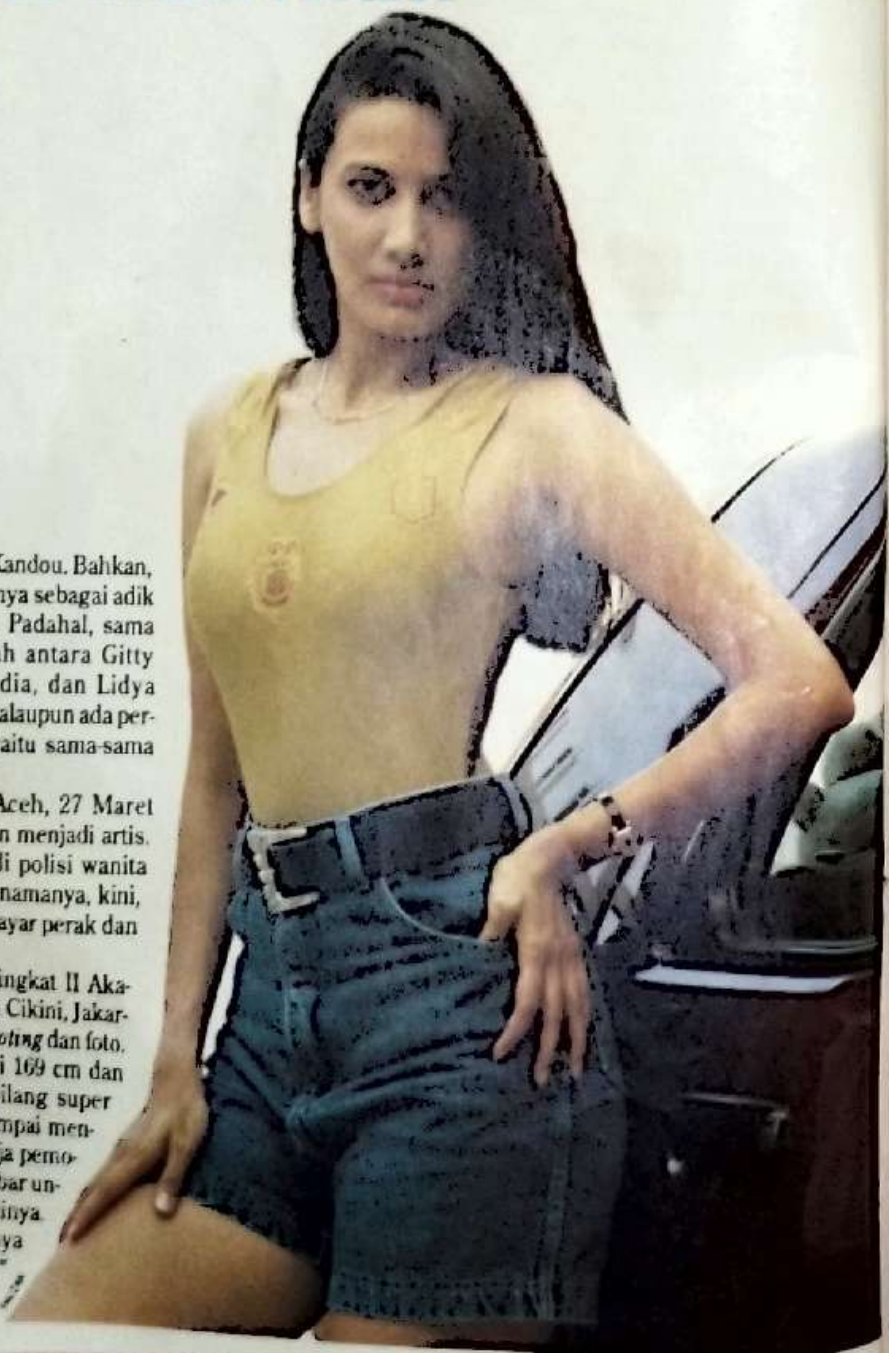
Kariernya di bidang seni peran berawal dari dunia mode, yang ditapakinya empat tahun silam. Kala di sekolah menengah atas, ia sering ikut berlenggak-lenggok di atas *catwalk* memperagakan busana. "Tapi, pasti belum bisa disebut peragawati, soalnya belum profesional sih," katanya.

Berkat keluwesan dan kepiawaiannya bergaya di depan kamera, Gitty sempat meraih juara dalam berbagai kejuaraan. Misalnya, menjadi juara dalam Top Model Kacamata, Busana Serasi, Top Model Photogenic ataupun Top Model Jeans. Semuanya tingkat nasional.

Namun, terjunnya ke dunia film, diakuinya, tanpa direncanakan. "Waktu itu, saya mengantar kakak saya ke studio rekaman. Eh, tiba-tiba, ada sutradara yang menawari main film," kata putri bungsu dari enam bersaudara pasangan Charan Singh, asli India, dan Balbir, Aceh-India, itu.

Dalam film pertamanya, *Pedang Naga Puspa*, Gitty pemerang hanya tampil sebagai figuran. Namun, penampilannya membuat produser lain melirik dan menawarkan peran untuk berbagai film, antara lain, *Suromenggolo, Angkasa Membara, Aji Pamungkas, Wanita Jelmaan, Kamandaka*, atau film-film komedi seperti *Jangan Bilang Siapa-Siapa, Gampang-Gampang Susah*, dan *Bisa Naik Bisa Turun*, yang dibintanginya bersama trio Warkop. Yang terbaru adalah *Selir Sriti II*.

Di tengah kelesuan film layar lebar, dunia sinetron pun dirambahnya lewat serial *Mahkota Mayangkara* dan *Delima*, yang ditayangkan Televisi Pendidikan Indonesia.

Namun, sampai kini, ada yang digusarkan oleh gadis yang selalu menjaga kebugaran dan kerampingan tubuhnya dengan *fitness* dan renang itu. Ada suara-suara yang menuduhnya sebagai bintang baru yang tak keberatan buka-buka busana. "Saya enggak tahu kok ada yang mencap," katanya. Padahal, soal buka-bukaan atau adegan ranjang, "Tak ada satu pun film saya yang beradegan ranjang," katanya.

Toh, ia mengaku dalam beberapa filmnya memang ada produser yang memaksanya untuk melakukan adegan, yang mempertontonkan bagian-bagian tubuhnya yang biasa ia tutupi. "Tapi, selalu saya tolak, karena tidak ada dalam skenario," katanya. Misalnya, dalam film *Skandal Iblis*, Gitty harus memerankan setan bule yang haus seks. Karena Gitty menolak adegan itu, akhirnya sang sutradara menyiasatinya. Caranya, setan bule itu menyusup ke dalam tubuh wanita lain yang diperankan Lela Anggraini.

Akibat tuduhan sebagai artis yang gampang menanggalkan baju, juga merembet pada media massa. Ada majalah yang sampai merayunya tiga kali untuk berpose dengan bikini super mini dan gaya panas. Tapi, akhirnya, yang didapat hanya pose-pose dengan baju yang sesuai ukuran kewajaran menurut persepsi Gitty sendiri. Bagaimana itu? "Tidak vulgar, dan tidak memperlihatkan pusar, misalnya," kata Gitty.

Meskipun tak pernah mengenyam pendidikan akting secara khusus, bukan berarti gadis yang sehari-harinya lebih sering memakai jeans itu mengabaikan seni peran dalam film-filmnya. Dalam film *Suromenggolo*, ia berperan sebagai gadis gila. Untuk itu, Gitty mempelajari karakter orang gila di Rumah Sakit Jiwa Grogol. Bahkan, ia mendapatkan informasi lewat dokter dan perawat di rumah sakit itu perihal seluk-beluk orang yang mempunyai kelainan demikian. "Itu peran yang sulit buat saya," katanya.

Sekarang, gadis itu tinggal menapak lebih tekun lagi perjalanan kariernya. "Saya tidak tahu sampai kapan main film. Saya hanya ingin main film sebaik mungkin, tanpa harus mengorbankan harga diri," katanya.

Hasil keringatnya bermain dalam berbagai film itu — untuk sementara — sudah tampak. Sebuah rumah di Benda Indah dan sedan yang selalu disetirnya sendiri.

Soal pendamping? "Saya tidak ingin suami saya seorang artis," ujarnya. Tapi, dia tak mau menjelaskan, kenapa mentabukan pendamping sesama artis. "Pokoknya nggak mau saja," katanya tegas.

Kini, gadis bermata tajam itu mulai bermain di sinetron komedi *Gara-Gara* yang ditayangkan RCTI. Berperan sebagai Selly, adik Lidya Kandou, yang untuk sementara cuti dari sinetron itu karena hamil tua. "Tapi, bukan berarti saya spesialis aktris komedi atau *action* lho. Saya juga ingin, suatu saat, dapat peran yang lebih serius dan karakter yang menantang," katanya. ❑

Baharuddin:

Karena Status Tak Jelas, Gaji Pun Hilang

Rasanya seperti tergantung tanpa tali. Mungkin, pepatah itu sesuai dengan apa yang dialami Baharuddin, 39 tahun. Pegawai negeri sipil di Sekretariat Bimbingan Masyarakat (Bimas) Dinas Pertanian, Padang Pariaman, Sumatra Barat, itu sejak April 1987 tidak menerima gaji dan statusnya pun tidak jelas.

Menurut Baharuddin, semua itu terjadi karena ia menolak membuat laporan fiktif dan enggan ditugaskan melaksanakan supraintensifikasi khusus (supra-insus) di lokasi yang tidak mungkin dilakukan. Padahal, dalam melaksanakan tugas sehari-hari, selaku penyuluh pertanian lapangan (PPL) Bimas yang merangkap sebagai tenaga honorer di Unit Proyek Perkebunan di Kecamatan Sipora, Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padangpariaman, ia tergolong sukses. Baharuddin berhasil melampaui target 20 persen lebih per tahun. Ternyata, bagi Baharuddin, keberhasilan itu bukanlah jaminan untuk meningkatkan karier.

Sejak gajinya dihentikan, Baharuddin sudah berusaha mendapatkan haknya kembali. Namun, ia tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dari atasannya. Karena itu, Baharuddin menggugat atasannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sudah jatuh begitu, Baharuddin masih tertimpa tangga pula. Sang istri, yang sudah memberikan satu anak, rela pula meninggalkannya. "Saya sempat frustrasi," katanya.

Saya mulai bekerja di Dinas Pertanian setelah saya mengundurkan diri dari jabatan asisten manajer teknis lapangan di PTP VI pada 1979. Saat itu, saya merasa tidak tahan hidup sendirian di rantau orang setelah istri saya yang pertama, Asmariaty, meninggal dunia.

Pertama, saya diterima sebagai karyawan honorer yang ditugaskan sebagai pembantu PPL di Kecamatan Sipora. Tugas yang dibebankan kepada saya, kala itu, adalah menangani berbagai sektor proyek, seperti pembibitan kelapa, penyuluhan pengembangan perkebunan transmigrasi plus menjadi PPL Bimas. Setelah empat tahun bertugas, status saya ditingkatkan menjadi calon pegawai negeri.

Tak lama kemudian, setelah memenuhi persyaratan, saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan pangkat jabatan pengatur muda badan pengendali Bimas. Saya dipekerjakan sebagai PPL. Karena sudah cukup lama menduda, saya menikah lagi dengan Nurleli — yang kemudian memberikan satu orang anak kepada saya.

Selama saya bertugas, tidak pernah timbul masalah. Semua pekerjaan yang dibebankan kepada saya terlaksana dengan baik. Bahkan, saya pun tidak pernah ditegur atasan karena kesalahan dalam bertugas.

Namun, pada 25 April 1987, tiba-tiba saya mendapat foto kopi surat yang isinya, antara lain, meminta saya selaku PPL perkebunan di kecamatan, dimutasikan dari Siberut Utara ke lokasi transmigrasi di Tua Pejat. Alasannya, saya telah banyak makan asam garam selaku PPL di Kepulauan Mentawai, yang ketika itu berkedudukan di Soban.

Selama saya menjabat PPL pertanian di Kecamatan Sipora, saya juga ditugasi berbagai jabatan PPL perkebunan di empat lokasi di Kepulauan Mentawai. Bahkan, hampir seluruh pelaksanaan tugas PPL Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian (masih satu departemen) di kepulauan itu dipercayakan kepada saya. Maklum, tidak semua orang bersedia ditugaskan di Mentawai, yang terpencil dan masih banyak penduduknya yang primitif. Sebelum saya datang, petugas PPL di daerah itu tidak pernah mencapai target. Hasil jerih payah saya itu diakui baik oleh pimpinan proyek maupun oleh masyarakat.

Selain berhasil menjalankan tugas PPL, saya juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Saya aktif di komisariat Golkar, dan menjadi sekretaris RT. Di Golkar, saya malah dipercaya menjadi juru kampanye.

Pada prinsipnya, saya tidak keberatan ditugaskan di mana pun. Karena itu, setelah mendapat foto kopi surat itu, saya menghadap kepada Kepala Dinas Pertanian, Nyonya Nurazmi Yahya. Maksud saya, meminta petunjuk agar dapat bekerja secara baik di lokasi baru.

Namun, saat menghadap, saya tidak mendapatkan petunjuk, tetapi mendapat tugas baru. Secara lisan, saya diperintahkan untuk pindah tugas ke Sikakap. Saya bertanya-tanya. Mutasi tugas ke lokasi transmigrasi Tua Pejat saja belum terlaksana, kenapa saya dipindahkan ke tempat lain?

Saya tidak mau dimutasikan secara lisan. Saya mau bila ada perintah resmi secara tertulis. Jadi, saya bukan menolak tugas. Jika harus melaksanakan tugas itu, saya bersedia dengan catatan saya tidak mau mempertanggungjawabkannya. Artinya, saya bersedia membuat laporan fiktif atau asal bapak senang, tetapi saya tidak mau menandatanganinya.

Saya melihat tugas itu sebagai hal yang tidak mungkin. Sebab, supra-insus yang dibebankan kepada saya di Sikakap itu sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Lokasi dan keadaan tanah adalah penyebabnya.

Setelah kejadian itu, saya tidak merasakan ada masalah yang serius. Namun, ketika saya akan mengambil gaji bulanan, barulah saya tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh atasan. Mungkin, sikap menolak itu dianggap sebagai sikap melawan atasan. Akibatnya, Mei 1987, bendaharawan gaji, Munir Naf, memberitahukan bahwa gaji saya tidak bisa diambil karena dihentikan atasan.

Saya menanyakan surat perintah atasan yang menghentikan gaji saya itu kepada Munir. Jawaban yang saya peroleh, perintah itu disampaikan secara lisan. Tentu saja, saya berusaha mencari jawaban yang pasti dari atasan, Nurazmi Yahya. Tetapi, entah mengapa, beliau selalu menghindar setiap kali saya ingin menemuinya.

Sejak saat itu, gaji saya dihentikan. Dan, surat-surat yang saya ajukan untuk mengurus kenaikan gaji berkala, tidak ada hasilnya. Sampai sekarang, saya tidak tahu status kepegawaian saya, apakah masih tetap sebagai pegawai negeri atau sudah dipecat. Tidak ada keterangan yang bisa memberi jawaban.

Karena harus menghidupi istri dan anak, saya tidak bisa berdiam diri terus. Maka, mulailah saya berusaha membuka toko kecil. Pelan-pelan, usaha saya mulai menampakkan hasil. Rupanya, Tuhan masih memberi cobaan. Jumat malam, 15 Agustus 1990, toko itu dilalap si jago merah sampai tak bersisa.

DI DEPAN RUMAH:
Baharuddin di depan rumah orangtuanya.

Kini, yang masih bisa saya harapkan sebagai penghasilan hanya honor dari Dinas Perkebunan. Honor yang saya terima selaku tenaga honorer proyek yang diperbantukan di perkebunan memang tidak dihentikan. Tetapi, jumlahnya kecil sekali dan tak memadai untuk membiayai istri dan anak saya.

Sudah gaji saya dihentikan, toko saya terbakar pula. Tampaknya, belum cukup cobaan yang ditimpakan kepada saya. Istri saya tidak tahan hidup dalam kondisi seperti itu. Akhirnya, saya harus kehilangan istri saya yang kembali kepada orangtuanya dengan membawa anak kami. Ia pergi tanpa pamit.

Kami memang belum resmi bercerai. Namun, dengan kepergian tanpa pamit dan kondisi ekonomi saya yang begini, alasan kami untuk bercerai secara resmi cukup kuat. Meskipun saya kehilangan istri dan anak, saya tetap bertahan di Sipora. Saya masih mengharapkan adanya kebijaksanaan lain dari atasan, yang berkaitan dengan status kepegawaian saya.

Tetapi, betapapun saya berusaha tabah, toh, cobaan beruntun itu membuat saya tertekan dan frustrasi. Bahkan, saya terkadang kehilangan keseimbangan berpikir. Berhari-hari, saya mengurung diri. Karena tidak tahan dengan cobaan itu dan perubahan kebijaksanaan belum ada juga, saya terpaksa meninggalkan Sipora dan kembali ke kampung halaman, di Dodok Tunggul Hitam, Kototangah, Kota Madya Padang.

Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, saya terkadang menjual jasa pengetikan skripsi dan surat-surat jual-beli. Selain itu, saya juga dipercaya sebagai sekretaris Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di kelurahan. Semula, saya sudah pasrah dan tidak akan mempermasalahkan lagi gaji saya.

Namun, setelah saya pikir-pikir, jika statusnya mengambang seperti sekarang ini, tentu saya juga akan mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Saya ini menjadi pegawai negeri diangkat secara resmi, masak diberhentikan tidak dengan secuil keterangan pun. Itulah yang membuat saya menggugat Dinas Pertanian. Jadi, bukan karena masalah gaji semata.

PALGUNO DAN MARLIS LUBIS (PADANG)

Kepala Dinas Pertanian Padang Pariaman, Bernawi R.:

" Tidak Ada yang Memaksa"

SAYA tidak tahu persis duduk persoalannya karena baru delapan bulan memegang jabatan. Sepanjang yang saya ketahui, Baharuddin memang bekerja sebagai PPL. Dari berkas-berkas yang ada di kantor ini, saya lihat ia sudah sering dipanggil. Tapi, ia tak kunjung datang. Bahkan, pernah seorang utusan menjemputnya, tapi Baharuddin tidak mau datang.

Gajinya memang tidak pernah dibayar lagi sejak enam tahun lampau. Penyebabnya, ia mangkir kerja. Pekerjaannya di lapangan pun tidak beres. Selain itu, ia tidak mau mematuhi surat keputusan menteri yang memindahkannya ke tempat tugas baru. Juga, tidak ada yang memaksanya membuat laporan fiktif.

Ia tidak memiliki disiplin dalam bertugas. Sebagai pegawai, seharusnya ia siap ditugaskan ke mana saja. Karena itulah, Februari 1990, Kantor Wilayah Departemen Pertanian, Sumatra Barat, mengusulkan agar Baharuddin diberhentikan. Namun, sampai sekarang belum ada balasan dari pusat.

Jadi, saya tegaskan, tidak ada yang memaksa Baharuddin untuk membuat laporan fiktif atau asal bapak senang. Kalau ia menggugat ke pengadilan, saya tidak bisa berkomentar. Namun, ada baiknya masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan.

Perlukah

Koridor demokrasi yang semakin terb[...] akhirnya, sampai pula pada perdebatan: ap[...] sudah saatnya kini ada partai baru di luar [...] Golkar, dan PDI. Pertanyaan itu mencuat lant[...] ada anggapan bahwa belum semua aspirasi p[...] tertampung dalam tiga organisasi peserta pe[...] yang ada. "Partai baru bermanfaat u[...] merangsang kompetisi di antara parpol dan Go[...] yang kini dianggap tak bisa menyalurkan aspi[...]

Marzuki Darusman
Bekas Anggota DPR

Tujuan pembentukan partai baru itu untuk mengarahkan agar tercipta kehidupan demokrasi yang dapat menghargai perbedaan pendapat, dapat bersikap luwes dalam menampung perkembangan kepentingan, dan aspirasi rakyat. Kenyataan selama ini, persoalan-persoalan tersebut tidak tertampung dalam organisasi-organisasi politik atau partai-partai yang ada.

Pembentukan partai baru itu bukan hanya dimungkinkan, tapi harus bisa. Sebab, pada prinsipnya, UUD 1945 memberi kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat dalam artian yang luas. Mengemukakan pendapat bisa diartikan juga sebagai kebebasan mendirikan wadah untuk pendapat-pendapat tersebut.

Berdirinya partai baru mempercepat proses mewujudkan keberfungsian kekuatan-kekuatan politik sebagaimana diinginkan masyarakat. Di samping itu, dapat menumbuhkan kompetisi di antara partai politik (parpol) dan Golkar untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Selama ini kan tidak. Parpol dan Golkar selama 25 tahun hanya berorientasi mengumpulkan massa pendukungnya saja. Karena itulah, dengan tumbuhnya partai baru, kalau tak ingin massa pendukungnya berkurang, mereka tak bisa lagi hanya memberikan janji-janji bahwa aspirasinya akan disalurkan.

Seperti yang terjadi di Jerman, tadinya hanya ada dua partai yaitu Partai Sosialis dan Partai Demokrat. Namun, karena ada suatu kepentingan politik masyarakat yang tak dapat disalurkan, maka berdirilah partai "hijau" (*Greenpeace*). Nah, itu kan bisa terjadi juga di Indonesia, karena UUD 1945 memang membuka peluang untuk hal-hal seperti itu.

Kemudian, di Inggris, terjadi juga penambahan jumlah partai. Sebelumnya, di Inggris hanya ada dua partai yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif. Namun, karena rakyatnya menginginkan partai alternatif, dengan pertimbangan dapat menyalurkan aspirasinya, kemudian berdirilah Partai Demokrat. Jadi, jumlah partai itu memang masih bisa dioptimalkan, asalkan ada kehendak politik pula dari pemerintah untuk membuka peluang itu.

Bila jumlah partai itu sudah dioptimalkan, sudah seharusnya kekuatan-kekuatan politik itu dikembangkan agar bisa berprakarsa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Intinya, diperlukan juga mekanisme politik yang sehat.

Yang akan menjadi hambatan pembentukan partai baru itu, mungkin datang dari alasan bertentangan dengan kesepakatan mengenai penyederhanaan partai. Kalau kita menganggap bahwa demokrasi kita telah dewasa, kesepakatan itu tak bisa dijadikan alasan lagi. Sebab, kondisi politik waktu itu berbeda dengan kondisi politik sekarang.

Jadi, kalau ada yang berkeinginan mendirikan partai baru, pemerintah tak perlu khawatir lagi bahwa kejadian seperti di masa awal kemerdekaan itu akan terulang. Sebenarnya, karena kekhawatiran itu pulalah, pemerintah tidak mengatur mengenai kepartaian dalam bentuk UU yang bersifat umum. UU yang ada sekarang, seperti UU parpol dan Golkar, bersifat spesifik mengatur PPP, Golkar, dan PDI saja.

Kedewasaan politik untuk mengarahkan perubahan politik, dalam hal partai baru, harus disertai keinginan pemerintah untuk mengurangi kecurigaan-kecurigaan, bahwa gagasan itu tidak merongrong Pancasila dan UUD 1945.

Kekuatan-kekuatan kepentingan politik yang hendak mendirikan partai baru itu juga harus menyadari kepentingannya. Apa yang perlu dicapai dari partai baru yang diinginkannya itu? Bahwa Partai baru itu perlu, jawabnya memang perlu, asalkan tidak berbentuk seperti partai-partai yang ada sekarang. □
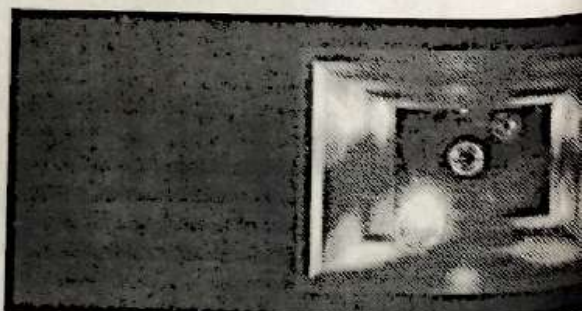
Partai Baru?

aspirasi itu," kata Marzuki Darusman, bekas anggota DPR yang dikenal vokal itu, yang sekaligus menunjukkan bahwa ia setuju ada partai politik baru.

Sebaliknya, Ketua DPP Golkar, Jacob Tobing, menganggap tak perlu ada partai baru karena tak ada masalah dalam kehidupan berpartai. Berikut ini wawancara FORUM dengan **Marzuki Darusman** *dan* **Jacob Tobing**.

Ide atau keinginan untuk membuat partai baru, atau dengan mengubah UU parpol dan Golkar, saya lihat karena ada "limbah" yang tidak tertampung pada ketiga kekuatan politik (PPP, Golkar, dan PDI). Limbah itu terwujud dalam orang-orang yang merasa tidak punya tempat yang pas untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Tidak mau memilih salah satu kontestan alias golput.

Kenapa terjadi limbah? Tidak lain karena tidak ada suasana demokrasi dalam organisasi sosial politik (Orsospol). Bagi mereka, dalam orsospol yang ada sekarang belum sesuai dengan apa yang diimpi-impikan untuk mewakili hati nuraninya.

Saya punya premis, partai tidak perlu terlalu banyak. Alasannya, dengan terlalu banyak partai kita akan tenggelam dalam kehingarbingaran politik. Karena itu, jumlah partai yang ada sekarang sudah ideal.

Memang benar, limbah yang tidak tertampung itu memerlukan penyaluran. Tapi, apakah alternatifnya harus dengan membentuk partai baru? Apakah dengan partai baru lantas masalah akan selesai sampai di situ? Bahkan, bisa jadi, masalah yang timbul pun tidak kalah rumit.

Yang lebih penting itu. Seharusnya memperbaiki kehidupan intern partai itu sendiri. Kita harus membuat partai itu mempunyai suasana demokratis, yang pada akhirnya akan kohesif untuk menarik masyarakat, yang selama ini tidak tertarik pada orsospol yang ada. Dengan demikian, saya punya keyakinan "limbah" yang tercecer itu akan terserap.

Selain itu, harus dilihat masalah itu dengan satu komunitas sistem politik Indonesia. Saya melihat penyaluran aspirasi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh orsospol, tapi juga oleh kekuatan lain. Termasuk organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, pers, dan juga perguruan tinggi. Dengan demikian, kekuatan lain itu pun harus ikut dibenahi. Jika tidak, limbah itu akan terus terjadi.

Bagaimana jika ada yang berpendapat dalam orsospol sendiri sudah tidak bisa diperbaiki, karena ada kekuatan lain. Pendapat seperti itu harus diartikan sebagai upaya masyarakat untuk memperbaiki keadaan. Tuntutan untuk menghidupkan suasana budaya demokratis. Saya sependapat, memang harus ada perbaikan.

Jika ada limbah, lalu diselesaikan dengan partai baru, apa nanti bila partai baru itu ada masalah lagi, bikin partai baru lagi. Itu bagaikan menimbulkan kuman-kuman baru. Begitu seterusnya, ya, kita akan lelah dengan urusan membentuk partai baru.

Bagaimana menghadapi tekanan internasional dalam masalah demokratisasi? Demokratisasi hak kita. Itu kebutuhan kita. Kalau ada yang berpendapat begitu, kita harus melihat dengan skala politik secara global.

Di Jepang, tokoh-tokoh Partai Liberal Demokrat (LDP) yang merasa tidak bisa sepaham lagi dengan partai terbesar, dengan mudah keluar untuk mendirikan partai baru. Kita tidak bisa begitu.

Kenapa begitu? Jepang sudah punya pengalaman berdemokrasi yang lama. Tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan juga kesadaran politik masyarakat sudah tinggi.

Memang, bila dalam partai terjadi perbedaan tajam yang tidak bisa diselesaikan, maka akan menimbulkan friksi. Itu hal yang wajar. Namun, solusinya, bagi kita tidak serta-merta harus melalui partai baru.

Kita harus memperbaiki keadaan. Perbaikan partai harus dimulai dengan membenahi intern partai, supaya ada suasana dialogis antara orang partai dan yang berada di luar partai, termasuk yang selama ini merasa tidak terwakili aspirasinya. Tentu, itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. ❑

Jacob Tobing
Ketua DPP Golkar

Pertarungan Perubahan Politik

Afan Gaffar
Dosen Fisipol UGM

Sejumlah peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini memperlihatkan gejala yang sangat menarik. Hal-hal yang selama ini tidak masuk di akal kita akan terjadi, ternyata benar-benar terjadi. Munculnya Menristek B.J. Habibie sebagai orang yang sangat dipercayai menjadi perantara dalam proses rekonsiliasi, dan menjadi tokoh yang sangat dipercaya oleh Presiden, menyisihkan kekuatan lainnya. Disusul dengan sejumlah langkahnya, walaupun oleh Abdurrahman Wahid dianggap sebagai "kilat yang melintas sesaat, yang tak mempunyai arti apa-apa", ternyata, mempunyai makna yang menarik dalam gejala ke arah perubahan politik.

Kemudian, kunjungan Panglima ABRI dan rombongan kepada Jenderal (Purn.) Abdul Haris Nasution di rumah sakit. Dan, dilanjutkan dengan pertemuan antara Presiden Soeharto dan Pak Nas di Istana Merdeka. Dua tokoh yang berperan sangat besar dalam mewujudkan dwifungsi ABRI. Pak Nas merupakan pencetus ide "jalan tengah", sementara Pak Harto merupakan implementatornya pada masa Orde Baru. Kedua tokoh itu muncul dalam kancah transisi, yang menentukan dari Orde Lama ke Orde Baru. Hanya saja, Pak Nas tersisih dari arena politik nasional karena perbedaan pandangan, sementara Pak Harto merupakan *power holder* yang utuh selama Orde Baru. Hubungan yang membeku selama ini ternyata mencair.

Gejala lain dan menarik, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia oleh Presiden Soeharto, yang diketuai bekas Ketua Mahkamah Agung, Ali Said. Demikian pula, dengan semakin ramainya diskusi tentang hak uji materiil (*judicial review*) dari Mahkamah Agung. Tak kalah pentingnya adalah pertarungan berkepanjangan yang berkaitan dengan kongres PDI yang kacau-balau dan melibatkan kekuatan-kekuatan yang ada di luar partai itu. Sehingga, memang, Soerjadi hanyalah "wayang" saja dalam permainan ini.

Apa makna itu semua? Apakah pertanda bahwa itu awal akan terjadi perubahan politik yang mengarah ke kemungkinan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia? Atau, itu hanya merupakan gejala awal dari pertarungan sesungguhnya yang akan terjadi, ketika memasuki masa transisi dari "pasca" pemerintahan Presiden Soeharto — dengan asumsi, periode 1993-1998 merupakan periode terakhir beliau menjadi presiden — sehingga persoalan PDI itu hanya sekadar pemanasan?

Saya mempunyai kecenderungan memilih kemungkinan pada pertanyaan yang kedua. Jadi, bukan dalam arti perubahan-perubahan tersebut akan meningkatkan kualitas demokrasi, melainkan lebih merupakan persiapan dalam memasuki masa transisi yang dianggap sangat kritis pada 1997-1998.

Tesis pertarungan persiapan itu akan lebih jelas lagi kalau kita mengamati kemungkinan pertarungan persiapan Munas V Golkar, Oktober nanti. Hampir dapat dipastikan, orang atau kelompok mana pun yang akan mampu menguasai Golkar, merekalah yang akan sukses untuk memasuki masa transisi itu. Sebab, Golkar merupakan partai terbesar yang dapat dijadikan wahana untuk menjamin agar kepentingan politik terlindungi. Perdebatan, bahwa siapa yang akan menjadi ketua umum partai terbesar antara keluarga besar ABRI (KBA) dan non-KBA, cukup ramai.

Dengan demikian, tesis perubahan politik menuju demokrasi juga cukup lemah, kalau kita mengantisipasi siapa yang akan mendominasi Golkar, setidaknya untuk masa lima tahun nanti. Pertarungan antara kekuatan utama di Golkar, yaitu antara jalur A (ABRI) dan jalur B (Birokrasi) cukup ramai.

Kalau kita menggunakan indikator pada daerah tingkat I dan daerah tingkat II, maka dominasi jalur A melalui KBA di Golkar akan kuat sekali. Contoh Jawa Timur, dari 37 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat II, 33 di antaranya dipimpin oleh tokoh jalur A atau KBA. Demikian juga di Jawa Barat, dari 25 DPD tingkat II, hanya 3 DPD yang tidak dipimpin KBA. Di daerah tingkat I, ditemukan gejala yang sama, yaitu lebih dari 20 Ketua DPD tingkat I dipimpin KBA. Di Jawa Tengah, hampir dipastikan bahwa yang akan terpilih menjadi Ketua DPD tingkat I Golkar adalah dari KBA, karena didukung oleh gubernur yang baru dan Panglima Kodam Diponegoro.

Meskipun muktamar PPP belum dilaksanakan dalam waktu dekat ini, saya juga mengantisipasi "ramainya" muktamar partai tersebut. Meskipun, tampaknya, merupakan partai yang "ademayem" saja, PPP berpotensi sama dengan PDI untuk terjadinya konflik. Sebab, pasti ada kekuatan luar yang mempunyai kepentingan untuk menanamkan pengaruhnya dalam rangka persiapan memasuki masa transisi. Kita dapat menyaksikan, pada persiapan Sidang Umum MPR lalu, antara ketua dan sekjennya berbeda tajam tentang siapa yang menjadi calon wakil presiden, terutama dalam cara mengartikulasikannya. Karena itu, tidak mustahil, H. Matori Abdul Djalil akan menjadi penantang utama Buya Ismail Hasan Metareum.

Jadi, dalam melihat gejala perubahan politik kita tidak perlu terlampau jauh mengantisipasinya, terutama menaruh harapan yang besar kepada kemungkinan terjadi demokratisasi. Kita masih memerlukan perjalanan panjang menuju demokrasi. Perubahan tersebut hanyalah pemanasan awal menuju pertarungan yang sebenarnya. ❑

Penyelesaian Pesangon Buruh

SAYA ingin menanyakan beberapa hal mengenai perburuhan, sehubungan persoalan yang sedang dihadapi teman saya.

Teman saya (sebut saja Ajid), sudah lima tahun bekerja di suatu perusahaan. Namun, tiba-tiba bulan lalu, ia di-PHK oleh perusahaan. Alasannya, selama dalam satu bulan, ia delapan hari tidak masuk kerja. Setelah di-PHK, teman saya mengadukan persoalannya ke Departemen Tenaga Kerja. Penyelesaiannya, Departemen Tenaga Kerja memutuskan agar perusahaan tempat bekerja Ajid memberikan pesangon, dengan pertimbangan bahwa Ajid sudah bekerja selama lima tahun. Namun, ternyata perusahaan itu menolak keputusan Departemen Tenaga Kerja.

Karena penolakan itu, Departemen Tenaga Kerja mengusulkan agar Ajid mengadukan persoalannya ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D). Tapi, sampai sekarang belum ada keputusan.

Pertanyaan:

1. Pada kasus yang bagaimana seorang buruh yang di-PHK bisa mendapat uang pesangon?
2. Sejauh mana fungsi atau peranan Departemen Tenaga Kerja dalam menyelesaikan kasus-kasus PHK?
3. Apakah keputusan yang diambil Departemen Tenaga Kerja itu tak mengikat perusahaan atau pekerja, sehingga dilimpahkan kepada P4D?
4. Dalam penyelesaian kasus PHK, mulai dari Departemen Tenaga Kerja sampai kepada P4D, hukum acara apakah yang dipakai?

Tukiman
Jalan Durian III No. 202
Langsa
Aceh

Jawaban:

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1986 tanggal 22 April 1986, pasal 10 butir 3 dan 4, seorang karyawan yang di-PHK dapat memperoleh uang pesangon, apabila:

a. PHK tersebut hanya disebabkan oleh kesalahan ringan yang telah dilakukan karyawan.

b. PHK tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan karyawan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan bukan hanya uang pesangon yang diperoleh melainkan juga uang-uang lainnya.

Peranan Departemen Tenaga Kerja dalam menyelesaikan kasus-kasus PHK, pada prinsipnya, adalah mengupayakan agar PHK dihindarkan sejauh mungkin, kecuali memang PHK tersebut disebabkan kondisi perusahaan yang terpaksa harus dilakukan karena kesalahan besar yang dilakukan karyawan atau buruh, yang berakibat ruginya perusahaan.

Peranan dan fungsi Departemen Tenaga Kerja itu tercermin dari keputusan-keputusan ataupun kebijakan yang dikeluarkan Departemen Tenaga Kerja, yang tujuannya melindungi hak-hak buruh. Misalnya, tentang penetapan besarnya uang pesangon, uang ganti rugi, dan lain-lain, seandainya PHK tak dapat dihindarkan. Di samping itu, peranan Departemen Tenaga Kerja, dalam kaitannya dengan PHK, juga terlihat dari peran aktifnya sebagai pihak pendamai antara karyawan dan majikan (perusahaan).

Dengan perannya sebagai pendamai, tujuannya diharapkan masalah PHK dapat dihindarkan, dan karenanya tak perlu dilimpahkan ke P4D atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P).

Keputusan Departemen Tenaga Kerja tersebut, sifatnya tak mengikat. Artinya, baik pihak buruh atau karyawan, maupun perusahaan dapat melimpahkan penyelesaian kasus perburuhan itu kepada P4D atau P4P, apabila mereka tidak puas menerima keputusan dari Departemen Tenaga Kerja.

Untuk menyelesaikan kasus-kasus perburuhan seperti PHK yang dilakukan P4D maupun Departemen Tenaga Kerja, tak ada ketentuan-ketentuan yang khusus diatur dalam bentuk hukum acara. Hal itu, mungkin, disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa pemeriksaan kasus PHK itu sendiri, yang dilakukan Departemen Tenaga Kerja maupun P4D atau P4P itu, merupakan proses pemeriksaan administratif, yang dilakukan bukan oleh hakim-hakim yang berasal dari lembaga yudikatif.

Kebenaran tentang hal tersebut, dibuktikan dengan penjelasan UU No.5 tahun 1986 pasal 48 (1), tentang peradilan tata usaha negara (PTUN), yang antara lain menyebutkan, bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara.

Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan, atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Maka, prosedur tersebut dinamakan "banding administratif".

Contoh banding administratif, antara lain, adalah keputusan P4P, berdasarkan UU No. 22 tahun 1957, tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, dan UU No. 12 tahun 1964, tentang PHK di perusahaan swasta. ❑

Visine* PON XIII

Fun bike

MINGGU 5 SEPTEMBER '93

START / FINISH : PARKIR TIMUR SENAYAN

± 30 km

MENANGKAN DOOR PRIZE BESAR

dan Ribuan Doorprize Menarik lainnya

TEMPAT PENDAFTARAN

- **RR & Associates** (Doni/Evi), Jl. Hang Tuah Raya 71 Keb.Baru - JakSel. Telp. 716727 - 7206092
- **Majalah MATRA** (Mahmud), Jl. Buncit Permai Kav.1 JakSel. Telp. 7803510
- **Majalah TEMPO** (Neneng), Gd. Tempo Lt.8 Jl. HR Rasuna Said Kav.C 17 Jakarta Telp. 5201022
- **Bike Corner** (Rustam), Jl. Cempaka V / 31 Bintaro JakSel, Telp. 7360952
- **Majalah HumOr**, Jl.Palmerah Barat 38 A Blok B4 JakPus, Telp. 5483569 - 5484992
- **Ardency Advertising**, Kebayoran Center A-17, Jl. Keb. Baru JakSel, Telp. 714.775
- **PT MPM**, Jl. Gaya Motor Barat 2, Sunter II (Jam Kerja), Telp. 4301560 - 4301559
- **FEDERAL EXECUTIVE SHOP**, Atrium Segitiga Senen Jl. Senen Raya Lr. 1, Unit 10 - 11 Telp. 3867976
- **ATLANTA** (Tia), Jl. Kelapa Gading Boulevard Blok PA 11/2 JakUt, Telp. 4500678
- **IPSJ** (Ismuyanto), Jl. Jaksa 15 JakPus, Telp. 326224
- **PD MINI** , Jl. Kapt. Tendean 10 B JakSel Telp. 7993129: Roxy Mas Blok C2 No. 17-18 Jakpus, Telp. 3867272
- **Benyamin Sport** (Benyamin), Jl. Raya Kebon Jeruk JakBar, Telp. 5492997
- **Toko Sepeda IDAMAN** (Antono), Jl. Ir H Juanda 41 Rempoa Ciputat Telp. 7491329 - 7492891
- **Niaga Cycle Centre** (Tia/Fanny), Jl. Taman Galaksi Raya A-15 Bekasi Selatan.

Dipersembahkan oleh :

Visine* STERIL

ARDENCY / VP FB / 93

PERSYARATAN PESERTA :

1. Terbuka untuk umum, pria dan wanita.
2. Berbadan sehat, tidak sedang dalam perawatan dokter.
3. Usia peserta 10 - 60 tahun.
4. Wajib melaksanakan peraturan - peraturan yang telah ditetapkan oleh Panitia.
5. Keputusan Panitia berlaku mutlak, tidak dapat diganggu gugat.
6. Jenis sepeda bebas
7. Hadir di arena paling lambat pkl. 06.40 / sebelum start dimulai pkl 07.00.
8. Penentuan pemenang berdasarkan Doorprice.
9. Mengisi Formulir Pendaftaran dan membayar uang pendaftaran sebesar :
   Rp. 15.000,- (tgl 2 s/d 9 Agustus 1993)
   Rp. 16.000,- (tgl 10 s/d 16 Agustus 1993)
   Rp. 17.000,- (tgl 17 s/d 24 Agustus 1993)
   Rp. 20.000,- (tgl 25 Agustus '93 s/d penutupan pendaftaran)
   Setiap peserta mendapat : **T-Shirt, Topi, Snack, Sticker dan Asuransi Peserta** (bukan sepeda)
10. Peserta dari luar kota dapat mengirimkan formulir pendaftaran berikut kelengkapannya kepada Sekretariat Pelaksana : **RR & Associates, Jl. Hang Tuah Raya 71 Keb. Baru, Jakarta 12120.**

TEMPO MAJALAH BERITA MINGGUAN

FORUM KEADILAN

MATRA MAJALAH TREND PRIA

SWA SEMBADA

HumOr

Bisnis Indonesia

SUARA PEMBARUAN

Lain Fatwa, Lain Dharsono

Setelah sembilan tahun mendekam dalam penjara dan berpindah dari satu penjara ke penjara lain, Andi Mappatahang Fatwa pun akhirnya meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang.

Hari kemerdekaan, bagi Fatwa, itu begitu istimewa. Ia dilepas setelah membacakan "skripsi"-nya sepanjang enam halaman, yang telah dinyatakan lulus, di hadapan Panglima Kodam Jaya, Mayjen A.M. Hendropriyono, selaku Bakorstanasda, Mayjen (Pol.) Moch. Hindarto, Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta, B.T.P. Siregar, Direktur D Bais, Brigjen Arie Kumaat, Kepala Staf Kodam Jaya, Brigjen Wiranto, serta sejumlah petugas penjara.

Perlakuan istimewa itu bukan mengada-ada, tapi merupakan suatu bukti nyata, dari adanya angin perubahan di negeri ini. Sebab, sebelumnya, sangat mustahil, menjelang pembebasannya, seorang narapidana bisa berpidato di mimbar di hadapan

banyak petinggi. Suatu hal, yang bahkan tidak terjadi ketika bekas Panglima Kodam Siliwangi dan bekas Sekjen ASEAN, Letjen (Purn.) H.R. Dharsono, dibebaskan beberapa tahun lalu.

Fatwa, yang dikenal dalam kasus Buku Putih Tanjungpriok, benar-benar menjadi pusat perhatian pada pagi itu, 23 Agustus 1993. Keceriaan di wajahnya tak dapat disembunyikan. Ia akan berkumpul kembali dengan anggota keluarganya. "Siapkan ranjang pengantin," katanya bergurau saat meninggalkan lingkungan III E-F LP Cipinang.

Para tahanan politik yang menjadi penghuni LP Cipinang memang ada yang mengikuti jejak Fatwa. Misalnya, Abdul Qadir Djaelani, rekan Fatwa dalam kasus dakwah yang menyulut Peristiwa Tanjungpriok pada 1984, yang segera dibebaskan. Namun, para pelaku kasus Lampung 1988, masih harus mendekam bersama narapidana kriminal lainnya.

Sebelum menghirup udara segar di luar penjara, Fatwa masih harus mengikuti sebuah proses kecil. Dalam proses yang dihadiri beberapa orang dari Petisi 50 itu, Fatwa mendapatkan wejangan dari Kepala LP Cipinang, Soeharto. Dengan iringan lagu *Padamu Negeri*, yang dikumandangkan melalui sebuah *tape recorder*, kedua tangan Fatwa memegang ujung bendera Merah Putih. "Bagimu negeri, jiwa raga kami," katanya berbisik.

Fatwa tak begitu saja meninggalkan ruangan, yang telah banyak mendera hidupnya selama bertahun-tahun. Setiap sudut ruangan dipandanginya. Istri, anak, serta rekan-rekannya, tampak tak sabar lagi. Di halaman dekat pintu ke luar LP Cipinang, Fatwa pun bersujud. "Kepadamu, ya..., Allah, aku memohon ampun." Begitu pula di luar pintu, Fatwa bersujud kembali. "*Baldatun thayyibatun warabbun ghafur* (negara yang baik di bawah rahmat ampunan Allah)," katanya mendesah, mengutip sebuah ayat Alquran. Fatwa, kini, telah membuktikan bahwa kebebasan memang ada batasnya. Begitu pula ketidakbebasan.

Teks dan Foto: Agus Butar Butar

Griya Produksi Pembuat Berita

Griya produksi ada yang membuat berita.
Padahal, televisi swasta pun sampai sekarang dilarang membuat berita.

Meskipun televisi swasta, menurut peraturan menteri, belum diperbolehkan membuat berita, kenyataannya mereka tetap saja menyajikan berita. RCTI dan SCTV, misalnya, sudah cukup lama menyiarkan *Seputar Indonesia* yang menyajikan berita-berita aktual. Hal serupa dilakukan pula oleh AN teve dalam program *Laporan AN teve*, dan TPI menyajikan berita-berita *Bisnis Hari Ini* dan *Serbaneka*. Padahal, menurut Menteri Harmoko, sampai sekarang ketentuan yang melarang teve swasta membuat berita belum dicabut. "Yang diperbolehkan hanya *feature*, bukan *hard news*," katanya.

Entah kenapa, biarpun ada larangan, berita-berita yang ditayangkan teve swasta jarang sekali menampilkan *feature* dan mereka sibuk dengan *hard news*. Namun, belum semua stasiun teve siap membuat berita-berita setiap hari. AN teve, misalnya, menurut Kepala Bagian Pemberitaan, Azkarmin Zaini, selama ini baru membuat acara berita seminggu dua kali. "Tetapi, bulan depan sudah akan ditingkatkan menjadi empat kali seminggu," katanya.

TPI, tampaknya, juga belum siap dengan bagian pemberitaan. Karena itu, acara *Bisnis Hari Ini* tidak mereka buat sendiri. Pihak TPI memberikan waktu setengah jam kepada Nusantara International Television Productions. "Kamilah yang menyusun rencana program, sampai pemunculannya di televisi," kata Manajer Umum Nusantara International, Syahrir Gobel. Menurut Gobel, sebenarnya Nusantara International yang menawarkan program acara kepada TPI. "Kami diberi *air time* di pagi hari. TPI membayar biaya produksi dan hasil iklannya dibagi dua," kata Gobel.

Untuk program yang ditayangkan pukul 06.30 setiap hari itu, Nusantara International menggarapnya mulai dari konsep acara, pemilihan berita, penyediaan wartawan, sampai penyiar. Dalam menyiapkan acara itu, Nusantara International dibantu tenaga konsultan dari Australia. "Tetapi, untuk juru kamera dan peralatan lainnya, kami bekerja sama dengan pihak lain," katanya. Sedangkan iklan yang masuk, dibagi untuk Nusantara International dengan TPI.

KERJA SAMA:
Acara Bisnis Hari Ini yang ditayangkan TPI adalah hasil kerja sama dengan griya produksi

Keberhasilan Nusantara International membuat program acara seperti itu, tampaknya, belum ditiru griya produksi (*production house*) lain. Pihak Yasawirya Tama Cipta, yang menyediakan kamera untuk *Bisnis Hari Ini*, belum mau mengikuti cara yang ditempuh Nusantara International. "Yah, bagi-bagi rezekilah," kata Presiden Yasawirya Tama Cipta, Youk Tanzil. Pihaknya hanya menyediakan kamera, juru kamera, dan ruang pengambilan gambar.

Sebenarnya, selain Nusantara International, ada juga griya produksi yang membuat berita. Bekas wartawan perang TVRI, Hendro Soebroto, sudah cukup lama mengelola biro kantor berita North Television Agency. North Television itu memproduksi berita untuk stasiun televisi asing. Berdasarkan izin dari Departemen Penerangan, badan itu disebut sebagai biro kantor berita, bukan griya produksi. Beberapa teve swasta Australia, Portugal, Hong Kong, dan Amerika Serikat pernah menyiarkan berita yang dibuat North Television. "Biasanya, berita-berita yang kami buat bertaraf internasional," katanya.

Menurut Hendro, biasanya, pihaknya menawarkan berita kepada stasiun teve asing. "Jika mereka oke, berita itu akan segera kami kirim via satelit. Yang *booking* satelit dan menanggung biayanya adalah pihak pemesan," katanya.

Meskipun berita dijual kepada teve asing, menurut Hendro, tidak semua pesanan dipenuhinya. Misalnya, ketika enam pemuda Timor Timur meminta suaka politik ke Kedutaan Besar Swedia dan Finlandia, Hendro tidak membuat berita tentang itu. Padahal, sebuah jaringan teve Portugal bersedia membayar berapa pun untuk berita tersebut. "Yang kami jual kan berita. Bukan bangsa," kata Hendro.

Menurut Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film, Alex Leo Zulkarnaen, yang dikelola Hendro itu bukanlah kantor berita. "Sampai sekarang, kantor berita yang diizinkan hanya tiga. Antara, PAB, dan KNI, sedangkan yang dikelola Hendro itu agensi," katanya.

Griya produksi sendiri, menurut Alex, belum diizinkan menjual berita. "*Bisnis Hari Ini* itu kan acara yang *air time*-nya dikontrakkan oleh TPI kepada pihak lain. Kalau *production house* menjual berita ke satu stasiun teve jelas enggak boleh," katanya.

Pawoko

BASF Dijebol Karena Bau

Pagar tembok pabrik kaset BASF digempur penduduk. Mereka tak tahan pada bau yang menyengat. Gubernur DKI Jakarta pun mengirim teguran. Dan, penyanyi Harry Moekti memaklumi tindakan warga.

BASF ternyata hanya mau berurusan dengan telinga, bukan hidung. Akibatnya, para pemilik hidung yang tak dipedulikan perusahaan pembuat pita kaset itu, pertengahan Agustus lalu, naik darah. Mereka ramai-ramai merobohkan pagar, sepanjang 400 meter, milik pabrik itu di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. "Warga sudah habis kesabarannya, karena bau menyengat yang tak henti-hentinya keluar dari pabrik BASF," kata Ketua RW 04 Duri Kosambi, Fachruddin.

"Baunya seperti karbit. Kalau terhirup, dada jadi sesak," katanya memberi gambaran. Bau itu sendiri datangnya tak menentu. "Terkadang malam, terkadang pagi," kata Haji Abdul Halim, warga RT 06 dan takmir masjid di situ, yang rumahnya hanya sekitar sepuluh meter dari pagar itu. Dan, jika bau itu keluar, menurut Halim, yang paling menderita adalah anak-anak. "Mereka jadi lemas dan perutnya kembung. Kasihan," katanya.

Bau tak sedap itu, sebenarnya, sudah tercium penduduk sejak Maret lalu. Kala itu, di tengah suasana puasa, penduduk sempat protes dengan menimpuki pabrik yang berdiri sejak 1971 itu.

Hasilnya pada 15 Maret lalu, pihak BASF menjanjikan, selain akan meredam bau yang menyengat itu, juga menyilakan warga untuk berobat di poliklinik pabrik.

Namun, tampaknya, janji itu sukar dipenuhi oleh pihak pabrik, yang omsetnya sekitar Rp 40 miliar pertahun itu. Juli lalu, diadakan lagi musyawarah antara warga dan pihak BASF, serta tim penanggulangan pencemaran Jakarta. "Pertemuannya sampai dua kali," kata Fachruddin yang tinggal di situ sejak 1960.

Namun, bau menyengat dari pabrik BASF itu, tetap saja menjadi langganan warga RW 04 Duri Kosambi. Puncaknya, pada 14 Agustus, sekitar 400 warga di situ ramai-ramai merubohkan pagar pabrik pita kaset yang setiap tahun menyelenggarakan BASF Award itu.

JEBOL:
Pagar tembok pabrik BASF yang dirobohkan penduduk, kini mulai dibangun lagi. Bagaimana dengan bau yang diprotes itu?

Lalu, dari mana sebenarnya sumber bau menyengat itu berasal? "Mungkin dari bagian pabrik kimia yang dibangun sejak 1990," kata Halim. Memang, selain memproduksi pita kaset sejak 1987, kini BASF juga memproduksi bahan kimia untuk tekstil, kulit, kertas, farmasi, serta bahan kimia dasar.

Humas BASF, Tantowi Yahya, menyangkal jika BASF dituduh tak mengupayakan sarana pengolahan limbah di pabriknya. "Kita sudah memiliki fasilitas pengolah limbah cair dan gas. Tapi sulit memang menghindarkan bau bahan kimia itu," kata pembawa acara *Gita Remaja* di TVRI itu.

Yang jelas, tiga hari setelah perobohan pagar tembok itu, Pemda Jakarta meminta BASF untuk menyusun prosedur penanggulangan bau di pabrik itu. "Agar saudara segera menyampaikan perbaikan atau penyempurnaan dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan," kata Gubernur Jakarta dalam suratnya yang ditujukan kepada pimpinan BASF.

Pakar pencemaran kimia dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Adang Setiana, memberi alternatif untuk mengatasi masalah itu. "Seharusnya ada cerobong udara dengan ukuran tertentu untuk menyalurkan polusi bau itu," katanya. Menurut Adang, akibat pertama polusi zat demikian biasanya paru-paru, iritasi kulit.

Akibat jebolnya pagar tembok setinggi dua meter tersebut, kini — di tengah-tengah perbaikan pagar itu — beberapa petugas keamanan dari Koramil Jakarta Barat berjaga-jaga di lokasi itu. "Saya berharap dengan peristiwa itu BASF mau lebih tanggap memperhatikan lingkungan, dan tidak semata-mata mencari keuntungan besar saja," kata *rocker* Harry Moekti, yang Agustus lalu mendapat hadiah dari BASF untuk jalan-jalan ke Amerika Serikat.

Sebagai pecinta lingkungan, kata Harry, ia tidak menyalahkan ulah warga di situ. Tapi bagi warga sendiri? "Walaupun dipagar besi, kalau tetap mengeluarkan bau, kita akan terus memprotes," kata Halim.

BASKORO DAN WAHID

Membangun "Surga" di Ranah Minang

Lapangan golf bertaraf internasional dan kompleks vila mewah dibangun di Lembah Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Tapi, izin dan amdalnya belum ada. Mengapa bisa terjadi?

Surga bakal hadir di Padang. Itulah janji dalam brosur yang disebarkan PT Andalas Anaipermai Internasional kepada sejumlah pejabat dan pengusaha di Sumatra Barat. Yang dimaksud "surga" itu, tak lain adalah proyek pembangunan Anai Resort dan *golf court* di atas areal 114 hektare kawasan wisata Lembah Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

Di daerah wisata di pinggir jalan raya antara Padang dan Bukittinggi itu, kelak, selain akan ada lapangan golf 18 *hole*, juga bakal berdiri vila-vila dengan arsitektur khas ranah Minang. Vila itu berukuran 117-260 meter persegi, dengan empat alternatif desain, masing-masing berdiri di atas tanah seluas 1.000 meter persegi.

Selain itu, juga akan dibangun hotel, pusat olah raga, serta landasan helikopter. Proyek besar yang bakal dibangun di daerah sejuk 60 kilometer dari Padang itu, "Memang bertaraf internasional, dan kita telah mengalokasikan dana Rp 80 miliar," kata *project engineer* Andalas Anaipermai, Edward Pardede. Sampai kini, menurut Edward, sekitar Rp 20 miliar di antaranya telah dipakai untuk biaya penelitian, pembebasan tanah, pendirian beberapa vila (untuk percontohan), serta lapangan golf 18 *hole* yang telah rampung.

Namun, dengan rampungnya lapangan golf itu bukan berarti pembangunan Anai Resort tidak menimbulkan protes. Salah satunya, muncul dari Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Andalas. Pembangunan lapangan golf itu dilakukan tanpa analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), kata Kepala PSLH Universitas Andalas, Hamzah Gafar.

Menurut pakar lingkungan itu, kawasan Lembah Anai yang terletak di daerah tinggi itu, mempunyai fungsi penting bagi daerah sekitar. Selain kaya dengan mata air yang menjadi sumber air bagi penduduk, tempat itu juga berfungsi sebagai daerah resapan air. Di mata Hamzah, pembangunan lapangan golf yang mengabaikan amdal itu benar-benar sudah melanggar ketentuan pemerintah, seperti disyaratkan UU Lingkungan Hidup. "Pembangunan itu terletak di pinggang gunung dengan kondisi tanah yang labil. Jadi, akan berakibat di daerah bawahnya," kata Wakil Kepala PSLH Universitas Andalas, Masril Ms.

Menurut Masril, penggantian hutan dengan rumput-rumput impor khusus untuk lapangan golf bakal menyebabkan daerah itu tak efektif lagi menahan curahan hujan.

Peta Lokasi

Karena itu, menurut Masril, tanpa melalui pengkajian, dipastikan bencana bakal datang bagi masyarakat di sana kelak. "Apalagi, jika mengingat tempatnya berbatasan persis dengan daerah hutan lindung Anai Malibou," katanya. Dan, hutan lindung itu sendiri, menurut sumber FORUM yang tahu persis, bahkan sebagian sudah dicaplok untuk pembangunan Anai Resort.

Warga sekitar tempat itu, sebenarnya, sudah merasakan gangguan ekologis akibat proyek tersebut. Sejak lapangan golf itu dibangun pada 1992, misalnya, banjir kiriman dari sungai Lembah Anai datang tak henti-henti. "Saya bukan ahli lingkungan, tapi sebagai penduduk asli, sejak dulu, belum ada banjir seperti setelah adanya pembangunan di Lembah Anai itu," kata Rusdi, 59 tahun, pemuka masyarakat Desa Kandang Ampek Bungo Tanjung.

Namun, mengapa izin pembangunan itu bisa mulus tanpa amdal? Ketua Amdal Tingkat I yang juga Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatra Barat, Rusdin Kamaludin, hanya mengangkat bahu. "Yang menyangkut soal perizinan, tanyakan saja kepada gubernur atau instansi terkait," katanya. Yang pasti, Rusdin membenarkan bahwa amdal untuk pembangunan itu belum ada.

Dinas Pariwisata Sumatra Barat, instansi terkait mengenai soal itu justru memberi keterangan lain. "Pembangunan lapangan golf di daerah itu belum ada izin dari gubernur," kata Kepala Dinas Pariwisata Sumatra Barat, Hawari Siddik. Persoalannya, menurut Hawari, sebenarnya izin prinsip untuk proyek itu ada di PT Bangun Cipta Sarana. Artinya, karena izin prinsip dioperkan dan belum disetujui gubernur, Dinas Pariwisata pun tak pernah mengeluarkan rekomendasi perizinannya.

Edward Pardede membenarkan soal itu. "Izin itu sedang diurus di kantor gubernur Sumatra Barat," katanya. Dan itulah kacaunya. Sebab, sesuai dengan prosedur, setelah ada amdal — untuk melihat dan mengantisipasi akibatnya — baru izin pembangunan itu dikeluarkan. Karena itu, tak heran, ada warga Padang yang berkata sinis, "*Itu namonyo, surgo nan dijanjikan, narako nan didapek* (Ini namanya, surga yang dijanjikan, neraka yang didapat)."

Bambang dan Mawis (Padang)

Melindungi Buruh di Australia

Dulu, mendirikan serikat buruh di Australia dianggap sebagai kejahatan. Belakangan, peran serikat buruh, dengan perangkat hukumnya, telah mewarnai kehidupan di negeri itu.

Soal buruh mencuat lagi. Tak kurang dari Australia, tetangga "Barat" kita di Selatan, ikut prihatin. Maka, 11 Agustus lalu, Menteri Luar Negeri Australia, Gareth Evans, menanyakan kepada Presiden Soeharto soal kemungkinan Indonesia mengubah UU yang mengatur masalah perburuhan.

Ada alasan tertentu, mengapa Evans mengungkit masalah UU Perburuhan tersebut. Menurut Evans, dengan hancurnya komunisme dunia, apakah masih ada kemungkinan soal perburuhan menjadi unsur yang membahayakan di Indonesia.

Berbeda dengan Indonesia, soal perburuhan di Australia, pada awalnya, tak lepas dari situasi di Inggris. Sebab, Australia ketika itu di bawah kekuasaan Inggris. Dan, Inggris pun menerapkan hukum-hukumnya di Australia, termasuk dalam soal perburuhan.

Tercatat, pada 1800, serikat buruh di Australia, seperti di Inggris, dinyatakan terlarang. Sebab, menurut hukum Inggris, The Combination Act, 1800, mendirikan serikat buruh merupakan tindakan kriminal. Namun, kemudian, The Combination Act itu diperbarui pada 1825, dengan UU yang lebih liberal.

Akibatnya, periode tahun 1800 sampai 1828, persoalan buruh di Australia tak jauh beda dengan di Inggris.

Titik cerah muncul pada 1880, ketika organisasi buruh kasar di Australia menyatakan eksistensinya. Mereka, melalui serikat buruh itu, mulai mengembangkan peran yang cukup diperhitungkan dalam negosiasi dengan pemilik modal. Sejak itu, serikat buruh pun tumbuh bak jamur di musim hujan. Hingga kini, tercatat lebih dari 150 ribu serikat buruh. Belakangan, The Trade Union Act of 1871, yang lahir di Inggris itu, diadopsi Australia.

Pada 1890, muncul pemogokan besar-besaran, yang dijuluki "Great Strikes", di Negeri Kanguru itu. Buntutnya, perlu perbaikan dalam UU Perburuhan Australia. Pada 1986, suatu dewan didirikan di negara bagian Victoria untuk menentukan sistem penggajian dan kondisi kerja. Kemudian, beberapa negara bagian mengikuti gerak di Victoria itu. Australia Selatan mengikuti langkah serupa itu pada 1906, Queensland pada 1908, dan Tasmania pada 1901.

MOGOK:
Aksi mogok dilancarkan oleh para buruh Australia, yang menuntut perbaikan mutu kehidupan mereka.

Suatu wadah untuk menyelesaikan sengketa perburuhan, Compulsory Arbitration Systems, pertama kali diperkenalkan di Australia Barat pada 1900. Kemudian, model arbitrase itu diikuti New South Wales pada 1901.

Yang jelas, UU soal perburuhan yakni, Trade Union Act 1871, mengalami beberapa kali perubahan sampai Trade Union Act 1975 terbentuk. Dan, Trade Union Act 1975 pun belakangan diperbarui dengan Industrial Relations Legislation Amendment Act 1991. UU itulah yang dijadikan acuan masalah pengaturan perburuhan di Australia kini.

Beberapa UU Australia yang berkaitan dengan Industrial Relations Legislation Amendment Act, antara lain, Aboriginal and Torres Islander Commission Act 1989, Administrative Appeals Tribunal Act 1975, dan Australian Commission Act 1985.

Dalam Industrial Relations Legislation Amendment Act itu diatur berbagai permasalahan perburuhan. Mulai dari soal kecelakaan dalam bekerja yang mengakibatkan kecelakaan fisik maupun mental sampai soal pengadilan bagi masalah-masalah perburuhan. Termasuk mengenai jumlah ha-

diah atau bonus bagi para pekerja, yang harus dimintakan persetujuan menteri dengan rekomendasi dari serikat buruh. Begitu pula untuk masalah batasan usia pensiun.

Dalam UU itu, disoroti pula tentang Serikat Buruh yang dapat menarik iuran, denda, bahkan pajak bagi para anggotanya, sepanjang itu sesuai dengan ketentuan Trade Union Act. Bila muncul persoalan dalam tubuh serikat buruh, pemerintah tidak akan campur tangan. Masalah itu akan diselesaikan menurut aturan main yang ditetapkan oleh serikat buruh tersebut.

Ada aturan rinci dalam pemilihan pemimpin serikat buruh, mulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan cabang. Begitu pula, untuk pemilihan komite, konferensi, dewan, atau badan-badan lainnya dalam serikat buruh itu. Sehingga, kaderisasi dalam serikat buruh berjalan lancar.

Selain itu, diatur pula tentang hak dan kewajiban komite dan para pejabat serikat buruh, pertemuan anggota, pencopotan anggota maupun pejabat, dan penanganan masalah perburuhan yang timbul antara pihak majikan dan karyawannya.

Bagi serikat buruh, juga ada hal-hal yang harus dipenuhi agar eksistensinya diakui. *Pertama*, serikat buruh itu harus mempunyai catatan anggotanya secara lengkap dan rinci, mempunyai papan nama, dan alamat pos yang tetap dan jelas. *Kedua*, tiga bulan sekali, serikat buruh itu harus memperbarui catatan keanggotaan serikat buruh itu. Dan, *ketiga*, tiap anggota serikat buruh harus menjaga kartu anggotanya dan melaporkan alamat tempat tinggal terakhir ke serikat buruhnya itu.

Singkatnya, masalah perburuhan di Australia mendapat landasan hukum yang lengkap dan ketat. Sehingga, soal pemogokan juga ditentukan, apakah boleh atau tidak. Komite serikat buruhlah yang akan menentukan bisa-tidaknya para buruh mengadakan aksi mogok.

Sebaliknya, gubernur jenderal Australia dapat melarang suatu aksi pemogokan jika dianggap menghancurkan hubungan dagang antara Australia dengan negara lain. Bila ada yang membandel dan ikut aksi pemogokan itu, orang tersebut dapat dipenjarakan. Atau, bila ia orang asing, ia bisa dipulangkan ke negeri asalnya.

Yang jelas, hukum Australia sangat mendukung kepentingan kaum buruh. Sehingga, kaum buruh dapat membentuk partai buruh, yang mendominasi kehidupan di Australia.

Tantangan Golkar Saat Ini

Amir Santoso
Dosen FISIP UI

Tak lama lagi Golongan Karya (Golkar) akan menggelar Musyawarah Nasional V. Saat ini, organisasi politik terbesar di Indonesia itu menghadapi beberapa tantangan yang harus diantisipasi, jika ingin terus berjaya di masa depan.

Tantangan pertama, soal kepemimpinan: bagaimana mencari pemimpin yang bisa diterima semua pihak. Agar bisa diterima di bawah, pimpinan Golkar haruslah seorang yang memiliki jiwa kerakyatan dan mampu berdialog dengan masyarakat, yang sebagian besar masih berpendidikan rendah dan tinggal di pedesaan.

Tetapi, yang lebih utama, sebenarnya, tokoh yang bisa diterima golongan menengah ke atas. Sebab, basis kekuatan Golkar sebenarnya terletak pada dukungan golongan menengah yang terdiri dari pegawai negeri sipil di departemen pemerintah dan universitas, purnawirawan ABRI (secara langsung) dan ABRI aktif (secara tak langsung), serta penduduk kota dan desa yang berpendidikan.

Golongan menengah dan atas, umumnya, adalah massa yang kritis dan mampu memberikan penilaian terhadap pemimpinnya. Awalnya, mereka memang memberikan dukungan kepada Golkar karena dipaksa. Tapi, saat ini, dukungan mereka sebagian besar terjadi karena memang hanya Golkar yang bisa mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. Pemimpin Golkar dengan sendirinya harus menampilkan ciri intelektual yang mencukupi, yang akan memancarkan kharisma dan wibawa yang diperlukan. Jadi, mencari tokoh yang intelektual sekaligus merakyat merupakan tantangan utama bagi Golkar.

Tantangan kedua adalah kondisi sosial yang mulai berubah. Masa kini, tidak lagi sama dengan saat Golkar dilahirkan. Ketika itu situasi politik tidak menentu dan orang mencari organisasi yang mampu melawan PKI dan ormas-ormasnya. Kini, masa yang stabil dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif baik.

Dengan demikian, dukungan masyarakat bersifat kritis, bukan dukungan yang terpaksa atau membabi buta. Pencarian dukungan melalui mobilisasi atau manipulasi melalui janji-janji kosong harus ditinggalkan. Golkar harus menyusun program yang konkret dan jangan mengandalkan diri pada program yang disusun oleh pihak lain, meskipun pihak itu *partner* Golkar.

Tantangan ketiga, konservatisme. Sebagai sebuah organisasi politik yang besar dan selalu memperoleh suara mayoritas dalam setiap pemilu, Golkar bisa terkena penyakit mayoritas, yaitu lamban (karena gemuk) dan kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Organisasi politik besar, biasanya, selalu merasa yakin bahwa dirinya benar dan selalu yakin, bahwa masyarakat akan mendukungnya dalam setiap pemilu.

Namun, Pemilu 1992 telah membuktikan bahwa anggapan tersebut tidak selamanya benar. Memang masih banyak yang mendukung Golkar, tetapi yang kecewa juga semakin bertambah. Berkurangnya dukungan tersebut disebabkan oleh kekurangmampuan Golkar untuk mengantisipasi perubahan tuntutan masyarakat.

Belakangan ini, isu mengenai persamaan, kebebasan, dan hak-hak warga negara yang menuntut keadilan semakin menguat. Hasil survai mengenai persepsi masyarakat mengenai hak-hak warga negara yang dilakukan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Sosial FISIP UI bekerja sama dengan *The Jakarta Post* beberapa bulan lalu menunjukkan, bahwa masyarakat bawah pun memiliki kesadaran terhadap persamaan, keadilan, dan hak-hak mereka.

Karena itu, Golkar dituntut untuk selalu memahami apa yang berkembang di masyarakat. Jangan sampai, karena merasa besar, Golkar lalu menjadi birokrasi dengan wawasan serta sikap yang birokratis, yang biasanya berorientasi ke atas. Sebab, jika demikian, Golkar bukan lagi organisasi politik, melainkan tak ubahnya sebuah departemen pemerintah.

Tantangan berikutnya adalah demokratisasi. Beberapa pengamat mempersoalkan peranan Golkar sebagai *the single majority*. Ada kekhawatiran bahwa. Golkar justru menjadi kekuatan yang antidemokrasi. Kekhawatiran itu ada benarnya, namun ada pula salahnya. Sebuah partai yang memenangkan pemilu terus-menerus — dan dengan sendirinya menjadi besar — bisa menjadi imun dan tidak responsif terhadap tuntutan dan perkembangan masyarakat. Selain itu, dia bisa kebal terhadap kritik dan jadi korup.

Namun, masalah demokrasi juga tidak bisa hanya dikaitkan dengan besar kecilnya partai politik. Partai besar bisa juga tetap demokratis, asalkan pengurusnya mampu mempertahankan mekanisme dan tata cara yang demokratis dalam setiap pengambilan keputusan. Tetap menghargai perbedaan pendapat dan bersikap luwes dalam menampung perkembangan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Di beberapa negara, malah *the single majority* masih tetap dibutuhkan untuk mencegah timbulnya ketidakstabilan politik. Hancurnya Partai Komunis di bekas Uni Soviet dan Yugoslavia membuktikan perlunya satu partai yang besar dan kuat. Sedangkan India memberikan contoh betapa kacaunya politik, jika tidak ada partai besar dan kuat. Karenanya, pemerintah hampir selalu berbentuk koalisi antarpartai. Indonesia, yang heterogen, masih memerlukan satu partai besar dan kuat, tetapi mampu menampung pertambahan tuntutan kepentingan politik. □

Dituduh Pengisap Darah

HATI siapa yang tak panas dituduh sebagai pengisap darah bayi atau *palasik*? Itu pula yang dirasakan Sayuti. Penduduk yang tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto, Medan, itu marah berat lantaran Juliani menuduhnya mengisap darah anak Juliani hingga sang anak kurus kering. Sayuti, tukang cukur, lalu menuntut Juliani ke pengadilan. Hakim menghukum Juliani karena dianggap memfitnah Sayuti. Dalam persidangan terbukti, anak Juliani kurus kering karena kurang gizi, bukan kehabisan darah karena diisap *palasik*.

Awalnya memang dari mulut Juliani. Kepada tetangganya, ia sering menceritakan anaknya, Ulfan, 1,5 tahun, kurus kering lantaran darahnya diisap Sayuti. Padahal, sebelumnya Ulfan sehat dan montok.

Juliani mencurigai Sayuti karena sebelumnya lelaki itu sering mengusap ubun-ubun Ulfan. Apalagi, ada "korban" lain. Keponakannya juga kurus kering. Namun, anak tersebut sembuh setelah diobati Sayuti. Kabarnya, penyembuhan oleh Sayuti itu dilakukan hanya dengan menghembuskan nafas di kepala dan telinga sang anak.

Juliani memang tidak langsung menuduh Sayuti. "*Palasik* oleh Sayuti tak bisa dibuktikan secara ilmiah," ujar Juliani. Karena itu, Juliani pasang kuping ke istri Sayuti, Maida. Menurut Juliani, dari Maida-lah ia baru yakin *palasik* oleh Sayuti benar. "Maida bilang, sewaktu muda Sayuti pernah menuntut ilmu di Padang, dan memiliki ular bertanduk dua. Ilmu *palasik* itu dipelajari Sayuti untuk menambah kekuatannya," kata Juliani.

Setelah yakin bahwa Sayuti *palasik*, mulut Juliani pun tak bisa direm lagi. Informasi disebarkan kepada para tetangganya, sehingga terdengar oleh Sayuti sendiri. Sayuti pernah menegur Juliani, tapi teguran itu tak diacuhkan. Walhasil, Sayuti menuntut Juliani lewat pengadilan.

Kepada Abdul Haris Nasution dari FORUM, Maida membantah suaminya *palasik*. "Mana ada *palasik* di alam modern ini," katanya. Hakim pun sependapat. Apalagi, di persidangan terbukti bahwa anak Juliani kurus kering karena kurang gizi. Lalu, tok..., palu hakim pun diketuk. Juliani dikenakan hukuman percobaan selama sebulan.

Strategi Kawin Hansip

BANYAK jalan menuju pelaminan. Namun, jalan yang ditempuh Husni, bukan nama sebenarnya, untuk menyunting Eva, sebut saja begitu, ternyata keliru. Buntutnya, Husni malah babak belur dihajar massa. Ia pun digiring ke penjara.

Ceritanya begini. Husni dan Eva, penduduk Desa Padang Kemuning, Luhak, Sumatra barat, sebenarnya sudah lama pacaran. Hanya saja, orangtua Eva tidak menyetujui hubungan mereka. Maklum, di samping Husni sudah beranak-bini, ia juga tergolong pengangguran berat. Tapi, cinta Eva, 14 tahun, yang berkulit putih mulus, kepada Husni, 21 tahun, agaknya ibarat amplop dengan perangko: maunya lengket saja. Sampai akhirnya Husni dan Eva mencari jalan, bagaimana hubungan mereka distempel resmi oleh Pak Penghulu.

Skenario pun dirancang dengan cara main "dokter-dokteran". Di tengah permainan tadi, mereka berdoa moga-moga ada hansip yang akan menangkap mereka.

Begitulah. Hari masih sore. Husni dan Eva masuk ke semak belukar di bawah pohon nangka. Semenit, dua menit, tak ada orang yang lewat. Padahal, keduanya sudah berpelukan dan "berbugil ria".

Belakangan, datang seekor anjing iseng. Husni melempari anjing itu supaya menggonggong. Dugaannya tepat. Gonggongan anjing tadi menarik perhatian penduduk kampung. Tak berapa lama kemudian, puluhan pemuda sudah berkerumun di sekitar semak belukar itu.

Aksi kedua dilakukan. Dengan pakaian ala tarzan, Husni sengaja berlari ke luar. Eva pun menyusul, juga dengan pakaian ala kadarnya. Akhirnya, penduduk memang memburu Husni.

Sesuai skenario, Husni diharuskan menyerah dan mengakui segala perbuatannya. Husni pun minta agar dikawinkan dengan Eva. Ternyata, skenario itu meleset. Puluhan pemuda yang sedang marah itu malah menghajar Husni sampai babak belur. "Kami kesal, masak ketika ditangkap dia (Husni) hanya *mesem* saja," kata Syafril, salah seorang pemuda yang ikut menghajar Husni.

Persoalannya tidak sampai di situ saja. Orangtua Eva lalu melaporkan Husni kepada polisi. Husni pun ditahan. "Saya enggak menyangka sandiwaranya jadi begini," ujar Husni menyesal. Eva sendiri agaknya tak berdaya. "Sebenarnya, saya tak tega. Tapi, saya dipaksa orangtua memberikan keterangan yang memberatkan Husni," katanya. □

KHUSUS DIY, JAWA TENGAH & SEKITARNYA

Sobat muda,

KUIS TANAH MERDEKA

kerjabareng TVRI Sta. Yogyakarta dengan Harian Umum Republika mengajak kita untuk ikut menjawab permasalahan yang ada disekeliling kita ataupun yang ada pada diri kita sendiri, kawula muda. Jadi, melalui KUIS TANAH MERDEKA kamu-kamu akan menjadi lebih kritis, sekaligus menjadi insan-insan muda yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, bangsa dan negara.
Laginya... dengan menjawab kuis, kalian bakal memperoleh hadiah-hadiah yang cukup menarik dari para sponsor pendukung, dan inilah KUIS yang ada di TANAH MERDEKA

SEKILAS WAJAH TOKOH

melalui kuis ini kalian akan diajak untuk mengenali tokoh-tokoh yang patut menjadi panutan kita, kawula muda.

OPINI KITA

kamu-kamu bebas untuk berpendapat dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan ini hanya ada di KUIS TANAH MERDEKA

HASIL KERAJINAN TANGAN

bagi yang hobi utak atik, kirimkan hasil utak atikmu, karena TANAH MERDEKA selalu menghargai karyamu.

FOTO PARIWISATA dan FOTO UNIK AKTIVITASMU

rekamlah aktivitasmu yang sehat dan keindahan alam Indonesia dengan angle-angle kamera yang eksklusif. Hasilnya akan kami pilih dan tampil sebagai kebanggaan bersama dalam KUIS TANAH MERDEKA

Ada juga yang lebih serius dan tentu dengan hadiah yang lebih super, yaitu

LOMBA ARTIKEL ILMIAH dan LOMBA TEMUAN ILMIAH

PERSYARATAN

1. Kirim jawaban kalian melalui kartu pos dengan menempelkan KUPON KUIS TANAH MERDEKA yang ada di Harian Umum REPUBLIKA, ke TIM TANAH MERDEKA TVRI Sta. Yogyakarta. Jl. Magelang Po. Box 7 Yogyakarta.
2. Kuis TOKOH KITA bulan Agustus 1993, jawaban dikirim paling lambat 15 September 1993 (cap pos).

SIMAK DAN JANGAN GANTI CHANNEL KALIAN

tetaplah bersama TANAH MERDEKA

ON AIR SELASA 31 AGUSTUS 1993 Pukul 19.30 – 20.00

HADIAH – HADIAH

Tabanas dari Menpora dan Bank Exim serta puluhan hadiah lain menantimu.

TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
STASIUN YOGYAKARTA

M. Tashrif Tuasikal:

"Pengeboman Itu Shock Therapy"

Dulu, ia dikenal sebagai tokoh yang misterius. Ketika peristiwa pengeboman kantor cabang Bank Central Asia (BCA) terjadi pada 1984, Muhammad Tashrif Tuasikal tak segera tertangkap. Ia sempat buron selama dua bulan, sebelum ditangkap di Surabaya.

Akibat perbuatannya, tokoh yang mengomandoi peledakan itu dijatuhi hukuman 17 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Saya menyesal melakukan perbuatan yang tidak konstitusional itu," kata Tashrif saat acara pelepasan, Selasa, pekan lalu. Penyesalan itu, menurut pengakuannya, telah disadarinya sejak ia disidik pihak kejaksaan. Orang yang banyak berperan mempengaruhi sikapnya adalah B.T.P. Siregar (kini, jaksa tinggi Jakarta), yang ketika itu menjabat kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. "Saya sangat terkesan oleh sikapnya yang persuasif," ujar Tashrif.

Pengeboman BCA itu, kata Tashrif, sebenarnya dimaksudkan sebagai *shock therapy* kepada pemerintah Indonesia. Yang ingin mereka ingatkan adalah sistem ekonomi Indonesia yang didominasi golongan nonpribumi (Cina). Bagi Tashrif dan kawan-kawannya, keadaan itu tidaklah sehat. "Dengan pengeboman itu, kami berharap pemerintah memperhatikan masalah tersebut," ujarnya lagi.

Ini bukanlah yang pertama kali Tashrif dibui. Di masa Orde Lama, ia sempat mendekam dua tahun (1964-1966) di penjara karena dituduh terlibat dalam gerakan DI/TII. Pada 1973, bersama puluhan orang lainnya, ia berdemonstrasi menentang RUU Perkawinan yang sedang dibahas di DPR. Karena itu, mereka sempat ditahan selama beberapa bulan. Lima tahun kemudian, bersama Abdul Qadir Djaelani dan Rachmat Basuki, Tashrif kembali ditahan karena terlibat dalam Gerakan 20 Maret, yang menentang Aliran Kepercayaan, P4, dan KNPI masuk GBHN.

Profesi terakhir Tashrif adalah *mubaligh*. Sebagai seorang *mubaligh* pergaulannya dikenal luas. Ia, misalnya, kerap bertugas sebagai khatib salat Jumat di berbagai mesjid di Jakarta. Keahlian berceramah didapat Tashrif sejak ia kuliah di Akademi Agama Islam Solo. Usai tamat kuliah, 1963, ia sempat menjadi guru agama di sebuah SD, di Banjar, Jawa Barat. Untuk menghidupi keluarganya, bapak tujuh orang anak ini pernah pula berdagang beras di Tasikmalaya. Sejak 19[illegible], ia menetap di Jakarta dan bekerja sebagai guru privat pelajaran agama.

Di bidang politik, pengalaman Tashrif tidaklah terlalu banyak. "Saya ini orang lapangan," ujarnya. Meskipun begitu, menjelang Pemilu 1982, Tashrif masuk GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah), organisasi pemuda Partai Persatuan Pembangunan. Ia sempat menjadi ketua bidang dakwah GPK Jakarta.

Selama dalam tahanan, pria kelahiran Ambon itu tetap mengikuti perkembangan politik Indonesia. Tashrif menilai iklim politik sekarang ini sudah lebih terbuka. Itu terbukti, dengan langkah pemerintah merangkul kembali kelompok Petisi 50 dan mengundang Jenderal (Purn.) A.H. Nasution ke Istana Negara. "Bagaimanapun, saya dan teman-teman punya peran dalam perubahan itu," kata Tashrif.

Untuk lebih mengenal sosok Tashrif, Riza Sofyat dan Imran Hasibuan dari FORUM menemui Tashrif di rumahnya yang sederhana, di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Sebelum dibebaskan, A.M. Fatwa membuat makalah dulu, sedangkan Anda tidak. Mengapa begitu?

Bahwa saya dibebaskan bersyarat dan langsung keluar pada 24 Agustus, sebenarnya tak diduga sebelumnya. Saya perkirakan, saya baru dilepas dua hari setelah Fatwa.

Seusai Fatwa memaparkan makalahnya itu, saya dan Abdul Qadir Djaelani dipanggil Pak Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi, red.), B.T.P. Siregar, ke ruang kepala lembaga pemasyarakatan. Kepada kami diberi tahu bahwa besoknya saya akan dibebaskan bersyarat, dengan didahului acara pemaparan isi pikiran mengenai kesadaran bernegara yang berdasarkan Pancasila. Waktu itu, saya agak terkejut. Lalu, saya utarakan bahwa saya tidak bisa menulis makalah atau *paper* seperti Fatwa.

Pak Djaelani ternyata seperti saya. Karena itu, Pak Kajati mengatakan, kalau tak bisa menulis *paper* atau makalah, atau karya tulis, kami berdua bisa menggantinya dengan pidato. Kalau tak bisa berpidato, bisa dilakukan tanya jawab. Saya pun memilih berpidato saja. Ternyata, Panglima Kodam Jaya, Pak Hendropriyono, yang juga Ketua Bakorstanasda Jaya, mengabulkan keinginan itu.

BEBAS BERSYARAT:
Untuk kesekian kalinya Tashrif bebas dari penjara. Hanya, kali ini ia bebas bersyarat.

Apa esensi yang Anda pidatokan?

Mengenai kesadaran saya untuk bernegara yang berdasarkan Pancasila. Saat itu, saya katakan, sebagai warga negara Indonesia, saya menyadari benar bagaimana seharusnya melakukan kewajiban-kewajiban bernegara. Dan memang, selama ini, saya tak pernah merasa mengkhianati Pancasila dan UUD 1945. Yang saya lakukan, waktu itu, hanyalah sebuah protes untuk mengingatkan pemerintah bahwa terjadi ketimpangan. Tapi, sekarang saya sadari, tindakan saya itu tidak benar walaupun waktu itu peledakannya bukan untuk melukai orang sekitar BCA, tapi untuk mengejutkan saja.

> **Memang kami pilih cara peledakan. Karena, dengan demonstrasi maupun aksi-aksi ke DPR, kami pikir sudah tak mempan lagi**

Mengapa harus dengan ledakan dan mengapa memilih Bank Central Asia (BCA)?

Waktu itu, untuk mengejutkan memang kami pilih cara peledakan. Karena, dengan demonstrasi maupun aksi-aksi ke DPR, kami pikir sudah tak mempan lagi. Waktu itu, kan DPR memang lumpuh. Jadi, dengan pertimbangan untuk mengejutkan pemerintah agar menarik perhatiannya, dipilihlah cara peledakan.

Protes yang kami lakukan dengan cara peledakan itu adalah mengenai ketimpangan ekonomi, yang dikuasai kelompok minoritas Cina. Waktu itu, golongan pribumi yang berekonomi lemah diperlakukan tidak adil dibanding kelompok minoritas Cina yang mendominasi ekonomi. Itulah salah satu alasan kami, mengapa memilih BCA. Dan, harap diingat, aksi kami waktu itu tak berkaitan dengan masalah politik, tapi semata-mata masalah ekonomi. Jadi, tak ada kaitannya dengan peristiwa Tanjungpriok. Sebenarnya, peledakan itu hanya *shock therapy*.

Bagaimana Anda menilai kondisi perekonomian sekarang?

Sekarang, sih, sudah berubah. Pak Harto sekarang memperhatikan perekonomian rakyat kecil, khususnya muslim. Seperti menyetujui dan mendukung berdirinya Bank Muamalat, dan mengharuskan konglomerat untuk membantu koperasi. Nah, itu kan baik. Artinya, sudah agak berubah. Dan, saya percaya, mungkin akan terus dilanjutkan dengan perubahan-perubahan lainnya, dengan lebih memperhatikan masyarakat ekonomi lemah.

Saya percaya, salah satu sebab perubahan itu adalah aksi peledakan itu yang merupakan andil kami.

Anda mengatakan ada perubahan karena sudah dibebaskan bersyarat...

Tidak juga. Karena, itu memang seperti yang saya ikuti melalui koran atau teve. Buktinya memang begitu. Kalau saya mengatakan begitu, pasti begitu. Jadi, tak ada yang mempengaruhi atau dibuat-buat.

Justru apa yang saya ketahui selama ini, saya kemukakan juga kepada Pak Kajati. Saya, bahkan, *ngomong* mengenai aksi saya dulu tanpa rahasia lagi dengan Pak Kajati. Saya kemukakan bahwa obsesi kami dulu itu tak ada kaitannya dengan masalah politik. Kami memang benar-benar beraksi karena memperjuangkan masyarakat kecil, yang keadaan sosial-ekonominya di bawah taraf kemiskinan. Karena, waktu itu, ekonomi nasional didominasi oleh kelompok minoritas yang bermodal *gede*. Itu tidak sesuai lagi dengan cita-cita revolusi.

Pak Kajati memang manusiawi sekali melakukan pendekatan kepada kami, kelompok peledakan BCA. Cara pendekatan Pak Kajati itu bukan *security approach*, seperti yang dilakukan ABRI dalam menginterogasi saya dulu. Dengan upaya Pak Kajati yang cukup keras mengurus pembebasan bersyarat kami, rasanya, saya dan teman-teman berutang budi kepadanya.

Apa yang Anda maksudkan dengan security approach?

Yah, itu, pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan dengan cara siksaan-siksaan. Mereka itu, sebenarnya, tak pandai menggali fak-

KASUS BCA:
Kantor BCA yang diledakkan Tashrif pada 1984, sehingga ia dihukum 17 tahun penjara

ta-fakta dari tersangka. Nah, satu-satunya cara, dengan jalan siksaan.

Walau bagaimana, *security aproach* itu tidak cocok diterapkan di negara yang demokratis, yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia. Dan, Pak Harto sendiri, saya baca di koran mengatakan, pada prinsipnya *security approach* itu harus ditinggalkan dan beralih ke *welfare approach*. Artinya, pendekatan untuk menyejahterakan.

Pokoknya, bagi setiap orang yang pernah merasakan, *security approach* itu tak akan enak. Orang didesak untuk mengakui apa yang tak pernah dilakukan atau dialaminya. Karena penyiksaan itu, kendati tak bersalah, akhirnya terpaksa mengakui untuk menghindari penyiksaan. Jadi, sebenarnya, cara-cara seperti itu mendorong orang untuk membohongi dirinya sendiri. Kan kasihan.

Kapan Anda merasakan pemeriksaan dengan cara security approach itu?

Cara itu saya alami pada 1973, waktu saya ditangkap karena melakukan aksi protes terhadap UU Perkawinan. Kami, 13 orang, waktu itu ditahan, di antaranya seorang wanita. Kami ditahan pada bulan puasa selama 29 hari, dan baru dilepaskan pada malam takbiran secara massal dalam upacara di Kodam Jaya, yang kini jadi lapangan parkir Mesjid Istiqlal.

Kemudian pada 1978. Waktu itu, pada aksi memprotes sidang MPR agar tidak memasukkan aliran kepercayaan ke dalam GBHN. Aksi kami itu dikenal sebagai aksi 20 Maret. Protes dalam bentuk demonstrasi itu dipimpin Pak Djaelani. Dan, di situlah, saya pertama kali kenal dengan Pak Djaelani.

Sebelum 1973, apakah Anda pernah diinterogasi?

Iya, pernah juga, waktu Orde Lama. Tepatnya pada 1964, sebelum peristiwa G-30-S/PKI. Tapi, waktu itu, interogasinya masih bagus, tak dilakukan *security approach*.

Di mana Anda diperiksa seperti itu?

Kejadiannya di Garut. Ketika itu, saya difitnah sebagai anggota Darul Islam. Saya ditahan di kantor CPM dari 1964 sampai 1966. Jadi, saya sama sekali tak tahu, bagaimana Orde Lama tumbang dan berganti dengan Orde Baru.

Yang memfitnah saya itu PKI. Saya dilaporkan hendak mendirikan negara Islam. Padahal, upaya mendirikan negara Islam itu kan sudah berakhir pada 1962, setelah Imam Karto (Kartosuwiryo, red.) tertangkap.

Apakah dengan keluar-masuk penjara Anda tidak merasa meninggalkan kewajiban sebagai kepala keluarga?

Pertama, mesti dibedakan, apa yang saya lakukan kaitannya selalu pada perbuatan politik. Jadi, berbeda dengan pelaku kriminal. Jelas, kalau dikatakan meninggalkan kewajiban, memang benar. Tapi, walaupun begitu, juga ada suatu prinsip yang memang harus dilakukan. Sehingga, saya keluar-masuk penjara.

Sejak muda, prinsip saya untuk melakukan yang benar. Minimal, dari kacamata saya, dan maksimal, dari kepentingan agama, selalu mendorong saya untuk berbuat sesuatu. Maklum, sejak kecil saya sudah jauh dari orangtua. Jadi, saya harus putuskan sendiri. Kalau sudah tua seperti sekarang, maksimal, saya akan dahulukan kepentingan keluarga dan agama yang saya yakini.

> *Security aproach* itu tidak cocok diterapkan di negara yang demokratis, yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia

Tashrif Tuasikal, yang lahir di Haruku, Ambon, pada 1936 dan berputra tujuh itu, kelihatannya memang misterius.

SABAR:
Tashrif dan istrinya, Mardiyah Hayati, yang sabar ditinggal-tinggal selama keluar-masuk penjara

Ia tidak suka dengan publikasi. Karena itulah, tokoh di balik peristiwa peledakan BCA itu tak banyak diketahui masyarakat. "Kalau saya terkenal, artinya, saya punya beban, yang akibatnya, mengurangi nilai keimanan saya. Berarti pula, perjuangan saya tak lagi mengharapkan rida Allah," kata Tashrif.

Tokoh militan Islam, Tashrif, sejak muda memang sudah berpisah dari orangtuanya. Ia merantau ke Pulau Jawa, meneruskan pendidikan SMP di Malang, Jawa Timur, dan SMA di Solo, Jawa Tengah, dalam usia 18 tahun. Kemudian, ia kuliah di Akademi

PENDEKATAN:
Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta, B.T.P. Siregar, dianggap sangat baik dalam melakukan pendekatan kepada narapidana politik. Tashrif sangat terkesan akan cara-cara pendekatan itu.

Agama Islam Solo, jurusan agama Islam. Setelah itu, ia jadi guru agama di Garut. Ketika itulah, pada 1962, Tashrif mengenal Mardiyah Hayati, yang dinikahinya pada 1964. "Saya kasihan kepada keluarga. Mereka selalu saya tinggal-tinggal. Bisa dihitung, sebagian hidup saya, sejak remaja, saya habiskan dengan keluar-masuk penjara," kata Tashrif. Ia mengaku baru menetap di Jakarta pada 1969. Sebelumnya, Tashrif hanya pulang-pergi bila ada keperluan di Jakarta.

Anda dulu dikenal sebagai tukang bantai PKI...

Ah, itu tidak benar. Yang jelas, ketika terjadi peristiwa PKI itu, semua umat Islam berkewajiban menumpasnya, ya, GUPPI, GPI, PII, dan organisasi-organisasi Islam lainnya. Jadi, tak hanya saya yang berbuat itu.

Ketika dikeluarkan dari penjara pada 1966 itu, Anda kan mendapat keringanan...

Itu tidak benar. Saya keluar memang karena masa hukuman saya habis, waktu itu dua tahun.

Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Anda bertemu tokoh PKI, juga Subandrio dan Omar Dhani, bagaimana kesannya?

Yang jelas, mereka berdua sudah mengenal Islam secara benar. Radio di sel Subandrio tiap pagi dan sore selalu menyiarkan pengajian dan ceramah-ceramah Islam. Waktu saya tanya mengenai sikapnya, Subandrio mengatakan bahwa selama dia jadi pejabat di masa Orde Lama, tak pernah mengenal Islam, bahkan cenderung meninggalkannya sama sekali. Dia pun mengatakan, selama di penjara ini ada untungnya. Ia mengaku, justru mengenal Islam lebih mendalam lagi. Kalau ideologinya, jelas saya tak tahu, apakah sudah berubah atau belum.

Bagaimana hubungan Anda dengan sesama narapidana politik lainnya selama di penjara?

Tak ada persoalan. Satu sama lain saling mengikatkan seolah dalam satu keluarga. Sebab, merasa satu nasib, jauh dari anak, istri, dan keluarga. Pokoknya, hubungan kami cukup baiklah. Bisa Anda lihat sendiri ketika pembebasan kemarin.

Bagaimana perlakuan petugas Lembaga Pemasyarakatan Cipinang sendiri?

Juga tak ada masalah. Bahkan, bagi kami, Lembaga Pemasyarakatan Cipinang itu merupakan lembaga pemasyarakatan yang sangat bagus dalam memperlakukan narapidana politik. Misalnya, narapidana politik diperkenankan memasak makanannya sesuai menu yang dipilihnya dengan biaya sendiri. Dari segi keperluan administrasi pun, saya tak pernah merasa dihambat. Pokoknya, sangat baik dan manusiawilah.

Kabarnya Anda pernah ke Libya...

Ya, tapi tidak untuk belajar. Saya hanya jalan-jalan. Dan, tidak hanya ke Libya, tapi juga ke beberapa negara di Timur Tengah. Saya pergi ke Timur Tengah dua kali, yaitu pada 1975 dan 1976.

Adakah yang membiayainya?

Tidak, saya cari sendiri secara estafet. Dari Indonesia, saya ke Kualalumpur. Di sana, saya cari ongkos dari teman-teman. Lalu, dari Kualalumpur ke Bangkok, Bombay, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi. Di Arab Saudi, saya sempat melaksanakan ibadah haji. Dari Arab Saudi terus ke Libanon, Tunis, Aljazair, Maroko, terus ke Libya. Dari sana, ke Mesir kemudian kembali lagi ke Jedah, Irak, Pakistan, Kuala Lumpur, dan Indonesia.

KESADARAN:
Bendera Merah Putih, yang digenggam Tashrif, diiringi lagu Padamu Negeri, merupakan perwujudan kesadaran Tashrif.

Niat Anda sekadar jalan-jalan atau apa?

Saya hanya mengunjungi teman-teman, di samping cari pengalaman dan cari pekerjaan. Tapi, setelah melihat keadaan di sana, saya sadar, di Indonesia lebih enak. Setelah saya tanya-tanya lagi, di Eropa malah lebih parah lagi. Di sana, orang sibuk mengurus kepentingannya masing-masing. Kalau ada tamu, tak pernah diterima di rumah, tapi di hotel atau restoran.

Perjalanan ke Timur Tengah itukah yang memberatkan Anda di persidangan kasus peledakan BCA?

Itu tidak terungkap. Memang, mereka (maksudnya hakim dan jaksa) hendak mengungkapkan itu, tapi saya menolak. Saya jawab, persoalan itu sudah selesai. Kalau mau memaksakan juga, saya katakan, *file* saya itu ada di Kodam Jaya. Silakan saja ambil di Kodam Jaya.

RINDU:
Tak hanya Tashrif yang rindu berkumpul dengan keluarganya, tapi juga teman-temannya

Anda ditahan karena perjalanan itu...

Yah, saya diperiksa Kodam Jaya dan ditahan selama enam bulan, pada 1976. Memang, itu karena perjalanan saya ke Timur Tengah. *File* saya di Kodam Jaya, kalau tidak salah nomor 375 atau nomor 275, itu saya masih ingat.

Memang, ada upaya untuk mengaitkan soal itu dalam persidangan kasus peledakan BCA...

Mungkin. Tapi, waktu itu kan saya tolak. Dan, andaikata diperlukan demi negara juga, saya katakan, silakan ambil di Kodam Jaya, *file*-nya jelas. Saya tak mau mengungkapkannya lagi di persidangan.

Kodam Jaya memeriksa Anda karena ada tuduhan sebelumnya...

Masalahnya, memang karena ada tuduhan bahwa saya ke luar negeri itu, katanya, dalam rangka mencari dukungan politik di forum internasional. Dan, mencari dukungan dana serta persenjataan untuk perjuangan di Indonesia. Sehingga, pada 1976 itu, menteri penerangan waktu itu, Mashuri, mengumumkan bahwa ada dua kapal selam akan menurunkan senjata di daerah Jawa bagian Selatan. Karena pengumuman itulah saya diperiksa.

Peristiwa Anda itu dimuat di media massa...

Oh tidak. Itu kan rahasia negara. Hanya pengumuman Mashuri saja yang dimuat.

Katanya, Anda juga terlibat peristiwa Cikini...

Itu tidak benar. Hanya nama pelakunya saja kebetulan sama dengan nama saya. Saya tahu itu, kan, pelakunya Mohammad Tasrif, yang buron itu. Selain itu, kejadiannya kan pada 1957, saya ingat itu. Pelakunya Yusuf Ismael, dan tokohnya Zulkifli Lubis. Tahun-tahun itu, saya masih sekolah di Solo.

Ketika di Solo, Anda sudah berorganisasi...

Belum. Saya hanya mengutamakan kuliah. Jadi, kegiatan saya, yah, hanya belajar untuk memperdalam ilmu keagamaan. Tapi, saya sudah merasa ada ketidakpuasan dalam diri saya sebagai bangsa Indonesia. Saya tak puas melihat ada bagian dari wilayah Indonesia yang masih "belang". Mata saya sakit melihat Pulau Timor masih terbagi dua. Masih dikuasai kolonial.

Kalimantan dan Irian pun masih "belang", seperti Brunei dan Papua Nugini, misalnya...

Itu kan lain. Wilayah itu sudah merdeka dan berdaulat, dan tak pernah dikuasai oleh kaum kolonial yang menindas rakyat. Di samping itu, hubungan Indonesia memang sudah baik dengan negara-negara itu sejak dulu.

Ada yang menuduh Anda sebagai alat Ali Moertopo. Benarkah itu?

Yang jelas, saya tak mengenalnya secara langsung. Tapi, yang saya rasakan, dia sangat berperan dalam mengotak-atik perjuangan Islam. Dan, saya tak pernah berhubungan sama sekali dengan dia. Kalau ada yang mengatakan saya diperalat Ali Moertopo, itu tak benar. Begitu juga dengan Benny Moerdani.

Apa pendapat Anda tentang ICMI?

Kalau benar misinya mengentaskan kemiskinan, saya akan mendukung sepenuh hati saya dengan doa-doa saya. Karena, bagaimanapun juga rakyat berekonomi lemah itu mesti diperhatikan. Mengenai permainan politiknya, saya tak mau tahulah.

Perkembangan politik dari kelompok Islam lainnya menurut Anda bagaimana?

Saya tak tahu, bagaimana perkembangannya. Hanya, kalau membaca dari koran, mereka cukup baik. Artinya, itu pun tak lepas dari sikap pemerintah yang kini tidak begitu mencurigai lagi, apa yang dilakukan organisasi-organisasi Islam. Itu langkah yang baik. Apakah itu hanya rekayasa saja, saya tak tahu. Saya tak ingin memupuk kecurigaan itu. Dan lagi, yang saya ketahui, itu kan hanya sebatas dari koran di dalam penjara.

> Lembaga Pemasyarakatan Cipinang itu merupakan lembaga pemasyarakatan yang sangat bagus dalam memperlakukan narapidana politik

Tashrif, dalam kehidupan sehari-harinya pendiam, kata istrinya, Mardiyah. Tapi, perhatiannya besar sekali terhadap keluarga. "Disiplin Islamnya benar-benar diterapkan, jadi bukan hanya di bibir saja," kata Mardiyah.

Selama beberapa kali ditinggalkan dan selama di penjara, kata Tashrif, yang menghidupi keluarganya adalah istrinya. Bahkan, karena kegigihan istrinya itu pula, katanya, anak ketiganya berhasil mendapat bea siswa di Universitas Islam Kuala Lumpur, Malaysia. "Saya bangga dengan keuletan istri saya, yang bisa membimbing anak-anak saya," ujar Tashrif.

Dari tujuh putranya, Tashrif mendapat dua orang cucu, masing-masing dari anaknya yang pertama dan kedua. Kata Tashrif, selama ia di penjara banyak sekali perubahan yang terjadi di lingkungan keluarganya. Misalnya, rumahnya yang di Gang Bataco, Ulujami, baru pertama kali ditempatinya. "Saya baru tiga hari mengenal lingkungan rumah saya ini," katanya. Sebelumnya, Tashrif tinggal di Rawasari, Jakarta.

Menurut Tashrif, dia sadar, bebas bersyarat itu mengandung konsekuensi. Ia pun menyadari, dalam tenggang waktu bebas bersyarat sembilan tahun mendatang, sampai 2002, dirinya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. "Saya sendiri sudah bertekad untuk tidak macam-macam. Saya sudah tua. Sekarang ini, cukup memperhatikan keluarga, bertakwa kepada Allah. Itu saja," kata Tashrif. □

Dikotomi ABRI-Sipil?

Harold Crouch
Pengamat Politik dan Militer dari The Australia National University

Pada awal Orde Baru, ABRI memang merupakan kekuatan politik yang menentukan. Semua instansi kunci dipegang ABRI dan kekuatan-kekuatan sipil tak diberi kesempatan untuk berkembang. Malah ruang geraknya semakin sempit. Golkar dibina ABRI bukan untuk menyalurkan kehendak rakyat kepada pemerintah, tapi sebagai alat untuk menjamin kemenangan dalam pemilu. Sedangkan parpol, seperti Parmusi dan PNI, mengalami intervensi yang dilakukan perwira-perwira intel dan bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin-pemimpinnya "sesuai" dan dapat dikendalikan.

Bagaimana keadaannya pada awal 1990-an? Memang, kedudukan parpol tidak banyak berbeda. Seperti halnya Parmusi dan PNI dulu, sekarang pun PDI tampaknya tidak dibenarkan memilih pemimpin sendiri jika pemimpin itu tidak mendapat "lampu hijau" lebih dahulu. Apalagi kalau lampu itu sudah "merah". Seperti PDI, PPP juga bebas memilih pemimpinnya sendiri asal pilihan itu "betul".

Namun, suasana politik secara umum pada 1990-an sangat berbeda ketimbang 1960-an. Dulu, suara pemerintah dan suara ABRI adalah seirama saja. Jika orang berbicara tentang pemerintah pada waktu itu, maksudnya ABRI. Dan, jika menyebut ABRI, maksudnya pemerintah. Tapi, sekarang, pemerintah bermakna pemerintah, dan ABRI bermakna ABRI.

Perubahan itu dapat dilihat dalam hal pemilihan ketua umum Golkar yang sedang banyak disoroti. Dulu, pimpinan Golkar disepakati secara bersama oleh pemerintah dan ABRI. Tidak ada calon "istana" ataupun calon "Mabes". Tapi, sekarang, kita mendengar nama-nama yang dikemukakan pihak yang dapat dikatakan mewakili "pemerintah", sedangkan nama lain dikemukakan oleh pihak yang mewakili ABRI.

Dalam hal ini, kita mungkin teringat akan politik di zaman Bung Karno. Waktu itu, suara pemerintah dan suara ABRI belum tentu senada, malah sering bertentangan. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa presiden dan ABRI selalu berkonfrontasi secara langsung. Sebaliknya, Presiden Sukarno berusaha untuk merangkul jenderal-jenderal tertentu dan meletakkan mereka di posisi-posisi penting dalam ABRI. Dengan demikian, dikotomi ABRI-Sipil tidak begitu jelas. Ada jenderal-jenderal yang dekat dengan istana dan, sebaliknya, ada yang kurang dekat.

Sekarang, dikotomi ABRI-Sipil tidak setajam dulu, apalagi kalau diperhitungkan bukan saja peran ABRI aktif tetapi juga keluarga besar ABRI. Dulu, hampir tidak ada jenderal purnawirawan karena, pada waktu itu, kebanyakan perwira Angkatan 45 belum berumur 55 tahun dan masih aktif walaupun banyak yang dikaryakan. Tapi, sejak akhir 1970-an, semakin banyak perwira menjadi purnawirawan. Justru jenderal-jenderal purnawirawan itu yang paling berani dan lantang mengeluarkan pendapatnya. Dan, pendapat-pendapatnya belum tentu sama dengan penguasa ataupun pimpinan ABRI, sehingga ada di antara mereka yang dianggap *dissident*.

Dikotomi ABRI-Sipil juga semakin pudar dalam hal pemilihan gubernur daerah dan ketua-ketua DPRD. Ada kalanya, pendapat dua calon yang sama-sama berpangkat jenderal, yang satu didukung F-ABRI dan yang lain didukung pihak sipil. Di daerah lain, F-ABRI mendukung calon sipil dari Golkar, tapi di daerah lain lagi menentang calon Golkar. Dibanding suasana politik beberapa tahun lalu, percaturan politik di tingkat daerah memang semakin "kompleks" dan tak menentu. Dulu, gubernur selalu didrop pusat. Sekarang, sering terjadi persaingan yang melibatkan unsur ABRI dan Sipil.

Mungkin ada pihak yang tidak begitu suka "kekacauan" seperti itu dan merindukan zaman serba tertib kembali seperti sebelumnya, ketika dikotomi ABRI-Sipil cukup jelas. Tapi, di segi lain, perkembangan-perkembangan baru itu patut disambut baik sebagai langkah positif ke arah demokratisasi. Sistem demokrasi memang kurang tertib dan kurang teratur. Tak ada lampu hijau dan lampu merah dalam pemilihan yang demokratis. Pemimpin-pemimpin harus dipilih secara bebas, apakah pemenangnya itu sipil atau ABRI.

Sudah tentu, kita tak dapat mengatakan bahwa dikotomi ABRI-Sipil sudah lenyap sama sekali. Perwira-perwira ABRI bukanlah individu yang boleh bertindak secara sendiri-sendiri dalam politik. Sebagai perwira ABRI, mereka tetap tunduk kepada disiplin militer. Justru doktrin ABRI sendiri yang menetapkan tanggung jawab ABRI dalam memimpin masyarakat, apakah berdasar asas *ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa* ataupun *tut wuri handayani*. Artinya, ABRI yang menuntun orang sipil, bukan orang sipil yang menuntun ABRI.

Masalahnya sekarang — sudah tentu melalui kacamata seorang pengamat asing — adalah sejauh mana ABRI membatasi diri dalam bidang politik, supaya golongan sipil dapat bergerak secara leluasa. Kelihatan sekarang bahwa ABRI sangat aktif dalam Golkar, sehingga banyak sekali anggota keluarga besar ABRI dipilih sebagai pemimpin Golkar di daerah. Apakah tujuannya sekadar untuk bekerja sama dengan sipil dalam tubuh Golkar, ataukah ABRI ingin merebut pimpinan Golkar agar organisasi itu dikuasainya? Seandainya pihak ABRI masih yakin, hanya seorang perwira ABRI saja yang sesuai untuk memimpin Golkar nanti, sudah tentu dikotomi ABRI-Sipil masih belum hilang. ❑

Membongkar Jaringan Pemalsu Uang

Poltabes Semarang mendapat penghargaan dari Amerika Serikat karena berhasil membongkar jaringan pemalsu uang. Rupanya, jumlah sindikat pemalsu uang memang sudah banyak.

Penanganan masalah uang palsu di Indonesia mendapat pujian. Dinas rahasia Amerika Serikat yang menyelidiki kasus kejahatan ekonomi, Secret Service, awal Bulan Agustus lalu, memberikan penghargaan kepada Poltabes Semarang. Penghargaan yang telah disampaikan lewat Bank Indonesia itu diberikan lantaran Poltabes Semarang dinilai sukses menggulung pemalsu uang dollar. "Penghargaan itu juga merupakan penghargaan kepada polisi, dan bangsa Indonesia secara umum," kata Kapolda Jawa Tengah.

Memang, belakangan, kasus pemalsuan uang banyak yang terungkap. Misalnya, di Pengadilan Negeri Bandung, Agus Sukirno, 47 tahun, dan Mustofa Sururi, 38 tahun, duduk di kursi terdakwa karena memalsukan uang pecahan Rp 20 ribu. Keduanya penduduk Desa Kemranggan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Agus bahkan menjabat kepala Desa Kemranggan. Menurut Jaksa, Aguslah penyandang dana proyek pemalsuan uang itu. Ia bekerja sama dengan teman sekampungnya, Slamet Saefulloh, yang mengaku punya klise uang palsu itu. Slamet memang pernah membuka usaha sablon. Untuk proyek itu, Agus menyediakan dana Rp 500 ribu.

Percobaan awal gagal. Gambarnya buram dan warnanya tak pas. Tapi, dengan bantuan teman Slamet di Bandung, Hasanuddin, akhirnya, mereka berhasil mencetak uang palsu yang mirip aslinya. Bahan yang dipakai kertas HVS.

Setelah mendengar kabar keberhasilan itu, Agus menyusul ke Bandung. Sebagai penyandang dana, ia menerima 150 lembar uang palsu Rp 20 ribuan. Untuk mengedarkannya, Agus membagikan uang palsu itu kepada Mustofa Sururi, Usep Saepuddin, dan Nasiruddin. Lewat merekalah uang itu diedarkan di Bandung dan kota-kota lain di Jawa Tengah. Imbalan bagi para pengedarnya setengah nilai nominal.

Untunglah, langkah sindikat itu akhirnya terjegal. Salah seorang pengedar, Sofyan, ditangkap polisi di Jalan Geger Kalong, Bandung. Sofyan mengaku mendapatkan uang itu dari Usep. Dan, awal Agustus lalu, Agus dan Mustofa ditangkap. Beberapa pengedar lainnya ikut ditangkap pula saat beraksi.

Dari 150 lembar, kata Agus, sampai akhir Juli, hampir semuanya sudah beredar. Namun, ia tak mau banyak bercerita tentang komplotannya. "Kepala saya pusing," katanya pendek.

Pada Agustus lalu, terungkap pula pemalsuan uang di di Bogor, Jawa Barat. Malam itu, seorang pemilik warung, Ayeb Sutisna, menerima uang Rp 10 ribu dari pembeli rokok Dji Sam Soe dan obat nyamuk. Ayeb curiga, uang itu palsu. Meskipun uang itu selintas mirip dengan aslinya, kertasnya lebih ringan dan tidak berbenang pengaman. Ia segera melaporkan hal itu kepada Polsek Cario Bogor.

Malam itu juga, polisi berhasil menangkap si pengedar, Marsid. Berdasar pengakuan Marsid, ditangkap pula Munasir. Di rumah lelaki berusia 30 tahun itu, ditemukan enam rim kertas folio yang diduga bahan baku uang palsu. Selain itu, didapati pula hasil foto kopi uang sebanyak satu rim. "Modus pemalsuannya memang dengan memfoto kopi uang asli ke atas kertas folio," kata Kasat Serse Polres Bogor, Letda Widodo.

Munasir mengaku, semula ia hanya iseng memalsu uang itu. Caranya, ia memfoto kopi uang asli ke atas kertas folio, kemudian mewarnainya. "Kebetulan saya senang melukis," kata satpam di Warung Buncit itu.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, juga tengah digelar kasus serupa. Terdakwanya Asan dan tiga orang temannya. Jumlah uang yang dipalsukan sekitar 7 ribu lembar, yang terdiri dari pecahan Rp 10 ribu dan Rp 20 ribu. Uniknya, salah seorang pengedarnya tertangkap ketika membayar seorang WTS di daerah puncak pada Maret lalu.

Cara Asan dkk. memalsukan uang itu sudah lebih canggih: menggunakan mesin offset. Selama 12 hari, sekitar bulan Februari dan Maret, uang palsu itu dicetak ke dalam 10 rim kertas duplikator yang permukaannya agak kasar sehingga menyerupai uang aslinya. Uang itu, menurut Jaksa R.S. Sudjono, digunakan untuk bermain biliar di Jalan Toko Tiga, Glodok. Namun, sebelum uang palsu habis diedarkan, kelompok itu sudah dibekuk polisi.

Di Bondowoso, Jawa Timur, Arief Soebijanto dan Abdul Rokhmad juga sedang disidang karena mengedarkan uang palsu. Ulah pengedar uang palsu itu terbongkar,

MEMBELI UANG PALSU: *Arief Soebijanto (kiri) dan Abdul Rochman, pengedar uang palsu di Bondowoso, Jawa Timur. Keduanya memperoleh uang palsu itu dengan membeli seharga setengah dari nilai nominalnya.*

berawal dari ribut-ribut di warung rokok milik Muryanto. Awal April 1993, Muryanto menerima uang palsu yang digunakan Arief, 23 tahun, untuk membeli rokok. Karena sadar uang itu palsu, Muryanto meminta Arief menggantinya dengan uang asli. Namun, Arief berkeras bahwa uang tadi asli.

Pertengkaran kedua lelaki itu akhirnya mengundang perhatian orang-orang yang berkumpul di sekitar kios rokok. Termasuk di antaranya Serda Cahyo, anggota Polres Bondowoso. Arief pun kemudian digiring ke Polres Bondowoso.

Dalam pemeriksaan polisi, Arief baru mengaku bahwa uang itu palsu. Ia mendapatkannya dari Abdul Rokhman, penduduk Sidoarjo, Jawa Timur. "Saya mau mengedarkan uang palsu karena akan diberi pekerjaan di Surabaya," katanya. Sampai ditangkap, Arief berhasil mengedarkan 26 uang palsu dengan nilai nominal Rp 10 ribu. Polisi segera menangkap Abdul Rokhman, 24 tahun.

Di Minahasa, Sulawesi Utara, kisahnya lain lagi. Akhir Juni lalu, James Sonny Putong, 24 tahun, terpaksa ditembak kakinya oleh polisi karena melarikan diri ketika akan dibawa ke kantor polisi. Sonny dicurigai sebagai pengedar uang palsu yang cukup meresahkan penduduk Minahasa dan sekitarnya.

Awalnya, kasir toko swalayan "Glen", Sulan Sumolang, mencurigai uang kertas Rp 50 ribu yang disodorkan Sonny untuk membeli rokok dan bir. "Soalnya, ketara bedanya: halus dan tidak ada benang pengaman," katanya. Borty Mandagi, pemilik toko swalayan itu melaporkan penemuannya kepada polisi. Ketika Koptu Suyanto tiba di lokasi, Sonny sedang makan di restoran "Hari Hari" di depan toko swalayan itu. Koptu Suyanto mengajak Sonny ikut dengannya. Namun, di tengah jalan, Sonny berhasil melepaskan diri dan kabur. Dia baru menyerah setelah kakinya ditembak Suyanto. Soalnya, Sonny mengancam akan menusuk Suyanto dengan belati panjang.

"Kini, kami masih menyelidiki, berapa jumlah uang palsu yang beredar di daerah ini," kata Kapolresta Minahasa, Letkol Piet Tacumansang. Diduga, uang itu dicetak di luar Minahasa karena mesin cetaknya tidak ada di daerah itu.

Akhir Agustus lalu, Suwardi divonis 6,5 tahun karena terbukti memalsukan mata uang rupiah dan dollar Amerika. Lelaki

TERTEMBAK: *Sonny Putong, tersangka pemalsuan uang di Minahasa. Polisi menembak kakinya karena ia melarikan diri ketika akan dibawa ke kantor polisi.*

berusia 29 tahun itu, menurut Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Enteng Masarin, melanggar pasal 245 KUHP. Dalam kasus itu, Suwardi bekerja sama dengan Mulyono, seorang pemilik percetakan.

Dalam aksinya, Suwardi mencetak yang palsu dengan nilai nominal Rp 20 ribu sebanyak 1.286 lembar dengan nomor seri yang sama, yaitu CC F 050336 tahun 1992. Sedangkan uang dollar yang dipalsukan pecahan 100 dollar AS sebanyak 20.500 lembar. Uang palsu itu dicetak dengan alat sablon di atas kertas HVS putih.

Atas keberhasilan itulah, Poltabes Semarang memperoleh penghargaan dari Amerika Serikat dan Bank Indonesia.

Mendengar vonis hakim, Suwardi, yang dikenal sebagai dukun di kampungnya, Bringin Jajar, Demak, sempat terisak karena kaget. "Saya tak menyangka, hukumannya sedemikian berat," katanya.

TIM FORUM

Yang Palsu, Yang Terlibat

James Sonny Putong tampak mengerang kesakitan akibat luka tembak di kaki kirinya. Sesekali, lelaki tampan berkulit putih itu mengeluh. "Rasanya, mau mati saja. Saya betul-betul kapok," katanya kepada FORUM di Rumah Sakit Bethesda, Tomohon, Minahasa, tempat ia dirawat. Luka tembak itu didapatnya ketika ia berusaha melarikan diri saat akan dibawa ke kantor polisi. Ia itu diduga sebagai pengedar uang palsu di wilayah Minahasa.

Sonny masih menyangkal bahwa ia terlibat pemalsu uang. Menurut Sonny, uang palsu yang dibelanjakan di toko swalayan "Glen" itu didapat dari salah seorang kawannya ketika ia bekerja sebagai pendulang emas di Lanut, Bolang Mongondow. "Saya dapat dari dia Rp 100 ribu," katanya. Namun, ia tak mau menyebutkan nama temannya itu.

Pihak kepolisian tetap akan memeriksanya dengan intensif. Apalagi, masa lalu Sonny tidaklah bersih. Bermodal badan yang kekar, lelaki tamatan SMA itu sering mangkal di terminal bis dan memeras sopir kendaraan umum. Tak heran bila ia pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Papakelan, Tondano, karena menikam salah seorang warga Kawangkoan, Minahasa.

Pengedar lain, Arief Soebijanto. Ia mengaku terus terang mengedarkan uang palsu. Ia mendapatkan uang palsu itu dari Abdul Rokhman, penduduk Sidoarjo yang ditemuinya di depan gedung bioskop Guntur Bondowoso, Maret 1993. Saat itu, Abdul menawarinya pekerjaan di Surabaya. Syaratnya, ia harus membantu Abdul mengedarkan uang palsu. "Saya mau karena ingin dapat pekerjaan," kata Arief yang masih menganggur itu.

Abdul Rokhman sendiri mendapat uang palsu itu dari Sumbri, 40 tahun, yang kini masih buron. Abdul mengaku mengenal Sumbri dengan perantaraan Satikan dan Sanusi. Pada pertemuan itu, Sumbri mengeluarkan contoh uang palsu senilai Rp 5 ribu. Uang itu bisa dibeli dengan harga setengah dari nilainya.

Dengan uang Rp 400 ribu, ia mendapat Rp 600 ribu uang palsu. "Harusnya saya dapat Rp 800 ribu, ternyata dia menipu saya," kata Abdul.

Pembuat uang palsu itu, kata Abdul, adalah Sumbri sendiri. Cara membuatnya seperti mencetak sablon. Sumbri menggunakan zat kimia tertentu yang dioleskan di atas uang asli lalu ditempelkan pada kertas bakal uang palsu. Hasilnya memang tidak sempurna. Siang hari, uang itu terlihat berbeda jauh dibanding yang asli. Warnanya buram dan tintanya mudah terkelupas. Karena itu, biasa diedarkan sore atau malam hari dan di daerah yang agak terpencil, sehingga perbedaannya tidak terlihat nyata. ☐

PERBUATAN CABUL

Setelah Si Jojon Mengintip

Gara-gara sering melihat orangtuanya berhubungan intim, seorang anak sering mencabuli teman sepermainannya.

Ketika para orangtua berhubungan intim, jangan sampai diintip anak sendiri. Bahaya. Sebab, jika sampai ketahuan, kemungkinan besar si anak ingin mencoba juga meskipun ia belum cukup umur. Seperti yang dilakukan Jojon, bukan nama sebenarnya, berusia 12 tahun.

Anak lelaki dari Desa Tanjung Ilir, Kabupaten Sarolangun, Jambi, itu mencabuli beberapa teman mainnya, Yeyen, Timbul, Anggi, dan Leni — semuanya nama samaran — karena sering melihat ayah dan ibunya berhubungan intim.

Perbuatan Jojon itu terbongkar pada pertengahan Agustus ketika Abdullah, kakak Yeyen, mengadu kepada ibunya bahwa ia melihat Jojon menindih adiknya. Ketika hal itu ditanyakan kepada Yeyen, bocah kecil berusia 6 tahun itu langsung menangis. "Ia *mengacuk* (menyetubuhi) saya," katanya. Selama ini, ia memang tak mau menceritakan peristiwa itu kepada orangtuanya. "Saya diancam akan dipukul kalau lapor," ujarnya.

Pengakuan Yeyen itu membuat sang ayah, M. Wagirin, tersentak. Lelaki berusia 48 tahun itu, yang bekerja sebagai Kepala Sekolah SD 26 Sekapuk, Jambi, lalu mencari Jojon, yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Jojon langsung mengakui perbuatan itu. Namun, ia menyangkal melakukan perbuatan itu dengan paksaan. "Waktu itu, Yeyen tidak menjerit atau menangis," katanya. Yeyen mengaku, ia tidak bisa menjerit karena Jojon membekap mulutnya.

Malam itu juga, Jojon dibawa ke Polsek Tabir untuk diperiksa. Kepada polisi Jojon mengaku tidak memerkosa Yeyen. "Saya hanya menindih dia saja," katanya lugu. Tak hanya Yeyen yang ia perlakukan seperti itu. Tiga teman Yeyen, yaitu Timbul, Laini, dan Enny, juga sering diperlakukan seperti itu oleh Jojon. Selain itu, saat mereka mandi di kolam, Jojon sering menjahili dubur teman lelakinya. Namun, semua temannya yang berusia 6 dan 7 tahun itu tidak ada yang mengadu karena takut dipukul Jojon.

Menurut Jojon, ia melakukan perbuatan cabul itu sejak kelas 2 SD. Penyebabnya, ia sering melihat orangtuanya melakukan hubungan intim. Maklum, dari dulu, ia memang tidur seranjang dengan orangtuanya. Karena miskin, orangtua Jojon hanya mampu memiliki rumah papan berukuran 4 x 4 meter. Di rumah, hanya tersedia satu tempat tidur untuk mereka bertiga.

Yeyen

Tak heran jika Jojon sering mengintip orangtuanya berhubungan intim. Dan, ketika orangtuanya bercerai, 1990, ia selalu tidur dalam kehangatan pelukan ibunya. "Jadi, saya ingin mencobanya dengan teman-teman," kata Jojon.

Sebagai anak tunggal yang sering ditinggal ibunya berladang, Jojon menghabiskan waktunya untuk bermain-main bersama teman-temannya. Setelah lelah bermain, mereka lalu tidur-tiduran. Kadang-kadang di rumah korban, tapi lebih sering di rumah Jojon. Di saat itulah, Jojon melampiaskan keingintahuannya. Celana dalam teman mainnya dilepas, dan mulailah ia menindih korbannya. Namun, Jojon mengaku hanya memandangi alat vital milik temannya, lalu menindihnya.

Menurut hasil visum dokter, alat vital Yeyen memang tidak luka dan selaput daranya masih utuh. Meskipun demikian, Wagirin tetap menginginkan penyelesaian tuntas karena peristiwa itu akan menimbulkan trauma bagi anaknya. "Anak saya yang baru masuk SD sudah dicabuli seperti orang dewasa. Dada saya rasanya sesak," kata Wagirin.

Karena perbuatan itu tidak tergolong pemerkosaan, pihak kepolisian tidak menahan Jojon. "Itu hanya perbuatan cabul biasa," kata Kadispen Polda Sumatra Bagian Selatan, Letkol Syarifuddin Madri Gumai. Karena itu, Jojon dikembalikan kepada orangtuanya, dengan perjanjian, ibu Jojon, Mariah, akan mengawasi anaknya agar tidak melakukan perbuatan itu lagi.

Namun, pada 21 Agustus, digelar sidang adat untuk kasus pencabulan itu. Keputusan sidang adat, orangtua Jojon diharuskan membayar *basuh* desa berupa satu ekor kambing. Paling lambat pada 3 September, kambing itu harus diserahkan kepada kepala desanya.

Mariah sangat terpukul oleh ulah anaknya itu. Ia tak menyangka sama sekali anaknya berbuat seperti itu kendati Mariah mengakui bahwa Jojon memang nakal. "Saya pernah punya niat membunuhnya karena kesal. Dia suka melawan," katanya. Ia pun malu terhadap keluarga M. Wagirin karena Jojon, yang sering dititipkan kepada keluarga itu, ternyata tega berbuat tak senonoh.

Karena malu, kini, Mariah pindah ke pondok kecil di ladangnya. Sedangkan Jojon, untuk sementara, diungsikan ke salah seorang saudaranya. "Saya sudah tidak tahu, bagaimana mendidiknya lagi," kata Mariah.

SRI RAHAYU DAN ANA (PALEMBANG)

PON XIII
Jakarta 1993

Surat Palsu Versi Klien

Seorang klien menuduh pengacaranya memalsukan tanda tangan dalam sebuah bundel surat. Surat-surat kaleng juga diterima sang pengacara.

Setelah sukses membongkar jaringan mafia tanah Sukolilo, Surabaya, pengacara Elsa Syarif diadukan kliennya ke polisi. Klien itu, Tjendrawati, 60 tahun, menuduh Elsa telah memalsukan tanda tangannya dalam sebuah bundel surat. Belakangan, Tjendrawati mencabut pengaduan tersebut. Tapi, polisi telah melimpahkan perkaranya ke kejaksaan.

Pengaduan Tjendrawati terhadap Elsa, sebenarnya ada kaitan dengan perkara tanah Sukolilo, beberapa waktu sebelumnya. Semula, Tjendrawati membeli sekitar 60 hektare dari penduduk Sukolilo, melalui seorang makelar tanah, Said Saleh.

Belakangan, datang Kajen alias Kwee Goan Tjoan yang mengklaim, dialah pemilik tanah yang dibeli Tjendrawati itu. Karena itu, Kajen melaporkan Tjendrawati kepada polisi. Tuduhannya, Tjendrawati memalsukan surat-surat tanah untuk menguasai tanah milik Kajen. Perkaranya pun diteruskan ke pengadilan. Di persidangan, Elsa bertindak sebagai pengacara Tjendrawati.

Karena Tjendrawati dianggap terbukti bersalah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menghukum Tjendrawati 10 bulan penjara, April 1991. Lalu, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menambah hukuman itu menjadi setahun penjara. Kajen akhirnya menguasai tanah yang disengketakan.

Elsa tidak tinggal diam. Ia menemui banyak keganjilan sewaktu membela Tjendrawati. Terutama, pada saat Tjendrawati diperiksa di Polda Jawa Timur. Elsa menilai, sejak awal, proses peradilan terhadap Tjendrawati sudah tidak *fair*. Ketika Tjendrawati ditahan, misalnya, Tjendrawati diperas Rp 375 juta oleh Kajen. Untuk memenuhi uang sejumlah itu, Tjendrawati sempat menjual berbagai perhiasan, sebuah mobil Honda Accord dan Mercy Tiger miliknya.

Konon, pemerasan itu terjadi dengan disaksikan beberapa petugas, antara lain Letkol (Pol.) Soewarno. Uang itu dimasukkan Tjendrawati ke dalam rekening Kajen, atas nama PT Mapan Rukun Santosa. "Saya bisa buktikan pentransferan itu," kata Elsa. Karena itu, Elsa menilai Tjendrawati sebenarnya "korban" permainan mafia tanah Sukolilo.

Tjendrawati memang pernah membuat bundel surat berisi peristiwa pemerasan yang dilakukan Kajen dan kawan-kawan terhadapnya. Bundel surat itu, misalnya, dikirimkan Tjendrawati kepada Panglima ABRI.

Bundel surat yang sama sampai kepada Kapolda Jawa Timur. Di situlah timbul perkara. Sebab, Tjendrawati tidak mengaku mengirim bundel tertanggal 8 Juli 1991 itu kepada Polda Jawa Timur. Ia juga membantah soal tanda tangan yang tercantum dalam bundel tersebut. Entah bagaimana, tiba-tiba Tjendrawati menuduh bekas pengacaranya, Elsa, yang mengirimkan bundel surat sekaligus memalsukan tanda tangannya. Tjendrawati lalu melaporkan Elsa kepada polisi pada 6 Juni 1992.

"Saya benar-benar kaget," kata Elsa. Sebab, pengacara asal Jakarta itu merasa tidak pernah mengirim bundel surat yang dimaksud, apalagi memalsukan tanda tangan Tjendrawati. "Apa untungnya buat saya," ujar Elsa. Elsa menduga,

TANAH SENGKETA: *Tanah sengketa di daerah Sukolilo itu punya siapa?*

ada oknum yang berusaha mengadudombakan ia dengan Tjendrawati. Dengan kata lain, ada oknum yang merekayasa pengaduan Tjendrawati itu. (Lihat, *Korban Mafia Tanah Sukolilo?*).

Tjendrawati akhirnya memang sadar. Pada 30 April lalu, ia mencabut pengaduannya. Tjendrawati juga menjelaskan, bundel surat yang dikirimkannya kepada Kapolda Jawa Timur adalah untuk kepentingan dirinya. Tapi, ternyata, polisi tetap memproses, bahkan melimpahkan berkas perkara itu kepada kejaksaan.

REKAYASA:
Tjendrawati (kiri), tim pembela dan Kajen di persidangan. Benarkah ada rekayasa?

Kepada FORUM, Kapolda Jawa Timur, Mayjen Emon Rivai Arganata, mengatakan perkara itu tidak termasuk delik aduan. Sehingga, sekalipun Tjendrawati mencabut pengaduannya, polisi tetap berhak melanjutkan penyidikan. "Jadi, kita tetap meneruskan perkara itu," kata Emon.

Elsa menilai, tuduhan pemalsuan surat tadi mengada-ada. Menurut Elsa, suatu surat baru dapat dikatakan dipalsukan bila pemalsuan tadi menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang bagi pelakunya, KUHP pasal 263 ayat 1. "Lalu, apa keuntungan yang saya peroleh, kalau benar saya memalsukan surat tersebut. Adanya surat tadi justru menguntungkan Tjendrawati," kata Elsa.

Dalam berita acara pemeriksaan polisi, Elsa mengaku dia memang yang membuat konsep bundel surat yang dikirim kepada Polda Jawa Timur. Itu juga atas permintaan Tjendrawati sendiri. Suatu saat, Waras Setiawan, suami Tjendrawati, datang kepadanya minta agar Elsa memperbaiki bundel surat terdahulu, yang dikirim kepada Panglima ABRI. Elsa akhirnya bersedia mengoreksi bundel surat tersebut.

Tujuannya agar bundel surat itu lebih mudah dibaca orang. Pada saat pengoreksian, bundel surat sebenarnya belum diberi tanggal, alamat, ataupun tanda tangan. Karena itu, mungkin saja benar Tjendrawati tidak menekennya. "Tapi, kalau Tjendrawati tidak menandatangani bundel surat itu, apa otomatis berarti saya yang melakukan," kata Elsa.

AGUNG DAN TOHA (SURABAYA)

Korban Mafia Tanah Sukolilo?

"Sekarang Saudari macam-macam buat laporan terhadap kelompok kami. Itu dapat mencelakakan diri Saudari sekeluarga." Itulah salah satu bunyi surat kaleng yang diterima Elsa. Elsa memang gagal membela Tjendrawati. Namun, ia berhasil membongkar jaringan mafia tanah, yang diduga dipimpin Kajen. Surat kaleng itu, diduga, berkaitan dengan terbongkarnya mafia tanah tersebut.

"Semula, Markas Besar Polri-lah yang meminta saya membongkar mereka," kata Elsa. Karena usaha Elsa, Markas Besar Polri kemudian menangkap 12 anggota mafia tanah Sukolilo, termasuk Kajen. Ketika ditangkap tim reserse Markas Besar Polri, Kajen berusaha menyogok petugas dengan uang Rp 150 juta, tapi upayanya gagal. (*Surabaya Minggu*, 30 Oktober 1991). Kajen, pada 1973 pernah dihukum setahun penjara karena menggelapkan sertifikat warga Gununganyar, Surabaya, akhirnya diseret ke pengadilan bersama rekan-rekannya.

Pengadilan Negeri Surabaya memang menghukum para terdakwa, kecuali Kajen. Hanya, Kajen dinyatakan bebas demi hukum oleh Majelis Hakim, 21 November 1991. Keputusan itu diperkuat pada tingkat banding (perkara itu sekarang di Mahkamah Agung, red.)

Elsa Syarif

Menurut Elsa, ada kemungkinan Kajen berada di belakang pelaporan Tjendrawati terhadapnya. "Sebelumnya, saya memang sering diancam orang-orang tak dikenal," kata Elsa. Dalam salah satu surat kaleng, misalnya, Elsa diancam akan dijebloskan ke dalam kerangkeng Polda Jawa Timur. Kabarnya, Kajen dekat dengan petugas di Polda Jawa Timur, yaitu Kepala Bagian Serse Umum Soewarno.

Namun, baik Kajen maupun Soewarno menolak isu yang mengatakan, mereka memeras Tjendrawati dan merekayasa laporan Tjendrawati terhadap Elsa. "Kalau benar saya menerima uang, tentu saya sudah tidak ada lagi di sini," kata Soewarno.

Pengacara Kajen, Pieter Talaway, juga membantah soal perekayasaan tersebut. "Tidak betul Kajen yang merekayasa," ujar Pieter. Menurut Pieter, soal pengaduan itu murni urusan antara Elsa dan Tjendrawati. Namun, Pieter berpendapat tidak ada jalan lain kecuali perkara pengaduan Tjendrawati tetap dilanjutkan sampai ke pengadilan. "Satu-satunya jalan, ya, diajukan ke sidang," katanya. ❑

HKBP

Buntut Lain Kericuhan Itu

Kodim yang menangkap dan menahan pendeta HKBP dipraperadilankan. Berwenangkah hakim memeriksa gugatan praperadilan terhadap militer?

Mempraperadilankan pihak militer ternyata tidak mudah. Setidaknya, itu terlihat dari kandasnya gugatan pendeta HKBP yang mempraperadilankan Kodim Tebing Tinggi. Marulan Sitorus, pendeta, menganggap penangkapan dan penahanan yang dilakukan Kodim 0204 Deli Serdang terhadapnya tidak sah. Karena itu, korban mempraperadilankan pihak Kodim lewat Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Tapi, pada 19 Agustus, Hakim Amir Sjarifuddin menilai pengadilan tidak berwenang memeriksa kasus demikian.

Marulan ditangkap Kodim ketika ia sedang memberikan kebaktian Minggu, awal Agustus. Tanpa sepotong surat tugas dan surat penangkapan, petugas menyeret Marulan ke markas Kodim 0204 di Tebing Tinggi, sekitar 90 kilometer dari Medan.

Pendeta HKBP Perbaungan itu diinterogasi berjam-jam. Tiga hari kemudian Marulan dibebaskan. Itu pun setelah Marulan terpaksa meneken surat pernyataan untuk mengakui Ephorus hasil Sinode Godang Istimewa tempo hari. Karena itu, melalui LBH Medan, Marulan mempraperadilankan Kodim. Tapi hakim memutuskan, pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan praperadilan Marulan terhadap Kodim Deli Serdang itu.

Sebenarnya, kandasnya gugatan praperadilan itu bukanlah yang pertama terjadi. Sebelum itu, Hakim Pengadilan Negeri Langkat, H.S. Hutahuruk, juga menolak gugatan praperadilan Pendeta Manurung terhadap Kodim Langkat.

Loebby Loqman

Suatu pagi, datang anggota Kodim Langkat menyampaikan surat kepada Manurung, pendeta HKBP Binjai-Langkat yang menentang kepengurusan pendeta P.W.T. Simanjuntak hasil Sinode Godang Istimewa. Surat Komandan Koramil Langkat, Letda Djafar Sidik, tadi meminta Manurung agar datang ke markas Kodim 0203 Langkat. Isi surat itu hanya menyangkut soal koordinasi. Tak jelas koordinasi tentang apa.

Manurung, ditemani istrinya, datang menghadap si pengundang. Beberapa jam setelah diinterogasi, seorang bintara intel, Sertu Singarimbun, menyuruh Manurung pulang. Namun, Singarimbun meminta Manurung datang lagi esok harinya. "Tak apa-apa," kata Manurung menirukan janji Singarimbun.

Besoknya, Manurung memang datang ke Kodim Langkat. Tapi setelah diinterogasi, Manurung dibawa ke Kodam I Bukit Barisan, Medan. "Alasannya, saya akan diwawancarai di Kodam," kata Manurung. Sejak saat itulah, Manurung tidak kembali lagi ke rumah. Menurut Manurung, dalam pemeriksaan itu, ia diperlakuan sewenang-wenang oleh para petugas. "Saya ditendang dan dipukul. Saya juga dimaki sebagai pendeta PKI, penipu, dan pendeta uang," ujar Manurung.

Delapan hari kemudian Manurung dilepaskan. Seperti halnya Marulan, sebelum ke luar, Manurung juga dipaksa meneken surat pernyataan agar mengakui Ephorus yang baru. "Semula saya tidak mau. Tapi karena dipaksa, ya, saya teken saja," katanya. Manurung kemudian mempraperadilankan Kodim Langkat ke pengadilan. Hanya saja, gugatan Manurung kandas. Hakim H.S. Hutahuruk menolak gugatan tersebut.

Dalam pertimbangan yuridisnya, hakim mengatakan pengadilan hanya berwenang mengadili sah tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik yang dimaksud adalah pejabat polisi atau pejabat negeri sipil yang ditentukan undang-undang. Sedangkan penangkapan dan penahanan terhadap Manurung dilakukan oleh aparat mili-
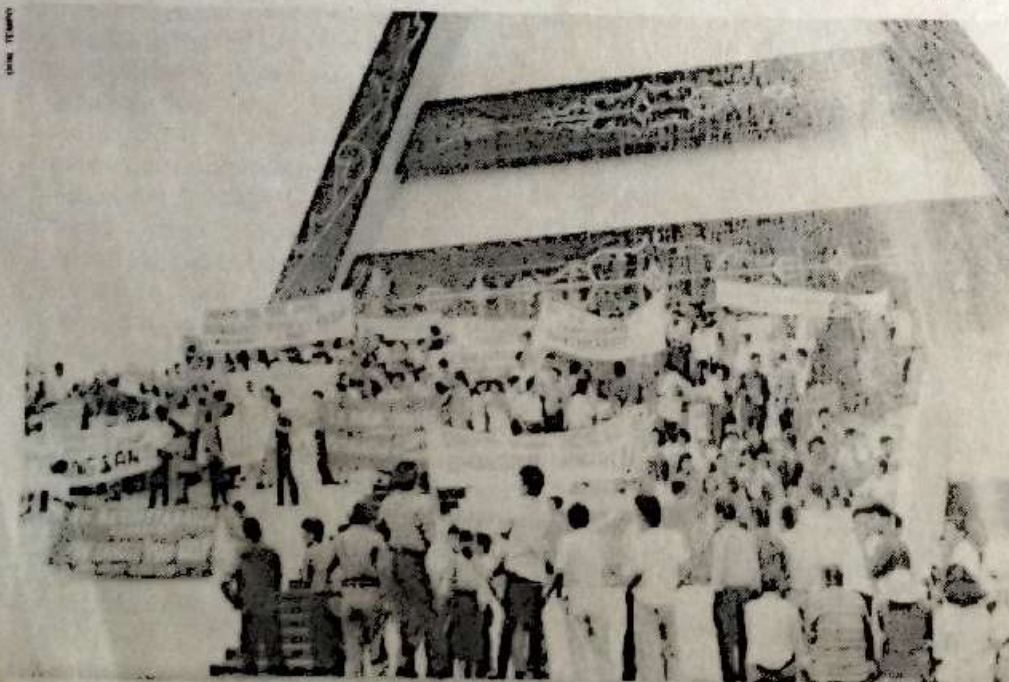
RUSUH: *Kerusuhan HKBP di Hotel Tiara Medan*

ter, bukan penyidik seperti yang ditentukan KUHAP. "Karena, perkara itu tidak termasuk dalam wewenang pengadilan," ujar Hutahuruk.

Pengacara Manurung, Borkat Harahap, langsung mengajukan kasasi. "Pertimbangan hakim jelas-jelas salah," kata Borkat. Menurut Borkat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 15 tahun 1983, pengadilan seharusnya berwenang memeriksa seseorang yang berstatus militer di muka sidang praperadilan. "Heran saya, kenapa hakim menyatakan tidak berwenang," ujar Borkat.

Pakar pidana, Dr. Loebby Loqman, mendukung pendapat Borkat. "Kenapa, sih, hakim tidak mau menerima gugatan itu," katanya. Menurut Loebby, KUHAP memang tidak mengatur secara tegas, apakah pengadilan berwenang menghadapkan militer dalam sidang praperadilan. Tapi, semestinya dilakukan penafsiran futuristis, hingga peraturan praperadilan KUHAP berlaku bagi anggota militer. "Sebab prinsipnya sama. Siapa pun tidak boleh menangkap atau menahan seseorang dengan sewenang-wenang," kata pakar pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.

Sebenarnya sudah ada contoh bahwa pihak militer bisa diajukan ke sidang praperadilan. Dalam perkara pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) beberapa waktu sebelum itu, misalnya, Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan mengadili gugatan praperadilan terhadap Kodim setempat. Artinya, pengadilan dianggap berwenang memeriksa gugatan praperadilan terhadap anggota militer.

Komandan Kodim Langkat, Letkol Djuandi Mansyur, menyangkal bahwa ia memerintahkan penangkapan dan penahanan Manurung. Ia hanya memerintahkan bawahannya untuk menyampaikan informasi kepada Manurung mengenai pembinaan sesuai petunjuk atasan. "Ternyata, anak buah saya salah menafsirkan perintah itu," kata Djuandi.

Sebaliknya, Komandan Kodim Deli Serdang, Letkol M. Syahrul, menolak memberi komentar kasus HKBP tersebut, sebab baru sekitar dua minggu ia menempati posnya. Namun, ia membantah bahwa Kodim Deli Serdang pernah menahan Marulan. "Kami hanya mengamankannya," kata Syahrul.

AGUNG DAN HARIS (MEDAN)

GOLPUT

WO untuk Saksi Ahli

Pengacara "kasus golput" di Pengadilan Negeri Semarang *walk out* (WO). Mereka protes terhadap penolakan hakim untuk menghadirkan saksi ahli.

Ini bukan cerita dalam film *LA Law*. Tim pengacara terdakwa kasus Golput ke luar (*walk out*) dari ruang sidang. Protes itu buntut terhadap penolakan hakim untuk menghadirkan saksi ahli yang mereka minta di Pengadilan Negeri Semarang dalam sidang 24 Agustus lalu. Tim pengacara lalu mengadukan soal *walk out* itu kepada Ketua Mahkamah Agung, Purwoto S. Gandasubrata.

Dalam acara pemeriksaan saksi, tim pengacara terdakwa, Luhut M.P. Pangaribuan, Mujiono, Puspoaji, Sugiarto, dan Akhmad Rachman dari Lembaga Bantuan Hukum meminta hakim menghadirkan saksi ahli yang meringankan terdakwa (*a decharge*). Para saksi ahli tadi, antara lain, Dr. Arief Budiman, J.E. Sahetapy, dan Emha Ainun Nadjib. Tapi, majelis hakim yang diketuai Soeharso menolak permintaan tersebut.

UNJUK RASA:
Demonstrasi mahasiswa membela Poltak dan Lukas di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Dalam sidang itu, duduk di bangku terdakwa mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Lukas Suwarno, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Poltak Ike Wibowo. Keduanya di Semarang.

Menurut Hakim Agung Tommy Bustomi, hakim bisa menolak saksi yang diajukan pengacara. "Hakim kan pimpinan di persidangan," katanya. Tapi, penolakan saksi hakim haruslah disertai pertimbangan, kata Tommy. Hanya, menurut Tommy, tindakan para pengacara itu tidak tepat disebut *walk out*. Hakim boleh saja mengizinkan mereka meninggalkan persidangan. "Mereka kan keluar sidang dengan izin hakim. Jadi, itu kan bukan tergolong *contempt of court*," kata Tommy.

Majelis hakim yang diketuai Soeharso memang menolak kehadiran saksi ahli dari pengacara. Sebab, majelis menilai para saksi ahli tidak menyaksikan langsung peristiwa pidananya. "Saksi dilarang mereka-reka kesaksiannya. Apalagi, kasus itu sudah diketahui umum, tidak perlu pembuktian khusus yang menghadirkan saksi ahli," kata Soeharso kepada Heddy Lugito dari FORUM.

Pertimbangan hakim seperti itulah yang diprotes pengacara terdakwa. Menurut Luhut, saksi ahli bukanlah saksi biasa yang harus melihat dan mendengar peristiwa pidananya. Saksi ahli yang diajukan jaksa juga tidak memenuhi kriteria demikian.

KUHAP sebenarnya mewajibkan hakim mendengar setiap keterangan saksi yang diminta jaksa atau pengacara. Tapi KUHAP juga memungkinkan hakim menolak permintaan tersebut. KUHAP memang tidak membedakan secara spesifik, apakah saksi yang dimaksud di sini termasuk juga saksi ahli.

Namun, keluar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 1985 yang menyebutkan, pemeriksaan saksi harus efisien, murah, dan sederhana. Dengan demikian, hakim bisa saja menjadikan SEMA tadi sebagai "pijakan" untuk memangkas kehadiran saksi di persidangan. Itulah yang banyak terjadi. Dalam sidang kasus pembunuhan satwa Taman Safari di Pengadilan Negeri Bogor, tempo hari, misalnya, Hakim Agustinus Hutauruk juga menolak saksi ahli yang disodorkan pengacara.

Luhut agaknya, masih mencoba menghadirkan para saksi yang pernah ditolak tersebut. Mereka sudah menghadap Ketua Mahkamah Agung Purwoto S. Gandasubrata. "Dari pembicaraan kami, tampaknya, Mahkamah Agung akan segera mengeluarkan petunjuk," kata Luhut.

AGUNG DAN WAHID

LSM Kelompok Penekan

Di negara-negara modern, perjuangan politik dilakukan oleh organisasi-organisasi spesialistis, dan organisasi itu digunakan sebagai senjata politik mereka. Kelompok-kelompok yang memiliki struktur dan hierarki itu, secara umum, berusaha memperjuangkan ideologi politik mereka, untuk mempengaruhi dan merebut kekuasaan, baik melalui cara-cara demokratis maupun dengan kekerasan.

Di dalam ilmu politik, organisasi-organisasi politik semacam itu bisa dibagi dalam dua kategori besar, yakni partai politik (parpol) dan kelompok penekan (*pressure group*). Bila tujuan utama parpol adalah bagaimana memperoleh kekuasaan atau berperan serta dalam penyelenggaraan kekuasaan, melalui parlemen dan pemerintahan, maka kelompok penekan justru menghindari kekuasaan. Tujuan kelompok penekan adalah bagaimana mempengaruhi dan menekan penguasa itu agar melakukan kebijakan sesuai yang mereka inginkan.

Kelompok penekan itu terbagi dua, yakni kelompok "eksklusif" dan "parsial". Kelompok "eksklusif" mengkhususkan kegiatannya dalam politik dan melakukan pelbagai campur tangan terhadap setiap langkah dan kebijakan politik pemerintah. Sedangkan kelompok "parsial" lebih gampang dikenali karena kegiatannya yang lebih jelas, terbuka, dan terbatas. Yang termasuk kelompok "parsial", misalnya, seluruh serikat buruh, organisasi profesi, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau kelompok cendekiawan.

Dilihat dari pola rekrutmen dan keanggotaannya, kelompok penekan juga terbagi dua, yakni kelompok kader dan kelompok massa. Kelompok kader anggotanya hanya terdiri dari para pemikir, cendekiawan dan intelektual saja, tanpa basis massa. Sedangkan kelompok massa lebih berakar kepada masyarakat banyak dan mati-hidupnya tergantung kepada banyak sedikitnya pendukung yang mereka himpun.

Di Indonesia, sekarang, sesuai UU Partai Politik dan Golongan Karya (UU No. 8 tahun 1985), kita hanya mengenal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar), sebagai organisasi yang memiliki struktur dan hierarki yang bertujuan kekuasaan.

Selain itu, kita juga mengenal organisasi massa (ormas) yang bisa dikategorikan sebagai kelompok penekan "parsial" yang bersifat massal. Misalnya, Nahdlatul Ulama (NU), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Sedangkan kelompok penekan yang bersifat kader tapi bisa dikategorikan "eksklusif", karena kekuatan "lobi" mereka ke pemerintahan dan ABRI, adalah Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia (ICMI), dan tentu saja kelompok Petisi 50. Di luar itu adalah kelompok penekan "parsial" lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik yang sudah maupun yang belum terdaftar di Departemen Dalam Negeri.

Kegiatan kelompok penekan yang "eksklusif" dan yang "parsial" adalah melakukan penyadaran opini, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat, melalui pernyataan-pernyataan keprihatinan mereka terhadap pelbagai masalah.

Namun, karena masih banyak kendala yang membatasi demokratisasi politik, keterbukaan, dan kebebasan menyatakan pendapat, akibatnya peranan kelompok penekan itu, baik yang "eksklusif" maupun yang "parsial", dalam sepuluh tahun terakhir ini, nampaknya lebih "berbunyi" dibanding parpol dan Golkar. Sehingga timbul kesan, tanpa kontrol dari kelompok penekan itu, niscaya keterbukaan, kebebasan pers, penegakan hukum, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, perbaikan kondisi perburuhan, dan kebebasan menyatakan kritik dan pendapat, tidak akan membuahkan hasil sebagaimana kita rasakan tahun-tahun terakhir ini.

Bahkan, ada pihak tertentu berpendapat, selama belum ada perubahan politik yang nyata — indikasinya harus dilihat dari pencabutan, perbaikan, atau perubahan terhadap sejumlah UU yang dinilai masih dijiwai oleh semangat pendekatan keamanan, misalnya UU Parpol dan Golkar, UU Pemilu, UU Subversi, UU Tentang Keanggotaan DPR/MPR, dan Peraturan Menteri Penerangan Tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) — maka peranan kelompok-kelompok penekan itu akan semakin penting dan dibutuhkan.

Karena itulah, Forum Utama kali ini berupaya merekam dan menguraikan apa, siapa, dan bagaimana masa depan, peranan dan perjuangan kelompok-kelompok penekan itu, khususnya yang terdiri dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), dalam membela dan memperjuangkan nasib rakyat banyak. Laporan utama ini juga berusaha mencari jawaban obyektif atas pertanyaan-pertanyaan sekitar keberadaan mereka, yang selalu dinilai kontroversial, dituduh memperjuangkan kepentingan pihak asing yang membiayai mereka, dan bahkan dianggap menjelek-jelekkan nama baik Indonesia di luar negeri. Tidak lupa pula mengenai apa dan bagaimana peranan dan perjuangan LSM di luar negeri, dan hubungannya dengan LSM di Indonesia.

Menuju "Par

Meskipun kerap dianggap sebagai oposan, peran politik LSM di Indonesia semakin besar. Dapatkah mereka menjadi "partai" alternatif?

Kasus ketidakberesan pembangunan Waduk Kedungombo di Boyolali, Jawa Tengah, sempat membuat citra pemerintah Indonesia di mata internasional terganggu. Itu karena kasus tersebut "dikampanyekan" tokoh-tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM), dalam konferensi International NGO Forum on Indonesia (INGI) di Niewport, Brussel, Belgia, 1989.

Berkat kampanye gencar LSM itu, kebijakan pemerintah mengenai pembangunan sedikit berubah. Ketidakberesan dalam soal ganti rugi dan pemindahan penduduk jadi lebih diperhatikan. Kampanye LSM juga berperan dalam perkara Scott Paper, yang tak jadi menanamkan modalnya dalam pembangunan pabrik kertas dan pulp di Irian Jaya. Begitu pula dalam beberapa kasus tanah, seperti Badega, Cimacan, dan Majalengka.

Memang, tak semua upaya perjuangan LSM membantu rakyat kecil itu berhasil mengubah kebijakan pemerintah. Namun, perkembangan yang terjadi menunjukkan peran politik LSM di Indonesia kini semakin penting. Ruang gerak mereka di tingkat *grass root* dianggap dekat dan tahu masalah sehari-hari rakyat kecil. "Prakteknya, LSM berhasil mengambil alih peran partai politik," ujar Arief Budiman, sosiolog dari Universitas Satya Wacana, Salatiga, yang dikenal dekat dengan kalangan LSM. "Karena itu, LSM bisa diharapkan sebagai *embrio* "partai" alternatif."

Harapan Arief mungkin berlebihan. Namun, yang jelas, gebrakan-gebrakan LSM belakangan ini menunjukkan perannya sebagai *pressure group* (kelompok penekan) semakin meningkat. Soal ancaman pencabutan sistem preferensi umum (GSP) oleh pemerintah Amerika Serikat, misalnya, tak lepas dari kampanye kalangan LSM mengenai kehidupan buruh Indonesia yang masih memprihatinkan. Selain itu, pelarangan Kongres Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), sebuah LSM perburuhan, juga disorot tajam oleh pemerintah dan Kongres Amerika Serikat.

Para pengusaha juga ikut dibuat sibuk oleh LSM. PT Barito Pacific Timber, misalnya, kini sibuk menepis aksi kampanye pemboikotan penjualan sahamnya di dalam dan luar negeri. Pasalnya, perusahaan milik *taipan* kondang Prajogo Pangestu itu, dinilai telah merusak hutan. Tak kurang dari 15 LSM dalam dan luar negeri, yang tergabung dalam panji "Green Investment", mendukung gerakan pemboikotan tersebut.

Fenomena kemunculan LSM di Indonesia menarik untuk diamati. Meskipun sudah mulai muncul sejak 1960-an, perkembangan pesatnya baru terjadi dua dekade terakhir. Suburnya pertumbuhan LSM itu, menurut Arief lagi, disebabkan kesuntukan terhadap sistem politik yang tidak aspiratif. Fungsi partai politik sebagai pengemban aspirasi masyarakat tidak berkembang sebagaimana mestinya. "Akibatnya, banyak intelektual muda yang tak puas. Dan, akhirnya, membentuk LSM untuk menyalurkan aspirasinya," tutur Arief.

Saat ini, jumlah LSM yang tercatat di Ditjen Sospol Depdagri saja lebih dari 4.000. Yang belum mendaftarkan diri jauh lebih banyak lagi. Anggotanya, yang tersebar di seluruh provinsi, bisa mencapai puluhan ribu orang. Namun, tak semua LSM, baik yang terdaftar maupun yang tidak, masih aktif melakukan kegiatan.

Rumusan LSM sendiri sulit ditentukan. Namun, menurut Direktur LP3ES (Lembaga Pendidikan, Penelitian, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), Rustam Ibrahim, secara sederhana LSM bisa diartikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. Tujuannya, untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk LSM umumnya kecil, tidak birokratis, dan independen.

AGUS BUTAR-BUTAR

ALTERNATIF:
Di masa yang akan datang, LSM bisa diharapkan menjadi embrio "partai" alternatif.

Ruang lingkup kegiatan LSM sangat luas. Mulai dari soal keluarga berencana, lingkungan hidup, bantuan hukum, sampai penyuluhan pertanian. Cara melakukan kegiatannya juga bermacam-macam. Ada yang sekadar melakukan penelitian atau penerbitan buku, ada pula yang langsung terjun membantu mengatasi masalah yang

ai" Alternatif

dihadapi masyarakat. LP3ES, misalnya, sejak lima tahun lalu mengembangkan program pengembangan pesantren di pedesaan. Lembaga yang didirikan pada 1971 oleh 45 intelektual muda itu — di antaranya Emil Salim, Dawam Rahardjo, Tawang Alun, dan Aswab Mahasin — pernah pula bekerja sama dengan Pemda DKI dalam program perbaikan kampung. "Kami memang memilih pendekatan persuasif, sebagai mitra pemerintah," kata Rustam lagi.

Pendekatan yang sama dilakukan pula oleh beberapa LSM lainnya, seperti LSP (Lembaga Studi Pembangunan), PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), dan Dian Desa (Yogyakarta). Dengan pendekatan "mitra kerja" tersebut, kata Direktur Cides (Center for Information and Development Studies), Adi Sasono, LSM terbukti mampu mempengaruhi beberapa kebijakan pemerintah. Bahkan, sejak awal 1980-an, kalangan LSM telah diikutsertakan dalam penggodokan beberapa RUU, antara lain RUU Lingkungan Hidup, RUU Perumahan, dan RUU Koperasi. "Ini kan berarti LSM telah berperan sebagai *pressure group*," kata Adi Sasono, pendiri LSP, yang kini juga aktif sebagai pengurus ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).

ADVOKASI:
Sebagian LSM bergerak di bidang advokasi masyarakat.

Namun, tak semua LSM memilih cara kerja seperti itu. Sebagian lagi lebih menyukai aksi advokasi yang lebih frontal. Mereka, misalnya, sering ikut menggerakkan masyarakat untuk mengadu ke berbagai instansi pemerintah di Jakarta. Terutama dalam kasus-kasus penggusuran tanah rakyat. Itulah sebabnya, mereka kerap membuat "gerah" para pejabat pemerintah dan pengusaha. "Mereka sering ke luar rel. Kegiatan LSM kan mestinya membantu kesejahteraan masyarakat, bukan mengurusi politik," ujar Dirjen Sospol Departemen Dalam Negeri, Soetojo N.K.

Arief Budiman

Karena itulah, Departemen Dalam Negeri, selaku pembina politik dalam negeri, merasa perlu "membina" LSM. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk Forum Komunikasi Mendagri dengan LSM. Forum itu dibentuk di masa Rudini menjadi menteri dalam negeri 1989, menyusul "Insiden Brussel", yang sempat membuat panas kuping para pejabat tinggi Indonesia itu.

Tak lama kemudian, keluar Instruksi Mendagri No. 8 tahun 1990 tentang Pembinaan LSM. Dalam ketentuan itu, antara lain, disebutkan bahwa sebuah LSM harus bermotif nirlaba (*nonprofit*). Mengenai pendanaan, selain dari sumber keuangan sendiri, LSM diizinkan memperolehnya dari luar negeri. "Asal sesuai dengan peraturan," kata Soetojo. Artinya, setiap bantuan dana asing, apalagi dalam jumlah besar, harus dilaporkan terlebih dahulu kepada pemerintah.

Perihal bantuan dana asing itu pula yang sering menjadi ganjalan bagi LSM. Banyak yang melihat, ketergantungan LSM kepada dana asing itu sebagai kelemahan. "Ketergantungan itu menyebabkan LSM Indonesia tidak mandiri secara politis," kata pengamat politik dari UI, Arbi Sanit. Sebab, menurut Arbi, bagaimanapun lembaga-lembaga donor tersebut memberikan bantuan dengan pamrih tertentu. Mereka juga punya kerangka kebijakan alokasi dana yang mereka berikan.

Lazimnya, dana yang disediakan lembaga donor itu sebagian besar jatuh ke tangan LSM-LSM kelas kakap, atau Bingo (*Big NGO*), seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LP3ES, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), PKBI, LSP, Yayasan Bina Desa, dan Walhi. Sedangkan ribuan LSM *gurem* hanya berharap mendapat dana lewat program kerja sama dengan para Bingo itu. Keadaan itu mengakibatkan persaingan antar-LSM sendiri. Dua tahun lalu, misalnya, beberapa aktivis LSM — di antaranya Direktur Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia, H.J.C. Princen, dan Koordinator Sekretariat Pelestarian Hutan Indonesia (Skephi), S. Indro Tjahjono — membentuk Indonesian Front for The Defence of Human Rights (INFIGHT) untuk menyaingi keberadaan INGI, yang dianggap sudah tak mampu lagi menyalurkan aspirasi LSM-LSM kecil.

Situasi persaingan itulah yang dikritik Adnan Buyung Nasution. "Kalau begitu terus, lama-lama bisa habis dan tidak membawa gaung untuk perubahan struktural," ujar Ketua Dewan Pengurus YLBHI itu. Melalui LBH di pusat maupun cabangnya di daerah-daerah, Buyung berniat membentuk jaringan kerja sama antar LSM. "Ini penting, agar seluruh potensi LSM bisa berjuang bersama-sama," katanya.

Mungkin, dengan begitu, bila tiba saatnya, LSM bisa berpotensi menjadi "partai" alternatif.

Tim FORUM

Menekan dan Menggugat Ketidakberesan

Beragam kegiatan dan cara dilakukan LSM untuk mencapai sasaran. Mereka bergerak hampir di semua wilayah ketidakberesan.

Kantor redaksi media massa di Jakarta tak kaget lagi jika dari mesin faksimile mereka tiba-tiba — di malam buta sekali pun — muncul selebaran dari Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (Skephi) atau Walhi. Isinya pun beragam. Bisa informasi pencemaran lingkungan atau juga pernyataan keprihatinan terhadap kasus tertentu. "Kami memang berharap teman-teman di pers mau menyebarkan informasi itu," kata Koordinator (Skephi), S. Indro Tjahjono.

Pentingnya penyebaran informasi itu jelas sangat diperlukan para pengurus LSM tersebut. Dan, itulah, dalam bahasa pengamat politik dari UI, Maswadi Rauf, "Berguna sebagai *pressure group* buat pemerintah."

Sebagai kelompok penekan atau tidak, yang jelas aktivitas LSM, seperti kata Maswadi, akan menjadi kontrol sosial bagi tindakan pemerintah.

Kenapa begitu? "Karena ia memang lahir untuk, antara lain, mengajar masyarakat bersikap kritis. Jadi, wajar jika aktivitasnya mengarah ke situ," ujar Erna Witoelar, yang sudah bergelut selama puluhan tahun dalam kegiatan LSM. Erna tentu saja punya bukti nyata untuk itu. "Ratu LSM" Indonesia itu sudah puluhan tahun bergelut di lembaga yang sering "bentrok" dengan kebijakan pemerintah.

Kasus pembangunan Waduk Kedungombo pada 1987, adalah contoh "monumental" keterlibatan LSM dalam menyoroti kebijakan pembangunan sekaligus keberpihakannya kepada rakyat yang dirugikan. Waktu itu, berawal dari kerja LBH Yogyakarta dengan Yayasan Bina Kesejahteraan sosial, Solo, yang membantu ribuan warga Kedungombo yang sedang "tarik urat" dengan pemerintah soal ganti rugi tanah mereka — sementara yang lain tak mau pergi. Puluhan LSM pun ikut berpartisipasi dengan berbagai macam cara dan gerakan.

Selain mengangkat aksi, dengan turun ke jalan seperti yang dilakukan puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa yang tergabung dalam "Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Kedungombo", ada pula Panitia Dharma Karya bagi Anak-Anak Kedungombo yang dipimpim Budayawan Y.B. Mangunwijaya.

DOK. TEMPO

KEDUNGOMBO:
Pembangunan Waduk Kedungombo di Jawa Tengah juga melibatkan puluhan LSM yang bersimpati kepada rakyat.

Liputan pers, baik nasional maupun internasional, tentang aksi Kedungombo bergaung ke mana-mana. Bahkan, *aide memoire* International NGO Forum on Indonesia (INGI) pada 1989 segera mengecam cara-cara pemerintah Indonesia menangani kasus Kedungombo itu. Dan, hasilnya memang tampak. Selain penanganan ganti rugi lebih tertib dan tanpa "sunatan", warga juga dibolehkan menempati tanah Perhutani di sekitar waduk itu.

Mengapa LSM bisa begitu cepat menggalang persatuan? Menurut Erna, itu karena faktor personel pengurus LSM sendiri. "Rata-rata anak muda atau mahasiswa," kata Erna. Dan, dalam usia demikian, semangat dan idealisme mereka sangat tinggi.

Mahasiswa dan LSM memang bisa disebut teman sejalan untuk hal-hal demikian. Kasus tanah Cimacan (Bogor) dan tanah Badega (Garut), yang akan disulap menjadi lapangan golf pada 1986-an, misalnya, juga melibatkan LSM.

Seperti kasus Badega, kasus Cimacan pun mengundang aksi LSM dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Aksi itu, antara lain, berkemah dan menggelar poster di lokasi tanah tersebut. Bahkan, dengan diantar oleh pelaku aksi itu, puluhan petani Cimacan mengadu ke DPR tentang nasib tanah mereka, yang dibeli paksa PT Bandung Asri Raya dengan harga Rp 30 per meter.

Selain itu, kasus yang pernah mencuat adalah soal gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesai (YLBHI) terhadap PT Inti Indorayon Utama di Simalungun, Sumatra Utara. Walaupun gugatan itu kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1989, kasus itu memberi harapan baru kepada LSM. Sebab, untuk pertama

kalinya hakim mengakui Walhi sebagai wali masyarakat yang berhak memperkarakan PT. IIU.

"Protes" terhadap masalah pencemaran atau perusakan lingkungan dari tahun ke tahun, agaknya, selalu melibatkan LSM. "Wajar saja. LSM tidak mungkin menunggu, misalnya, masyarakat semakin menderita atau lingkungan semakin rusak," kata Direktur Eksekutif Walhi, Zulkarnaen, yang bergelut di LSM sejak masih mahasiswa ITB.

Kasus pencemaran Kali Tapak oleh sejumlah industri di Semarang, atau pencemaran Sungai Siak oleh PT Caltex, misalnya, semuanya melibatkan LSM.

Kasus pencemaran Kali Tapak, bisa menjadi contoh efektivitas "gertakan" LSM. Pencemaran yang membuat warga sepanjang kali itu bertahun-tahun menderita karena limbah pabrik yang dibuang begitu saja ke Kali Tapak, membuat sejumlah LSM di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jakarta turun tangan. Setelah berbagai pendekatan gagal, LSM itu mengeluarkan imbauan, agar masyarakat memboikot produk pabrik tersebut.

Aksi itu bisa dibilang berhasil. Buktinya, Pemda Jawa Tengah serius ikut menangani kasus itu. Tapi, apakah semuanya lebih baik berakhir dengan pemboikotan? "Tidak, itu salah satu alternatif terakhir. Dan, aksi itu kan tidak mematikan pabrik," kata Erna.

Kini, kasus pencemaran lingkungan, bisa jadi, tak ada yang terangkat ke permukaan tanpa keterlibatan LSM. Kasus tambak udang yang hancur karena pencemaran Sungai Cidurian oleh PT Indah Kiat di Serang, tercemarnya Kali Surabaya, juga Sungai Siak oleh PT Caltex, adalah sebagian kasus pencemaran lingkungan yang ditangani LSM. Bahkan, kini, kasus pencemaran hutan Simalungun oleh Inti Indorayon, yang sempat "beku" beberapa tahun, mulai terangkat lagi. "Akhirnya, apa yang kita katakan dulu benar," kata Erna.

Tentu saja, itu tidak terbatas pada lingkungan. Wilayah "politik" pun dimasuki LSM. YLBHI, misalnya, merupakan LSM yang nyaris setiap tahun tak pernah berhenti menangani kasus-kasus yang selalu berhubungan dengan politik atau melibatkan pemerintah. Peristiwa Tanah Merah, pembunuhan Marsinah, atau pengadilan aksi "Golput", yang kini tengah berlangsung di Semarang, adalah contoh beberapa kasus yang ditangani lembaga itu. "Kita memang tidak lepas dari topik yang masih diperjuangkan masyarakat dunia. Yaitu, persoalan demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan lingkungan hidup," kata Ketua YLBHI, Adnan Buyung Nasution.

LBH memang punya rekor sendiri dalam advokasi hukum. Peristiwa Malari 1974, peristiwa Tanjungpriok, pengeboman BCA, Komando Jihad, kasus Lampung, semua melibatkan LBH sebagai pembela. "Pokoknya ketidakdilan struktural di Indonesia," kata Buyung.

PENGADUAN:
LSM dan mahasiswa kerap menjadi ujung tombak dalam memperjuangkan hak masyarakat

Daftar itu bisa diperpanjang lagi jika menunjuk peran LBH di daerah, seperti Yogyakarta, Bandung, atau Surabaya. LBH Bandung, misalnya, kini, disibukkan oleh buntut peristiwa Haur Koneng. "Beberapa korban meminta perlindungan kepada kita. Dan, tim pencari fakta yang kita bentuk sedang mencari bukti," kata Koordinator Pelaksana LBH Bandung, Efendi Saman.

Ketidakadilan dan ketidakberdayaan masyarakat itu tentu saja tidak terbatas menimpa pada tingkat bawah saja. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), misalnya, pada 1991 pernah "memaksa" pemerintah menarik peredaran semua obat diare yang mengandung *hidrokloride*. "Sampai kini, perlindungan terhadap konsumen kita memang lemah," kata Ketua YLKI, Zumrotin K.S. Kini, YLKI pun ikut dalam mempersiapkan RUU Konsumen.

Jika sasaran LSM itu bersifat menyangkut perubahan kebijakan, atau reaksi atas kasus tertentu, tampaknya, para aktivis LSM lebih cenderung bersatu dan membentuk forum gabungan LSM.

Contoh untuk itu, misalnya, selain kasus Kedungombo atau pencemaran Kali Tapak, juga dalam kasus tewasnya buruh wanita, Marsinah, dan kasus yang menimpa warga transmigrasi lokal Sei Lepan di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, yang sampai kini belum juga tuntas penyelesaiannya. Kasus terakhir itu bermula dari konflik antara warga, pemda setempat, dan PT Anugrah Langkat Makmur, yang ingin mengubah lahan warga menjadi perkebunan inti rakyat (PIR) pada 1986.

Puncaknya, terjadi pembakaran kantor Anugrah Langkat pada Juni 1992, karena warga menuding perusahaan itu telah menyerobot tanah mereka. Sedangkan penyerangan Kantor Mapolsek Pangkalan Brandan, Maret 1993 lalu, merupakan protes warga karena beberapa penduduk ditahan. Akibatnya, 198 warga masuk rumah tahanan, dan areal Sei Lepan dinyatakan tertutup bagi orang luar.

Peristiwa Sei Lepan itu membuat sekitar 15 LSM dari Jawa dan Sumatra bergabung dalam Forum Solidaritas untuk Masyarakat Sei Lepan, dengan aksi memberi bantuan pangan bagi warga — bantuan itu ditolak pejabat setempat — dan mengadukan kasus itu ke DPR Mei lalu.

Kasus terbunuhnya Marsinah pun mendorong beberapa LSM di Jawa membentuk Komite Solidaritas untuk Marsinah. Komite itu mendesak agar pemerintah mengusut sampai tuntas dan menjatuhkan tindakan hukum kepada yang terlibat pembunuhan itu yang, sampai kini, belum terdengar hasilnya. Dan, kematian Marsinah, tetap menjadi misteri.

Namun, memang tidak semua riwayat LSM akrab dengan bau protes. Yayasan Swadaya Membangun (YSM), misalnya. Kini, yayasan itu lebih menekuni pengembangan dua bank perkreditan rakyat (BPR) dan industri kecil. "Kita ingin membangun swadaya masyarakat. Dan, target saya, 12 tahun mendatang BPR YSM akan digabung menjadi bank umum," kata Ketua YSM, yang berpusat di Mataram dan kini memiliki staf 300 orang. **Ali B.D.**

[illegible], Lucky (Bandung), dan [illegible] (Mataram)

Adnan Buyung Nasution:

"Tidak Setuju Sikap Apriori"

Adnan Buyung Nasution, 59 tahun, merupakan salah seorang tokoh perintis LSM di dunia. Pada 1971, ia mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), sebuah LSM yang sampai sekarang gigih membela kepentingan rakyat kecil. Si Abang, demikian ia biasa dipanggil, kini menjadi Ketua Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia.

Kegigihannya membela hak-hak asasi manusia, membuat Buyung beberapa kali dituduh subversi. Pada peristiwa Malari, 1974, ia diciduk dan dijebloskan ke penjara di Nirbaya, Lobang Buaya, Jakarta Timur, bersama Prof. Ismail Sunny dan Mahbub Djunaedi, selama 22 bulan, tanpa proses peradilan. Izin praktek pengacaranya pernah dicabut karena dinilai menghina pengadilan (contempt of court), *ketika membela H.R. Dharsono, 1986. "Kala itu, Abang sempat frustrasi," ujarnya.*

Buyung kemudian "bertapa" di negeri Belanda. Selama lima tahun ia mendalami ilmu hukum di Rijksuniversiteit, Utrecht. *Hasilnya, ia berhasil menggondol gelar doktor dengan tesis berjudul* The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959. *Berikut ini wawancara* Imran Hasibuan *dan* Santoso *dari FORUM dengan Buyung di kantornya, YLBHI.*

Apakah Anda kini melihat perubahan dan keterbukaan politik?

Secara *policy* belum jelas betul. Yang ada sekarang kan baru isyarat-isyarat. Umumnya, baru bersifat verbal, pernyataan-pernyataan, pidato-pidato. Belum berupa suatu *policy* yang menyeluruh tentang arah kebijakan negara yang akan ditempuh. Secara detailnya belum jelas. Garis besar GBHN, itu kritik saya banyak sekali.

Misalnya?

GBHN tidak menyebut sama sekali soal demokratisasi dan hak asasi manusia. Pembangunan hukum tanpa menyebut hak asasi manusia kan kehilangan substansinya. Contoh paling konkret, coba cari dalam PJPT II apakah ada disebut hak-hak asasi manusia. Saya baca tidak ada satu pun. Padahal, harus disebut eksplisit bahwa kita *committed* pada hak-hak asasi manusia.

Maka, saya pikir, yang paling penting, Presiden Soeharto harus membuat suatu konsep pembaruan yang menyeluruh di tanah air kita ini. Sebagai kelanjutan daripada sinyal-sinyal yang sekarang ini bersifat amat parsial, sepotong-sepotong. Cobalah dirangkum menjadi konsep yang jelas.

Follow up-nya harus ada instruksi-instruksi yang konkret, bagaimana oprasionalisasinya, supaya tidak ada salah tafsir. Misalnya, izin rapat. Apakah orang mau rapat masih perlu izin. Itu kan pendekatan *security* yang amat kolot. Orang rapat kan tidak perlu minta izin. Kalau nanti ada rapat yang mengganggu keamanan kan tinggal ketuanya diminta tanggung jawabnya. Ini, belum apa-apa orang sudah dicurigai dulu. Makanya saya keras dalam soal ini. Manusia berdaulat sadar akan haknya. Itu yang mesti ditegaskan oleh presiden kalau bicara soal keterbukaan.

FAUZAN

Mesti ada instruksi presiden, cabut semua kebijakan-kebijakan yang selama ini mewajibkan setiap orang minta izin untuk mengadakan pertemuan. Dengan itu, kan, kemungkinan mengadakan penyalahgunaan di dalam tafsiran aparat-aparat di bawah bisa dihindari. Contohnya, buku yang tidak pernah dilarang oleh jaksa agung, tapi diskusinya dilarang di Yogyakarta.

Kunjungan Panglima Kodam Jaya, Mayjen Hendropriyono, ke mari apakah merupakan isyarat perubahan sikap terhadap LBH?

Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, dalam pengertian begini. Kita pahami bahwa Hendro sebagai perwira tinggi, Panglima Kodam Jaya, tidak berdiri sendiri, tetapi dia kan merupakan bagian integral dari suatu kesatuan ABRI. Sebagai bagian dari aparat kekuasaan negara yang ada atasannya, panglima ABRI, presiden. Beliau kan punya hubungan langsung sama presiden, maka tentu tindakan beliau itu paling tidak harus direstui. Dia tidak akan berbuat sesuatu kalau itu bertentangan dengan keinginan atasannya. Dalam kerangka itu, bisa kita tarik kesimpulan bahwa kunjungan beliau kemari, paling tidak, tidak bertentangan atau sudah direstui, dalam rangka mencoba mendobrak kesan yang selama ini ada bahwa ABRI itu curiga dan memusuhi LBH. Kan

kesan itu ada.

Contohnya, waktu Panglima Kentot (Mayjen Kentot Harseno, sekarang Irjen Pembangunan) membikin *estimate* intel, yang menyatakan LBH subversif. Kok, Kentot bisa-bisanya mengatakan subversif. Ini dari mana? Apa yang berjuang dia saja buat negara ini? Saya mau lawan itu. Lawan dengan mulut, ya. Dalam arti diskusi. Yang berjuang untuk bangsa negara bukan hanya Kentot, tapi juga LBH. Jadi, enak saja dia bilang subversif. Kok, jadi begini. Kita boleh berbeda pendapat, bertentangan, tapi sama-sama mempunyai landasan kuat untuk berjuang untuk bangsa. Mesti saling menghormati eksistensi peranan masing-masing.

Protes itu mengapa tidak disampaikan kepada Kentot?

Waktu itu saya masih di Belanda. Sekarang mau apa lagi? Dia enggak di situ. Apalagi, Hendro posisinya sudah lain. Betul enggak? Kedatangan Hendro ke mari, paling tidak, ada isyarat penilaian baru.

Ada sikap baru dari ABRI dan amat simpatik. Kita sambut baik. Sesuai dengan ucapan beliau kepada saya, bahwa sekarang zaman kan sudah berubah. Katanya, ABRI kan *ndak* boleh terus-menerus memberikan kesan wajah angker kepada rakyat. Itu istilahnya wajah angker. *Ndak* bisa lagi.

Apakah situasi yang di dalamnya negara menilai pikiran orang itu sudah terjadi?

Sudah mulai. Misalnya, yang saya kritik, adanya litsus (penelitian khusus). Itu satu teknik, metode, yang mengadili pikiran orang, keyakinan orang di bidang politik. Bayangkan, bagaimana rancunya untuk memantau pikiran dan keyakinan orang. Kalau itu dibiarkan berarti kita memberikan otoritas kepada kekuasaan negara untuk menetapkan apa yang baik dan tidak baik. Sedangkan kalau bicara negara hukum, demokratis, kan harus dijamin orang berbeda pendapat. Apa pun juga pikirannya. Harus dijamin, pikirannya itu sah. Kalau ini dipakai untuk UU Keamanan Nasional, untuk menilai apakah orang itu setia kepada UUD 1945, Pancasila, mau ke mana demokrasi Indonesia, mau ke mana asas kedaulatan rakyat.

Bagaimana pendapat Anda tentang perubahan politik yang terjadi sekarang ini?

Ini belum terjadi, belum sinkron apa yang diucapkan presiden dengan apa yang terjadi. Makanya, saya bilang perlu ada ketegasan dong. Konkret, kalau sekarang memang mau ada perubahan ke arah yang lebih demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia, tegaknya hukum, segala macam. Kan mesti ada perubahan mendasar, sesuai dengan konsep demokrasi itu sendiri. Jangan bilang demokrasi, tapi prakteknya tidak demokrasi. Buat apa.

PULANG KANDANG:
Buyung kembali ke Indonesia setelah lima tahun "bertapa" di Belanda dan memperoleh gelar doktor.

Kalau Presiden Soeharto sendiri sudah omong perubahan, kenapa kita mesti tutup kemungkinan itu? Di sini, sikap pragmatis saya.

Saya ingin ambil itikad baik seseorang. Memang, ada teman-teman, apalagi orang luar negeri, yang pagi-pagi sudah menilai, semua percuma. Ini hanya sandiwara. Bahkan, Amnesty terang-terangan mengatakan ini hanya tipu muslihat, semua isyarat ini.

Saya diminta waktu itu oleh Radio BBC, berkomentar terhadap pendapat yang beredar di luar. Saya bilang tidak setuju. Karena, menurut saya, terlalu pagi untuk menilai seperti itu. Itu sikap yang amat apriori. Saya ingin lihat dulu perkembangan berikutnya, *follow up*-nya apa. Artinya, tidak boleh terlalu pagi mengambil kesimpulan bahwa ini semua hanya suatu perubahan yang kosmetik. Saya tidak ingin mengambil sikap serupa itu. Saya ingin mengambil itikad baik seseorang.

Bisa saja, kan, seperti kata pepatah "harimau mati meninggalkan belangnya". Pak Harto, di masa tuanya, mungkin juga sudah melihat selama 25 tahun ini, kalau terus menerus begini, bangsa ini tidak akan ada perubahan untuk bisa pembangunan ini berkelanjutan terus. Maka, saya mengambil sikap yang memberi kesempatanlah, untuk orang mengubah keadaan ini. Jadi, kalau ada tanda-tanda seperti isyarat Presiden Soeharto itu, ingin perubahan, kita berilah kesempatan itu. Bahkan, kita harus mendorong keadaan supaya lebih cepat terjadi perubahan itu. Hanya saja, kan, kita sudah lihat itu ada kendala-kendala dari aparatur di bawah, sipil maupun militer.

Anda mengunjungi mahasiswa itu obsesinya apa

Saya ingin melihat sampai di mana kesadaran politik generasi muda.

Prioritasnya mengapa mahasiswa?

Itu aset bangsa. Saya lihat di mana-mana, di Perancis, Belanda, Belgia. Saya mengambil pelajaran dari buku Hatta, *Peranan Intelektual*. Tidak bisa tidak, setiap bangsa mengharapkan generasi muda yang tampil.

Ada rencana membuka kantor pengacara lagi?

Ya. Sekarang ini sedang Abang persiapkan. Mungkin dalam tiga bulan ini. Ini kan penting. Sebab, Abang dan kawan-kawan di Dewan Pengurus sudah bertekad tidak mau digaji dari LBH. Kita di sini hanya untuk mengabdikan diri saja.

Selama ini kebutuhan sehari-hari dari mana?

Ya, dari sumbangan kawan-kawanlah, yang masih sayang sama Abang. Mobil, misalnya, dipinjami Hariman Siregar. Begitu pula kontrak rumah dan kebutuhan sehari-hari dibantu seorang kawan mantan aktivis yang sekarang jadi pengusaha di Bandung. Tapi, kan enggak bisa begini terus. Makanya, Abang akan berusaha buka kantor lagi. □

"Go International" Gaya LSM

LSM tidak lagi bekerja lokal. Organisasi "akar rumput" itu tidak canggung lagi memanfaatkan sarana, dan semua peluang internasional untuk memperkuat perjuangannya. Termasuk dana.

Prajogo berkeliling dunia menjajakan saham. Pada saat yang sama, 15 LSM internasional bekerja sebaliknya. Mereka melakukan berbagai upaya kampanye anti penjualan saham Barito. Genderang perang itu ditabuh dari London oleh Greenpeace, yang mengadakan tatap muka dengan klub investor setempat. Kampanye serupa, kabarnya, juga akan dilakukan di New York, Tokyo, Hong Kong dan Singapura. Dengan panji *Green Investment*, kerja jaringan LSM internasional itu tampaknya cukup merepotkan manajemen Barito.

Menurut Koordinator Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI), Ir. S. Indro Tjahjono, kampanye secara internasional itu sangat penting, karena Barito juga berencana menjual sahamnya di pasar internasional. "Kampanye soal itu tidak efektif kalau hanya dilakukan di Indonesia, karena pembeli potensialnya justru investor asing," tuturnya. Selain Greenpeace, ia mengajak LSM kondang lainnya, seperti Rain Forest Action Network, Friends of the Earth, dan World Rain Forest Movement.

Menggalang solidaritas internasional itu, ternyata bukan hal yang mustahil bagi LSM di negeri mana saja. Mereka tinggal membuat pernyataan, menuliskan latar belakang masalah, dan mengirimkan faksimili. Dalam beberapa menit, permintaan solidaritas itu sudah sampai di segala penjuru dunia. Dan, karena kontak mereka sudah terjalin lama, tidak sulit bagi LSM-LSM, terutama yang punya misi serupa, untuk melakukan gerakan bersama. Beberapa LSM besar di Indonesia, misalnya, bahkan mulai melatih stafnya untuk menggunakan sarana transfer informasi dari komputer ke komputer.

"Bila sistem modem nanti dipakai, penyebaran informasi ke jaringan internasional dapat berlangsung lebih cepat," kata Sekretaris Jaringan Kerjasama Lembaga Pelayanan Kristen Indonesia (JKLPKI), Asmara Nababan. Globalisasi memang bukan hanya monopoli perusahaan raksasa, tetapi juga merasuk ke kalangan LSM. Mereka, mau tak mau, memanfaatkan sarana tekti itu untuk mengartikulasikan perjuangannya.

DOK. TEMPO

JARINGAN:
Jaringan kerja sama antara LSM dari Indonesia dan LSM dari luar negeri cukup kuat, terutama dalam masalah Timor Timur.

Kerjasama internasional di kalangan LSM sebenarnya bukan hal baru, walaupun dulu lebih terbatas karena soal dana. Hampir semua LSM besar (BINGO's), dan LSM menengah (MINGO's) menggantungkan sumber dananya dari luar negeri. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), misalnya, banyak tergantung pada Nederlandse Organisatie Voor Internationale Bijstand (NOVIB) dan HIVOS, keduanya dari Belanda, untuk menopang keuangannya yang jumlahnya sekitar Rp 600 juta per tahun. Begitu pula SKEPHI, yang menggantungkan pemenuhan Rp 250 juta kebutuhan dananya dari luar negeri.

Ihwal menerima bantuan dari luar negeri itu memang sensitif. Pemerintah telah membuat ketentuan bahwa LSM yang menerima bantuan dari luar negeri harus melaporkan agar dapat dipantau. Tidak jarang timbul kecurigaan, aktivis LSM yang dananya berasal dari luar negeri dituduh menjual negara. Bekas Menko Polkam yang kini menjabat Ketua DPA, Sudomo, menegaskan bahwa LSM yang mendapat bantuan dari luar negeri dan tidak melaporkan kepada pemerintah dapat dikategorikan melanggar hukum. "LSM seperti itu bisa dibubarkan," kata Sudomo kepada Haryanto dari FORUM.

"Terus terang, sumber dana SKEPHI memang dari luar negeri," kata Indro Tjahjono. Tetapi, ia mengaku, pemberian dana itu tidak berarti LSM luar negeri bisa mendikte semaunya. SKEPHI pernah menolak dana karena dikaitkan dengan syarat tertentu, katanya. Hal itu, kata Indro, pernah terjadi pada buletin SKEPHI, *Berita Hutan*, yang dukungan dananya oleh Ford Foundation dihentikan pada 1988, karena liputan Peristiwa Lobongkok, Jawa Tengah.

Kerja sama LSM dalam negeri dengan LSM luar negeri juga terjadi di lapangan pemantauan hak asasi manusia. Secara tidak kentara, aktivis Amnesty International atau Asia Watch bekerjasama dengan LSM dalam negeri melakukan investigasi terhadap Insiden Dili dan kasus Aceh. Sidney R. Jones, Direktur Eksekutif Asia Watch, kabarnya, sempat tinggal di Aceh untuk melihat secara langsung pelanggaran hak asasi yang terjadi di serambi Mekah itu. Menurut Kepala Divisi Khusus LBH, Hendardi, Sidney Jones sudah dipantau gerak-geriknya sejak di Aceh. "Sampai sekarang, Sidney masih ditangkal," kata Hendardi.

Human Rights Watch, sebagai induk organisasi Asia Watch, mempunyai tradisi untuk memberikan penghargaan hak asasi (*Human Rights Award*) kepada aktivis pembela hak asasi manusia. Penghargaan yang lebih menguatkan hubungan aktivis hak asasi manusia itu, pernah diterima Hendardi pada 1991. Sebenarnya, orang Indonesia pertama yang memperoleh

penghargaan itu adalah mendiang Slamet Bratanata pada 1990, pentolan Petisi 50. Tetapi, ia tidak bisa menghadiri acara pemberian penghargaan itu karena masih terkena cekal. Menurut Hendardi, kerja sama Human Rights Watch dengan LBH juga dilakukan dalam bidang peningkatan sumber daya manusia. "Staf LBH dikirim magang ke markas mereka di New York untuk melihat bagaimana mereka bekerja," kata Hendardi.

Kecanggihan kerja sama global di antara LSM itu bisa dicontohkan dalam Insiden Dili, 12 November 1991. Dua hari setelah insiden itu meletus, Amnesty International membuat laporan yang sangat komprehensif tentang peristiwa itu. Bahkan, LSM yang khusus memantau narapidana politik dan korban hukuman mati itu, dengan tepat memperkirakan jumlah korban mencapai 50-100 orang. Perkiraan itu tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Komisi Penyelidik Nasional, beberapa bulan kemudian. Kecepatan dan akurasi LSM itu memantau Insiden Dili, tampaknya, tidak terlepas dari pasokan data oleh LSM dalam negeri. Indonesian Front for Human Rights (INFIGHT) adalah salah satu LSM dalam negeri yang banyak turun tangan memantau perkembangan Timor Timur.

S. Indro Tjahjono

Peristiwa lain yang menunjukkan kerja sama LSM dari Indonesia dengan pihak asing, tampak pada kasus pembangunan waduk Koto Panjang, Sumatra Barat. SKEPHI bersama LSM dari Jepang mengadakan *hearing* dengan parlemen Jepang atas bantuan Partai Sosialis. Karena *hearing* yang ditayangkan oleh televisi secara nasional itu, pemerintah Jepang terpaksa meninjau lagi bantuannya untuk pembangunan waduk Koto Panjang. "Kami memanfaatkan jalur-jalur yang mungkin untuk menyampaikan aspirasi. Apalagi, dananya kan dari Jepang," kata Indro. Ia menolak tuduhan bahwa tindakannya itu menjelekkan nama bangsa.

Puncak kerja sama LSM dari Indonesia dengan LSM dari luar negeri, secara kelembagaan, tampaknya tercapai dalam pembentukan International NGO Forum on Indonesia (INGI) pada 1985. Jaringan kerja yang bersifat terbuka dan pluralistis itu dirintis YLBHI dan NOVIB, keanggotaannya 75 persen LSM dari Indonesia dan 25 persen LSM dari negara-negara yang tergabung dalam Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI). INGI memang dirancang untuk memantau penggunaan dana bantuan IGGI di Indonesia. "Ketika itu, kami meminta LSM dari luar negeri supaya aktif mengawasi bantuan negaranya masing-masing. Jangan kami saja yang disuruh berhadapan dengan pemerintah," kata Ketua Dewan Direksi YLBHI, Adnan Buyung Nasution.

INGI mengadakan sidang setiap tahun untuk memberi masukan kepada IGGI. Biasanya, sidang INGI diadakan bersamaan dengan sidang IGGI. Puncak kerja INGI terlihat dalam sidangnya di Brussel pada 1989. Peristiwa itu, yang kemudian dikenal sebagai Insiden Brussel, membawa akibat jauh terhadap hubungan LSM dalam negeri dengan pemerintah. Memo Brussel itu, yang mengritik pedas pembangunan waduk Kedung Ombo, membuktikan bahwa tekanan internasional dapat mengubah kebijakan Bank Dunia, donatur pembangunan waduk Kedung Ombo, dan pemerintah Indonesia.

Namun, "kesuksesan" itu tidak berlangsung lama. Ketika campur tangan pihak asing mulai terasa mendikte, Presiden Soeharto mengambil keputusan drastis pada 1992 dengan menolak bantuan dari Belanda dan membubarkan IGGI. "INGI memang sudah bubar," kata Asmara Nababan, Sekretaris Dewan Pleno Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Ia mencatat kelemahan organisasi itu terlalu memusatkan diri pada koreksi terhadap IGGI. Padahal, banyak masalah lain yang bisa ditangani, seperti perdagangan dan perbaikan kondisi buruh.

Kabarnya, LSM dari Indonesia dan LSM dari luar negeri, yang menaruh perhatian terhadap Indonesia, akan membentuk jaringan lagi dengan wilayah kerja yang diperluas. Tidak lagi sekedar menjadi *counter* terhadap Consultative Group on Indonesia (CGI). Lembaga baru itu, yang diberi nama International NGO Forum on Development, dipersiapkan sebagai pengganti INGI, dan menurut Asmara, akan bersidang pertama kali pada 1994. Selamat datang jaringan LSM yang baru. •

SANTOSO

Profil LSM Internasional

LSM berkembang marak di Indonesia pada era 1970-an. Fenomena itu, tak lepas dari pengaruh LSM atau non-government organization (NGO) internasional, yang aktivitasnya sering menimbulkan kekaguman karena keberanian dan konsistensi mereka. Di bawah ini, profil dan kiprah tiga LSM internasional yang kredibilitasnya tak diragukan, dan pengaruh mereka menembus hingga ke tanah air. Tiga LSM itu adalah Amnesty International, Greenpeace, dan Human Rights Watch.

Amnesty International

Amnesty International sering dianggap momok oleh rezim-rezim otoriter, karena kritiknya tentang pelanggaran hak asasi manusia. Lembaga yang dikelola sebanyak 150 orang itu, memang sangat peduli terhadap kondisi hak asasi manusia, khususnya nasib tahanan politik dan korban hukuman mati. Menurut anggaran dasarnya, Amnesty International memprioritaskan kegiatannya dalam tiga hal, yaitu pembebasan tahanan politik, pengadilan tahanan politik secara adil dan singkat, serta menentang hukuman mati, hukuman yang karena berbagai alasan masih diberlakukan di lebih dari 100 negara di dunia.

Hingga akhir 1992, Amnesty International mempunyai koresponden dengan lebih dari 8.000 kelompok lokal, di 70 negara. Sedangkan individu yang terlibat, baik dalam keanggotaan atau donatur, mencapai sekitar 1,1 juta orang, yang tersebar di 150 negara. Dengan jaringan yang luas itu, dapat dimengerti bila hampir tak ada satu pelanggaran hak asasi manusia, terutama di bidang politik, yang lolos dari pengamatan Amnesty International. Acapkali, orang mengetahui berbagai kasus di negaranya sendiri, justru setelah membaca laporan dari Amnesty International.

Amnesty International, yang memperoleh hadiah Nobel Perdamaian pada 1977 itu, merupakan LSM yang didirikan pada 28 Mei 1961 oleh Peter Benenson, dan berkantor pusat di London. Lembaga itu, yang pada 1961-1975 dipimpin Sean MacBride — pemenang hadiah Nobel Perdamaian pada 1974, mengumpulkan dana dari iuran anggota dan sama sekali tidak meminta dana dari pemerintah. Pada 1992, anggaran

AMNESTY INTERNATIONAL:
Insiden Dili segera menyebar ke luar negeri, antara lain karena kerja Amnesty International.

kegiatan LSM raksasa itu mencapai 12,75 juta poundsterling atau sekitar Rp 40 miliar. Selain untuk membiayai kegiatan organisasi, dana Amnesty International sebagian dipakai juga untuk membantu keuangan para korban pelanggaran hak asasi. Misalnya, membantu pengobatan atau meringankan beban keluarga korban. Pada 1992, anggaran untuk bantuan langsung itu sekitar Rp 750 juta. Porsi terbesar dananya dipakai untuk investigasi dan pembuatan laporan.

Kredibilitas Amnesty International didukung oleh sifat independensi lembaga itu yang tidak dapat ditawar. Amnesty International tidak berpihak pada satu pandangan ideologi tertentu dalam melihat suatu masalah, sehingga laporannya dinilai netral.

Greenpeace

Rainbow Warrior, kapal milik LSM internasional itu, yang disabot pasukan komando Perancis, menjadi monumen bagi perjuangan mereka dalam mencegah percobaan nuklir Perancis di Pulau Atol Muroroa. (Lihat Selingan: Greenpeace dan Skandal *Rainbow Warrior*) Greenpeace didirikan oleh David McTaggart di Kanada pada 1972. Organisasi, sejak semula, memang dirintis oleh aktivis pecinta lingkungan yang sangat prihatin terhadap percobaan nuklir. Tetapi, kini, LSM itu berkembang mengurusi berbagai soal lingkungan hidup melalui jaringan yang berskala internasional. Greenpeace menggerakkan organisasinya dari kantor pusatnya di London.

Robert Cartmel

Greenpeace mempunyai kantor perwakilan di 30 negara di dunia, dan hanya satu di Asia, yaitu di Jepang. Meskipun demikian, dalam dua tahun terakhir, Greenpeace juga mengembangkan sayap yang sangat intensif ke Asia Tenggara, lewat kerja sama dengan mitra lokal. Di Filipina saja, organisasi itu mempunyai jaringan kerja sama dengan 32 LSM setempat. Di Indonesia, kegarangan Greenpeace juga mulai terasa, seperti tampak dalam protes mereka terhadap pencemaran PT Inti Indorayon Utama. Aksi menentang pencemaran *chlorine* dari Inti Indorayon Utama itu dilakukan Robert Cartmel, salah seorang anggota Greenpeace asal Australia. Dan, yang terakhir kampanye anti penjualan saham PT Barito Pacific Timber.

Human Rights Watch

Geger soal sistem preferensi umum (GSP) baru-baru ini, tak lepas dari peran Human Rights Watch, yang membawahkan Asia Watch. LSM bidang hak asasi manusia itu mengeluarkan dua lembar pernyataan kritis tentang kondisi buruh di Indonesia, dan ternyata mampu mempengaruhi Kongres serta pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Bill Clinton. Akibatnya, fasilitas GSP untuk Indonesia diancam akan dicabut. Pemerintah Indonesia mau tak mau segera bereaksi. Sebab, pencabutan fasilitas GSP itu, bila direalisasi, bisa berpengaruh terhadap ekspor nonmigas ke Amerika Serikat sebanyak 600 juta dolar AS.

Human Rights Watch adalah LSM yang tidak hanya membawahkan Asia Watch, tapi juga menginduki beberapa organ yaitu Africa Watch, Americas Watch, Helsinki Watch, Middle East Watch, dan Fund for Free Expression. Human Rights Watch didirikan pada 1985, dan berkantor pusat di New York. LSM itu juga mempunyai kantor perwakilan di Washington, khusus menangani lobi ke pemerintah Amerika Serikat dan Kongres.

Asia Watch, sebagai salah satu organ Human Rights Watch, memonitor segala persoalan hak asasi manusia di Asia. Kemudian membuat laporan berdasarkan investigasi sendiri, atau atas kerja sama dengan LSM lokal di masing-masing negara. Di Indonesia, misalnya, Asia Watch bekerjasama dengan LBH dalam investigasi Insiden Dili dan kasus Aceh. Karena aktivitasnya itu, staf Asia Watch tidak jarang terpaksa berhadapan dengan pemerintah setempat ketika sedang melakukan tugasnya.

ROMBONGAN BERJUBAH:
Gerakan Fisabilillah untuk Aceh Merdeka mendapat perhatian dari Asia Watch

Pada 1992, Sidney R. Jones, Direktur Eksekutif Asia Watch, ditangkal masuk ke Indonesia ketika akan mengikuti seminar tentang hak asasi manusia.

Berbeda dengan Amnesty International yang mempunyai keanggotaan massal, Asia Watch hanya merekrut relawan. Karena itu, dananya juga tidak sebesar Amnesty International. Asia Watch mengumpulkan dananya dari pelayanan jasa informasi, penjualan publikasi tahunan, dan berbagai kegiatan pengumpulan dana pada hari hak asasi manusia.

SANTOSO

DBS dari Siera

TELEVISI *Siera DBS (Direct Broadcasting Satellite)* yang lisensinya didapat dari Belanda tiga tahun lalu. Televisi 20 inci itu dilengkapi dengan alat penerima saluran televisi satelit (siaran parabola) langsung, tanpa alat penerima siaran atau *satellite receiver*. Sebab, *receiver*-nya sudah menjadi satu dengan badan televisi.

Harga jualnya Rp 900 ribu sampai Rp 1 juta per unit. Bahkan, bila dihitung-hitung, harga *receiver* plus pesawat televisi bisa lebih murah sekitar Rp 300 ribu. Hal itu dikarenakan komponennya diimpor dari Jepang dan Korea.

Proses pemasangannya pun lebih mudah: dari parabola langsung dihubungkan ke pesawat televisi. Keunggulan itulah yang belum dimiliki produk lain sejenis di Indonesia selama ini.

Siera DBS juga punya kelebihan pada *remote control*-nya. Selain bisa mengatur suara dan gambar, alat itu mampu pula mencari saluran siaran lewat antena parabola dan televisi lokal. Pabrik televisi itu berlokasi di Medan. Sedangkan distributor tunggalnya adalah PT Multi Sentosa Nusantara Permai.

Aman Ada Micro Chips

TREND memiliki kartu kredit, bisa jadi, bakal berubah menjadi kartu debet. Berkat kemajuan teknologi, kini, bank tinggal memotong dari rekening penabung ketika menggunakan dananya dan kemudian memberikan laporan bulanan. Karena itu disebut kartu debet. Dengan demikian, proses transaksi antara konsumen atau penabung dan *merchant* cepat karena tak diperlukan lagi proses *authorized*.

Kecepatan itu bisa terjadi karena bank menggunakan teknologi baru: *micro chips*. Bank Dharmala sudah memakai teknologi itu untuk *Procard*. Begitu pula Bank Exim sudah menggunakannya.

Keunggulan *micro chips* itu, selain mampu menyimpan secara akurat semua data keluar-masuknya dana, juga punya daya pengaman yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan sistem magnetik yang ada dalam kartu kredit. Sebab, pada saat personalisasi, penabung memiliki kunci sendiri atau *personal identification number* (PIN) yang hanya diketahui bank. Di bank pun, hanya orang-orang tertentu yang tahu PIN tersebut.

Apa pun yang ada dalam *micro chips* tidak dapat ditarik keluar, meskipun oleh pabrik atau terminal kartu tersebut. Bila terjadi kesalahan masukan PIN, kartu tersebut secara otomatis tak bisa beroperasi. Dan, kalau kejadian itu terulang sampai tiga kali, kartu itu otomatis terkunci untuk segala macam kegiatan. Untuk mengaktifkan kembali kartu itu, penabung mesti mengembalikannya ke bank.

Micro chips itu juga mampu mengantisipasi upaya seseorang — misalnya, oleh pegawai bank yang bersangkutan — untuk mencuri dengan menggunakan PIN penabung. Dengan sistem pengaman yang canggih, kartu tersebut secara otomatis tidak bisa digunakan.

Kartu dengan teknologi semacam itu diproduksi di Perancis. Untuk melayani kawasan Asia Pasifik, pabrik itu mempunyai kantor perwakilan di Singapura. Agen tunggalnya di Indonesia adalah PT Askom.

Terminal berikut perangkat lunaknya pun berasal dari Perancis: Ingenico International Inc. Mereka mempunyai perwakilan di Australia untuk menangani wilayah Asia Pasifik. Khusus untuk menangani proyek-proyek, perwakilan Australia memiliki kantor di Singapura. Di Indonesia, untuk proyek tersebut, Bank Dharmala menggunakan jasa konsultan PT Sigma Citra Caraka selaku distributor mesin Ingenico di Indonesia. Jadi, transfer teknologi terjadi antara Ingenico dan Sigma.

Selain memiliki *micro chips* untuk menyimpan data saldo, sisi lain *Procard* juga menggunakan strip magnetik yang bisa digunakan di mesin pembayar otomatis (ATM). ❑

Kehormatan Itu di Atas Segalanya

Apa yang akan Anda lakukan kalau suami Anda ternyata bukan suami Anda yang sebenarnya? Apakah Anda akan tetap berhubungan sebagai suami istri, bahkan melahirkan anak dari lelaki itu?

Film *Sommersby* yang tengah beredar tanpa gembar-gembor itu, tidak hanya mempersoalkan cinta, dan dendam wanita terhadap lelaki yang ternyata bukan suaminya yang sebenarnya, tapi juga berbicara soal kehormatan, rasa keadilan, dan idealisme.

Film ini mengisahkan keanehan jalan hidup yang menimpa dan dialami pasangan suami-istri petani Jack Sommersby (Richard Gere) dan Laurel (Jodie Foster), di zaman Victoria, di tengah dekor alami Amerika Serikat, di masa Perang Saudara pada 1860-an.

Tak seorang pun menyangka, pemuda Jack Sommersby yang sering mabuk dan suka menganiaya istrinya itu, tiba-tiba kembali ke kampungnya, dua tahun sesudah perang saudara berakhir. Jack yang semula dikira sudah mati itu pun, masuk kembali ke tengah kehidupan Laurel, wanita yang hidup keras sebagai petani, setelah enam tahun membesarkan anaknya, dengan bantuan pemuda Orin (Bill Pullman), yang berharap bisa mengawini Laurel suatu hari.

Kedatangan Jack yang perilakunya berubah total dibanding dulu itu, tak hanya membuat suasana hati Laurel berubah ceria, tapi juga telah mengubah kebiasaan di desa itu. Jack pun berhasil mengajak para petani di desanya untuk menanam tembakau Virginia.

Namun, persoalan baru muncul, ketika polisi federal datang untuk menangkap Jack, dengan tuduhan membunuh. Jack yang baru memperoleh anak dari Laurel itu, harus dibawa ke kota untuk diadili dengan ancaman hukuman gantung. Ketika Jack dihadapkan pada pilihan, antara hidup bebas dan mengakui identitasnya yang lain, atau tetap mengaku sebagai Jack tapi harus dihukum gantung, pergulatan batin pun terjadi. Pertentangan moral itu, tidak hanya berlangsung di dalam nurani Jack, tapi juga dalam jiwa Laurel.

Di bagian itulah kita mengerti, bahwa ada seorang pencuri dan penipu bernama Horace Townsend yang berkenalan dengan Jack Sommersby di penjara. Ketika salah seorang dari mereka membunuh dan kemudian mati dibunuh pula, maka terjadilah pengambilalihan identitas, karena wajah dan postur tubuh mereka mirip bagaikan kembar. Tapi, apakah Jack Sommersby yang diperankan Richard Gere itu adalah Jack yang asli atau yang palsu, jawabannya memang baru bisa diperoleh di akhir film.

PERAN PRIMA: Richard Gere (berkuda), tiba-tiba pulang sebagai Jack Sommersby yang baik hati. Inilah peran prima bagi Gere setelah sekian lama. (Inset: Jodie Foster sebagai Laurel)

Melalui dialog yang subtil di dalam penjara, serta di sidang pengadilan yang mengharukan itu, kita pun disadarkan, bahwa bagi seorang pria, nama baik dan kehormatan, jauh lebih [illegible] daripada cinta kasih [illegible] depan. Dan apa artinya [illegible] kebenaran dan kemanusiaan [illegible] lebih penting dari soal identitas.

Tak syak lagi skenario yang ditulis Nicholas Meyer dan Sarah Kernochan yang [illegible] pikan adaptasi dari [illegible] film Perancis *Le Retour de Martin Guerre* yang ditulis disutradarai Daniel Vigne pada 1982, itu terasa [illegible] kuat. Sutradara [illegible] Amiel [illegible] Inggris yang [illegible] tiga buah filmnya *The Singing Detective*, *Queen of Hearts*, dan *Tune in Tomorrow*, [illegible] mampu menerjemahkan [illegible] jiwa film Perancis yang di[illegible] dengan cemerlang dimainkan Gerard Depardieu dan Nathalie Baye. Amiel pun berhasil memberikan keintiman dan panorama alam dalam gaya bertutur Eropa.

Dan penampilan Richard Gere, yang juga produser pelaksana dalam film yang wajib Anda tonton ini, sebagai aktor, sama primanya dengan permainannya dalam *Internal Affairs* (Mike Figgis/1990) dan *An Officer and a Gentleman* (Taylor Hackford/1982). Sehingga kehadiran Jodie Foster, peraih dua Oscar Aktris Terbaik berkat *The Accused* (Jonathan Kaplan/1988) dan *The Silence of the Lamb* (Jonathan Demme/1991), hanya terasa sekadar pendamping belaka.

Sommersby
Produksi : Le Studio Canal
Sutradara : Jon Amiel
Cerita : Daniel Vigne, Jean-Claude Carriere
Skenario : Nicholas Meyer, Sarah K.
Kamera : Philippe Rousselot
Pemain : Richard Gere, Jodie Foster.

PORTABLE DATA ENTRY TERMINAL (PDE)

PW 800 / PT 815

PW 800 / PT 815 merupakan Barcode reader yang bersifat portable yang kompatibel dengan berbagai PC yang memiliki interface komunikasi standar RS 232C. Dengan kapasitas RAM sampai 256 KB untuk menampung data barcode sebelum di upload ke komputer lalu diproses, membuat sistem ini sangat efisien dan mudah dioperasikan untuk mengoleksi data dalam jumlah besar yang jauh dari komputer.

PW 800 / PT 815 dapat diprogram (programmable) sehingga membentuk suatu data collection job dengan 2 cara yaitu: memakai keypad dan program embedded PROM resident atau dengan memakai program Job Generator. Semua program aplikasi dibuat [illegible]gan Job Generator di komputer PC, lalu semua object code dikirim (download) ke portable reader.

KEYBOARD EMULATOR

[illegible] sistem [illegible]g kompak dan mudah d[illegible] [illegible] Emulator Decoder ini di[illegible] [illegible]an di komputer PC. Dapat m[illegible] data dari [illegible] code, Magnetic Stripe dan [illegible]

[illegible] instalasi yang sangat mudah an[illegible] dengan scanner dan komputer tanpa mempengaruhi kerja/performance operasi keyboard. Tidak diperlukan mo[illegible] [illegible]ware dan software. Dapat digunakan transparant terhadap setiap software yang sudah ada pada komputer IBM PC [illegible] [illegible]patible.
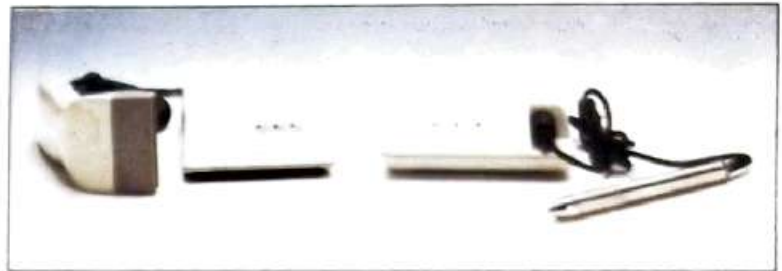
CHEKPOINT SECURITY & MONITORING SYSTEM

Sistim ini diciptakan untuk memonitor kegiatan security/satpam dan kegiatan-kegiatan monitoring lainnya. Terdiri dari 2 peralatan yaitu Data Collector dan Checkpoint Unit.

Checkpoint Unit diletakkan ditempat-tempat tertentu sebagai titik checkpoint. Kode-kode yang unik sampai 100 juta kombinasi, copy protected coding system, maintenance free, design tamper proof dan mudah instalasinya pada berbagai permukaan.

Data Collector mudah dibawa-bawa, mudah digunakan dan dapat diandalkan dengan hasil cetakan (print out) yang mudah dibaca serta effisien. Data Collector tersebut didisain tampered proof, tanpa kontak/saklar terbuka, sehingga sangat cocok untuk situasi/kondisi yang memerlukan operasi yang rigid. Data Collector membaca semua data checkpoint, menyimpan dalam RAM bersama dengan waktu, tanggal, event/kejadian, serta nomor personal sampai 2000 kali pembacaan.

Dengan paket software PC Patrol dapat dihasilkan laporan untuk: Kolektor, inspeksi, pengecualian, personal dan analisa statistik.